

SEKILAS LAPORAN TAHUNAN ABOUT ANNUAL REPORT

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2013 Perum Jamkrindo. Tema laporan tahunan ini adalah “Ayo MAJU UMKMK” diperoleh berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam terhadap perkembangan Penjaminan Kredit UMKMK pada tahun 2013 serta prospek bisnis Perusahaan yang berkelanjutan.

Tujuan utama dari laporan tahunan 2013 ini adalah meningkatkan keterbukaan informasi Perusahaan yang ditunjukkan dalam lingkup eksternal dan internal serta pembelajaran dalam organisasi Perusahaan sendiri. Laporan Tahunan ini menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan Perum Jamkrindo.

Laporan tahunan ini memberikan gambaran secara komprehensif dan detail tentang sumber informasi pencapaian kinerja, laporan posisi keuangan, laba rugi, dan arus kas dalam setahun. Laporan ini juga memberikan gambaran tentang tugas, peran, dan fungsi struktural organisasi Perusahaan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Laporan Tahunan 2013 bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan Perusahaan dengan menyediakan informasi yang tepat, berimbang, dan relevan sehingga seluruh karyawan, manajemen, Pemegang Saham, serta seluruh Pemangku Kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang memadai terkait langkah-langkah kebijakan yang akan dan telah ditempuh serta keberhasilan pencapaian Perusahaan pada tahun 2013.

Welcome to 2013 Annual Report of Perum Jamkrindo with the theme of “UMKMK, Let’s Move Forward”. This annual report presents in-depth analysis and review on the development of Credit Guarantee for UMKMK in 2013 and the Company’s business continuity outlook.

The primary objective of Annual Report 2013 is enhancing transparency of the Company within the external and internal Company while being a lesson to improve the Company’s future performance. This Annual Report is a yearly book that also builds a sense of pride and solidarity among employees of Perum Jamkrindo.

This Annual Report provides a comprehensive and detailed picture of the Company’s performance achievement records, as well as the report of financial position, income and cash flow for the year. This report also elaborates duties, roles, and structural functions of the Company’s organization that reflect the implementation of good corporate governance.

Annual Report 2013 will build shared understanding and trust in the Company with the provision of accurate, balanced and relevant information to all employees, managements, and shareholders. This enables them to gain appropriate information on the past and future strategies of the Company, challenges encountered during the year and its attainment in 2013 as well.

daftar isi

table of contents

JEJAK LANGKAH

MILESTONE

KILAS KINERJA 2013

FLASHBACK PERFORMANCE 2013

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 8 | Peristiwa Penting yang terjadi pada Tahun 2013
Significant Events 2013 | 16 | Tingkat Kesehatan Perusahaan
Appraisal of the Company's Performance |
| 12 | Jalinan Kerjasama Tahun 2013
Partnership in 2013 | 18 | Penilaian GCG
Assessment GCG |
| 14 | Key Performance Indikator
Key Performance Indicator | 19 | Ikhtisar Data Keuangan Penting
Financial Data Highlights |

LAPORAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

BOARD OF SUPERVISORS AND BOARD OF DIRECTORS REPORT

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 24 | Laporan Dewan Pengawas
Board of Supervisors Report | 32 | Surat Pernyataan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi
tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2013
Perum Jamkrindo
Statement of Members of Board of Supervisors and
Board of Directors on the Responsibility for the Annual
Report 2013 of Perum Jamkrindo |
| 28 | Laporan Direksi
Board of Directors Report | | |

PENGANTAR DIREKSI

Foreword from Board of Directors

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 36 | Pengantar Direktur Operasi
Foreword of Director of Operations | 40 | Pengantar Direktur SDM dan Umum
Foreword of Director of Human Resources and General
Affair |
| 38 | Pengantar Direktur Keuangan dan Investasi
Foreword of Director of Finance and Investment | 42 | Pengantar Direktur Manajemen Risiko dan TI
Foreword of Director of Risk Management and IT |

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

- | | | | |
|----|---|-----|--|
| 46 | Identitas Perusahaan
Corporate Identity | 74 | Kronologis Pencatatan Saham
Share-listing Chronology |
| 47 | Selayang Pandang Perum Jamkrindo
Perum Jamkrindo At a Glance | 74 | Informasi Anak Perusahaan
Information of Subsidiaries |
| 51 | Bidang Usaha
Line of Business | 74 | Nama dan Alamat Notaris dan KAP 2013
Name and Address of Notary and Public Accountant 2013 |
| 56 | Struktur Organisasi
Organization Structure | 75 | Nama dan alamat perusahaan pemeringkat obligasi
Company Supporting Institution |
| 60 | Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Culture | 75 | Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications |
| 62 | Profil Dewan Pengawas
Board of Supervisors Profile | 76 | Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)
PERUM JAMKRINDO
Implementation of PERUM JAMKRINDO Assessment
Criteria on Excellent Performance (KPKU) |
| 66 | Profil Dewan Pengawas Syariah
Board of Sharia Supervisor Profile | 79 | Kompetensi Inti
Core Competency |
| 68 | Profil Direksi
Board of Directors' Profile | 81 | Sumber Daya Manusia
Human Resources |
| 72 | Pejabat Perum Jamkrindo
Officers at Perum Jamkrindo | 101 | Jaringan Pelayanan Perum Jamkrindo
Network Services Perum Jamkrindo |
| 73 | Kepala Cabang Perum Jamkrindo
Head Branch of Perum Jamkrindo | 102 | Peta Jaringan Kerja Perum Jamkrindo
Map Network Perum Jamkrindo |
| 74 | Komposisi Pemegang Saham
Composition of Shareholder | | |

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON COMPANY PERFORMANCE

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 106 | Tinjauan Umum
Overview | 135 | Perbandingan Realisasi Dengan Rkap 2013
Comparison Between Realization and RKAP 2013 |
| 108 | Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operational Overview per Business Segment | 138 | Proyeksi Keuangan Tahun 2014
Financial Projection For 2014 |
| 126 | Uraian Atas Kinerja Keuangan Perusahaan
Company's Financial Performance | 139 | Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal
Capital Structure and Management Capital Structure Policy |
| 134 | Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2013
Company Capability Rate In 2013 | 140 | Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Information and Material Fact Subsequent to the Date of the Accountant's Report |
| 135 | Peningkatan dan Penurunan Material Dari Penjualan/Pendapatan Bersih
Material Increase and Decrease From Net Sales/Income | | |

141	Kebijakan Dividen Dividend Policy	143	Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Transaksi Dengan Pihak Afiliasi Material Transaction Information Containing Conflict of Interest and Transaction With Affiliate Parties
141	Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/atau Manajemen Employee and/or Management Stock Ownership Program	143	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berpengaruh Significant Changes In Regulation
142	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of Use of The Funds General Offering Result	143	Kebijakan Akuntansi Accounting Policy
142	Informasi Transaksi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang/ Modal Information of Material Transaction on Investment, Expansion, Divestment, Business Merger, Acquisition or Debt/Capital Restructuring	143	Perpajakan Perusahaan Corporate Taxation
143	Investasi Barang Modal Yang Direalisasikan Pada Tahun Buku Terakhir Capital Goods Investment Realized In The End of Fiscal Year	145	Aspek Pemasaran Marketing Aspect
		146	Pangsa Pasar Market Share
		148	Strategi Pemasaran Tahun 2014 Marketing Strategy 2014
		149	Program kerja dan Langkah Kegiatan Tahun 2014 Work Program and Activities in 2014
		149	Prospek Usaha Perusahaan Company Business Outlook
		151	Rencana Jangka Panjang Perusahaan Long Term Corporate Plan

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

156	Pelaksanaan GCG GCG Implementation	173	Komisaris Independen Independent Commissioner
157	Kebijakan dan Praktik GCG Policy and GCG Practice	173	Komite-Komite Yang Berada Di Bawah Dewan Pengawas The Committees under the Board of Supervisors
158	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan Commitment to Continuously Implement Corporate Governance	174	Direksi Board of Directors
158	Penilaian GCG GCG Assessment	183	Kebijakan mengenai Rencana Suksesi Direksi Policy on the Succession Plan of the Board of Directors
163	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ Rapat Pembahasan Bersama (RPB) General Meeting of Shareholders (GMS) / Discussion of Joint Meeting (RPB)	185	Assessment Dewan Pengawas dan Direksi Assessment on the Supervisory Board and Board of Directors
164	Dewan Pengawas Board of Supervisors	187	Uraian Tentang Remunerasi Direksi Description of Remuneration of Board of Directors
		192	Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Variety In The Composition of The Board of Supervisors and The Board of Directors

195	Informasi Pemegang Saham Information of Shareholders	213	Satuan Pengawas Intern Internal Audit
195	Hubungan Afiliasi Antara Anggota Direksi, Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Affiliation Among Members of Board of Directors, Board of Supervisors, and Major and/ or Controlling Shareholders	223	Audit Eksternal External Audit
195	Komite Audit Audit Committee	225	Manajemen Risiko Risk Management
198	Komite Investasi dan Risiko Usaha Business Risk and Investment Committee	242	Perkara Penting Yang Dihadapi Legal Case
201	Komite-Komite Di Bawah Direksi Committees Under The Board of Directors	242	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Information and Data of the Company
207	Sekretaris Dewan Pengawas Board Supervisor Secretary	244	Teknologi Informasi Information Technology
209	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	250	Kode Etik dan Budaya Perusahaan Code of Conduct and Corporate Culture
211	Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan Organization Structure of Corporate Secretary	254	Standar Perilaku Insan Perusahaan Conduct Standard of Company Personnel
211	Uraian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2012 Description of General Meeting of Shareholders (GMS) 2012	258	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
		260	Kebijakan Anti Korupsi Anti Corruption Policy
		261	Praktik Bad Corporate Governance Bad Corporate Governance Practice
		262	Kepatuhan Terhadap Pajak Tax Compliance

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

262	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Lingkungan Hidup Corporate Social Responsibility in Environment	264	Program Kemitraan melalui Pengembangan Masyarakat dan Konsumen Partnership Program through Community and Customer Development
263	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Corporate Responsibility in Manpower, Health, and Occupational Safety		

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT

Our Milestones



1970–1981

Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK)

Skim kredit yang dijamin TRI, Kredit Padi Palawija, Kredit Pengadaan Pupuk

Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK)

Credit Guarantee Scheme: TRI, Loan for rice and crops, fertilizer credit.



PERUM PKK

1981–2000

Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK)

Skim kredit yang dijamin: TRI, GLP & GLK, Kopelra, RMU, Kredit Sapi Perah, Kredit Padi Palawija Cengkeh, Kredit Pengadaan Pupuk, KUT (Kredit Usaha Tani).

Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK)

Credit Guarantee Scheme: TRI, GLP & GLK, Kopelra, RMU, dairy cow credit, Loan for rice and crops, fertilizer credit, Loan for Farmer (KUT).



2000–2008

Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU)

Penjaminan Kredit dengan orientasi bisnis untuk pengembangan UMKMK, Pemberian Pinjaman Bagi Hasil, peluncuran Produk Penjaminan Syariah.

Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU)

Credit guarantee with business orientation for SMEs development, direct loans on profit sharing, and the launching of sharia guarantee products.



Jamkrindo

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

2008–Sekarang / Now

Perum Jamkrindo

Penjaminan Kredit untuk UMKMK yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, Penjaminan Bank Garansi, penjaminan distribusi dan *Surety Bond*.

Perum Jamkrindo

Credit Guarantee for SMEs was offered in scheme conventional and Sharia such as commercial credit, micro, constructions, bank guarantee, guarantee for distribution, and *Surety Bond*.

Highlight 2013



Total Aset
Total Assets

▲ 24,74%

Pendapatan Investasi
Investment Income

▲ 39,36%

Pendapatan Imbal Jasa
Penjaminan (IJP)
Gross Guarantee Fee

▲ 14,43%



Batik Solo

Ragam motif batik asal Solo memang dipengaruhi dengan makna-makna simbolis yang berasal dari kebudayaan Hindu. Beberapa ciri khas batik Solo banyak ditemukan pada motif-motif seperti, sawat, meru, naga, burung, dan modang. Dari kesemuanya, secara umum corak batik Solo merupakan perpaduan dari bentuk-bentuk geometris yang berukuran kecil-kecil. Selain itu, ciri khas yang terdapat pada batik Solo adalah terletak dalam pewarnaannya.

A range of original batik Solo motif is indeed influenced by the symbolic meanings derived from Hindu culture. Some of the characteristics of batik Solo are found on such motives, sawat, meru, dragons, birds, and modang. Of all of them, in general the pattern of batik Solo is a combination of geometric shapes that are in small-sized. In addition, hallmark found on batik Solo is located in its coloring.



Kilas Kinerja 2013

Flashback Performance of 2013

Peristiwa Penting pada Tahun 2013

Significant Events in 2013

22 Januari January 22



Pada tanggal 22 Januari 2013, sebagai bentuk kepedulian kepada korban banjir yang melanda wilayah DKI Jakarta, Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) memberikan bantuan berupa dana sebesar Rp. 200.000.000,- yang diserahkan kepada PMI Provinsi DKI Jakarta.

On January 22, 2013, as a form of care to flood affected communities in DKI Jakarta, Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) donated fund of Rp, 200,000,000.- to the Indonesian Red Cross of DKI Jakarta Province.

18 April April 18



Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menandatangani nota kesepahaman (MOU) pada tanggal 18 April di Denpasar, Bali. Nota kesepahaman itu untuk memberikan penjaminan pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong ekspor nasional.

Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) with the Indonesia Export Financing Institution signed the memorandum of understanding (MOU) on April 18, 2013 in Denpasar, Bali. This Memorandum of Understanding aims to provide credit financing guarantee for Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK) and support the government's policy to spur on national export.

8 Mei May 8



Kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) atas penjaminan KUR online.

Cooperation between Perum Jamkrindo and PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) for online KUR guarantee.

11 Juli

July 11



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dalam hal pemberian jaminan pembiayaan umum BTN iB untuk modal kerja dan investasi.

The signing of Partnership Agreement between Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) with Bank Tabungan Negara (BTN) concerning the provision of financing guarantee of BTN iB for investment and working capital.

5 September

September 5



Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan PT. Bank Kalbar mengenai Perjanjian kerjasama Penjaminan Kredit.

The signing of cooperation agreement between Perum Jamkrindo and PT. Bank Kalbar on Partnership Agreement on Credit Guarantee.

30 September

September 30



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Jamkrindo tentang peningkatan prestasi olahragawan Indonesia di Jakarta.

The signing of Cooperation Agreement between Central National Sport Committee of Indonesia (KONI) and State Owned Enterprise (SOE) of Perum Jamkrindo on the improvement of Indonesian athletes' achievement in Jakarta.



2-5 Oktober

October 2-5



Perum Jamkrindo berperan serta dalam rangka meramaikan KTT APEC di Bali, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada ajang "Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Unthinkable Week 2013", sebagai ajang sosialisasi dan promosi pelaksanaan program Pengembangan Wirausaha Muda pada 2-5 Oktober 2013 bertempat di Kuta, Bali.

Perum jamkrindo took part of succeeding KTT APEC in Bali, the Coordinating Ministry for Economy on the event held by "Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Unthinkable Week 2013" as a platform to disperse and promote the implementation of Youth Entrepreneurship Development Program on October 5-2, 2013 in Kuta, Bali.

12 Oktober

12 October



Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan PT. BPD Kalsel tentang pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam rangka melaksanakan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Online.

The signing of partnership agreement between Perum Jamkrindo with PT. BPD of South Kalimantan on the utilization of information technology (IT) for Citizen Business Loan (KUR) online guarantee.



30 Oktober

October 30



Perum Jamkrindo berhasil mengukir prestasi gemilang sepanjang tahun 2012 dengan meraih penghargaan dari Majalah Infobank untuk BUMN kategori industri keuangan yang berpredikat Sangat Bagus, pasalnya sepanjang tahun 2012 kinerja Perum Jamkrindo sangat cemerlang. prestasi tersebut ditandai dengan meningkatnya perolehan laba sebesar 36,83% dari Rp. 372,37 miliar pada 2011 menjadi Rp.509,52 miliar pada tahun 2012. kenaikan laba ditopang oleh pertumbuhan usaha yang mencapai 76,17 % menjadi Rp. 1.60 triliun dari Rp.910,99 miliar pada tahun 2011. Tahun lalu perum jamkrindo merealisasikan penjaminan sebesar Rp.53,54 triliun

Perum Jamkrindo succeeded to carve an encouraging achievement during 2012 with the awards from Infobank magazine, achieving Very Good predicate in the financial industry category for Perum Jamkrindo's satisfactory performance during 2012. The achievement was indicated with the increase in profit of 36.83% from Rp372.27 billion in 2011 to Rp, 509.52 billion in 2012. The increase in profit was supported by business growth of 76.17% to Rp, 1,60 trillion from Rp, 910.99 billion in 2011. Last year, the guarantee was realized at Rp, 53.54 trillion.

6 Desember

December 6



Pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013, bertempat di Kantor Perum Jamkrindo Cabang Yogyakarta, Jl. Parangtritis No. 96 Km 1, Yogyakarta, telah diresmikan pembukaan 3 (tiga) Kantor Cabang Perum Jamkrindo, yaitu Kantor Cabang Perum Jamkrindo Yogyakarta, Lampung dan Kantor Cabang Khusus Jakarta.

On Friday, December 6, 2013 at Perum Jamkrindo Office of Yogyakarta Branch, Jl. Parangtritis No. 96 Km 1, Yogyakarta, three branch office of Perum Jamkrindo, namely Branch Office of Yogyakarta, Lampung, and one Jakarta Special Branch of Perum Jamkrindo.

Jalanan Kerjasama Tahun 2013

Partnership in 2013

PERJANJIAN PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA DENGAN MITRA KERJA TAHUN 2013
CREDIT GUARANTEE AGREEMENT/ FINANCING OF
PUBLIC COMPANY (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA WITH PARTNERS 2013

No.	Nama Instansi Name of Institution	Bentuk Kerjasama Cooperation	Manfaat Benefit
1	Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia (Indonesia Exim Bank) LPEI Export-Indonesia Financing Institution (Indonesia Exim Bank)	Penjaminan Pembiayaan Eksport Indonesia Export-Indonesia Financing Guarantee	Meningkatkan Kerjasama dan memperoleh fasilitas pembiayaan Ekspor Nasional sehingga dapat membantu kegiatan UMKMK Improving partnership and obtaining facilities of National Export financing to support UMKMK activities
2	PT Bank Mandiri	Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) Dalam Rangka Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Utilization of Information Technology for KUR Online guarantee implementation (KUR Online)	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kerjasama Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan meningkatkan IJP Perusahaan Improving the quality of partnership implementation for Citizen Business Loan (KUR) and improving IJP of the Company
3	PT Heksa Eka Life Insurance	Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/Pembiayaan Multiguna The closing of Credit Life Insurance for Bank Debtor / Other Guarantee Recipient from Financial Institution/ Multipurpose Credit	Memberikan Perlindungan Asuransi jiwa kredit atas risiko kematian terhadap produk penjaminan multiguna dengan melakukan Penempatan atau pengalihan risiko Providing Credit Life Insurance for death risk of the guarantee products
4	PT Asuransi Syariah Al Amin	Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/Pembiayaan Multiguna The closing of Credit Life Insurance for Bank Debtor / Other Guarantee Recipient from Financial Institution/ Multipurpose Credit	Memberikan Perlindungan Asuransi jiwa kredit atas risiko kematian terhadap produk penjaminan multiguna dengan melakukan Penempatan atau pengalihan risiko Providing Credit Life Insurance for death risk of the multipurpose guarantee products by transferring or adjusting the risk to the target
5	PT Asuransi Jiwasraya	Sinergi Bisnis diantara BUMN dalam rangka membangun kemitraan yang Saling menguntungkan serta meningkatkan nilai tambah terhadap produk yang dimiliki Business Synergy between SOE for the purpose of building mutually beneficial partnership and improving added value for the owned credit	Meningkatkan kerjasama dan sinergi bisnis diantara BUMN sehingga dapat meningkatkan Produktifitas Perum Jamkrindo Improving partnership and business synergy between SOE to increase the productivity of Perum Jamkrindo
6	PT Danareksa	Sinergi BUMN SOE synergy	Meningkatkan sinergi BUMN terhadap produk-produk usaha yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan dan menunjang kegiatan usaha masing-masing Pihak Improving SOE synergy on the owned business products to develop and support business activities of each Party

No.	Nama Instansi Name of Institution	Bentuk Kerjasama Cooperation	Manfaat Benefit
7	CFD Universitas Teknologi Sumbawa dan Bank NTB	Kerjasama Peningkatan Profesionalisme Pelaku UMKMK di Kabupaten Sumbawa Cooperation for the Professionalism Enhancement of UMKMK Player in Sumbawa Regency	Membantu Peningkatan Profesionalisme Pelaku UMKMK di Kabupaten Sumbawa Assisting the Professionalism Enhancement of UMKMK Player in Sumbawa Regency
8	PT Asuransi Jiwasraya	Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/Pembiayaan Multiguna The closing of Credit Life Insurance for Bank Debtor / Other Guarantee Recipient from Financial Institution/ Multipurpose Credit	Memberikan Perlindungan Asuransi jiwa kredit atas risiko kematian terhadap produk penjaminan multiguna dengan melakukan Penepatan atau pengalihan risiko Providing Credit Life Insurance for death risk of the multipurpose guarantee products by transferring or adjusting the risk to the target
9	PT BTN Syariah	Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Umum (Modal Kerja BTN iB dan Investasi BTN iB) Guarantee (Kafalah) of Commercial Financing (Working Capital of BTN iB and Investment of BTN iB)	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kerjasama Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Umum dan meningkatkan IJP Perusahaan Improving the quality of cooperation of General Financing Guarantee (Kafalah) and increasing guarantee of the Company
10	PT BTN Syariah	Perjanjian Kerjasama Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan SPK Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa Partnership Agreement on Guarantee (Kafalah) of Financing of Construction and Goods/Service Procurement Contract	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kerjasama Penjaminan (Kafalah) pembiayaan SPK Konstruksi dan Pengadaan Barang dan jasa dan meningkatkan IJP Perusahaan Implementation of Partnership Agreement on Guarantee (Kafalah) of Financing of Construction and Goods/Service Procurement Contract and increasing guarantee of the Company
11	Badan Pemeriksa Keuangan (State Auditor)	Pembentukan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Perum Jamkrindo The establishment of Technical Instruction of Development and Management of Information System for Data Access in Perum Jamkrindo	Meningkatkan sinergi terhadap BPK dalam bidang Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data pada Perum Jamkrindo Improving synergy with BPK in the Management of Information System for Data Access in Perum Jamkrindo
15	PT Bank Syariah Mandiri	Penjaminan atas Pembiayaan Produktif bagi UMKMK Guarantee for Productive Financing for UMKMK	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kerjasama Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan meningkatkan IJP Perusahaan Improving the quality of the implementation of KUR Guarantee contract and increasing guarantee of the Company
16	PT Bank Syariah Mandiri	Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Guarantee for KUR Loan for the Indonesian Manpower	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kerjasama Penjaminan (Kafalah) Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan meningkatkan IJP Perusahaan Improving the quality of KUR Guarantee Program

Key Performance Indikator

KEY PERFORMANCE INDICATOR

S/D 31 DESEMBER TAHUN 2013 / AS OF DECEMBER 31

PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA

NO	PERSPEKTIF / INDIKATOR / SUB INDIKATOR PERSPECTIVE/INDICATOR/ SUB INDICATOR	SATUAN UNIT	FORMULA FORMULA	RKAP 2013 RKAP 2013	s/d DESEMBER 2013 AS OF DECEMBER 31, 2013		
	BOBOT WEIGHT			TARGET TARGET	REALISASI REALIZATION	NILAI VALUE	
I	PERSPEKTIF KEUANGAN DAN PASAR / MARKET AND FINANCIAL PERSPECTIVE			22	28		
1	Laba Sebelum Pajak Income Before tax	Rp	Tercapai Sesuai RKAP Achieved based on RKAP	4,84	Rp 538,39 milyar	Rp 596,1 milyar	5,36
2	Return On Asset	%	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak} / \text{Income Before Tax}}{\text{Rata - Rata Total Aset} / \text{Average of Total Asset}}$	4,40	7,50%	7,97%	4,68
3	Return On Equity	%	$\frac{\text{Laba Setelah Pajak} / \text{Income Before Tax}}{\text{Rata - Rata Total Ekuitas} / \text{Average of Total Equities}}$	4,40	8,48%	9,06%	4,70
4	Pertumbuhan Pendapatan Usaha (IJP + Investasi) Operation Income growth (IJP+Investment)	%	$\frac{\text{Pendapatan Usaha (n) - Pendapatan Usaha (n - 1)}}{\text{Pendapatan Usaha (n - 1)}}$ $\frac{\text{Operation Income (n) - Operation Income (n - 1)}}{\text{Operation Income (n - 1)}}$	4,40	7,61%	16,20%	9,37
5	Yield On Investment	%	$\frac{\text{Hasil Investasi} / \text{Investment Result}}{\text{Rata - Rata Total Investasi} / \text{Average of Total Investment}}$	3,96	6,50%	6,89%	4,20
II	PERSPEKTIF FOKUS PELANGGAN / CUSTOMERS' FOCUS PERSEPECTIVE			22	18		
1	Pertumbuhan Pasar Market Growth	%	$\frac{\text{Volume Penjaminan (n) - Volume Penjaminan (n - 1)}}{\text{Guarantee Volume (n) - Guarantee volume (n - 1)}}$ $\text{Volume Penjaminan (n - 1) / Guarantee volume (n - 1)}$	7,15	16,42%	-14,95%	0
2	Perolehan Pelanggan Baru New Customer Result	PKS	$\frac{\Sigma \text{ Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ditandatangani}}{\text{Dengan Penerima Jaminan} / \Sigma \text{ Partnership Agreement Signed by Guarantee Receiver}}$	7,15	10	15	10,73
3	Penambahan Kantor Cabang Branch Office Addition	Unit	$\frac{\Sigma \text{ Penambahan Kantor Cabang}}{\Sigma \text{ Branch office Addition}}$	7,70	3	3	7,70
III	PERSPEKTIF EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES / PERSPECTIVE OF PRODUCT AND PROCESS EFFECTIVENESS			20	22		
1	Perbaikan dan Penyempurnaan Sisdur (SOP) Repairmen and Improvement of Sisdur (SOP)	Unit	$\frac{\Sigma \text{ Perbaikan dan Penyempurnaan Sisdur (SOP)}}{\Sigma \text{ Repairmen and Improvement of Sisdur (SOP)}}$	6,50	6	7	8
2	Peningkatan Status Kantor Anak Cabang menjadi Kantor Cabang The Status Change from Branch Office Entity (KAC) to Branch Office	Unit	$\frac{\Sigma \text{ Peningkatan Status KAC menjadi Kanca}}{\Sigma \text{ The Status Change from KAC to Branch Office}}$	7,00	6	6	7,00
3	Produktifitas Pegawai Employees Productivity	Rp/ Orang Rp/ Person	$\frac{\text{Laba Usaha} / \text{Business Income}}{\text{Jumlah SDM} / \text{Total HR}}$	6,50	Rp 730,35 juta / million	Rp 840,53 juta / million	7,55

NO	PERSPEKTIF / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	SATUAN UNIT	FORMULA FORMULA	RKAP 2013 RKAP 2013	s/d DESEMBER 2013 AS OF DECEMBER 31, 2013		
	BOBOT WEIGHT			TARGET TARGET	REALISASI REALIZATION	NILAI VALUE	
IV	PERSPEKTIF FOKUS TENAGA KERJA / EMPLOYEES PERSPECTIVE			18	40		
1	Jumlah Orang Yang Disertakan Mengikuti Diklat Total Registered Training Participants	Orang Person	$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Orang Yang Mengikuti Diklat } \Sigma \text{ Realization of Participants}}{\Sigma \text{ Target Orang Yang Direncanakan Mengikuti Diklat } \Sigma \text{ Target of Participants in Plan}}$	6,30	400	1.122	17,67
2	Jumlah Diklat Keprofesian Total Profession Training	Diklat Training	$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Jenis Diklat Keprofesian } \Sigma \text{ Realization of Profession Training type}}{\Sigma \text{ Target Orang Yang Direncanakan Mengikuti } \text{Diklat Rencana Jenis Diklat Keprofesian } \Sigma \text{ Target of Participants in Plan}}$	6,30	30	86	18,06
3	Penugasan Belajar (S2) Dalam Negeri Atau Luar Negeri Study Assignment (S2) Domestic and Overseas	Orang Person	$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Orang Yang Dikirim } \Sigma \text{ Realization of Participants}}{\Sigma \text{ Target Orang Yang Direncanakan Dikirim } \Sigma \text{ Target of Participants in Plan}}$	5,40	8	6	4,05
V	PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA, DAN TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN PERSPECTIVE OF LEADERSHIP, CORPORATE GOVERNANCE AND SOCIAL RESPONSIBILITY			18	19		
1	Tingkat Pengendalian Risiko Risk Control Level	%	$\frac{\Sigma \text{ Penyelesaian Opini Risiko } \Sigma \text{ Risk opinion Settlement}}{\Sigma \text{ Permintaan Opini Risiko } \Sigma \text{ Risk Opinion Request}}$	4,50	80,00%	98%	5,51
2	Penerapan GCG GCG implementation	Skor Score	Sesuai Target Skor Based on Score Target	4,50	85,00	75,88	4,02
3	Pemenuhan Portal BUMN BUMN gate Fulfillment	%	Terpenuhi Fulfilled	4,50	100,00%	100,00%	4,50
4	Penyusunan RJPP RJPP Preparation	%	Tingkat Penyelesaian Penyusunan RJPP Finalization of RJPP Preparation	4,50	100,00%	100,00%	4,50
TOTAL BOBOT / TOTAL WEIGHT				100	127		

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Appraisal of the Company's Performance

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN EKSISTING

PERHITUNGAN KINERJA S/D 31 DESEMBER TAHUN 2013

PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA

THE EXISTING COMPANY'S SOUNDNESS

LEVEL OF PERFORMANCE AS OF DECEMBER 31, 2013

PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA

No	Uraian / Description	Perhitungan / Calculation	Bobot / Weight	Nilai / Value	Skor / Score
A. Aspek Keuangan / Financial Aspect					
1	Rentabilitas / Profitability				
	- Return On Equity / ROE (%)	$\frac{\text{Laba Setelah Pajak / Income after tax}}{\text{Rata-rata Ekuitas / Equities Average}}$	5	36,18%	5
	- Return On Assets / ROA (%)	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak / Income Before Tax}}{\text{Rata-rata Total Aset / Total Assets Average}}$	5	6,61%	2
2	Solvabilitas (%) Solvability (%)	$\frac{\text{Total Aset / Total assets}}{\text{Total Kewajiban / Total Obligations}}$	15	122,82%	8
3	Likuiditas (%) Liquidity (%)	$\frac{\text{Aset Lancar / Current Assets}}{\text{Hutang Lancar / Current Debt}}$	10	158,52%	10
Jumlah Aspek Keuangan / Total Financial Aspects			35		25
1	YOI (%)	$\frac{\text{Hasil Investasi / Investment Result}}{\text{Rata-Rata Investasi / Investment Average}}$	10	6,37%	10
2	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Expenses to Operating Income (%)	$\frac{\text{Biaya Usaha - Klaim / Business Cost-Claims}}{\text{Pendapatan IJP / IJP Revenue}}$	7,5	18,31%	7,5
3	Pertumbuhan IJP (%) IJP Growth	$\frac{\text{IJP Tahun Berjalan - IJP Tahun Lalu}}{\text{IJP of Current Year-IJP of Last Year}}$ $\frac{\text{IJP Tahun Lalu / IJP of Last Year}}$	7,5	-4,28%	0,0
4	Gearing Ratio (kali) / Gearing ratio (times)	$\frac{\text{Outstanding Penjaminan Kredit / Credit Guarantee Outstanding}}{\text{Saldo Ekuitas / Equities Balance}}$	10	12	3
5	Rasio Efektifitas Operasi (%) Operational Effectiveness Ratio (%)	$\frac{\text{Laba Usaha / Operation income}}{\text{Pendapatan IJP / IJP Revenue}}$	7,5	41,07%	7,5
6	Rasio Efektifitas Subrogasi (%) Subrogation Effectiveness Ratio (%)	$\frac{\text{Pendapatan Subrogasi / Subrogation Income}}{\text{Beban Klaim / Claims Expenses}}$	7,5	28,45%	7,5
Jumlah Aspek Operasional / Total Operational Aspects			50		35,5
1	Laporan perhitungan tahunan Annual Calculation Report	Menyampaikan tgl 15 Februari 2013 Submitting on February 15, 2013	3	3	3
2	Rancangan RKAP RKAP Draft	Menyampaikan tgl 25 Oktober 2013 Submitting on October 25, 2013	3	3	3
3	Laporan Periodik (Triwulan) Periodical Statement (Quarterly)	Terlambat 0 hari / 0 Day late	3	3	3
4	Kinerja PKBL PKBL Performance	a. Efektifitas Penyaluran / Distribution Effectiveness b. Tingkat Kolektibilitas / Collectability Level	6	6	6
Jumlah Aspek Administrasi / Total Administration Aspects			15		15
TOTAL / TOTAL			100		75,5
PREDIKAT PENILAIAN / SCORE PREDICATE			SEHAT GOOD		A

Keterangan / Description:

*) Usulan perubahan formula range nilai yang masih dalam proses Kementerian BUMN

*) Proposal of Value Range Formula Changes ongoing process to Ministry of BUMN

TINGKAT KESEHATAN KUR
PERHITUNGAN KINERJA S/D 31 DESEMBER TAHUN 2013
PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA

SOUNDNESS LEVEL OF KUR
LEVEL OF PERFORMANCE AS OF DECEMBER 31, 2013
PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA

No	Uraian / Description	Perhitungan / Calculation	Bobot / Weight	Nilai / Value	Skor / Score
A. Aspek Keuangan / Financial Aspect					
1	Gearing Ratio	$\frac{\text{Jumlah Kredit Yang Dijamin} / \text{Total Collateral Credit}}{\text{Jumlah PMN Yang Diterima} / \text{Total Received PMN}}$	10	12.13	10
2	Yield On Invesment (YOI)	$\frac{\text{Hasil Investasi} / \text{Investment Result}}{\text{Rata-rata Total Ekuitas} / \text{Average of Total Equity}}$	10	5.44%	10
3	Rasio Kecukupan Investasi (RKI) Investment Adequacy Ratio (RKI)	$\frac{\text{Total Investasi} / \text{Total Investment}}{\text{Cadangan Klaim} + \text{Hutang Klaim} / \text{(Claim Reserve) + (Claim Debts)}}$	10	1711%	10
Jumlah Aspek Keuangan / Total Financial Aspects			30		30
B. Aspek Operasional / Operational Aspects					
1	Rasio Pencapaian Penjaminan Achievement Ratio of Collateralization	$\frac{\text{Realisasi Nilai Penjaminan} / \text{Collateralization Value Realization}}{\text{Target Nilai Penjaminan} / \text{Collateralization Value Target}}$	20	116%	20
2	Rasio Pencapaian Jumlah Terjamin Achievement Ratio of Collateralized Amount	$\frac{\text{Realisasi Jumlah Terjamin} / \text{Collateralized Amount Realization}}{\text{Target Jumlah Terjamin} / \text{Collateralized Amount Target}}$	15	116%	15
3	Efisiensi Usaha Business Efficiency	$\frac{\text{Biaya Operasional} / \text{Operational Expenses}}{\text{Pendapatan IJP} / \text{IJP Revenue}}$	15	13.91%	15
Jumlah Aspek Operasional / Total Operational Aspects			50		50
C. Aspek Administrasi / Administration Aspects					
1	Kewajiban Pelaporan Reporting Obligation	Menyampaikan Tepat Waktu / On-Time Delivery	10	Sesuai Ketentuan	10
2	Efektivitas Penagihan IJP IJP Invoicing Effectiveness	$\frac{\text{Jumlah IJP Diterima} / \text{Total IJP Received}}{\text{Jumlah IJP Ditagih} / \text{Total IJP Invoiced}}$	10	98%	8
Jumlah Aspek Administrasi / Total Administration Aspects			20		18
TOTAL / TOTAL			100		98
PREDIKAT PENILAIAN / SCORE PREDICATE				SEHAT GOOD	AAA

TINGKAT KESEHATAN GABUNGAN
PERHITUNGAN KINERJA S/D 31 DESEMBER TAHUN 2013
PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA

JOINT SOUNDNESS LEVEL
LEVEL OF PERFORMANCE AS OF DECEMBER 31, 2013
PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA

Penilaian / Assesment	Score	Proporsi Joint Cost	Proporsi Score
1	2	3	4 = 2 X 3
Tingkat Kesehatan Korporasi Corporate Soundness Level	75,50	19,74%	14,90
Penugasan (Penjaminan KUR) Assignment (KUR Collateralization)	98,00	80,26%	78,66
Total Score			93,56
PREDIKAT PENILAIAN / SCORE PREDICATE		SEHAT / GOOD	AA

Penilaian GCG

Assessment GCG

Aspek / Aspect	Bobot / Weight	Tahun 2013 (Self Assessment)		Tahun 2012 (Assessment)	
		Nilai / Score	% Pencapaian / % of Achievement	Nilai / Score	% Pencapaian / % of Achievement
I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan / Commitment on sustainable implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,360	90,862	5,187	74,100
II Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal / Shareholders and GMS/ Owners of Capital	9,00	8,463	94,039	7,427	82,522
III Dewan Pengawas / Board of Supervisors	35,00	31,308	89,453	27,982	79,949
IV Direksi / Board of Directors	35,00	32,312	92,319	28,871	82,488
V Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information and Transparency Disclosure	9,00	7,890	87,663	6,415	71,278
VI Aspek Lainnya / Other Aspects	5,00	3,750	75,000	-	-
SKOR KESELURUHAN / TOTAL SCORE	100,00	90,084	90,084	75,882	75,882
KLASIFIKASI PERINGKAT KUALITAS PENERAPAN GCG / RATING CLASSIFICATION OF GCG IMPLEMENTATION QUALITY		SANGAT BAIK OUTSTANDING		BAIK GOOD	

Tingkat Level	Capaian Achievement	Peringkat Rate
1	Nilai di atas 85 / Score above 85	Sangat Baik / Outstanding
2	75 < Nilai ≤ 85 / 75 < Score < 85	Baik / Good
3	60 < Nilai ≤ 75 / 60 < Score < 75	Cukup Baik / Enough
4	50 < Nilai ≤ 60 / 50 < Score < 60	Kurang Baik / Poor
5	Nilai ≤ 50 / Score < 50	Tidak Baik / Very Poor

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Financial Data Highlights

ASET / ASSETS	31 Desember 2013 December 31, 2013	31 Desember 2012 December 31, 2012
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalent	4,711,774,750,747	4,279,058,647,035
Efek-efek / Marketable Securities:		
- Dimiliki Hingga Jatuh Tempo / Held to Maturity	523,602,230,000	347,517,959,880
- Tersedia Untuk Dijual / Available For Sale	930,400,172,330	666,253,229,545
Piutang IJP KUR Kepada Pemerintah / Piutang Co-Guarantee / Co Guarantee Receivable	862,234,407,631	309,836,402,176
Piutang Penjaminan Ulang / Co-Guarantee Receivable	120,583,795,519	25,408,715,226
Piutang yang diberikan / Loans	1,297,400,099	1,672,066,476
Piutang lain-lain / Other Receivables	27,596,443,977	13,508,306,435
Beban Dibayar Dimuka / Prepaid Expenses	553,068,468,726	533,717,383,806
Properti Investasi / Investment Property	14,981,219,414	15,327,182,736
Aset Tetap / Fixed Assets	37,840,551,952	36,141,076,104
Aset Pajak Tangguhan / Deferred tax Assets	141,500,601,350	128,426,955,968
Aset Lain-lain / Other Assets	368,501,660,187	304,209,015,035
JUMLAH ASET / TOTAL ASSETS	8,293,381,701,932	6,661,076,940,422
LIABILITAS / LIABILITIES	31 Desember 2013 December 31, 2013	31 Desember 2012 December 31, 2012
Hutang Klaim / Claim Payable	45,180,582,714	22,056,514,565
Cadangan Klaim / Claim Reserve	452,121,969,352	395,874,829,797
Hutang Penjaminan Ulang / Re-Guarantee Payable	41,712,936,083	2,607,675,669
Pendapat ditangguhkan / Deferred Revenue	1,103,427,896,654	1,120,831,984,142
Hutang Pajak / Tax Payable	24,242,476,126	32,008,718,569
Hutang Lain-Lain / Other Liabilities	76,557,601,893	38,066,682,982
JUMLAH LIABILITAS / TOTAL LIABILITIES	1,743,243,462,822	1,611,446,405,724
EKUITAS / EQUITY	31 Desember 2013 December 31, 2013	31 Desember 2012 December 31, 2012
Penyertaan Modal Pemerintah / Government's Share Placement	5,338,733,365,160	4,218,733,365,160
Cadangan-Cadangan / Appropriate Retained Earnings	757,940,218,914	313,055,484,298
Komponen Ekuitas Lainnya / Other Equity Components	(71,744,405,302)	8,324,950,625
Saldo Laba / Retained Earnings	525,209,060,338	509,516,734,615
JUMLAH EKUITAS / TOTAL EQUITY	6,550,138,239,110	5,049,630,534,698
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	8,293,381,701,932	6,661,076,940,422

LAPORAN LABA/RUGI KOMPREHENSIF

(Disajikan dalam Rupiah) / (Expressed in Rupiah)

URAIAN / DESCRIPTION	31 Desember 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011
PENDAPATAN PENJAMINAN / GUARANTEE REVENUES			
Imbal Jasa Penjaminan Bruto / Gross Guarantee Fee	1,600,961,372,287	1,399,062,673,556	969,158,565,210
Pendapatan Komisi Re Asuransi / Re Insurance Comission Fee	844,526,272	-	-
Premi Co Guarantee / Co Guarantee Premium	(253,402,175,909)	(230,775,492,171)	(188,798,401,771)
Premi Re Asuransi / Re Insurance Premium	(4,204,367,559)	-	-
Fee Based Income / Fee Based Income	(4,668,600,023)	(2,291,852,370)	(1,401,789,633)
Fee Agent / Fee Agency	(3,485,849,403)	-	-
Restitusi IJP / Guarantee Restitution	(4,560,059,814)	-	-
Imbal Jasa Penjaminan Bersih / Net Guarantee Revenues	1,331,484,845,851	1,165,995,329,015	778,958,373,806
BEBAN KLAIM / CLAIM EXPENSES			
Beban Klaim / Claim Expenses	(898,582,003,777)	(618,015,662,668)	(333,070,345,921)
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim / Increase (Decrease) in Reserve Claim	(39,541,500,471)	(89,820,948,419)	(140,024,547,203)
Beban Pencegahan Klaim / Claim Prevention Expense	(937,683,469)	-	-
Kerugian Penurunan Nilai Piutang Co Guarantee / Impairment Losses on Co Guarantee Receivable	(8,563,736,757)	(62,405,502,284)	(1,736,008,557)
Provisi Kerugian Klaim Co Guarantee / Provision for Claim Losses Co Guarantee	(16,705,639,084)	-	-
Jumlah Beban Klaim / Total Claim Expenses	(964,330,563,558)	(770,242,113,371)	(474,830,901,681)
PENJAMINAN BERSIH / NET GUARANTEE INCOME	367,154,282,293	395,753,215,644	304,127,472,125
Pendapatan Investasi Bersih / Investment Income - Net	286,814,758,443	205,802,142,173	132,028,163,985
Pendapatan Lain-Lain Bersih / Others Income - Net	162,646,571,794	110,504,205,512	65,842,097,878
BEBAN USAHA / OPERATING EXPENSES			
Beban Operasional / Operating Expenses	(35,819,923,140)	(24,704,213,962)	(15,446,577,154)
Beban Sumber Daya Manusia / Human Resources Expenses	(115,761,687,179)	(88,588,657,630)	(72,064,180,531)
Beban Administrasi dan Umum / General and Administrative Expenses	(64,212,211,219)	(36,288,146,414)	(34,499,463,598)
Beban Sistem, Teknologi, & Pengembangan Usaha / Technology, System, & Development Expense	(4,714,770,785)	(204,950,000)	(1,000,000,000)
Jumlah Beban Usaha / Total Operating Expenses	(220,508,592,323)	(149,785,968,006)	(123,010,221,283)
LABA SEBELUM PAJAK / INCOME BEFORE TAX	596,107,020,207	562,273,595,323	378,987,512,705
BEBAN PAJAK PENGHASILAN / INCOME TAX EXPENSES			
Beban Pajak Kini / Current Income Tax	(83,971,605,250)	(89,980,684,750)	(50,450,165,750)
Manfaat Pajak Tangguhan / Deferred Tax Benefit	13,073,645,381	37,223,824,042	43,833,846,962
Jumlah Beban Pajak Penghasilan / Total Tax Expenses	(70,897,959,869)	(52,756,860,708)	(6,616,318,788)
LABA TAHUN BERJALAN / PROFIT FOR THE YEAR	525,209,060,338	509,516,734,615	372,371,193,917

URAIAN / DESCRIPTION	31 Desember 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011
LABA TAHUN BERJALAN / PROFIT FOR THE YEAR	525,209,060,338	509,516,734,615	372,371,193,917
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA: / OTHER COMPREHENSIVE INCOME :			
Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual / Available For Sale Financial Assets	(80,069,355,927)	8,152,526,472	172,424,153
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN / TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR	445,139,704,411	517,669,261,087	372,543,618,070

21

RASIO KEUANGAN

Rasio Keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan data keuangan di atas adalah sebagai berikut:

FINANCIAL RATIO

Financial Ration during last 3(three) years based on the financial data above are as follow:

URAIAN / DESCRIPTION	31 Desember 2013 December 31, 2013	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011
LIKUIDITAS / LIQUIDITY			
Current ratio / Current ratio	1010,06%	956,94%	690,08%
SOLVABILITAS / SOLVABILITY			
Hutang Terhadap Ekuitas / Debt to equity	26,61%	31,91%	43,56%
RENTABILITAS / PROFITABILITY			
Margin Laba Kotor / Gross profit margin	26,78%	32,94%	34,37%
Margin Laba Penjualan / Profit margin on sales	36,84%	40,99%	41,60%
Return on assets / Return on Assets	7,97%	9,70%	9,57%
Return on equity / Return on equity	8,02%	10,09%	10,84%
AKTIVITAS / ACTIVITIES			
Perputaran aset / Assets Turnover	0,22%	0,24%	0,23%
Jumlah investasi pada entitas asosiasi	286,814,758,443	205,802,142,173	132,028,163,985

Margin laba kotor dan margin laba penjualan tahun 2013 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan beban klaim terutama beban klaim KUR dari tahun-tahun sebelumnya.

The margin of gross profit and sales profit in 2013 had a downturn compared to previous years. Such downturn is resulted from the increase of claim expense, particularly KUR claim expense compared to the last few years.

Return on asset dan *return on equity* mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2007, 2009, 2010, 2012 dan 2013 dimana rata-rata diterima pada akhir tahun, sehingga berdampak pada naiknya nilai aset dan ekuitas perusahaan sementara dana PMN tersebut belum menghasilkan (belum di investasikan).

Return on asset and return on equity experienced a downturn as well due to the addition of State Equity Participation (PMN) in 2007, 2009, 2010, 2012 and 2013 received in average at the end of the year, further to the impact of the increasing asset and equity value of the company whilst the PMN fund has not yet been invested.

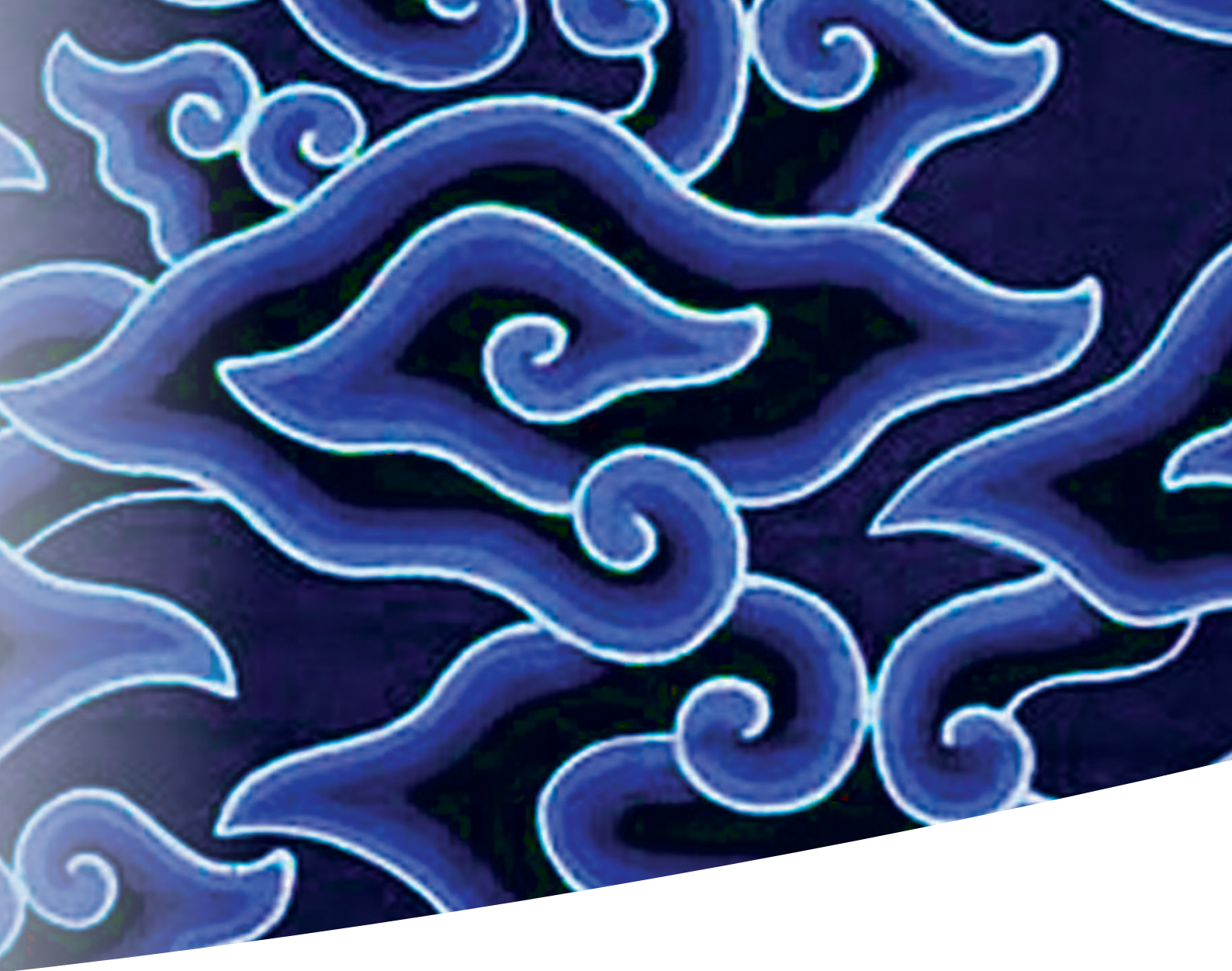
Batik Cirebon

Menengok sejarah perkembangan batik ke wilayah Cirebon, ternyata dipengaruhi juga oleh penyebaran agama Islam. Diterangkan bahwa Sunan Gunung Jati yang mengembangkan ajaran Islam di daerah Cirebon menikah dengan seorang putri cina bernama Ong Tie.

Perhatian Ong Tie yang besar terhadap bidang seni, khususnya keramik, membuatnya tertarik dengan motif-motif batik. Hingga kemudian, terjadilah perpaduan antara kebudayaan Cirebon-Cina. Salah satu motif yang paling terkenal dari daerah Cirebon adalah batik mega mendung dan awan-awanan. Pada motif ini dapat dilihat baik dalam bentuk maupun warnanya bergaya selera Cina.

Looking into the history of the development of batik in Cirebon, apparently it was influenced by the spread of Islam. Explained that Sunan Gunung Jati who developed the teachings of Islam in the region of Cirebon was married to a Chinese princess named Ong Tie.

Tie Ong's great attention to arts, especially ceramics, made her interested to batik motives. Until then, there was a great fusion of Cirebon-China culture. One of the most famous batik motives of Cirebon area was cloudy overcast and mega cloud batik. This motif can be seen both in form and colour in the Chinese taste in style.



Dewan Pengawas Dan Direksi

Board of Supervisors and Board of Directors Report

Laporan Dewan Pengawas

Board of Supervisors Report

Dewan Pengawas senantiasa memberikan pengawasan terhadap kinerja Direksi serta saran untuk terus melakukan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja sesuai kebutuhan dengan berbasis risiko, peningkatan kualitas pelayanan, kualitas, dan kesejahteraan SDM.

Board of Supervisors continues to provide oversight of the performance of the Board of Directors as well as suggestions to continue to improve the system and work procedure in accordance to the risk based needs, as well as to increase the service quality and the welfare of our HR.

Choirul Djamhari

Ketua Dewan Pengawas

Chairman of Board Supervisor

Dear Shareholders

Penilaian atas Kinerja Perusahaan

Di tahun 2013, Perum Jamkrindo berhasil mencatat perolehan laba tahun berjalan sebesar Rp525,21 miliar atau meningkat 3,08% dari tahun 2012 sebesar Rp509,52 miliar. Meningkatnya Pendapatan Operasional dari IJP dan Pendapatan Investasi mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi tercapainya peningkatan Laba Perusahaan. Atas kinerja yang memuaskan tersebut, kami memberikan apresiasi kepada Direksi, karyawan dan seluruh pihak yang terkait dengan pencapaian kinerja operasional dan keuangan Perum Jamkrindo tahun 2013.

Kinerja keuangan Perum Jamkrindo sangat baik, hal ini dibuktikan dengan tingkat kesehatan perusahaan pada level SEHAT A dengan perolehan skor sebesar 75,5 point.

Prospek Usaha

Di masa mendatang, kami memandang peluang usaha untuk Perum Jamkrindo juga semakin besar, terutama karena meningkatnya kepercayaan Pemerintah kepada Perum Jamkrindo untuk melaksanakan program penjaminan bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini ditandai dengan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,120 triliun di tahun 2013. Dengan penambahan tersebut, maka aset Perum Jamkrindo meningkat menjadi sebesar Rp8,293 triliun dengan ekuitas sebesar Rp6,550 triliun.

Penambahan kapasitas tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dengan sebaik-baiknya, untuk mendorong peningkatan volume kredit yang dijamin, yang berarti perusahaan berguna untuk sebesar-besarnya pengembangan UMKMK (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi). Namun perlu disadari bahwa pertumbuhan jumlah kredit tersebut

Assessment of Company Performance

In 2012, Perum Jamkrindo succeeded in recording the net profit of Rp517.67 billion which is a 3.08% increase from the Rp509,52 billion net profit in 2012. The increase of Operational Revenue from guarantee fee and Investment Revenue has a significant impact on the increase of Company Profit. Due to this satisfactory performance, we would like to convey our appreciation towards the Directors, employees and all parties which took part in the achievement of operational and financial performance of Perum Jamkrindo's in 2013.

Perum Jamkrindo's financial performance is very good, reflected in its score for sound performance, which is in the category of SOUND or A, receiving 75.5 points.

Business Outlook

In the future, we view that there is a large business prospect for Perum Jamkrindo, particularly due to the increase of the Government trust to Perum Jamkrindo regarding the implementation of guarantee program for KUR Loan. This is marked by the addition of Rp1,120 trillion for Additional Government shares in 2012. With this addition, Perum Jamkrindo's asset increased and become Rp8,293 trillion with the equity of Rp6,550 trillion.

The additional capacity is at the disposal of the Company's best interest in order to enforce an increase of the guarantee credit volume which results in its optimum usage for the development of UMKMK (Small, Medium, Enterprises). However, we need to convey that the credit guarantee growth will also result in the increase of credit risks and claims that Perum Jamkrindo

juga nantinya akan berdampak pada meningkatnya risiko kredit dan klaim yang harus dihadapi oleh Perum Jamkrindo. Sehubungan dengan hal ini, maka kami menyambut baik upaya Direksi untuk menerapkan Manajemen Risiko di seluruh lini perusahaan, yang tentunya pengawasan dari kami juga mengimbangi dengan mulai berperannya Komite Investasi dan Risiko Usaha selama tahun 2013.

Tantangan Perum Jamkrindo ke depan yang semakin besar, perlu diimbangi dengan penerapan praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Untuk itu kami mengingatkan Direksi untuk terus menerus melakukan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja sesuai kebutuhan dengan berbasis risiko, meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas dan kesejahteraan SDM.

Komite-Komite di bawah Dewan Pengawas

Dewan Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi kinerja Perum Jamkrindo agar tetap dalam jalur yang positif oleh sebab itu dibentuk komite-komite yang membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Audit dan Komite Investasi dan Risiko Usaha.

Dewan Pengawas memberikan apresiasi kepada seluruh komite dibawah Dewan Pengawas, antara lain: Komite Audit dan Komite Investasi serta Komite Risiko Usaha, yang kami pandang telah menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dan penuh dedikasi.

Perubahan Komposisi

Kami menyambut gembira atas bergabungnya Ony Suprihartono dan Subandriyo sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo pada 31 Desember 2013, dengan segenap harapan untuk bersama-sama meningkatkan kinerja Perum Jamkrindo di masa mendatang.

should be faced by. Hence, we welcome the good intention of the Directors to establish an enterprise Risk Management in all lines of the company, and in addition of our supervision will balance this effort by the commencement of Investment and Business Risk Committee along the year of 2013.

The increasing future company challenges need also to be balanced with the implementation of Good Corporate Governance. Therefore, we gently remind all the Directors to continue to improve the system and work procedure in accordance to the risk based needs, as well as to increase the service quality and the welfare of our human capital.

Committee under Board of Supervisors

Board of Supervisors is responsible for monitoring and maintaining the good performance of Perum Jamkrindo. Thus, committees under the Board of Supervisors are essential to help the Board to perform the duties. Board of Supervisors is assisted by Audit Committee and the Investment Committee and Business Risk.

Board of Supervisors gives appreciation to all committees under them, among others: Audit Committee and Investment Committee and Business Risk Committee which we see have fulfilled their duties and responsibilities effectively with full of dedication.

Change in Composition

We gladly welcome Ony Suprihartono and Subandriyo as member of Board of Supervisors of Perum Jamkrindo in December 31, 2013. With our purest hope, we look forward to repeating the improvement of Perum Jamkrindo's performance in the future.

Jakarta, Maret 2014 / March, 2014



Choirul Djahari

Ketua Dewan Pengawas

Chairman of Board of Supervisors



2

3

1

4

5

Dewan Pengawas

Board of Supervisors

1 Choirul Djamhari
Ketua / *Chairman*

2 Subandriyo
Anggota / *Member*

3 Nasaruddin Umar
Anggota / *Member*

4 Ony Suprihartono
Anggota / *Member*

5 Dahlan Siamat
Anggota / *Member*

Laporan Direksi

Board of Directors Report

Dengan tingkat stabilitas makro ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, Perum Jamkrindo sukses menumbuhkan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), dan meningkatnya permintaan kredit. Hal ini menjadi modal penting bagi Perum Jamkrindo untuk tumbuh secara berkelanjutan.

With the Indonesia's macro economy remained at a stable level, Perum Jamkrindo successfully support the growth of the small medium Enterprise number and increase the demand for SMEs credit this becomes important point for Perum Jamkrindo to sustainable its growing in the years ahead.

Diding S. Anwar

Direktur Utama
President Director

Dear Shareholders

Kinerja Perusahaan

Pada akhir tahun 2013, kinerja Perum Jamkrindo menunjukan hasil yang memuaskan. Total aset Perum Jamkrindo tercatat sebesar Rp8,29 triliun, dan nilai ini meningkat sebesar 24,47% dibandingkan dengan aset tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp6,66 triliun.

Ekuitas Perum Jamkrindo pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 29,70% dari Rp5,04 triliun pada 2012 menjadi Rp6,55 triliun pada 2013. Jumlah ekuitas ini terdiri dari Penyertaan Modal Negara (PMN), cadangan-cadangan dan laba tahun berjalan.

Tingkat rasio solvabilitas Perum Jamkrindo tercatat sebesar 26,61% dan tingkat rasio likuiditas sebesar 1010,06%.

Salah satu kendala yang melekat pada sebagian besar Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Indonesia adalah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses kepada sumber pembiayaan (perbankan) karena keterbatasan agunan. Dengan masih banyaknya UMKMK yang belum memiliki akses kepada pembiayaan, tantangan Perum Jamkrindo ke depan juga semakin berat. Hal ini karena selain keinginan pemerintah agar Perum Jamkrindo selain harus meningkatkan program Penjaminan KUR, juga tetap meningkatnya bisnis penjaminan kredit eksisting non KUR.

Prospek Usaha

Dengan tingkat stabilitas makro ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, hal tersebut akan mendorong pertumbuhan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), dan meningkatnya permintaan kredit, yang selanjutnya akan memberikan peluang bagi Perum Jamkrindo untuk tumbuh secara berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Company Performance

At the end of 2013, the performance of Perum Jamkrindo showed satisfactory results. The total asset of Perum Jamkrindo was recorded as Rp8,29 trillion and this value was a 24.47% increase of the 2012 asset which was Rp6,66 trillion.

Perum Jamkrindo's equity had a 29,70% increase in 2013 which was from Rp5,04 trillion in 2011 and increased up to Rp6,55 trillion in 2013. This equity value consists of additional goverment shares, reserves and the current year profit.

Perum Jamkrindo's solvency ratio level was 26,61% and liquidity ratio level showed 1010,06%.

One of the hindrances found in most of the SMEs in Indonesia is their weak capital structure and lack of access to funding sources (banking) which is caused by the limits to collateral. With many UMKMK not having access to financing facilities, the challenge exposed to Perum Jamkrindo in the future is getting harder. This is because the Government expects Perum Jamkrindo to improve its KUR Guarantee program and the non-KUR existing guarantee business.

Business Prospect

With the Indonesia's macro economy remained at a stable level, the growth of number in Small Medium Enterprise and Cooperation (SMEs) will be enforced. With the growth of Indonesia's economy and number of SMEs, as well as the availability of Credit Guarantee facility, credit requests will increase and bring an opportunity for Perum Jamkrindo to continuously grow in the future.

Pada tahun 2013, Perum Jamkrindo memperoleh penilaian sangat baik sebagai perusahaan BUMN di antara 117 BUMN yang dilakukan penilaian.

Tata Kelola Perusahaan

Kami mengakui pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik secara tegas dan konsisten sebagai sebuah kebutuhan dalam menjalankan bisnis, adanya keadilan bagi semua pemangku kepentingan dan tercapainya integritas organisasi. Selama tahun 2013, kami terus mengusahakan inisiatif di semua tingkatan untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan Tata Kelola Perusahaan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perum Jamkrindo telah menjaga komitmennya terhadap peningkatan Tata Kelola Perusahaan, transparansi keuangan dan keadilan dalam mengungkapkan informasi keuangan bagi keuntungan semua pengguna.

Perubahan Komposisi

Pada tahun 2013, Perum Jamkrindo tidak melakukan perubahan atas komposisi Direksi.

Penutup

Pada kesempatan ini kami atas nama Direksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra kerja yang telah memberikan kepercayaan kepada Perum Jamkrindo dan terus menjalin kerjasama yang baik.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pengawas, karyawan Perum Jamkrindo di seluruh Indonesia dan seluruh *stakeholders* lainnya yang selama ini terus memberikan dukungan dan masukan-masukan positif bagi pelaksanaan kegiatan perusahaan.

In 2013, Perum Jamkrindo acquired a very well evaluation as an SOE in the Infobank magazine among other 117 SOE companies.

Good Corporate Governance

We acknowledge the importance of implementing a firm and consistent Good Corporate Governance as a crucial factor in attaining fairness for all stakeholders, as well as to attain organizational integrity. Along 2013, we continue to initiate efforts to guarantee that compliance towards our Corporate Governance is conducted in all levels which are all in accordance to the existing rules and regulations. Perum Jamkrindo has safeguarded the commitment in improving Good Corporate Governance, financial transparency and fairness in exposing financial information for the benefit of all users.

Changes in the Composition

In 2013, Perum Jamkrindo not make changes to the composition of the Board of Directors.

Closing Statement

With this opportunity, on behalf of the Board of Directors, we convey our gratitude to all our partners who have given their trust in Perum Jamkrindo and to continue our good cooperation.

We also would like to thank our Board of Supervisors and all other stakeholders who have continuously supported and deliver their positive inputs for the operation of our company activities.

Jakarta, Maret 2014 / March, 2014



Diding S. Anwar
Direktur Utama
President Director



Laporan Direksi

Board of Directors Report

- 1 Diding S. Anwar**
Direktur Utama / *President Director*
- 2 Nanang Waskito**
Direktur SDM dan Umum / *Director of Human Resources and General Affairs*
- 3 Herry Sidharta**
Direktur Operasi / *Director of Operations*
- 4 Bakti Prasetyo**
Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi / *Director of Risk Management and IT*
- 5 I. Rusdonobanu**
Direktur Keuangan dan Investasi / *Director of Finance and Investment*

Surat Pernyataan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2013 Perum Jamkrindo

Statement of Members of Board of Supervisors and Board of Directors on the Responsibility for the Annual Report 2013 of Perum Jamkrindo

32

PERUM JAMKRINDO • Laporan Tahunan 2013 Annual Report

Dewan Pengawas dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perum Jamkrindo tahun 2013 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perum Jamkrindo.

Board of Supervisors and Board of Directors state that all information in the Annual Report of Perum Jamkrindo for the year 2013 are presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the annual report of Perum Jamkrindo.

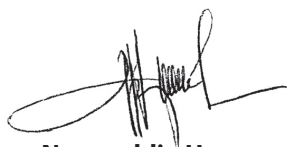
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Dewan Pengawas Board of Supervisors



Choirul Djahhari
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Board of Supervisors



Nasaruddin Umar
Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisors



Ony Suprihartono
Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisors



Subandriyo
Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisors



Dahlan Siamat
Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisors

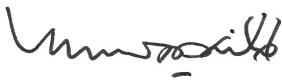
Direksi

Board of Directors



Diding S. Anwar

Direktur Utama
President Director



Nanang Waskito

Direktur SDM dan Umum
Director of Human Resources and General Affairs



Herry Sidharta

Direktur Operasi
Director of Operations



Bakti Prasetyo

Direktur Manajemen Risiko dan TI
Director of Risk Management and IT



I. Rusdonobanu

Direktur Keuangan dan Investasi
Director of Finance and Investment

Batik Yogya

Batik Keraton Yogyakarta merupakan warisan dari pola-pola batik zaman Sultan Agung Hanyakrakusuma, kerajaan Mataram Kotagede. Ketika Mataram mengalami perpecahan tahun 1755 menjadi Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat dan Surakarta Hadiningrat, Yogyakarta mendapat warisan budaya Mataram. Sedangkan Surakarta akan membuat pola-pola budaya baru.

Oleh karena itu seluruh busana keraton Mataram diboyong dari Kasunanan Surakarta ke Kasultanan Yogyakarta atas permintaan Sultan Hamengku Buwana ke I. Sedangkan Sunan Paku Buwana III sepakat akan membuat pola batik dan busana baru. Batik Yogyakarta mempunyai warna sogi coklat kemerahan atau coklat tua, warna putih bersih dan biru tua.

Batik of Yogyakarta Palace is a batik patterns inherited from the times of Sultan Agung Hanyakrakusuma of Mataram Kingdom. When they experienced a schism in 1755 into the Sultanate of Yogyakarta Hadiningrat Sultanate of Yogyakarta and Surakarta Hadiningrat, Yogyakarta got a cultural legacy of Mataram. Meanwhile, Surakarta would create new cultural pattern.

Therefore the whole Mataram Palace clothing were carried off from of Surakarta to Yogyakarta Sultanate at the request of Sultan Hamengku Buwono I. Whereas Sunan Paku Buwana III agreed will make new clothes and batik pattern. Batik Yogyakarta has a reddish-brown color of the sogi or dark brown colour, pure white and dark blue.



Pengantar Direksi

Foreword from Board of Directors

Pengantar Direktur Operasi

Foreword of Director of Operations



Herry Sidharta
Direktur Operasi
Director of Operations

Perum Jamkrindo merupakan pelopor perusahaan penjaminan kredit di Indonesia yang memiliki peluang usaha yang masih luas khususnya di bidang UMKMK. Perhatian terhadap kondisi UMKMK di Indonesia belum maksimal karena belum seluruhnya dapat mengakses kredit.

Perum Jamkrindo is the pioneer in the credit guarantee business in Indonesia with an extensive business opportunity, primarily in UMKMK. The attention to UMKMK business in Indonesia has not maximally given as not all UMKMK have access to the credit.

Pencapaian kinerja Perum Jamkrindo pada akhir tahun 2013 yang sangat bagus merupakan bukti dedikasi yang luar biasa yang dipersembahkan oleh Perum Jamkrindo, dengan dukungan penuh dari seluruh *stakeholders* kepada Bangsa Indonesia. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami bersyukur kepada Allah SWT, serta menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh *stakeholders*.

The performance achievement of Perum Jamkrindo at the end of 2013 which was an extraordinary is a reflection of its extraordinary dedication performed by Perum Jamkrindo with all supports from all its stakeholders to Indonesia. With all humility, we express our gratitude to Allah SWT, and express our immeasurable gratitude to all stakeholders.

Sebagai pelopor Perusahaan Penjaminan Kredit di Indonesia, Perum Jamkrindo terus menunjukkan eksistensinya dengan memberikan kinerja terbaiknya untuk Negeri tercinta Indonesia.

As the pioneer in the credit guarantee business, Perum Jamkrindo keeps striving to exist by performing our best for our beloved country, Indonesia

Sebagai salah satu BUMN yang mengemban misi untuk meningkatkan pemberdayaan UMKMK, peran Perum Jamkrindo semakin penting dalam menjembatani kepentingan UMKMK dan lembaga keuangan penyalur kredit/pembiayaan. Potensi perluasan pasar penjaminan pada sektor produktif yang digarap UMKMK sampai dengan akhir tahun 2013 masih terbuka luas.

As one of the SOEs with its mission to empower UMKMK, the role of Perum Jamkrindo is becoming more strategic in bridging the interest of UMKMK and the Credit Providers. The potential market expansion of the guarantee business for productive sectors managed by UMKMK until the end of 2013 is still widely open.

Untuk mengoptimalkan pasar yang masih luas tersebut, Perum Jamkrindo terus melakukan terobosan-terobosan baru dalam kegiatan pemasaran, pengembangan produk baik dengan mitra kerja eksisting maupun baru, pemutakhiran TI penunjang operasi, peningkatan kualitas layanan dan SDM. Salah satu pengembangan produk yang diluncurkan pada tahun lalu adalah produk *Surety Bond* Perum Jamkrindo, yang diharapkan ke depan mampu memperkuat bisnis penjaminan Perum Jamkrindo.

In order to grab the market optimally, Perum Jamkrindo continues to provide breakthrough in marketing, product development both with existing and new business partners, IT advancement to support the operation, improving the quality of service and Human resources. One of the product developments launched in last year was *Surety Bond*. Perum Jamkrindo hope that it can strengthen the business of guarantee of Perum Jamkrindo.

Terobosan-terobosan tersebut dilakukan untuk memperkuat strategi perusahaan dalam mempertahankan *Competitive Advantages* Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit terbesar di Indonesia.

This breakthrough is done to strenghten the company in retaining Competitive Advantages of Perum Jamkrindo as the biggest credit guarantee company in Indonesia

Pengantar Direktur Keuangan dan Investasi

Foreword of Director of Finance and Investment



I. Rusdonobanu

Direktur Keuangan dan Investasi

Director of Finance and Investment

Perum Jamkrindo selama periode tahun 2013 menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik, ditandai dengan peningkatan pada beberapa indikator keuangan perusahaan seperti pendapatan usaha, total aset, ekuitas dan laba tahun berjalan dan jumlah laba komprehensif tahun berjalan.

Perum Jamkrindo has shown a satisfactory performance for 2013, evidenced in various improvement in a number of financial parameters such as operating revenue, total assets, equity, current year profit, and total current year comprehensive income.

Kinerja Perum Jamkrindo pada tahun 2013 menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) perusahaan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp1.600,96 miliar mengalami kenaikan sebesar 14,43% dari tahun 2012 sebesar Rp1.399,06 miliar. Laba tahun berjalan Perum Jamkrindo periode tahun 2013 mencapai Rp525,209 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp15,69 miliar atau sebesar 3,08% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp509,517 miliar.

Selama periode tahun 2013, total ekuitas Perum Jamkrindo mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu tumbuh 46,93%, dari tahun 2011 sebesar Rp3,43 triliun, menjadi sebesar Rp5,04 triliun pada akhir tahun 2012. Disamping penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,120 triliun pada tahun 2013 sehingga Penyertaan Modal Negara menjadi sebesar Rp5,239 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 4,19% dibandingkan PMN tahun 2012 sebesar Rp1,169 triliun.

Posisi rasio kredit bermasalah Perum Jamkrindo terletak pada angka yang aman dibawah rasio NPL nasional. Kondisi kesehatan yang sangat baik di tahun 2013 membuat Perum Jamkrindo optimis untuk menghadapi tantangan yang akan datang dalam rangka membantu pemerintah mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui kegiatan usahanya melakukan penjaminan UMKMK.

The performance of Perum Jamkrindo in 2013 showed excellent growth.

The Company's revenue from return on guarantee fee in 2012 is Rp1,600.96 billion, increased significantly up to 14.43% compared to the year 2012 which was Rp1,399.06 billion. The current year earning of Perum Jamkrindo is Rp525.209 billion, which means that there is a increase of Rp15.69 billion or equal to 3.08% compared to year 2012 which was Rp509.517 billion.

During the year of 2013, total asset of Perum Jamkrindo increased 46.93% from the year 2011 which was Rp3.43 trillion to Rp5.04 trillion at the end of 2012. In addition to an increase in the additional Goverment shares which is Rp1.120 trillion in 2013, so the total of investment of State's capital is Rp5.239 trilliun, which means that there is an increase of 4.19% compared to 2012 which was only Rp1.169 trillion.

The position of Non Performing Loan Ratio of Perum Jamkrindo stays at safe level under the ratio of national NPL. The great soundness of the Company in 2013 makes Perum Jamkrindo optimistic to cope with the future challenges in order to support the government to to foster a welfare society through its UMKMK's credit guarantee business the people economy.

Pengantar Direktur SDM dan Umum

Foreword of Director of Human Resources and General Affair



Nanang Waskito
Direktur SDM dan Umum
Director of Human Resources and General Affairs

Salah satu faktor penting dalam kegiatan usaha Perum Jamkrindo adalah Sumber Daya Manusia yang kompeten, selain sistem TI yang mutakhir. Mengingat *culture* masyarakat Indonesia yang belum familiar dengan sistem TI, dan untuk menjangkau pelayanan di seluruh wilayah di Indonesia maka Perum Jamkrindo terus melakukan pendekatan dengan menggunakan SDM.

One of the important factors in business activities of Perum Jamkrindo is competent human resources, in addition to advanced IT System and to cover the areas across country. As most of Indonesian people are not familiar with IT system, Perum Jamkrindo continues to develop an approach by using Human Resources.

Pada tahun 2013, Direktorat SDM dan Umum dapat melaksanakan tugasnya dalam mendukung pencapaian target perusahaan dengan cukup baik. Hal ini ditandai dengan tercapainya penilaian berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) dalam aspek Pertumbuhan dan Pembelajaran melalui parameter peningkatan kompetensi SDM dari sisi jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat maupun jumlah dan jenis pelatihan/diklat, selain Aspek Produktivitas Pegawai.

Pangsa pasar jasa penjaminan kredit di Indonesia yang masih sangat luas membuat Perum Jamkrindo menyiapkan kebijakan untuk mempersiapkan SDM yang kompeten dengan melakukan pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan dan berjenjang. Untuk memenuhi kebutuhan SDM, Perum Jamkrindo melakukan rekrutmen *fresh graduate* di seluruh wilayah kerja sementara itu mengingat antusiasme masyarakat yang tertarik bergabung dengan Perum Jamkrindo berasal dari seluruh tanah air dan kesiapan perusahaan pada saat rekrutmen dilakukan di kantor pusat.

Mempertimbangkan tuntutan tugas dan tanggung jawab perusahaan yang terus meningkat seiring peningkatan skala dan volume bisnis Perusahaan, maka seluruh karyawan dituntut dapat bekerja secara intensif dan optimal sesuai kebutuhan Perusahaan. Untuk mencapai kinerja yang diharapkan, maka Perusahaan selalu berupaya menyempurnakan sistem penggajian karyawan dengan memperhatikan masa kerja, beban kerja, tanggung jawab serta risiko tugas maupun jabatan masing-masing karyawan.

Dengan upaya yang maksimal dari seluruh SDM yang bekerja di Perum Jamkrindo, maka kinerja perusahaan menjadi lebih baik, dan otomatis berdampak pada pelayanan yang memuaskan bagi nasabah dan mitra kerja. Hal ini selanjutnya akan memberikan keuntungan bukan hanya bagi Perum Jamkrindo tetapi juga bagi masyarakat UMKMK dan mitra kerja perbankan, yang pada gilirannya akan sangat mendukung stabilitas ekonomi.

In 2013, Directorate of Human Resources and General Affairs performed its duties well in supporting the achievement of Company's target. It is reflected on the achievement of assessment on the Key Performance Indicator (KPI) in the aspect of learning and development by using the parameter of Competence Improvement of Human Resources, either from the number of employees attending training/ education or from the number and types of training/ education in addition to the aspect of Employee's Productivity.

The market segment of the credit guarantee service in Indonesia is still widely open. With this condition, Perum Jamkrindo stipulates the policy to prepare its Human Resources to be competent by conducting sustainable and graded education and training. To meet the demand of Human Resources, Perum Jamkrindo recruits fresh graduates within all Company's operation areas. Due to the communities' enthusiasm to work for Perum Jamkrindo, from many areas in Indonesia and the readiness of the tools the recruitment is conducted in the head office.

Because the workload and the responsibility of the Company keeps increasing in line with the escalation of business volume, all employees are required to work intensively and optimally. In order to achieve the target performance, the Company continues to improve the merit system for each employee in accordance with his/ her tenure, workload, responsibility, and position.

With all these exerted efforts from all Human resources of Perum Jamkrindo, the Company's performance is better, and automatically affects the satisfactory service to customers and partners that can benefit not only for Perum Jamkrindo but also for the community of UMKMK and its partners which support the stability of the economic in the long run.

Pengantar Direktur Manajemen Risiko dan TI

Foreword of Director of Risk Management and IT



Bakti Prasetyo

Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi
Director of Risk Management and IT

Pada tahun 2013, Direktorat Manajemen Risiko dan TI dapat melaksanakan tugasnya dalam mendukung pencapaian target perusahaan dengan cukup baik. Hal ini ditandai dengan tercapainya pengembangan sistem manajemen risiko sesuai dengan *roadmap* yang telah ditetapkan dan beberapa indikator risiko yang secara umum dapat digolongkan dalam tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*).

In 2013, Directorate of Risk Management and IT carried out their duties quite well in achieving the target of the Company. It's reflected on the achievement of Management Risk System Development in accordance with the determined roadmap and some risk indicators that are generally categorized into acceptable risk level

Perum Jamkrindo memiliki usaha di bidang penjaminan kredit yang memiliki potensi risiko. Risiko penjaminan kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan nasabah perbankan dalam memenuhi kewajibannya. Untuk mengelola risiko penjaminan tersebut maka diperlukan sistem manajemen risiko penjaminan kredit yang handal dan terintegrasi. Sistem manajemen risiko penjaminan kredit Perum Jamkrindo adalah sistem yang meliputi rangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan penjaminan kredit.

Pada tahun 2013, Direktorat Manajemen Risiko dan TI dapat melaksanakan tugasnya dalam mendukung pencapaian target perusahaan dengan cukup baik. Hal ini ditandai dengan tercapainya pengembangan sistem manajemen risiko sesuai dengan *roadmap* yang telah ditetapkan, dan beberapa indikator risiko yang secara umum dapat digolongkan dalam tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*).

Perum Jamkrindo is engaged in the credit guarantee business that poses high risks. The risk of credit guarantee might arise from the failure of the banking customers in fulfilling its obligation. To manage the risk of credit guarantee, a risk management system for the credit guarantee is required. The risk management system for the credit guarantee of Perum Jamkrindo is a system that consists of a series of procedures that are used to identify, measure, monitor, and control the risks that occur as the result of the credit guarantee activities.

In 2013, Directorate of Risk Management and IT carried out their duties quite well in achieving the target of the Company. It's reflected on the achievement of Management Risk System Development in accordance with the determined roadmap and some risk indicators that are generally categorized into acceptable risk level.

Di bidang teknologi dalam rangka tata kelola Teknologi Informasi yang baik (*IT Governance*) telah dilakukan *assessment* TI berikut rekomendasi pengembangannya. Untuk meningkatkan layanan SLA (*Service Level Agreement*) kepada mitra kerja juga telah dan akan terus dikembangkan melalui Penjaminan Online.

Perum Jamkrindo berkomitmen dalam pengembangan teknologi informasi yang difokuskan pada penyampaian data informasi yang akurat, tepat waktu, serta selaras dengan pertumbuhan usaha dan kebutuhan perusahaan.

Perum Jamkrindo menerapkan Aplikasi Operasional ICPR yang berbasis web dan *multiuser* agar dapat diakses melalui jaringan internet/intranet oleh banyak pengguna secara bersamaan. Aplikasi Operasional ICPR digunakan untuk semua produk penjaminan perusahaan dan menangani hampir semua tahapan proses penjaminan, dari mulai permohonan penjaminan hingga ke pengelolaan subrogasi.

Dalam mendukung kinerja perusahaan yang semakin tinggi maka peranan teknologi informasi tidak dapat diabaikan begitu saja, untuk itu Perum Jamkrindo selalu mencari inovasi-inovasi baru dalam memperkuat berbagai lini bisnis yang ada, salah satunya dengan memanfaatkan sistem otomatisasi yang berbasis teknologi. Pengembangan *e-Guarantee* ini meliputi:

- a) *Cyber Guarantee*
- b) Sistem Informasi Debitur Kredit Usaha Rakyat
- c) Sistem Pelaporan Penjaminan Online
- d) Sistem Penjaminan Bersama KUR

Perum Jamkrindo sebagai salah satu BUMN terkemuka di Indonesia, telah mengembangkan sistem informasi manajemen menggunakan teknologi informasi yang berorientasi pada kecepatan dan kemudahan layanan bagi semua *stakeholders*. Teknologi informasi terkini telah diterapkan guna memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh mitra kerja perusahaan dan terwujudnya efisiensi dan efektivitas kerja.

Secara umum penerapan teknologi informasi di Perum Jamkrindo akan dikembangkan dengan tetap memperhatikan beberapa aspek tujuan utama seperti memberikan kemudahan dalam penyimpanan informasi, mengurangi biaya dan menghemat waktu, meningkatkan pengendalian, mendorong pertumbuhan, meningkatkan produktivitas serta profitabilitas perusahaan.

In technology, in order to have of good IT Governance, an IT assessment has been conducted along with its recommended development. To improve SLA (*Service Level Agreement*) for its partners, Perum Jamkrindo has developed and will keep developing it through on line-guarantee system.

Perum jamkrindo comitted to develope IT with focus to deliver the accurate information on the right time and suit to the need of the company's business.

Perum Jamkrindo applies the ICPR Operational Application which is based on web and multiuser so as to be accessed through the internet/intranet network by many users in the same time. The ICPR Operational Application can be utilized for all of the Company's credit guarantee products where it can manage almost all stages of the guarantee process, ranging from the application for the credit guarantee to the subrogation management.

In supporting the Company's improving performance, the role of information technology cannot be ignored. Therefore, Perum Jamkrindo always searches and creates innovations to strengthen the existing business lines, one of which is through the technology-based automation system. The improvement of *e-Guarantee* consists of:

- a) *Cyber Guarantee*
- b) Information System for KUR Program
- c) Online Guarantee Reporting System
- d) KUR coguarantee system

Perum Jamkrindo as a well-known SOE in Indonesia has developed a management information system using the information technology which is oriented in the speed and ease access to all services to all stakeholders. The latest information technology has been applied in order to provide an excellent service to all of the Company's partners and to achieve a work efficiency and effectivity.

Broadly speaking, the implementation of information technology in Perum Jamkrindo will be developed by taking account of several main purposes, such as providing easy access with information storage, decreasing the cost and saving time, increasing the control, fostering the growth, increasing the Company's productivity and profitability.

Batik Bali

Batik Bali berkembang pada tahun 1970, saat itu dipelopori oleh Pande Ketut Krisna. Ia merupakan penduduk dari Banjar Tegeha, Desa Batubulan Gianyar Bali. Saat itu, dia menggunakan cara tenun-cap menggunakan alat tenun yang bukan mesin. Namun, lama kelamaan dengan adanya kemajuan teknologi, penggunaan alat manual pun digantikan dengan teknologi yang lebih modern.

Disamping itu juga, umumnya masyarakat bali menggunakan batik untuk kegiatan sakral dan upacara keagamaan. Mereka menggunakannya untuk udeng (ikat kepala) ataupun pakaian. Selain digunakan untuk upacara adat, saat ini, batik bali telah menjadi salah satu souvenir khas wisata yang ada di Bali.

Batik Bali grew in the 1970s, when it was pioneered by Pande Ketut Krisna. He was a resident of Banjar Tegeha, Batubulan village Gianyar Bali. By the time, he used cap-loom by non-machines loom. However, gradually through the advancement of technology, the use of manual tools was replaced with more modern technology.

Besides that, people generally use batik bali for sacred activity and religious ceremonies. They use it to udeng (headband) or clothing. Besides being used for traditional ceremonies, at this time, bali batik has become one of the tourist souvenirs in Bali.



Profil Perusahaan

Company Profile

Profil Perusahaan

Company Profile

Identitas Perusahaan

Corporate Identity

Nama Perusahaan <i>Company Name</i>	Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)
Tanggal Pendirian <i>Establishment</i>	1 Juli 1970 <i>July 1, 1970</i>
Alamat Lengkap Perusahaan <i>Office Address</i>	Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B – 9 Kav. 6, Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610, Indonesia Telp. (62-21)-6540335, Fax. (62-21)-6540344,6540348 E-mail: info@jamkrindo.com; www.jamkrindo.com
Kantor Cabang <i>Branch Offices</i>	Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Pekanbaru, Denpasar, Pontianak, Palembang, Samarinda, Medan, Kupang, Palangkaraya, Mataram, Banjarmasin, Manado, Jayapura, dan Jambi
Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	Penjaminan Kredit UMKMK <i>SME Credit Guarantee</i>
Status Perusahaan <i>Company Status</i>	Perusahaan Umum (Perum) <i>Public Company</i>
Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Pemerintah Indonesia (BUMN) 100% <i>Indonesian Government (SOE) 100%</i>
Penyertaan Modal Negara <i>State Capital</i>	Rp5.239.000.000.000
Dasar Hukum <i>Legal Basis</i>	- UU Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang BUMN - PP Nomor: 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara - PP Nomor: 41 Tahun 2008 Tentang Perum Jaminan Kredit Indonesia - Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan • PMK Nomor: 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit - PMK Nomor: 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas PMK Nomor: 222/PMK.010/2008 - Kep Men no. 77 tentang penetapan / ijin sebagai perusahaan penjaminan - Act No. 19/2003 on State Owned Enterprises (SOEs) - Government Regulation No. 45/2005 on establishment, management, supervision and dissolution of SOE - Government Regulation No. 41/2005 on Perum JAMKRINDO - Presidential decree No. 2/2008 on Guarantee Agency - Ministry of Finance Regulation No. 222/PMK.010/2008 on Credit guarantee company and Credit re-guarantee company - Ministry of Finance Regulation No. 99/PMK.010/2011 about the Amendment of PMK 222/PMK.010/2008 - The Decree no. 77 regarding the determination / permits as insurance companies



Selayang Pandang Perum Jamkrindo

Perum Jamkrindo At a Glance

Pada tahun 1970, Pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dilandasi oleh kondisi riil perkembangan koperasi yang masih tertinggal dibandingkan dengan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Dalam perkembangannya LJKK kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember 1981 yang disempurnakan dengan PP No. 27 tanggal 31 Mei 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi.

Keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan penjaminan kredit, membuat Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK menjadi tidak hanya terbatas pada koperasi, tetapi juga mencakup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal tersebut dikuatkan dengan terbitnya legalitas Pemerintah, yakni PP No. 95 tanggal 7 November Tahun 2000 sekaligus mengubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

In 1970, the Government established the Cooperative Credit Guarantee Agency (LJKK) as a response to a sagging cooperative development if compared to the state owned enterprises and private companies. As the years passed, LJKK changed into Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) by virtue of Government Regulation Number 51 dated December 23, 1981 which was amended by Government Regulation No. 27 dated May 31, 1985 on the Establishment of Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi.

The success of function and duty of Perum PKK implementation in developing cooperative through credit guarantee activity spurred the Government on expanding the outreach of Perum PKK to not only limited to cooperative matters, but also Micro, Small and Medium Enterprises. This is reinforced by the issuance of legal regulation, namely Government Regulation No. 95 dated November 7 Year 2000, for which Perum PKK changed into Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

Perum Jamkrindo merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus usahanya bergerak dalam penjaminan kredit, baik konvensional maupun syariah. Perum Jamkrindo secara konsisten turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit baik bersifat tunai maupun non tunai yang diberikan Bank atau Badan Usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan memudahkan aksesibilitas, Perum Jamkrindo terus melakukan pengembangan jaringan kerja hingga ke pelosok negeri.

Perum Jamkrindo is a State Owned Enterprise with business focus on credit guarantee, both conventional and sharia. Perum Jamkrindo has consistently implemented and supported the government's policies and programs in national economic development development through credit guarantees, both cash and noncash, given by Bank or Enterprises to Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMEs). In an effort to improve society's economy and ease the accessibility, Perum Jamkrindo always strives to expand working network to all over the country.

Kemudian pada Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha kembali diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Perubahan nama tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK. Pada tahun 2008 juga, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan.

Guna melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Dengan regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti PMK tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit.

Penjaminan Syariah

Cikal bakal penjaminan Perum Jamkrindo untuk bank syariah dimulai pada tahun 1997 dengan ditandatanganinya kerjasama penjaminan kredit dengan Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 2003, mitra kerja Perum Jamkrindo mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan dilakukannya kerjasama dengan bank syariah mandiri. Perum Jamkrindo telah memiliki perjanjian kerjasama penjaminan pembiayaan syariah dengan beberapa perbankan syariah/ lembaga keuangan syariah.

Pada akhir tahun 2006, *outstanding* penjaminan pembiayaan syariah Perum jamkrindo mencapai Rp2,4 triliun yang terdistribusi pada berbagai sektor usaha yang dijalankan oleh Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

In May 2008, through Government Regulation No. 41 dated May 19, 2008m Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha changed into Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). The change was related to some changes in the company's business where the company only focuses on credit guarantee business for SME's instead of provide direct credit to SMEs through profit and loss sharing. Also in 2008, the Government issued Presidential Regulation No. 2 dated January 26, 2008 on Guarantee Institution.

As an enactment of the Presidential Regulation, the Government, in this case Department of Finance, issued Regulation of MOF (PMK) No.222/PMK.010/2008 dated December 16, 2008 on Credit Guarantee Company and Credit Reguarantee Company. The regulation referred Perum Jamkrindo to have business license as a Credit Guarantee Company. Following up the PMK, the Minister of Finance issued the Ministerial Decree No. KEP-77/KM.10/2009 dated April 22, 2009, declaring that Perum Jamkrindo has a business license as a Credit Guarantee Company.

Sharia Guarantee

Basis of Perum Jamkrindo's guarantee for sharia bank could be traced back 1997 years ago since the signing of credit guarantee contract with Bank Muamalat Indonesia. In 2003, the number of Perum Jamkrindo's working partner significantly increased along with the cooperation with bank syariah mandiri. Perum Jamkrindo has also signed sharia financing guarantee contract with several sharia banks/sharia financial institution.

At the end of 2006, the outstanding loan of sharia financing guarantee of Perum Jamkrindo reached Rp2.4 trillion which was distributed to various business sectors run by Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives.

Sejalan dengan semakin meningkatnya perekonomian yang berbasis syariah dan semakin besarnya ekspansi pembiayaan syariah, Pada bulan September 2006 manajemen memandang perlu untuk membentuk Divisi Penjaminan Syariah berdasarkan surat nomor U-217/DSN-MUI/IX/2006, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang rekomendasi pendirian Divisi Penjaminan Syariah Perum Jamkrindo. Kinerja bisnis Penjaminan Syariah selama kurun 5 (lima) tahun terakhir (2009-2013) menunjukkan positive growth dengan rata-rata pertumbuhan volume pembiayaan yang dijamin sebesar 17,39%.

Ekspansi ke Seluruh Indonesia

Pada tahun 2014, Perum Jamkrindo menargetkan memiliki kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan pelayanan dan memasarkan produk-produk Perusahaan. Pembukaan kantor cabang di seluruh Indonesia merupakan komitmen peningkatan pelayanan Perum Jamkrindo kepada para Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) seperti perbankan baik bank BUMN, bank swasta nasional, maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Peningkatan pelayanan tersebut juga tidak berhenti pada pembukaan kantor cabang, namun Perum Jamkrindo akan mengembangkan cabang tersebut pada tiap kabupaten dan daerah-daerah di Indonesia. Langkah ini dilakukan sejalan dengan tekad Perum Jamkrindo untuk terus meningkatkan kinerja operasional keuangan dan terus aktif memasarkan produk-produk penjaminan melalui kantor-kantor cabang Perusahaan.

Hingga akhir tahun 2013, Perum Jamkrindo melakukan penambahan tiga kantor cabang antara lain di Yogyakarta, Bandar Lampung, dan Jakarta. Dengan demikian, Perum Jamkrindo memiliki total sebanyak 21 kantor cabang.

In line with the increasing of sharia-based economy and a greater expansion of sharia finance, in September 2006 the management deems it is necessary to establish Sharia Guarantee Division under the Decree number U-217/DSN-MUI/IX/2006, the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) on the establishment recommendation of Sharia Guarantee Division of Perum Jamkrindo. The performance of Sharia Guarantee business during the 5 (five) years (2009-2013) showed positive growth with the average growth in the volume of financing guaranteed by 17.39%.

Expansion to All Over Indonesia

In 2014, Perum Jamkrindo targets to have branch office in all over Indonesia to increase service and market the Company's products. The opening of branch offices in Indonesia is a commitment to improve service of Perum Jamkrindo to all stakeholders, such as banking industry both SOE bank, national private bank and Bank Pembangunan Daerah (BPD).

The service improvement does not only cover the opening of branch office. Perum Jamkrindo will develop those branches in every sub-district and areas in Indonesia. This measure should be done in line with Perum Jamkrindo's determination to keep on improving the financial and operational performance and being active in marketing the guarantee products through the Company's branch offices.

As at the end of 2013, Perum Jamkrindo expanded to three branch offices in Yogyakarta, Bandar Lampung and Jakarta. Thus, Perum Jamkrindo currently has 21 branch offices.

Bidang Usaha

Line of Business

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 41 tahun 2008 yang menjadi Anggaran Dasar Perusahaan, dalam pasal 6, 7, dan 8 menyebutkan bahwa Perum Jamkrindo memiliki sifat, maksud, dan tujuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku.
- Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi.

Berdasarkan rujukan yang sama, guna mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud, Perum Jamkrindo menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

- 1) Melakukan penjaminan kredit baik bersifat tunai dan non tunai yang diberikan bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- 2) Melakukan penjaminan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan pola bagi hasil yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- 3) Melakukan penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- 4) Melakukan Penjaminan Syariah atas pembiayaan baik bersifat tunai dan non tunai yang diberikan Bank atau Badan Usaha Syariah kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- 5) Melakukan penjaminan atas transaksi kontrak jasa yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- 6) Melakukan kegiatan usaha lainnya, antara lain penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi, dan jasa manajemen kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Business Activities

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia no 41 year 2008 under the Company's Articles of Association, in article 6, 7 and 8, it is stated that Perum Jamkrindo has characteristics, purposes and objectives as follows:

- Providing service for public benefit and increasing profit based on the applicable good corporate governance principles.
- Purposes and objectives of the Company is to conduct and support the Government's policies and program in national economic development through credit guarantee for Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives.

Based on the above reference, to reach the purpose and objective as implied, Perum Jamkrindo conducted business as follows:

- 1) Providing credit guarantees both for cash and non-cash given by banks or non banks to Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMEs);
- 2) Providing guarantees for lease financing, factoring, consumer finance, and funding patterns given by the financial institution to the MSMEs and Cooperatives;
- 3) Providing guarantees to the purchase of goods by installments made by MSMEs and Cooperatives;
- 4) Providing Sharia Guarantees for financing both cash and non-cash provided by Sharia Bank or Sharia Unit for MSMEs and Cooperatives;
- 5) Providing guarantees for contract services performed by SMEs and Cooperatives;
- 6) Performing other business activities, including providing guarantees for personal loans, advisory and management services to Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives in accordance with the aims and objectives of the Company.

Disamping kegiatan usaha Penjaminan Kredit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011, tanggal 8 Juli 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, sebagai Perusahaan Penjamin.

Perum Jamkrindo mempunyai peluang untuk memperluas kegiatan usaha yang dijalankan dan tidak terbatas pada kegiatan usaha pemberian jasa penjaminan kredit, antara lain:

1. Penjaminan Pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
2. Penjaminan Kredit dan/atau Pinjaman Program Kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
3. Penjaminan Penyaluran Uang Pinjaman dengan Jaminan Gadai dan Fidusia;
4. Penjaminan atas Surat Utang;
5. Penjaminan Transaksi Dagang;
6. Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*surety bond*);
7. Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi);
8. Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
9. Penjaminan *Letter of Credit* (L/C);
10. Penjaminan Kepabeanan;
11. Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjaminan;
12. Penyediaan informasi/database terjamin terkait dengan Kegiatan Usaha Penjaminan;
13. Penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan Menteri.

Produk Usaha Penjaminan

Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit (Terjamin) kepada Penerima Jaminan.

Proses Penjaminan Kredit melibatkan sekurang-kurangnya tiga pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit yang disebut Penerima Jaminan; debitur kredit yang disebut Terjamin, dan Perusahaan Penjamin kredit yang disebut Penjamin.

In addition to Credit Guarantee's business activities as regulated by the Minister of Finance Regulation No. 99/ PMK.010/2011, dated July 8, 2011 on the Amendment of MOF Regulation No. 222/ PMK.010/2008 of Credit Guarantee and Credit Reguarantee Company.

Perum Jamkrindo as a Surety Company has the opportunity to expand its business not limited to credit guarantee services, among others:

1. Providing Guarantee for loans given by the cooperative to its members;
2. Providing Guarantee for loans channelled by State Owned Enterprises (SOEs) to the Program of Partnership and Environmental Development (PKBL);
3. Providing Guarantees with the Loan guaranteed by Liens and Fiduciary;
4. Providing Guarantee for the Bonds;
5. Providing Guarantees for Trade/Commerce Transactions;
6. Providing Guarantees for Procurement of Goods and Services (*surety bond*);
7. Providing Guarantee for Bank Guarantee (Counter Bank Guarantee);
8. Providing Guarantee for Domestic Letter of Credit (SKBDN);
9. Providing Guarantee for Letter of Credit (L/C);
10. Custom Bond;
11. Providing Management Consulting Services related to Business Activity of Guarantee;
12. Provision of Information / Database related to Business Activity of Guarantee;
13. Other business upon the approval of the Minister.

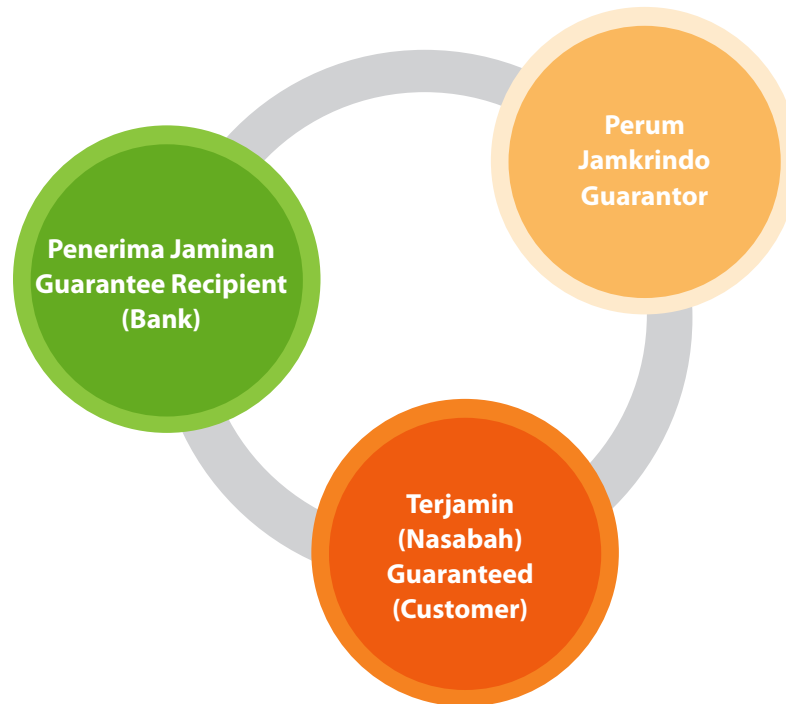
Credit Guarantee Products

Credit Guarantee is the service to provide the guarantee for the fulfillment of financial obligations of the borrower (Guaranteed) to the lender (Guarantee Recipient), enabling customers to obtain loan/credit.

Credit Guarantee involves at least three parties, namely the creditor/lender or Guarantee Recipient; the borrower/debtors called the Guaranteed, and the Guarantor or the company that provides guarantee.

Gambar Proses Penjaminan Kredit, adalah sebagai berikut:

The picture of Credit Guarantee Process is as follows:



Prinsip dasar Penjaminan Kredit adalah pengambilalihan atas risiko kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sampai Penerima Jaminan menyatakan Kredit Terjamin tersebut lunas.

Penjaminan Kredit diperlukan oleh Penerima Jaminan pada saat permohonan kredit dari Terjamin dinyatakan layak oleh Penerima Jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan (*Unbankable*).

Jenis-jenis Produk Usaha Penjaminan terdiri atas:

1) Penjaminan Kredit Umum

Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan Modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin (Proses penjaminan dilakukan secara kasus per kasus).

The basic principle of the Credit Guarantee is the takeover of the credit risks (credit failure) to meet the financial obligations of the borrower/Guaranteed to the guarantee recipients, but does not eliminate the financial obligations of borrower/Guaranteed to the lender/guarantee recipients until the lender/guarantee recipients convey that the loan is settled.

Credit Guarantee is required by the lender at the time the loan application is submitted by the borrower, and the borrower could not fulfill the credit requirement, especially of the fulfillment of the adequacy of collateral (*unbankable*).

The types of Guarantee Products consist of:

1) Commercial Credit Guarantee

Is for loan/financing provided by the bank/ other lender for additional working capital and/or investments in order to increase and develop the business (underwriting process done on a case by case basis).

2) Penjaminan Kredit Mikro

Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, Pengusaha Mikro dan Kecil, untuk keperluan Modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, dengan jumlah plafond Kredit/pembiayaan disesuaikan ketentuan Kredit mikro yang berlaku di Penerima Jaminan (proses penjaminan dilakukan secara Otomatis Bersyarat).

3) Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi

Adalah pemberian jaminan dalam bentuk kontra garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin (*Principle*).

4) Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/ Jasa

Adalah penjaminan atas Kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan Modal Kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan Bowheer (pemilik proyek), yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/ BUMN atau swasta nasional.

5) Penjaminan Distribusi Barang

Adalah penjaminan atas kredit penyaluran barang dari Penerima Jaminan (produsen barang) kepada Terjamin yang mewajibkan Terjamin untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

6) Penjaminan Kredit Multiguna

Adalah penjaminan atas Kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, perorangan (CPNS, PNS, pegawai tetap suatu Perusahaan Swasta/ instansi Pemerintah,) baik yang penyalurannya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga channeling, yang sumber pengembaliannya berasal dari gaji tetap Terjamin dengan cara memotong gaji tetap Terjamin (Proses Penjaminan dilakukan secara Otomatis Bersyarat).

2) Micro Credit Guarantee

Guarantee for micro loan/financing provided by the bank/ lender to the Micro and Small Entrepreneurs, for working capital purposes and/or investments in order to develop the business, with a ceiling amount of credit tailored to the need and feasibility of the micro and small businesses (the guarantee process is done on a conditional automatic basis).

3) Guarantee of Bank Guarantee / Counter Guarantee

The provision of guarantees in the form of counter-guarantee for bank guarantee issued by the Recipient to the Guaranteed.

4) Guarantee for Construction & Procurement of Goods/ Services

Credit Guarantee given by Recipient to the Guaranteed for the additional working capital of construction activities or goods and services procurement based on the contract between the Guaranteed with the Bowheer, in which the sources of the payment are from the state, regional budget or the private sector.

5) Guarantee of Goods Distribution

Guarantee for goods distribution credit from the Guaranteed (good producers) to the Guaranteed that is required to settle the payment within a specified period.

6) Multipurpose Credit Guarantee

Guarantee for the credit/financing given to the Recipient to the individual Guaranteed (future civil servants, civil servants, permanent employees of a private company/ government). The disbursement of the loan is either directly or through channeling institutions, which the source of repayment comes from the fixed salary (the guarantee services given on the conditional automatic basis).

7) Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada UMKMK untuk usaha produktif dan layak namun belum bankable. Penjaminan Perum Jamkrindo untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafond sampai dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) termasuk dalam kategori KUR Mikro sedangkan untuk plafond kredit lebih dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) termasuk dalam kategori KUR Ritel.

8) Surety Bond

Adalah Suatu perjanjian 3 pihak antara Surety (pihak pertama) atas dasar keyakinannya kepada Principal (Pihak Kedua) secara bersama-sama berjanji kepada *Obligee* (Pihak Ketiga) bahwa apabila *Principal* oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan *Obligee*, maka *Surety* akan bertanggung jawab terhadap *Obligee* untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban *Principal* tersebut.

7) KUR Guarantee Program (KUR)

KUR is "Kredit Usaha Rakyat" (Citizen Business Loan) provided by the bank to the Micro, small and medium enterprises including cooperatives (SMEs) that have feasible business but not yet meet the credit requirements (not bankable) in terms of collateral. With the limit of KUR loan up to Rp20,000,000 (twenty million rupiahs), KUR is categorized as Micro KUR. If the limit of credit is more than Rp20,000,000 (twenty million rupiah) to Rp500,000,000 (five hundred million rupiahs), the R is categorized as Retail KUR.

8) Surety Bond

A three-party agreement among Surety (first party) on their trust to the Principal (second party), in which both party accordingly agree to the Obligee (third party) that should the Principal neglect or fail to perform their duty due to any reason as required in the agreement, the Surety is responsible to the Obligee for fulfilling the obligations of the Principal.



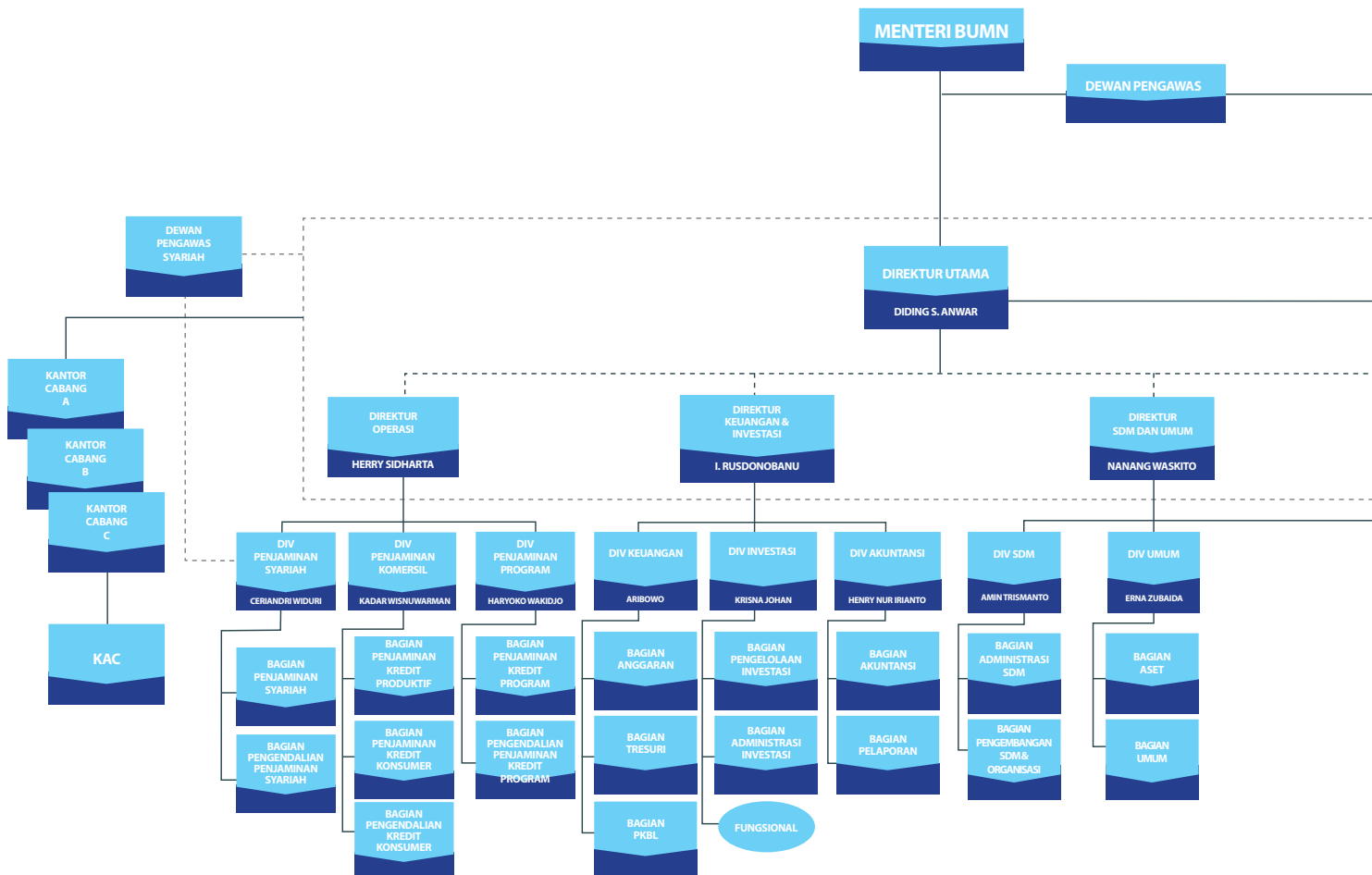
Struktur Organisasi

Organization Structure

Perum Jamkrindo sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara senantiasa patuh dalam mencapai kemajuan bangsa, dalam hal ini penerapan pengelolaan organisasi yang efektif melalui reformasi birokrasi sangat diperlukan. Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan sekali dalam satu periode tertentu dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dalam satu periode dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Perum Jamkrindo as one of the State-owned Enterprises continues to operate in accordance with effective organizational management to contribute to the national development. This is achieved through the reformation of bureaucracy. Reformation of bureaucracy is in the form of operationalization of Bureaucracy Reformation prepared and conducted once in a specified time period and is a detailed plan for the implementation of bureaucracy reformation of one stage to another in one period with clear target per annum. Targets in the first year will be a foundation for the next-year targets, and so on.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT HEAD OFFICE ORGANIZATION STRUCTURE

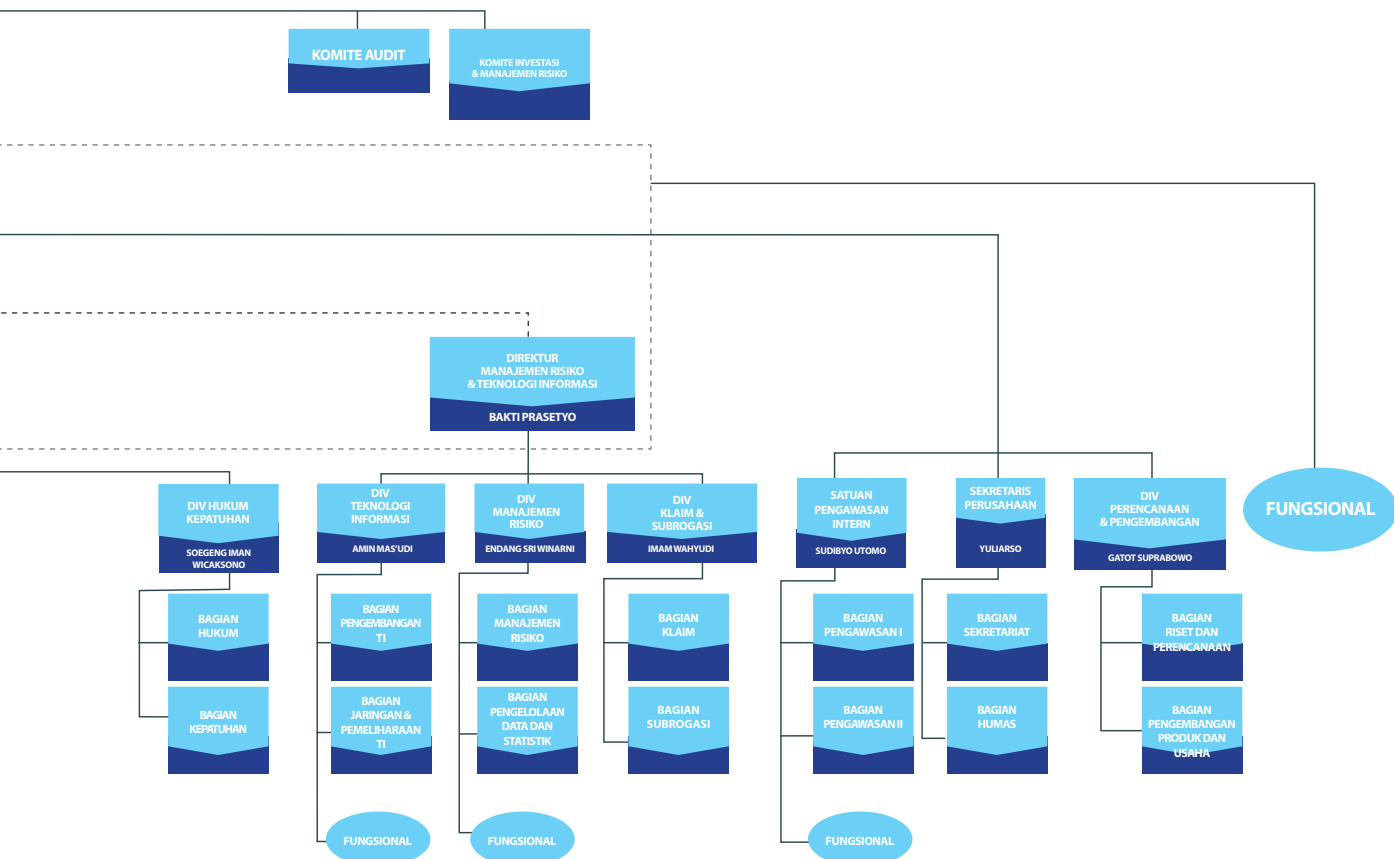


Setiap organisasi selalu menghadapi dinamika perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Untuk menghadapi dinamika perubahan lingkungan tersebut diperlukan tata kelola perusahaan yang efektif dalam meningkatkan dan pengembangan Perum Jamkrindo. Efektifitas pengelolaan perusahaan sangat ditentukan oleh struktur organisasi yang jelas dan berkesinambungan.

Every organization continues to deal with the dynamics of environmental change, both internally and externally. To address these changes, effective good corporate governance is required to enhance the development of Perum Jamkrindo. The effectiveness of the organization is highly determined by the structure and the administration of the organization.

Dalam merespon perubahan-perubahan lingkungan Perusahaan dan pencapaian arah bisnis jangka panjang, maka pada tahun 2013, Perum Jamkrindo telah melakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi Perusahaan.

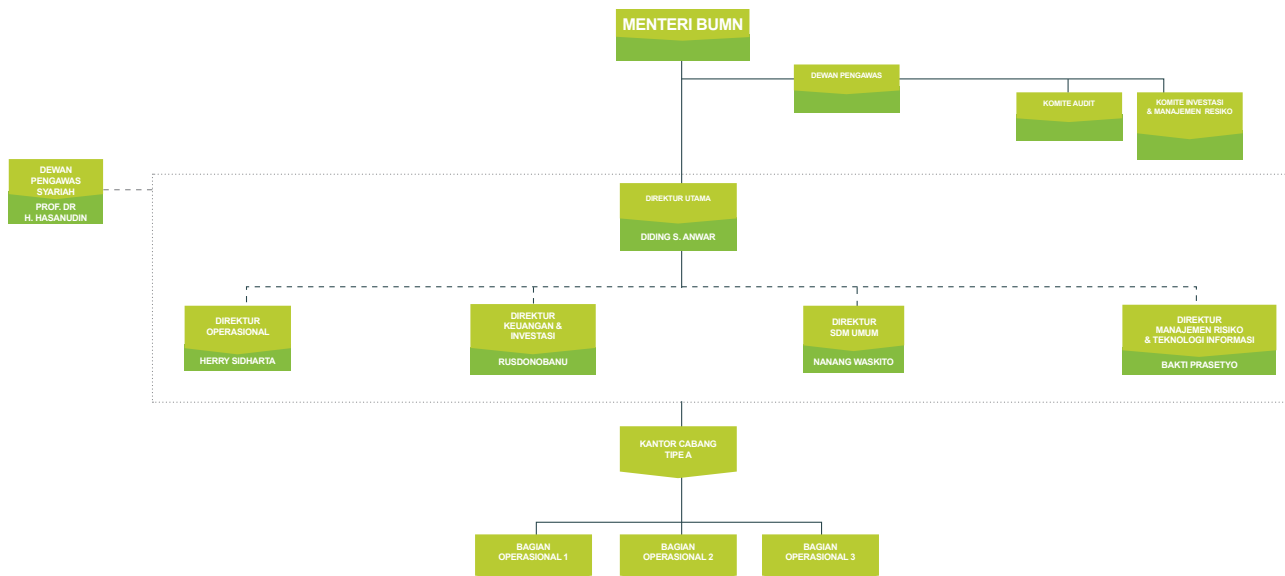
As a response to environmental changes and achieve the long-term business goals, in 2013, Perum Jamkrindo made adjustments to the Company's Organization Structure.



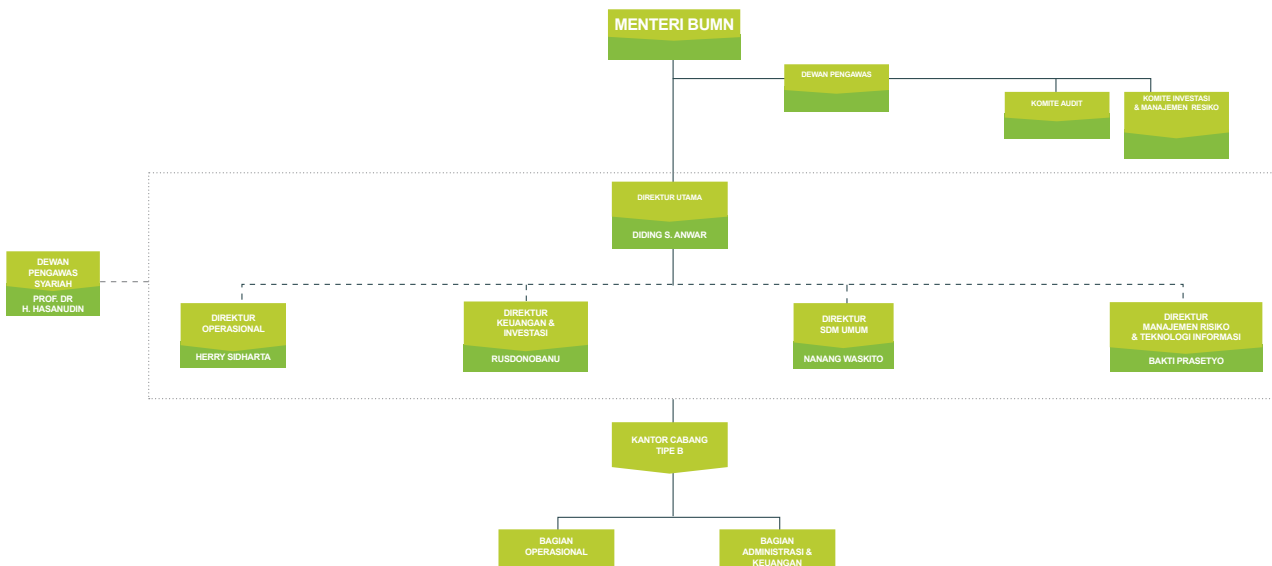
Berikut Struktur Organisasi Perum Jamkrindo sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 04/Kep-Dir/I/2013 tanggal 15 Januari 2013, yang terdiri dari :

The following Structure of Perum Jamkrindo was stipulated in Decree of Board of Directors No. 04/Kep- Dir/I/2013 dated January 15, 2013, consisting of:

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG TIPE A ORGANIZATION STRUCTURE OF BRANCH OFFICE TYPE A



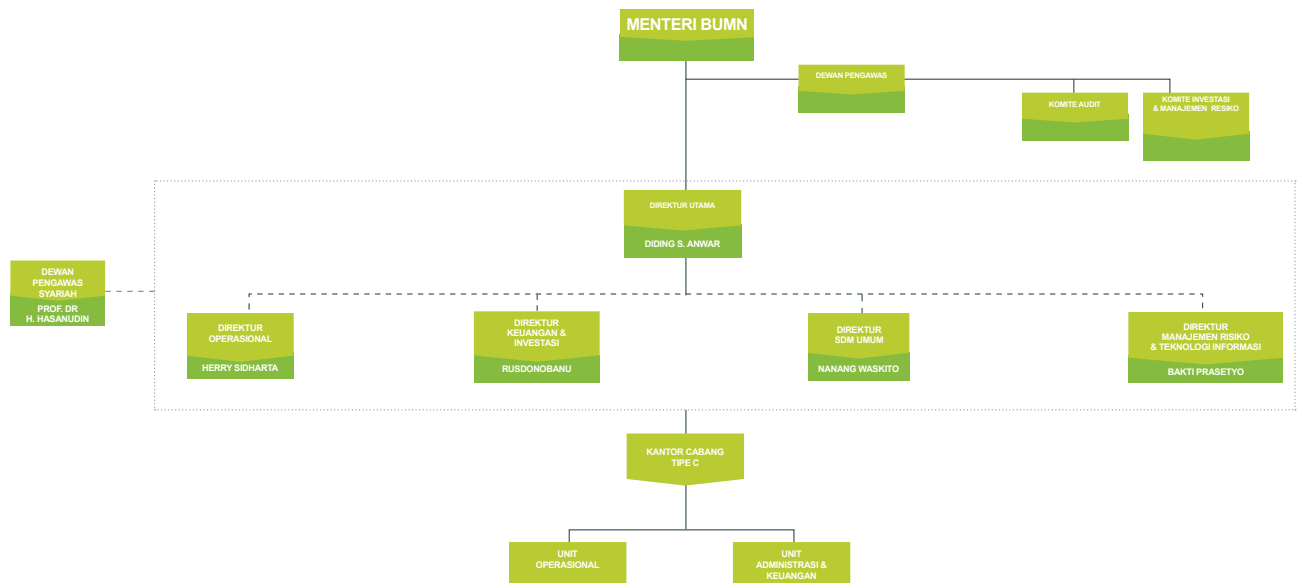
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG TIPE B ORGANIZATION STRUCTURE OF BRANCH OFFICE TYPE B



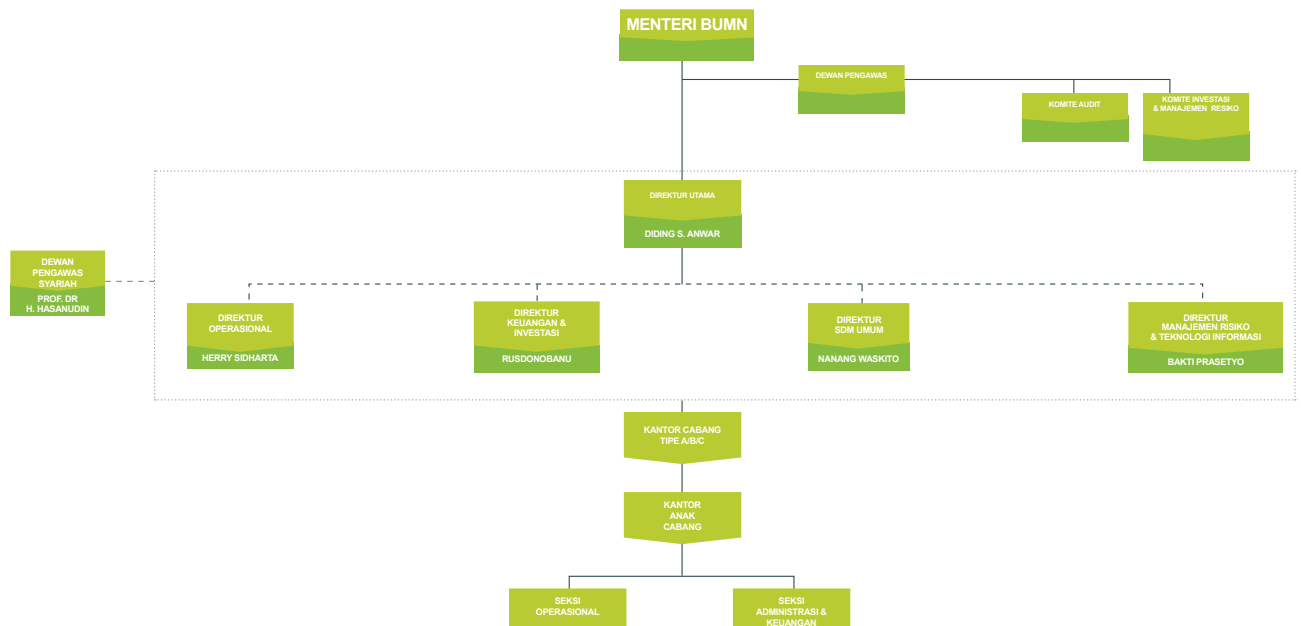
- A. Struktur Organisasi Kantor Pusat.
- B. Struktur Organisasi Kantor Cabang Tipe A.
- C. Struktur Organisasi Kantor Cabang Tipe B.
- D. Struktur Organisasi Kantor Cabang Tipe C.
- E. Struktur Organisasi Kantor Anak Cabang (KAC).

- A. Head office Organization Structure.
- B. Branch Office Organization Structure Type A.
- C. Branch Office Organization Structure Type B.
- D. Branch Office Organization Structure Type C.
- E. Sub Branch Office Organization Structure (KAC).

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG TIPE C ORGANIZATION STRUCTURE OF BRANCH OFFICE TYPE C



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR ANAK CABANG ORGANIZATION STRUCTURE OF SUB-BRANCH OFFICE



Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission, and Corporate Culture

Dalam rangka pelaksanaan peran serta dan fungsi Perum Jamkrindo dalam perekonomian nasional dan berdasarkan Surat Pengesahan dari Kementerian BUMN Nomor: S – 34/MBU/2014 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), maka Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jamkrindo menetapkan Visi, Misi dan Budaya Perusahaan sebagai berikut :

To implement the roles and functions of Perum Jamkrindo in the national economy, and in pursuance of legitimate of SOE Ministry Number: S – 34/MBU/2014, Board of Supervisors and Board of Directors of Perum Jamkrindo determined the Vision, Mission, and Corporate Culture of Perum Jamkrindo as follows:

Visi Vision

Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional.

Being a leading Credit Guarantee Company that can support the development of national economy.

Misi Mission

Visi Perusahaan dijabarkan ke dalam misi-misi yang merupakan Tridharma Jamkrindo sebagai berikut:

- 1. Dharma Pertama**
Melakukan kegiatan penjaminan bagi pengembangan bisnis UMKM dan Koperasi
- 2. Dharma Kedua**
Memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas
- 3. Dharma Ketiga**
Memberikan manfaat bagi *stakeholders* sesuai prinsip bisnis yang sehat

The Company's vision described into missions that are Tridharma Jamkrindo as follows:

- 1. First Dharma**
Conducting credit guarantee business activities and management consulting support for business development of Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK).
- 2. Second Dharma**
Providing wider and qualified services.
- 3. Third Dharma**
Providing interests to stakeholders in accordance with sound business principles.

Kredo Perusahaan

Kredo perusahaan Perum Jamkrindo terdiri dari 5 (lima butir) sebagai berikut.

- Terpercaya dalam melaksanakan usaha penjaminan
- Responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis
- Unggul dan Profesional dalam pelayanan
- Sehat dalam tata kelola perusahaan
- Terkemuka dalam memberikan kepuasan pelanggan

Corporate Credo

Perum Jamkrindo's Corporate Credo consists of 5(five) points of company's cultural values, namely TRUST, as follows:

- Trusworthy in conducting business guarantee
- Responsive to the changes of the environment
- Excellent and Professional in service
- Healthy in corporate governance
- Reputable in providing customers' satisfaction

61

Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan Perum Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir nilai-nilai budaya yang dianut perusahaan, yaitu budaya TRUST, sebagai berikut:

Corporate Culture

Corporate culture of Perum Jamkrindo comprised of 5 (five) points of cultural values held by the Company, namely TRUST culture as follows:

Terpercaya

bekerja jujur dengan integritas tinggi.
working honestly with high integrated.

Responsif

tanggap menghadapi kebutuhan mitra usaha dan segenap *stakeholder*.
responsive to meet the needs of business partners and all stakeholders.

Unggul

selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi perusahaan.
sustainably improving professionalism to reach extra value for the company.

Sehat

selalu bekerja dengan tekun untuk mendukung tatakelola perusahaan yang sehat.
always work diligently to support a healthy corporate governance.

Terkemuka

selalu terdepan dalam memberikan pelayanan dan kinerja untuk menjadi pemimpin dalam industri penjaminan.
always in the forefront in providing services and performances to become the industry leader in assurance.

Motto Perusahaan / Company's Motto

Solusi UMKMK menuju sukses
Solution of SME's to success

Tagline

Mitra Terpercaya Dalam Penjaminan
Your TRUSTed Guarentee Partner

Profil Dewan Pengawas

Board of Supervisors Profile



CHOIRUL DJAMHARI
Ketua Dewan Pengawas



NASARUDDIN UMAR
Anggota dewan Pengawas



ONY SUPRIHARTONO
Anggota dewan Pengawas



SUBANDRIYO
Anggota dewan Pengawas



DAHLAN SIAMAT
Anggota dewan Pengawas

CHOIRUL DJAMHARI

Ketua Dewan Pengawas / Chairman of The Board of Supervisor

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo sejak 17 September 2009. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Deputy Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM RI sejak tahun 2005. Beliau juga pernah menjabat berbagai posisi penting diantaranya sebagai Deputy Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Asisten Deputy Tata laksana koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tahun 2002 hingga tahun 2005 dan Kepala Pusat Pengembangan SDM BPS-KPKM serta Kementerian Koperasi dan UKM RI sejak tahun 2001 hingga tahun 2002.

Choirul Djamhari menamatkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dan S2 di University of Wisconsin serta meraih gelar doktor di McGill University – Montreal, Canada.

Indonesian Citizen, 57 years old. Serving as Head of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo since September 17, 2009. He is currently a Deputy of Financing, Ministry of Cooperative and SME of RI since 2005. He has also held important positions such as the Deputy of Business Restructuring and Development, Deputy Assistant of Cooperative Administration and SME, Ministry of Cooperative and SME of RI since 2002-2005 and Head of BPS-KPKM Human Resources Development Center and Ministry of Cooperative and SME of RI since 2001-2002.

Choirul Djamhari received his Bachelor's degree from Gadjah Mada University, his Master's degree from the University of Wisconsin, and his Doctoral degree from McGill University in Montreal, Canada.

NASARUDDIN UMAR

Anggota Dewan Pengawas /

Member of the Board of Supervisor

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo sejak 19 November 2012. Saat ini sebagai Wakil Menteri Agama RI sejak tahun 2011, sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI (2006-2011). Saat ini juga sebagai Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta sejak 2006 dan Wakil Direktur Pusat Studi Al-Quran (PSQ) Jakarta sejak 2004, sekaligus Guru Besar dalam bidang Ilmu Tafsir Pada Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak 2002.

Menamatkan pendidikan Sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1984), Program S2 pada tahun 1992 dan S3 pada 1999 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta menjadi visiting student di beberapa perguruan tinggi di luar negeri yaitu Mc.Gill University Canada (1994), Leiden University Belanda (1995), Paris University Perancis (1995), SOAS University London (2002), Georgetown University Washington USA (2004) dan Islamic Study Center Bellagio Milan, Italia (2005).

Indonesian Citizen, 55 years old. Serving as Member of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo since November 19, 2012. He is currently serving as the Deputy Minister of Religious Affairs of RI since 2011, formerly, he was a Director General of BIMAS Islam, Ministry of Religious Affairs of RI since 2006- 2011. Curenly,he serves as the Rector of Institute of Al-Qur'an Jakarta since 2006 and Deputy Director of Al Qur'an Study Center (PSQ) Jakarta since 2004 as well as the Professor of Al-Qur'an's Interpretation in Ushuluddin Faculty, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta since 2002.

Nasaruddin Umar received his Bachelor's degree from IAIN Alaudin, Ujung Pandang, and his Master's degree in 1992 and Doctoral Degree in 1999 from UIN Syarif Hidayatullah. he used to be a visiting student to some universities abroad such as Mc. Gill University Canada (1994), Leiden University Netherland (1995), Paris University, France (1995), SOAS University, London (2002), Georgetown University Washington USA (2004) and Islamic Study center Bellagio Milan, Italy (2005)

ONLY SUPRIHARTONO

Anggota Dewan Pengawas /

Member of the Board of Supervisor

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo sejak tahun 2013. Saat ini juga menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan SDM (2013-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Kabag Perencanaan Kementerian BUMN (2012-2013), Dewan Komisaris PT Jasaraharja Putera (2012-2013), serta Direktur Keuangan PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (2010-2012), Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun PT Persero Batam (2010-2012).

Meraih gelar Sarjana Akuntansi Universitas Jenderal Sudirman (1995), dan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (2002).

Indonesian citizen, 44 years old He serves as Member of Board of Trustees of Perum Jamkrindo since 2013. He also currently serves as Head of Planning and HR Bureau (2013 – now). Previously, he served as Head of Planning of Ministry of State Owned Enterprise (2012 – 2013), Board of Commissioners of PT Jasaraharja Putera (2012-2013), as well as Financial Director of PT Pengusahaan Daerah Industri Batam Island (2010 – 2012), Chairman of the Board of Supervisor of Pension Fund PT Persero Batam (2010-2012).

He obtained his Bachelor degree in Accounting from Jendral Sudirman University (1995) and Master degree in Management from Gadjah Mada University (2002).

SUBANDRIYO

Anggota Dewan Pengawas /

Member of the Board of Supervisor

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo sejak tahun 2013. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Jagadtara Unggul Kreasi (2008-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kogas Diryap Konsultan (1991-1997) serta Marketing Manager PT Kampsax International, Denmark (1986-1990).

Berpengalaman organisasi antara lain sebagai Sekretariat Jenderal Majelis Nasional KAHMI (2013-sekarang), Wakil Sekretariat Jenderal PP KAGAMA (Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) (2010-sekarang), Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Masyarakat Pengguna Pupuk Organik Indonesia (MAPORINA) (2002-sekarang), Salah satu dari tujuh Deklarator pendirian Himpunan Pengusaha KAHMI dan Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (2011-sekarang), serta Bendahara Yayasan Amal Insani (2006-sekarang).

Meraih gelar Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (1981).

Indonesian citizen, 58 years old. He serves as Member of Board of Trustees of Perum jamkrindo since 2013. He currently also serves as President Director of PT Jagadtara Unggul Kreasi (2008 – now). Previously he served as President Director of PT Kogas Diryap Konsultan (1991 -1997) and Marketing Manager of PT Kampsax Internantional, Denmark (1986 – 1990).

His experience in organisation are namely as General Secretary of KAHMI National Assembly (2013 – now), Vice General Secretary of PP KAGAMA (Gadjah Mada University Alumni Central Board) (2010-now), Chief of Community Agency Relation of Indonesian Organic Composs Users (MAPORINA) (2002 – now), one of Seven Declarators of the establishment of KAHMI Entrepreneur Assembly and Vice General Chief of KAHMI Central Entrepreneurship Board (2011 – now), as well as Treasurer of Amal Insani Foundation (2006 – now).

He obtained his Bachelor degree from Faculty of Agriculture, Gadjah Mada University (1981)

DAHLAN SIAMAT

Anggota Dewan Pengawas /

Member of the Board of Supervisor

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo sejak 28 Juni 2013. Saat ini menjabat sebagai Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan. Sebelumnya menggeluti beberapa bidang tugas di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) (2004-2006), Pusat Manajemen Obligasi Negara (2001-2003), Debt Management Unit (2000-2001), Direktorat Jenderal lembaga Keuangan (1979-2000).

Berpengalaman organisasi antara lain sebagai Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional MUI (2012), Wakil Ketua Bidang Pengembangan Moneter, Fiskal dan Publik Islami pada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) (2012), Anggota Dewan Pembina Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) (2012), Anggota Finance and Treasury Association (FTA) Australia (2005). Berperan aktif sebagai pembicara dalam berbagai forum nasional dan internasional di bidang Keuangan Islam, Sukuk, Pasar Modal Syariah, dan menjadi Anggota Delegasi pada beberapa pertemuan Islamic Development Bank Group Annual Meeting.

Menamatkan pendidikan Sarjana Muda Akuntansi di Universitas Jayabaya Jakarta (1978), Postgraduate Diploma in International Banking and Financial Studies, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, UK (1986), Magister Manajemen Keuangan, STIE IPWI, Jakarta (1999).

Indonesian citizen, 60 years old. Serving as Member of Board of Supervisors of Perum Jamkrindo since June 28, 2013. He is currently a Director of Sharia Financing, Directorate General of Debt Management, Ministry of Finance. He was assigned in several division in Directorate General of Debt Management (2004-2006), Bond Management Center (2001-2003), Debt Management Unit (2000-2001), Directorate General of Financial Instituion (1979-2000).

Participated by many organizations, such as the Plenary Member of National Sharia Council of MUI (2012), Deputy Head of Monetary, Fiscal, and Islamic Public Development at Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) (2012). Members of Board of Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) (2012), Members of Finance and Treasury Association (FTA) Australia (2005). He has wide experience as a speaker in various national and international forums in Islamic Finance, Sukuk, Sharia Capital Market, and Members of Delegates in several meeting of the Islamic Development Bank Group Annual Meeting.

He earned his bachelor's degree in Accounting at Jayabaya University, Jakarta (1978), a Postgraduate Diploma in International Banking and Financial Studies, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, UK (1986), Master of Financial Management, STIE IPWI, Jakarta (1999)

Profil Dewan Pengawas Syariah

Board of Sharia Supervisor Profile



Dari kiri ke kanan:

MUHAMMAD SYAKIR SULA

Anggota Dewan Pengawas Syariah / Member of Board of Sharia Supervisor

HASANUDIN

Ketua Dewan Pengawas Syariah / Chairman of Board of Sharia Supervisor

GUNAWAN YASNI

Anggota Dewan Pengawas Syariah / Member of Board of Sharia Supervisor

HASANUDIN

Ketua Dewan Pengawas Syariah /

Chairman Board of Sharia Supervisor

Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perum Jamkrindo sejak 19 Oktober 2006. Saat ini adalah Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indoneisa (MUI) sejak tahun 2010 dan Anggota Dewan Syariah Nasional MUI sejak tahun 2000. Merupakan Anggota DPS Bank Niaga Syariah, Ketua DPS Bank Victoria Syariah dan Guru Besar Tetap Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 1998.

Menamatkan pendidikan S1, S2 dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Indonesian citizen, 69 years old. Serving as Head of Sharia of Board of Supervisors of Perum Jamkrindo since October 19, 2006. He is currently a Head of the Commission of Fatwa of Majelis Ulama Indonesia (MUI) since 2010 and Members of Board of Sharia Supervisors of National MUI since 2000. He was also a Member of DPS of Bank Niaga Syariah, Head of DPS of Bank Victoria Syariah, and Permanent Professor at Sharia Faculty of UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, since 1998.

He received his bachelor's, master's, and doctoral degree from UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

MUHAMMAD SYAKIR SULA

Anggota Dewan Pengawas Syariah /
Member of Sharia Supervisor

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perum Jamkrindo sejak 19 Oktober 2006. Merupakan Ketua/Anggota Dewan Pengawas Syariah antara lain di Bank BTN Syariah, Asuransi Panin Life Syariah, Asuransi Central Asia Raya Syariah.

Menjabat Sekjen MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), Wakil Ketua Umum IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), Ketua III PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), Ketua Umum IIIS (*Internasional Islamic Insurance Society*), Anggota Pleno DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-MUI), dan Deputy Ketua Divisi Humas BWI (Badan Wakaf Indonesia).

Menamatkan Sarjana di bidang Pertanian di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung. Saat ini mengajar Program S2 dan S3 IEF (Islamic Economic & Finance) Universitas Trisakti dan IIIS (*International Islamic Insurance Society*).

Indonesian citizen, 50 years old. Serving as Member of Board of Sharia Supervisors (DPS) of Perum Jamkrindo since October 19, 2006. He was a Head/Member of Board of Sharia Supervisors at BTN Syariah Bank, Panin Life Syariah Insurance, Central Asia Raya Sharia Insurance.

Serving as Secretary General of MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), Deputy Head of IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), Head III of PKES (Pusat Komunikasi Ekonomis Syariah), Head of IIIS (International Islamic Insurance Society), Plenary Member of DSN-MUI (Baord of National Sharia – MUI) and Deputy Head of Public Relation Division of BWI (Badan Wakaf Indonesia).

He received his bachelor's degree in Agriculture at Padjajaran University (Unpad) Bandung. He is currently a lecturer of Master and Doctoral study at IEF (Islamic Economic & Finance) Trisakti University and IIIS (International Islamic Insurance Society).

GUNAWAN YASNI

Anggota Dewan Pengawas Syariah /
Member of Sharia Supervisor

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perum Jamkrindo sejak 19 Oktober 2006. Merupakan Anggota DPS Bank Ekspor Indonesia, Deutsche Bank Indonesia, Asuransi Astra Buana. Menjadi Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah dan Anggota Pokja Pasar Modal & Program Dewan Syariah Nasional.

Menamatkan pendidikan S1 bidang Ekonomi Akuntansi di Universitas Indonesia (1993) dan Magister Manajemen di Prasetya Mulya pada 1995.

Indonesian citizen, 45 years old. Serving as a Member of the Board of Sharia Supervisors (DPS) of Perum Jamkrindo since October 19, 2006. He is a Member of DPS of Bank Ekspor Indonesia, Deutsche Bank Indonesia, Astra Buana Insurance, Masyarakat Ekonomi Syariah, and Member of Work Group of Capital Market & Program of National Sharia Board.

He earned his bachelor's degree in Economic Accounting in University of Indonesia and Master degree in management from Prasetya Mulya in 1995.

Profil Direksi

Board of Directors' Profile



DIDING S. ANWAR

Direktur Utama / *President Director*

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perum Jamkrindo sejak 7 September 2012. Sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) pada tahun 2008-2012, Direktur SDM & Umum PT Jasa Raharja (Persero) pada tahun 2000-2008, Kepala Divisi Litbang PT Jasa Raharja (Persero) pada tahun 1996-2000 dan Kepala Cabang Palembang PT Jasa Raharja (Persero) pada tahun 1994-1996.

Aktif berorganisasi antara lain sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) (2012 - sekarang), Dewan Pengurus Pusat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (2011 - sekarang), Dewan Pembina Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) (2011-sekarang).

Menamatkan Sarjana Ekonomi di Universitas Pasundan (Unpas) Bandung (1989), Magister Manajemen Keuangan pada Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang (1996) dan menamatkan pendidikan Doktor Manajemen Pendidikan pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jakarta pada 2002. Mengikuti pelatihan antara lain The Malaysian Insurance MII Institute Malaysia (2003), Studi banding ke Bournemouth University di Inggris (2011), The International Insurance Society Annual Seminar di Toronto Canada (2011), The University of New South Wales Australia (2011).

Indonesian citizen, 60 years old. Serving as President Director of Perum Jamkrindo since September 7, 2012. Previously he served as a President Director of Jasa Raharja (Persero) in 2008-2012, Director of Human Resources & General Affairs of PT Jasa Raharja (Persero) in 2000-2008, Head of Education and Development Division of PT Jasa Raharja (Persero) Palembang of PT Jasa Raharja from 1996-2000 and Head of Palembang Branch of PT Jasa Raharja (Persero) from 1994 to 1996.

Actively involved in many organizations such as being a Chairman of the Credit Guarantee Company Association (Asippindo) (2012-present), Board of Indonesian Chambers of Commerce and Industry (Kadin) (2011-present) , Board of Trustees of the Association of Indonesian Insurance Management (AAMAI) (2011-now),

He received his Bachelor of Economics degree from Pasundan University (Unpas), Bandung (1989), and continued pursuing his Master's degree at Sriwijaya University (Unsri), Palembang in 1996, majoring in Financial Management in 1996 and Doctoral Degree in Education Management in UNJ in 2002. Attending some trainings such as The Malaysian Insurance MII Institute Malaysia (2003), Comparative Study to Bournemouth University in England (2011). The International Insurance Society Annual Seminar in Toronto, Canada (2011), the University of New South Wales Australia (2011).

NANANG WASKITO

Direktur SDM dan Umum /

Director of Human Resources and General Affairs

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Diangkat kembali sebagai Direktur SDM dan Umum Perum Jamkrindo sejak 15 Januari 2013 dimana sebelumnya adalah Direktur Perum Jamkrindo sejak 15 Januari 2008. Memulai karir di Perum Jamkrindo sejak 1982 dan telah menduduki beberapa jabatan manajerial seperti Kepala Divisi Hukum, Klaim dan Subrogasi (2006-2008), Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha, Kepala Divisi Operasional I, Kepala Divisi Penjaminan Bank, Kepala Satuan Pengawas Intern, Kepala Divisi Pengkajian dan Pengembangan Usaha.

Tercatat sebagai Sekretaris Jenderal Asippindo (Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia) sejak tahun 2012 dan beberapa pengalaman organisasi yaitu Sekretaris Jenderal Konferensi ACSIC di Bali tahun 2007, Anggota Komite Bidang Asuransi, Pasar Modal, Bursa Berjangka, Broker dan Penjaminan Syariah pada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sejak 2012.

Meraih gelar Sarjana Peternakan pada Institut Pertanian Bogor (1981) dan Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta (2000). Telah meraih gelar Certified Risk Government Professional (CRGP) pada tahun 2013. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan antara lain sebagai Qualified Internal Auditor (QIA) pada periode 2001-2006, Training dan Konferensi Asian Credit Supplementation Institutions Confederation (ACSIC) di Malaysia, Taiwan, Philipina dan Thailand, Penjaminan Syariah (Kafalah), Enterprise Risk Management.

HERRY SIDHARTA

Direktur Operasi /

Director of Operations

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat Direktur Penjaminan sejak 30 Maret 2011. Sebelumnya meniti karir perbankan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) dengan beberapa posisi manajerial seperti Senior Vice President for Network & Services (2010-2011), General Manager (GM) Commercial Division PT BNI (Persero) Tbk (2009-2010), GM Corporate Division (2008-2009), DGM Commercial Division (2006-2008), GM East Java Area (2005), GM West Java Area (2004), GM Lending Central Java Area & Yogyakarta (2003).

Menamatkan pendidikan S1 Jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Pancasila Jakarta (1982) dan Master di Rensselaer Polytechnic Institute, New York, USA, jurusan Manajemen Keuangan (1995). Mengikuti pelatihan antara lain Konferensi Asian Credit Supplementation System Confederation di India (2011), Six Sigma Champion Training di Jakarta (2007), Syndicated Master Class, Hongkong (2007), Risk Management Certification Level III Jakarta (2007), Advanced Credit (2005).

Indonesian citizen, 56 years old. Reappointed as Director of Human Resources and General Affairs Perum Jamkrindo since January 15, 2013 in which he previously served as Director of Perum Jamkrindo since January 15, 2008. Starting his career in Perum Jamkrindo since 1982 and has held several managerial positions such as Head of Legal Division, Claims and Subrogation (2006-2008), Corporate Secretary, Head of Planning and Business Development Division, Head of Operational 1 Division, Head of Bank Guarantee Division, Head of Internal Audit, and Head of Business Study and Development.

He was Secretary General of Asippindo since 2012 and active in some organizations such as Secretary General of ACSIC Conference in Bali in 2007, member of Insurance, Capital Market, Broker, Stock, and Sharia Guarantee Committee of Sharia Economic Community since May 2012.

He earned his bachelor's degree from the Faculty of Livestock, Bogor Agricultural University, Bogor, in 1981 and his Master's degree in Management from Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta in 2000. He also received Certified Risk Government Professional (CRGP) in 2013. He has attended some educations and trainings such as Qualified Internal Auditor (QIA) in 2001-2006, Training and Conference of Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) in Malaysia, Taiwan, Philiphine, and Thailand, Sharia Guarantee (Kafalah), Enterprise Risk Management.

Indonesian Citizen, 57 years old. He served as Director of Guarantee since March 30, 2011. He started his career in PT Bank Negara Indonesia (Persero) holding some managerial positions such Senior Vice President For Network & Services (2010-2011), General Manager of Commercial Division of PT BNI (Persero) (2009-2010), GM Corporate Division (2008-2009), DGM Commercial Division (2006-2008), GM West Java Area (2004), GM Lending Central Java Area & Jogjakarta (2003).

He received his bachelor's degree majoring in Financial Management from Pancasila University, Jakarta (1982) and a Master's degree from Rensselaer Polytechnic Institute, New York, USA majoring in Financial Management (1995). He has attended some trainings such as Conference Asian Credit Supplementation System Confederation in India (2011), Six Sigma Champion Training in Jakarta (2007), Syndicated Master Class, Hongkong (2007), Risk Management Certification Level III, Jakarta (2007), Advanced Credit (2005).

BAKTI PRASETYO

Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi /

Director of Risk Management and IT

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat kembali sebagai Direktur Penjaminan sejak 15 Januari 2013 dimana sebelumnya adalah Direktur Pengembangan Perum Jamkrindo sejak 27 Agustus 2007. Memulai karir di Perum Jamkrindo sejak 1983 dan telah menduduki beberapa jabatan manajerial seperti Kepala Divisi Pembiayaan Usaha, Kepala Divisi Pengembangan dan Perencanaan Usaha, kepala Divisi Penjaminan Bank, Kepala Divisi Bisnis Kredit Umum, Kepala Biro Usaha I, Kantor Cabang Semarang dan Kepala Cabang Bandung.

Tercatat sebagai Wakil Ketua Asippindo (Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia) sejak tahun 2012, Anggota Komite Harian Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan beberapa pengalaman organisasi yaitu Wakil Sekretaris Jenderal Konferensi ACSIC di Bali tahun 2000, Dewan Pusat Pengembangan Pendampingan Usaha Kecil dan Menengah.

Meraih gelar Sarjana Perikanan pada Institut Pertanian Bogor (1982) dan Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta (2000). Telah meraih gelar Certified Risk Government Professional (CRGP) pada tahun 2013. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan antara lain Training dan Konferensi Asian Credit Supplementation Institutions Confederation (ACSIC) di Taiwan, Filipina, dan Jepang.

I. RUSDONBANU

Direktur Keuangan & Investasi / *Director of Finance & Investment*

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi Perum Jamkrindo sejak 15 Januari 2013. Sebelumnya menduduki beberapa jabatan penting di Kementerian BUMN antara lain sebagai Asisten Deputi Usaha Jasa II sejak 2010, Asisten Deputi Usaha Perkebunan II (2006-2010), Kepala Bidang Usaha Perkebunan IIA (2006), Kepala Bidang Usaha Sarana Produksi Pertanian (2002-2006). Berpengalaman manajerial melalui penugasan sebagai Anggota Komisaris pada beberapa BUMN seperti PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2011), PT Perkebunan Indonesia X (2008-2011), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero).

Meraih gelar Sarjana di Universitas Pancasila bidang Manajemen Perusahaan (1988), dan Master of Science pada Jurusan Ekonomi Northeastern University Boston USA (1995). Mengikuti pelatihan antara lain Macroeconomics of Competitiveness UI/Harvard University (2004), Equity Capital Market di UBS Investment Bank of Hongkong (2004), Corporate Directors Training Programs, Peranan Komite Audit, Finance Market & Securities Market Merrill Lynch New York USA, The Economic Institute Colorado, USA.

Indonesian Citizen, 56 years old. He has reappointed as Director of Guarantee since January 15, 2013, and he was previously Director of Housing Development of Jamkrindo since August 27, 2007. He started his career in Perum Jamkrindo since 1983 and was posted in some managerial positions such as Head of Business Finance Division, Head of Development and Business Planning Division, Head of Bank Guarantee Division, Head of General Business Credit Division, Head of Business Bureau I, Semarang Branch and Branch Manager of Bandung.

He was the Vice President of Asippindo since 2012, member of KUR, and held some positions in some organization such as Vice Secretary General Conference of ACSIC in Bali in 2000, and Board of Central Development and Assistance of Small and Medium Enterprises.

He received his bachelor's degree from the Faculty of Fisheries, Bogor Agricultural University, Bogor (1982) and his Master's degree from Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta (2000). He also received Certified Risk Government Professional (CRGP) in 2013. He has attended education and training as well as conference of ACSIC in Taiwan, Philippine, and Japan.

Indonesian citizen, 55 years old. He was appointed as the Director of Finance and Investment of Perum Jamkrindo since January 15, 2013. Previously, he held important positions as Deputy Assistant of Service Business II of the Ministry of SOE since 2010, Deputy Assistant of Plantation Business II (2006), and Head of Plantation II A Business Division (2006), and Head of Agricultural Production of Infrastructure (2002-2006). He has held some managerial experience in numerous SOEs such as PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2011), PT Perkebunan Indonesia X (2008-2011), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Sang Hyang Seri (Persero).

He received his bachelor's degree majoring in Management at Pancasila University (1988) and his Master's degree in Economics at Northeastern University, Boston, USA (1995). He has attended some trainings such as Macroeconomics of Competitiveness of UI/Harvard University (2004), Equity Capital Market in UBS Investment Bank of Hongkong (2004), Corporate Directors of Training Programs, Committee Audit Role, Finance Market & Securities Market of Merrill Lynch of New York, USA, The Economic Institute of Colorado, USA.

Pejabat Perum Jamkrindo

Officers at Perum Jamkrindo

NO.	JABATAN / POSITION	NAMA PEJABAT / OFFICER NAME
1	Kepala SPI Head of Internal Audit	Sudibyo Utomo
2	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Yuliarso
3	Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Head of Planning and Development Division	Gatot Suprabowo
4	Kepala Divisi Penjaminan Syariah Head of Sharia Guarantee Division	Ceriandri Widuri
5	Kepala Divisi Penjaminan Komersial Head of Commercial Guarantee Division	Amin Mas'udi
6	Kepala Divisi Penjaminan Program Head of Program Guarantee Division	Nina Kurnia Dewi
7	Kepala Divisi Keuangan Head of Finance Division	Aribowo
8	Kepala Divisi Investasi Head of Investment Division	Krisna Johan
9	Kepala Akuntansi Head of Accounting Division	Henry Nur Irianto
10	Kepala Divisi SDM Head of Human Resources Division	Erna Zubaida
11	Kepala Divisi Umum Head of General Affairs Division	Imam Wahyudi
12	Kepala Divisi Hukum & Kepatuhan Head of Legal and Compliance Division	Soegeng Iman W
13	Kepala Divisi Teknologi Informasi Head of IT Division	Hadi Aribowo
14	Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division	Endang Sri Winarni
15	Kepala Divisi Klaim dan Subrograsi Head of Claim and Subrogation Division	Achmad Sonhadji

Kepala Cabang Perum Jamkrindo

Head Branch of Perum Jamkrindo

NO.	JABATAN / POSITION	NAMA PEJABAT / NAME OF OFFICER
1.	Kepala Kantor Cabang Bandung Head of Bandung Branch Office	Yanti Rachmawati
2.	Kepala Kantor Cabang Semarang Head of Semarang Branch Office	Sugeng
3.	Kepala Kantor Cabang Surabaya Head of Surabaya Branch Office	Muh. Solihin
4.	Kepala Kantor Cabang Denpasar Head of Denpasar Branch Office	Santosa
5.	Kepala Kantor Cabang DKI Jakarta Head of Jakarta Branch Office	Suwarsito
6.	Kepala Kantor Cabang Khusus DKI Jakarta Head of DKI Jakarta Special Branch	Kadar Wisnuwarman
7.	Kepala Kantor Cabang Medan Head of Medan Branch Office	Loesdarwanto
8.	Kepala Kantor Cabang Palembang Head of Palembang Branch Office	Machfud Sudiyono
9.	Kepala Kantor Cabang Makassar Head of Makassar Branch Office	Untung Heri S.
10.	Kepala Kantor Cabang Pontianak Head of Pontianak Branch Office	Achmad Muchlison
11.	Kepala Kantor Cabang Samarinda Head of Samarinda Branch Office	Dadang Iwan Setiawan
12.	Kepala Kantor Cabang Pekanbaru Head of Pekanbaru Branch Office	Hamim Bugi Avianto
13.	Kepala Kantor Cabang Palangkaraya Head of Palangkaraya Branch Office	M. Kisworo
14.	Kepala Kantor Cabang Kupang Head of Kupang Branch Office	Wakhyu Hidayattulloh
15.	Kepala Kantor Cabang Mataram Head of Mataram Branch Office	Arif Aviansyah
16.	Kepala Kantor Cabang Banjarmasin Head of Banjarmasin Branch Office	Agus Supriadi
17.	Kepala Kantor Cabang Manado Head of Manado Branch Office	Iwan Hermawan
18.	Kepala Kantor Cabang Jayapura Head of Jayapura Branch Office	Helmi Daniel
19.	Kepala Kantor Cabang Jambi Head of Jayapura Branch Office	Juli Sumartana
20.	Kepala Kantor Cabang Yogyakarta Head of Jayapura Branch Office	Sugiyono
21.	Kepala Kantor Cabang Bandar Lampung Head of Jayapura Branch Office	M. Rinanto Deddy

Komposisi Pemegang Saham

Composition of Shareholder

Perum Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status sebagai Perusahaan Umum (Perum), hingga saat ini Perusahaan belum melakukan penawaran saham perdana atau *index public offering* (IPO) dan kepemilikan saham di Perusahaan 100% dimiliki oleh Pemerintah.

Perum Jamkrindo is a State Owned Enterprise with the status of Perusahaan Umum (Perum). To date, the Company has not conducted initial public offering or index public offering (IPO), and 100% of its shares is owned by the Government.

Kronologis Pencatatan Saham

Share-Listing Chronology

Perum Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status sebagai Perusahaan Umum (Perum), hingga saat ini Perusahaan belum melakukan penawaran saham perdana atau *index public offering* (IPO) sehingga informasi mengenai kronologis pencatatan saham tidak dapat disajikan dalam laporan tahunan ini.

Perum Jamkrindo is a State Owned Enterprise (SOE) with the status of Perusahaan Umum (Perum). To date, the Company has not made an initial public offering or index public offering (IPO) so that information regarding this share-listing chronology is not available in this Annual Report.

Informasi Anak Perusahaan

Information of Subsidiary

Perum Jamkrindo belum memiliki anak perusahaan, sehingga informasi mengenai anak perusahaan yang meliputi nama entitas anak, persentase kepemilikan saham, keterangan bidang usaha anak perusahaan, serta keterangan status operasional belum dapat disajikan dalam laporan tahunan ini.

Perum Jamkrindo does not have a subsidiary, so that information on subsidiaries, including the name of the subsidiary, the percentage of share ownership, description of subsidiaries' line of business, as well as the description of the operational status is not available in this annual report.

Nama dan Alamat Notaris dan KAP 2013

Name and Address of Notary and Public Accountant 2013

Notaris / Notary

Yualita Widyadhari, SH.

Gedung TCC Batavia Tower One

Lantai 9 Suite 9,

Jl. KH. Mas Mansur Kav. 126 Jakarta Pusat.

Telp : 021-29529440/29529441.

KAP / Public Accountant

Husni, Mucharam & Rasidi

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH, No. 178A

Jakarta Selatan 12870

Telp : 021-8351868/8313413

Fax : 021-8351978

Nama dan alamat perusahaan pemeringkat obligasi

Company Supporting Institution

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Panin Tower Senayan City, 17th Floor

Jl. Asia Afrika Lot. 19

Jakarta 10270, Indonesia

Phone: (021) 7278 2380

Fax: (021) 7278 2370

75



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

19 Mei 2013

Perum Jamkrindo mendapatkan penghargaan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara atas pencapaian kinerja dan terobosan yang dilakukan dalam **"BUMN Penyalur dan Penjamin KUR"**

May 19, 2013

Perum Jamkrindo received award from the Ministry of State-Owned Enterprises for its performance achievement and breakthrough innovation made in **"SOE the Supplier and KUR guarantor"**

30 Oktober 2013

Perum Jamkrindo mendapatkan penghargaan dari Infobank BUMN Award 2013 dalam kategori BUMN Industri Keuangan yang Berpredikat Sangat Bagus.

October 30, 2013

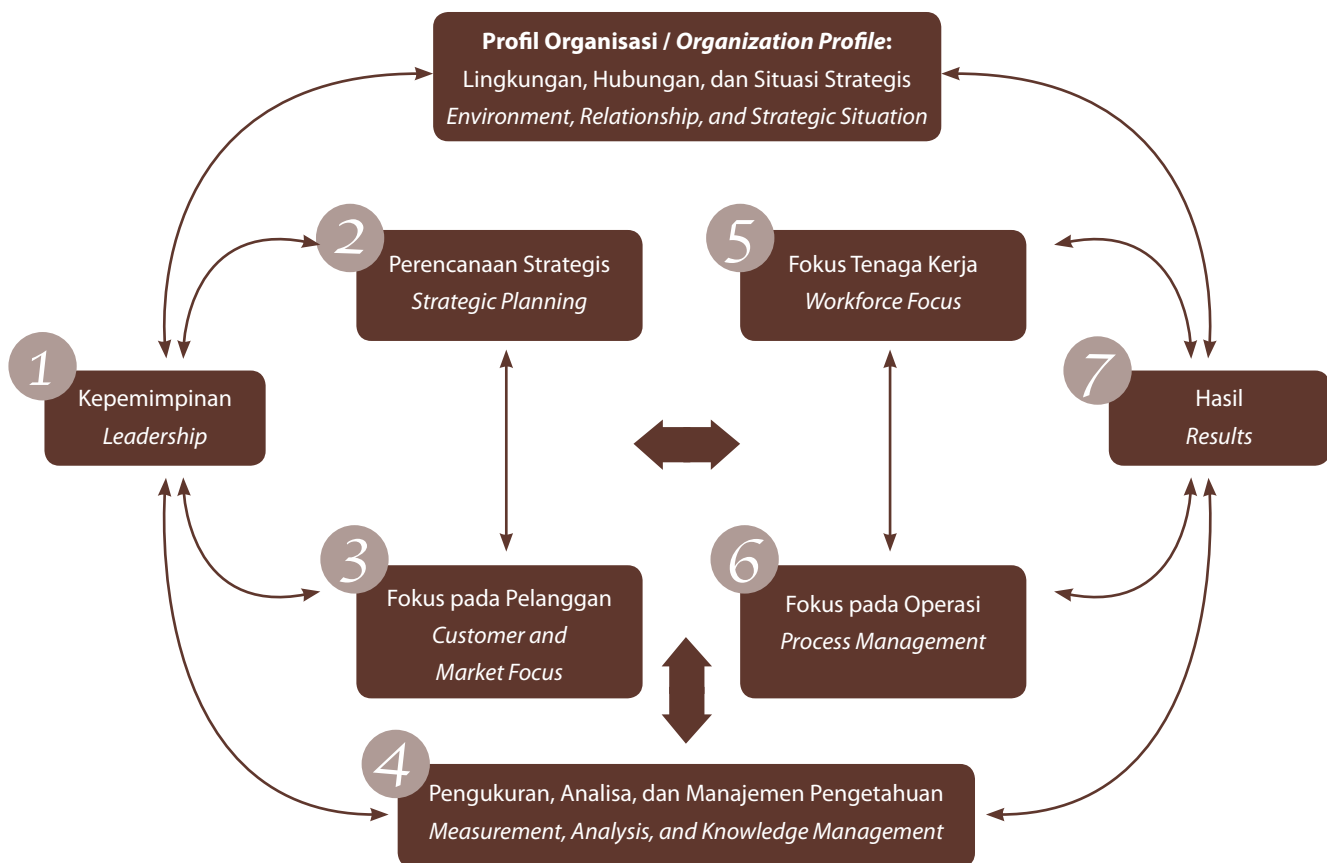
Perum Jamkrindo received award from Infobank BUMN Award 2013 for category of Outstanding Financial Industry of SOE.

Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) PERUM JAMKRINDO

Implementation of PERUM JAMKRINDO Assessment Criteria on Excellent Performance (KPKU)

Sejak tahun 2011 Perum Jamkrindo sudah menyusun implementasi KPKU, namun baru dilaksanakan melalui *self assesment*. Pada tahun 2013 Perum Jamkrindo sudah mengimplementasikan dan melakukan *assessment* KPKU, baik *self assesment* maupun evaluasi mandiri.

Since 2011, Perum Jamkrindo has composed the implementation of KPKU, yet it has only be realised by means of self assessment. In 2013, Perum Jamkrindo had implemented and performed KPKU assessment, both self and independent assessment.



Hasil evaluasi mandiri atas implementasi KPKU Perum Jamkrindo dengan perolehan skor KPKU sebesar 360, pada band *early result*. Berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: S-108/S.MBU/2014 tanggal 4 April 2014 tentang Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi KPKU pada BUMN, maka untuk BUMN yang berada pada level *early result* dapat melakukan beberapa rekomendasi utama atas hasil evaluasi implementasi KPKU pada BUMN diantaranya:

- a. Meningkatkan *awareness* kepada seluruh pimpinan senior BUMN yang bersangkutan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, proses dan kinerja (hasil-hasil) usaha;
- b. Meningkatkan pemahaman seluruh pimpinan senior BUMN yang bersangkutan, terhadap Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan perlunya memperoleh *best practices*, ataupun melalui kegiatan studi banding ke BUMN-BUMN yang berkinerja lebih unggul.
- c. Membentuk Tim Internal (*Champion Team*) untuk mengawal implementasi KPKU secara sistematis di perusahaan.
- d. Menata dan membangun sistem manajemen yang mengacu kepada persyaratan-persyaratan KPKU BUMN yaitu:
 1. Perusahaan disarankan untuk meningkatkan kualitas desain sistem/proses kerja utama perusahaan sehingga terdefinisi secara seksama input-proses-outputnya
 2. Perusahaan ini disarankan lebih konsisten dan disiplin dalam penerapan atas sistem/proses kerja utamanya, untuk selanjutnya perusahaan agar menentukan prioritas peningkatan kapabilitas sistem/proses kerja.
 3. Perusahaan disarankan mulai melakukan perencanaan strategis secara sistematis, dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan industri yang digarap perusahaan tersebut.

The result of independent evaluation on the implementation of KPKU Perum Jamkrindo is achieved with KPKU score of 360 at early result band. Pursuant to Letter of Ministry of SOE Secretary Number: S-108/S.MBU/2014 dated April 4 2014 on Independent Evaluation Result on KPKU Implementation in SOE, the SOEs at early result level may execute several major recommendations, such as:

- a. Increasing awareness to all related SOE senior executives in order to increase planning, process, and performance (results) quality;
- b. Improving the understanding on Assessment Criteria on Excellent Performance (KPKU) and the demand for best practice to the related SOE senior executives, or by holding comparative studies to other SOEs with excellent performance.
- c. Establishing Internal Team (Champion Team) to oversee the systematic KPKU implementation in a company.
- d. Arranging and developing management system which refers to SOE KPKU regulations, namely:
 1. The Company shall improve the quality of system design/main work process of the company for a detailed definition of input-output process.
 2. The Company is advised to be more consistent and discipline in implementing its main work system/process, henceforth the company shall determine the priority in improving the capability of work system/process.
 3. The Company is advised to perform strategic planning in a systematic manner, taking into account the market and industry dynamics engaged.

4. Perusahaan juga disarankan mulai menggunakan data historis sekurang-kurangnya 3 tahun kebelakang dan juga mulai melihat data historis perusahaan pesaing (*benchmark/pembanding*), untuk kemudian menentukan proyeksi kinerja perusahaannya.
 5. Perusahaan disarankan untuk mendapatkan data kinerja pesaing dan/atau data *best-in class* untuk referensi dalam penentuan langkah strategi perusahaan lebih lanjut.
 6. *Review* kinerja diharapkan lebih sistematis dan didasarkan pada data dan fakta, serta mulai berani menerapkan model-model peningkatan kinerja dari hasil pembelajaran terhadap perusahaan berkinerja lebih unggul (*best practices*).
 7. Adopsi dan adaptasi *best practices* dijadikan sebagai bagian dari rencana tindak lanjut atas hasil *review* kinerja sistem-sistem perusahaan maupun kinerja program kerja.
4. The Company is advised to use historical data from the past 3 years, as well as observing historical data of the competitors (benchmark) to determine its performance projection.
 - 5 .The Company is advised to gain performance data from its competitors and/or best-inclass data as reference to determine futher strategic steps.
 6. Performance review is expected to be more systematical and based on data and facts, as well as starting the implementation of performance improvement models based on the study result on companies with best practices.
 7. Best practice adoption and adaptation becomes part of follow-up plan on performance review of both the company's sytems and work program's performance.



Kompetensi Inti

Core Competency

Accessibility

Unik/Langka

Value Creation



KRITERIA IDENTIFIKASI

- *Accessibility* : kemampuan mengakses berbagai pasar potensial
- *Unik/langka* : peniruan oleh kompetitor sulit dilakukan
- *Value creation* : memberi kontribusi besar terhadap manfaat produk, terutama dari perspektif pelanggan

RISIKO

Pengabaian *core competency* berisiko dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Peluang untuk pertumbuhan terabaikan.
2. Reorganisasi perusahaan menjadi unit-unit bisnis yang lebih kecil dapat mengakibatkan kompetensi terpecah dan lemah.
3. Kurangnya sensitifitas terhadap tumbuhnya peluang lain yang terkait.
4. Investasi dapat menjadi kurang optimal
5. Terlalu fokus kepada kinerja periodik, yang sangat dipengaruhi oleh harga jual dan kompetisi pasar. Akibatnya, *core competency* kurang mendapatkan perhatian.

KENDALA

1. Kerugian akibat melemahnya *core competency* hanya sebagian kecil saja yang dapat dihitung dimuka
2. Tingginya pertumbuhan pasar menimbulkan kinerja cukup bagus yang dapat mengaburkan potensi yang lebih besar jika *core competency* diperhatikan sepenuhnya.

IDENTIFICATION CRITERIA

- *Accessibility* : capability to access various potential markets
- *Unique/rare* : difficult to be imitated by competitors
- *Value creation* : providing immense contribution on product benefits, particularly from the customers' perspective

RISKS

Neglecting *core competency* will result in risks such as:

1. Neglected opportunities for growing business.
2. Reorganizing companies into smaller business units may results in weakening competence.
3. Lack of sensitivity on other relevant opportunity.
4. Less optimum investment.
5. Neglected *core competency* due to the over-emphasize on periodical work, which is highly affected by selling price and market competence.

OBSTACLES

1. Loss due to weakened *core competency* in which only a small amount can be calculated in advance.
2. High market growth which results in fairly good performance may obscure bigger potential should the *core competency* is fully considered.



Core competency berpotensi besar dalam memperkuat *competitive advantage*. Namun demikian, *Competitive advantage* yang kuat masih dapat terhalangi oleh faktor-faktor dinamis dalam persaingan pasar, seperti kurangnya kesetiaan pelanggan dan tidak adanya *customer relationship*. Pada saat ini dan masa yang akan datang, Perum Jamkrindo memiliki beberapa tantangan strategis berkaitan dengan faktor-faktor dinamika persaingan pasar yang terkait dengan potensi *moral hazard* pada customer (lihat Bab 5 tentang permasalahan strategis).

Sesuai kriteria identifikasi di atas dan hasil pengembangan model bisnis Perusahaan, kompetensi inti Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut;

1. Memiliki keahlian dan reputasi yang baik dalam bidang penjaminan kredit UMKMK.
 - * Kecepatan pembayaran klaim penjaminan kredit.
 - * Melayani produk sesuai dengan kebutuhan mitra kerja (*customized product*)
2. Memiliki modal yang besar dan dukungan yang besar dari Pemerintah.
Sistim informasi yang terintegrasi secara internal maupun eksternal dengan mitra kerja

Core competency may bring massive potential to the improvement of *competitive advantage*. However, strong *Competitive advantage* may still be obstructed by dynamic factors in market competition, such as the lack of customers' loyalty and lack of customer relationship. In both the present and the future, Perum Jamkrindo is bond to several strategic challenges which are linked to the dynamic factors of market competition in relation to the moral hazard potential on customers (see Chapter 5 on Strategic Matter).

Referring to the identification criteria above and the result of improvement on the Company's business model, the core competence of Perum Jamkrindo is as follows;

1. Good skills and reputation in UMKMK credit guarantee.
 - * The immediacy of credit guarantee revenue payment.
 - * Serving products in accordance with the needs of work partners (*customized product*)
2. Strong capital and support from the Government.
Integrated internal and external information system with work partners .

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Perum Jamkrindo menyadari betapa pentingnya kualitas SDM bagi kinerja operasional, pemasaran dan keuangan Perusahaan. Karyawan yang handal hanya dapat dibentuk dari orang-orang yang mempunyai integritas, dedikasi serta loyalitas yang baik.

Jamkrindo realizes the importance of the quality of Human Resources for the operational, marketing, and financial performance of the Company. Skilled employees can be developed from people with good integrity, dedication and loyalty.

81



Konsep Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perum Jamkrindo senantiasa dikembangkan dalam rangka menciptakan pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan. Pengembangan kompetensi SDM dilakukan tidak hanya fokus pada pengembangan kompetensi SDM terhadap kegiatan usaha Perusahaan semata melainkan juga mampu mencetak SDM yang dapat menjadi anggota tim yang solid dan dapat melayani masyarakat UMKMK dengan baik.

Selain itu, melalui pengelolaan SDM yang berkesinambungan, diharapkan dapat tercipta sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam jumlah yang memadai berdasarkan keahlian, sehingga mampu mewujudkan komitmen Perusahaan dalam melakukan yang terbaik bagi pelanggan serta mendukung keberhasilan perusahaan dalam mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan.

Demografi SDM Perum Jamkrindo

Secara rinci, jumlah karyawan Perum Jamkrindo pada tahun 2013 sebanyak 513 karyawan. Jumlah tersebut meningkat 47,84% dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat sebanyak 347 karyawan. Peningkatan ini merupakan konsekuensi akan kebutuhan kuantitas SDM dengan pertimbangan pengembangan bisnis Perum Jamkrindo, namun tetap mengedepankan aspek kualitas kinerja setiap SDM. Selain itu, komposisi SDM Perum Jamkrindo juga ditujukan untuk menciptakan Perusahaan penjaminan kredit yang berkelanjutan.

Berikut rincian mengenai perkembangan komposisi karyawan yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, level organisasi, usia, dan gender.

The concept of Human Resource (HR) Management and Development of Perum Jamkrindo is constantly developed in terms of the creation of sustainable Company growth. Human Resource competency development is conducted not only in the company's business activity but also to generate Human Resources that capable to be a good tim member and the SME's.

In addition, through a sustainable human resource management, the capable and professional human resources based on skills could be created in sufficient number in order to translate the Company's commitment to bring the best service for customers and to support the company's achievements in the implementation of the predetermined strategy.

HR Demography of Perum Jamkrindo

In details, the number of employees of Perum Jamkrindo in 2013 was 513 employees. The number increased by 47,8% compared to 2012 which was recorded at 347 employees. The increase was a consequence to the need of the employee quantity with consideration of Perum Jamkrindo's business development as well as the performance quality of each Human Resource. In addition, the Human Resources composition of Perum Jamkrindo was also aimed to create a sustainable credit guarantee Company.

Details of the development of employees composition, which are classified based on education, organization level, age, and gender, are as follow:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employees Composition based on Education

Tingkat Pendidikan / Education Level	2013		2012	
	Jumlah / Total	%	Jumlah / Total	%
Pasca Sarjana / Post Graduates	28	5,46%	22	6,34%
Sarjana / Bachelors	367	71,54%	251	72,33%
Sarjana Muda / Diploma	67	13,06%	34	10,09%
SLTA / Senior High School	39	7,60%	29	8,07%
SLTP / Junior High School	9	1,75%	6	1,73%
SD / Elementary School	3	0,58%	5	1,44%
Jumlah / Total	513	100,00%	347	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

Employees Composition Based on Position Level

Jabatan / Position	2013	2012	Persentase / Percentage
Kepala Divisi / Head of Divisions	14	14	0.0%
Pejabat Pengkaji Utama / Head of Primary Reviewer	0	2	-100.0%
Kepala Kantor Cabang / Head of Branch Offices	21	11	90.9%
Kepala Kantor Anak Cabang / Head of Subsidiary Office	0	7	-100.0%
Kepala Bagian / Head of Sub-Divisions	57	55	3.6%
Kepala Unit / Head of Units	12	12	0.0%
Staf / Staff	168	149	12.8%
Pelaksana / Operator	48	49	-2.0%
Calon Karyawan / Employee Candidate	193	48	302.1%
Jumlah / Total	513	347	47.8%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Employees Composition Based on Based on Status

Status	2013	2012	Persentase / Percentage
Kontrak / Outsourcing	52	113	-53,98%
Tetap / Permanent	320	305	4,92%
Calon Karyawan / Employee Candidate	193	48	302,08%
Jumlah / Total	565	466	21,24%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Gender

Employees Composition Based on Based on Gender

No.	Unit Kerja / Work Unit	L	P	Jumlah / Total
1	Kanpus	139	98	237
2	Kanca Jakarta	8	8	16
3	Kanca Bandung	20	10	30
4	Kanca Semarang	17	9	26
5	Kanca Surabaya	13	8	21
6	Kanca Denpasar	11	10	21
7	Kanca Jakarta 2	1	0	1
8	Kanca Medan	9	7	16
9	Kanca Pekanbaru	10	6	16
10	Kanca Palembang	10	5	15
11	Kanca Pontianak	10	6	16
12	Kanca Samarinda	8	4	12
13	Kanca Palangkaraya	8	2	10
14	Kanca Banjarmasin	8	4	12
15	Kanca Manado	9	1	10
16	Kanca Kupang	9	4	13
17	Kanca Mataram	7	3	10
18	Kanca Jayapura	4	2	6
19	Kanca Jambi	4	3	7
20	Kanca Bandar Lampung	1	0	1
21	Kanca Yogyakarta	1	0	1
22	Kanca Makassar	11	5	16
Jumlah / Total		318	195	513

Rekrutmen SDM dan Pengembangan Karir

Perum Jamkrindo menyadari betapa pentingnya kualitas SDM bagi kinerja operasional, pemasaran dan keuangan Perusahaan. Karyawan yang handal hanya dapat dibentuk dari orang-orang yang mempunyai integritas, dedikasi serta loyalitas yang baik.

Oleh karena itu, Perum Jamkrindo pada tahap awal perekrutan karyawan senantiasa berupaya untuk mencari dan menempatkan calon-calon karyawan dengan aspek kompetensi dan integritas terbaik, berkualitas, dan mumpuni sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dalam melayani masyarakat. Perum Jamkrindo tidak hanya menawarkan pekerjaan pada bidang keahlian yang dimiliki masing-masing karyawan maupun calon karyawan, namun juga kepastian jenjang karir bersama Perum Jamkrindo.

Sesuai kompetensi dan untuk menjaga independensi maka seleksi karyawan dilakukan melalui konsultan independen yang mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang rekrutmen karyawan. Selain karyawan tetap, Perum Jamkrindo juga merekrut tenaga kerja dengan status Tenaga Kontrak Kerja Waktu Tertentu (KKWT) yakni tenaga kerja yang bekerja dalam waktu tertentu untuk mengerjakan pekerjaan pendukung di Perusahaan.

Proses rekrutmen yang diselenggarakan Perum Jamkrindo senantiasa mengedepankan asas-asas keterbukaan, kewajaran, dan kesetaraan berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki oleh calon karyawan. Perum Jamkrindo juga memberikan peluang seluas-luasnya bagi lulusan perguruan tinggi terbaik yang ingin mengembangkan karir.

Pendidikan dan Pelatihan

Perum Jamkrindo mempunyai komitmen yang tinggi untuk selalu meningkatkan kualitas karyawan sebagai salah satu kunci utama penentu keberlangsungan Perusahaan. Salah satu sarana peningkatan kualitas dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan karyawan.

Program pelatihan dan pendidikan Perum Jamkrindo dijalankan dengan tetap memperhatikan kemampuan finansial

Human Resource Recruitment and Career Development

Jamkrindo realizes the importance of the quality of Human Resources for the operational, marketing, and financial performance of the Company. Skilled employees can be developed from people with good integrity, dedication and loyalty.

Therefore, during the early stage of employee recruitment, Perum Jamkrindo constantly strives to seek and put prospective employees with the best quality of competence, integrity, and qualification in accordance with the Company's requirements in serving the community. Perum Jamkrindo offers jobs not only in the field of expertise of each employee or employee candidate, but also the certainty of careers path with Perum Jamkrindo.

In correspond to the competence and to maintain independency, employee selection is conducted by independent consultants who are competence and experienced in the field of employee recruitment. In addition to permanent employees, Perum Jamkrindo recruits Temporary Contract Workers, namely workers who work in a certain period of time for supporting assignments.

The recruitment process organized by Perum Jamkrindo constantly prioritizes the principles of transparency, fairness, and equality based on merit and competence possessed by employee candidates. Perum Jamkrindo also provides more opportunities for the best university graduates to develop their careers.

Education and Training

Perum Jamkrindo is highly committed to the constant improvement of the employees' quality as one of the key factors of the Company's sustainability. Employee training and education program is one of the means of quality improvement.

Perum Jamkrindo's training and educational program is conducted in reference to the financial ability of the Company.

Perusahaan. Program pelatihan dan pendidikan tersebut disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Berbasis Kompetensi
Program pelatihan mengacu pada kebutuhan kompetensi sesuai *job description* masing-masing karyawan.
- 2) Berjenjang
Program pelatihan dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatan kebutuhan/tuntutan tugas, tanggung jawab dan jabatan karyawan.
- 3) Berkelanjutan
Program pelatihan dilakukan secara berkesinambungan baik dari segi materi (materi level terendah sampai level tertinggi) maupun dari segi kontinuitasnya.

Sedangkan jenis pelatihan yang diperuntukan kepada karyawan dibedakan dalam 2 (dua) program sebagai berikut:

- 1) Program Pelatihan Reguler
Program pelatihan yang dirancang khusus untuk dilaksanakan secara rutin (tahunan) oleh Perusahaan. Dalam rangka program pelatihan reguler maka dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis pelatihan sebagai berikut:
 - a) Pelatihan Prajabatan
Pelatihan yang harus diikuti karyawan yang akan diangkat menjadi Calon Karyawan dan Karyawan Tetap atau yang akan atau telah menduduki suatu tingkat jabatan tertentu.
 - b) Pelatihan Kompetensi Teknis
Pelatihan yang harus diikuti karyawan agar mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai *job description* masing-masing.
- 2) Program Pelatihan Non Reguler
Program pelatihan di luar program reguler yang tema dan pelaksanaannya bersifat insidental sesuai kebutuhan Perusahaan. Materi pelatihan diberikan secara komprehensif meliputi semua aspek peningkatan kualitas, baik kualitas perilaku maupun keilmuannya.

Untuk itu materi Pelatihan Prajabatan terdiri dari:

- a) Pelatihan Pengetahuan Perusahaan (*Corporate and Product Knowledge*)
Pelatihan-pelatihan tentang pengetahuan Perusahaan yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan sesuai tingkatan dan jabatan karyawan.

The educational and training program are composed in reference to the principles below:

- 1) Competence-Based
The training program refers to the need for competence which is related to the job description of each employee.
- 2) Tiered
The training program is conducted in stages which correspond to the level of employees' duty needs/demands, responsibilities and position.
- 3) Sustainable
The training programs are conducted continuously in terms of material (the lowest up to the highest material level) and continuity aspects.

Whereas, the type of trainings intended for employees are classified into two (2) programs:

- 1) Regular Training Program
The training program specifically designed to be implemented on a regular basis (annually) by the Company. In order to conduct regular training program, there are 2 (two) types of training:
 - a) Pre-service Training
A compulsory training for employees who will be appointed as Employee Candidate and Permanent Employee or for employees who will or have occupied certain position.
 - b) Technical Competence Training
A compulsory training for the employees in order to attain the necessary technical competence to carry out duties relevant to each job description.
- 2) Non-Regular Training Program
An insidental training programs outside of the regular program which theme and implementation are based on the Company's needs. The training materials are comprehensively provided and cover all aspects of quality improvement for both behavioral and scientific qualities.

The material for Pre-service Training consists of:

- a) Training on Corporate and Product Knowledge

The training on knowledge of the Company which are mandatory for all employment levels and positions.

b) Pelatihan Perilaku

Pelatihan-pelatihan yang bertujuan pembentukan untuk dan peningkatan kualitas kepribadian, perilaku dan etika karyawan, yang wajib diikuti seluruh karyawan sesuai tingkatan dan jabatan karyawan.

c) Pelatihan Manajerial

Pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan karyawan, serta ditujukan bagi karyawan yang akan atau telah menduduki suatu tingkat jabatan struktural.

b) Behavioral Training

The training which is aimed at the establishment and improvement of the quality of personality, behavior and ethics of employees, which is mandatory for all employment levels and positions.

c) Managerial Training

The training which is aimed to improve the managerial and leadership abilities of employees, and is intended for employees who will be or have been occupying a structural position level.

Pelatihan dilakukan melalui lembaga pendidikan yang mempunyai kompetensi di bidang yang diperlukan maupun secara mandiri oleh para pejabat senior Perusahaan untuk materi *"Corporate and Product Knowledge"* dan sebagai sarana transfer pengetahuan ilmu Penjaminan Kredit dari pejabat yang telah mempunyai pengalaman di bidang tersebut kepada para staf sebagai generasi penerus Perusahaan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas karyawan Perusahaan juga telah menjalankan program pemberian beasiswa pendidikan ke jenjang S2 dengan program studi sesuai kebutuhan Perusahaan. Seleksi pemberian beasiswa tersebut dilakukan dengan memperhatikan kinerja dan kontribusi karyawan.

Guna meningkatkan kompetensi SDM Perusahaan serta pencerminan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh SDM di tahun 2013, Perum Jamkrindo telah mengeluarkan dana pendidikan dan pelatihan sebesar Rp4,5 miliar naik 31,5% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp3,4 miliar.

Tingkat Kesejahteraan

Perum Jamkrindo menyadari bahwa tuntutan tugas dan tanggung jawab Perusahaan terus meningkat seiring peningkatan skala dan volume bisnis Perusahaan. Untuk itu seluruh karyawan dituntut dapat bekerja secara intensif dan optimal sesuai kebutuhan Perusahaan.

Selain menyediakan lingkungan kerja yang nyaman, baik, dan kondusif, Perum Jamkrindo juga berupaya untuk menyempurnakan sistem penggajian karyawan. Sistem

The trainings are conducted both through educational institutions which have the necessary competence in the field and independently by the senior officers of the Company for the *"Corporate and Product Knowledge"* material, as well as a mean of knowledge transfer of Credit Guarantee science from personnels with extensive experience in the field to the staff as the Company's successors.

In order to improve the quality of its employees, the Company has conducted a scholarship program for Masters degree in which the courses are selected based on the Company's requirement. The selection for the scholarship is organized by taking into account the performance and contribution of the employees.

Guna meningkatkan kompetensi SDM Perusahaan serta pencerminan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh SDM in 2013, Perum Jamkrindo telah mengeluarkan dana pendidikan dan pelatihan sebesar Rp4,5 miliar naik 31,5% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp3,4 miliar.

Welfare Levels

Perum Jamkrindo realized that the demand of the task and responsibility of the Company continues to increase along with the the increases in scale and volume of the Company's business. In that respect, all employees are required to work intensively and optimally to meet the Company's needs.

In additon to provide a convenient, good and condusive atmosphere, Perum Jamkrindo strived also to improve the payroll system. Perum Jamkrindo's payroll system is developed

penggajian karyawan Perum Jamkrindo disusun dengan memperhatikan masa kerja, beban kerja, tanggung jawab serta risiko tugas maupun jabatan masing-masing karyawan.

Perum Jamkrindo memiliki beberapa sistem panggajian yakni sistem penggajian yang bersifat umum dan khusus. Sistem penggajian bersifat khusus antara lain meliputi tunjangan kasir dan tunjangan kemahalan bagi karyawan yang bertugas di wilayah yang tingkat biaya hidupnya relatif lebih tinggi dari rata-rata wilayah lainnya.

Perum Jamkrindo telah menerapkan sistem pemberian insentif baik kepada karyawan maupun Unit Kerja sebagai bentuk apresiasi atas kinerja karyawan. Selain hal tersebut, Perum Jamkrindo juga memberikan benefit kepada Karyawan berupa Jasa Produksi sebagai bentuk apresiasi Perusahaan atas kinerja tahunannya.

Berikut rincian pendapatan dan rasio gaji tertinggi dan terendah pegawai Perum Jamkrindo:

1) Pendapatan Pegawai Perum Jamkrindo terdiri dari:

- a. Gaji Pokok;
- b. Tunjangan Jabatan;
- c. Tunjangan Perusahaan:
 - 1) Perumahan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Pakaian;
 - 4) Cuti;
 - 5) Kesejahteraan;
 - 6) Tunjangan Hari Raya;
 - 7) Uang Makan;
 - 8) Uang Transportasi;

2) **Rasio Gaji (Upah) Tertinggi dan Terendah**

Berikut kami sampaikan Rasio Gaji (Upah) Tertinggi dan Terendah.

- a. Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah: 1 : 4,26
- b. Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah: 1 : 1,20
- c. Rasio Honorarium Dewan Pengawas Tertinggi dan Terendah: 1 : 1,07
- d. Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan pegawai Tertinggi: 1 : 8,96

by taking account of tenure, workload, responsibilities, and work risks as well as the job duties of each employee.

Perum Jamkrindo has implemented a system of incentives in general and particular. The particular system includes cashier allowances and expensiveness allowances for employees who served in the region that relatively has higher living expenses than the average elsewhere.

Perum Jamkrindo has implemented a good payroll system to both employees and the Working Unit as a token of appreciation on working performance. In addition, Perum Jamkrindo also provided benefits to employees as on the Company's annual performance.

Here are the details of income and the ratio of the highest and lowest salaries of employees of Perum Jamkrindo:

1) Employee Revenue of Perum Jamkrindo consists of:

- a. Basic Salary;
- b. Allowance Position;
- c. Allowances:
 - 1) Housing;
 - 2) Health;
 - 3) Clothing;
 - 4) Leave;
 - 5) Welfare;
 - 6) Religion Holiday Allowance;
 - 7) Meals allowances;
 - 8) Transportation;

2) **The ratio of the highest and the lowest salary (wages)**

The ratio of the highest and the lowest Salary are as follows.

- a. Ratio of the Highest and the Lowest salary of Employees : 1: 4.26
- b. Ratio of the Highest and the Lowest salary of Directors: 1: 1.20
- c. Ratio of the Highest and the Lowest Honorarium of the Supervisor : 1: 1.07
- d. Ratio the Highest Salaries of Employee and the Directors : 1: 8.96

RASIO GAJI 2013

SALARY RATIO 2013

GAJI / SALARY	GG/TG	GAJI + TUNJANGAN TETAP	JABATAN / POSITION
Gaji Tertinggi / Highest Salary 2013	GG XII/ 16.3	19.513.732,00	KEPALA DIVISI / DIVISION HEAD
Gaji Terendah / Lowest Salary 2013	GG III/3	3.315.750,00	PELAKSANA / STAFF

88

Hubungan Industrial dan Budaya Kerja

Industrial Relation and Work Culture

Identitas Perusahaan / Identity of Company	Hubungan Ketenagakerjaan / Labor Relationship	Perlindungan Tenaga Kerja / Labor Protection	Kesempatan Kerja berlandaskan / Basis for Labor Vacancy
- Perum Jamkrindo adalah BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.41/ Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 <i>Perum Jamkrindo is a state-owned enterprise established by virtue of Government Regulation No.41/Year 2008 dated May 19, 2008.</i> - Tugas Perum Jamkrindo adalah menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Penjaminan Kredit bagi UMKK <i>Perum Jamkrindo is responsible for conducting business activities of Credit Guarantee for SMEs.</i> - Berkedudukan dan berkantor Pusat di Jl. Angkasa Blok B9 Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720 <i>Domiciled and has office centre at Jl. Angkasa Blok B9 Kav. 6, Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720.</i> - Perusahaan membuka 11 Kantor Cabang dan 6 Kantor Anak Cabang di wilayah RI <i>The Company opened 11 branch offices and 6 sub branch offices in all Indonesia's regions.</i> - Pengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi <i>The Management of the Company is monitored by the Board of Directors</i>	- Karyawan Perusahaan merupakan pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan oleh Keputusan Direksi berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan <i>Employees of the Company are those whose appointment, dismissal, rights and obligations are determined by the Decision of the Board of Directors based on the Collective Labour Agreement in accordance with the provisions of legislation regarding employment.</i> - Merupakan hubungan ketenagakerjaan antara Perusahaan dan karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah (unsur hak & Kewajiban Perusahaan dan karyawan) <i>It is a relationship of employment between the Company and its employees under the Employment Agreement that has elements of work, wages and command (the main right and obligation of the Company and employees)</i> - Segala hal yang berhubungan dengan karyawan pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja <i>All matters related to the employees at the time before, during and after the period of work.</i>	- Karyawan Perusahaan telah memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja <i>Employees of the Company have obtained the protection of occupational safety and health.</i> - Perusahaan telah menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Perusahaan <i>The Company implemented a safety management system and occupational health management system integrated with the Company.</i>	- Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja warga negaranya <i>The government is responsible for seeking employment opportunities of its citizens.</i> - Pemerintah bersama masyarakat mengupayakan perluasan kesempatan kerja warga negaranya <i>Government and community efforts to extend employment opportunities of its citizens.</i> - Kebijakan Pemerintah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja warga negaranya <i>Government policies are aimed at every sector to realize the expansion of employment opportunities of its citizens.</i> - Lembaga Perbankan keuangan/ perbaikan/ Non Bank dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja <i>Financial Institutions Banking / repair / Non-Banks and businesses need to support and provide facilities for every community to create employment opportunities.</i>

Jumlah Pegawai Keluar (*Turn Over*)

Data jumlah pegawai keluar (*turn over*) pada tahun 2013 terdiri dari pensiun normal, pensiun dini, mengundurkan diri, dan meninggal dunia.

No.	Pegawai Keluar / Turn Over	Jumlah / Total
1	Pensiun normal / Normal resignation	15
2	Pensiun dini / Early Resignation	0
3	Mengundurkan diri / resign	7
4	Meninggal dunia / Decedent	1
Jumlah / Total		23

Serikat Pekerja

Perum Jamkrindo menyadari bahwa serikat pekerja merupakan mitra strategis bagi Perusahaan untuk bersama-sama mengembangkan bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan memberikan kebebasan bagi Karyawan untuk membentuk perserikatan dan berorganisasi. Serikat Pekerja atau Asosiasi Pekerja dibentuk sebagai wadah bagi karyawan untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan karyawan.

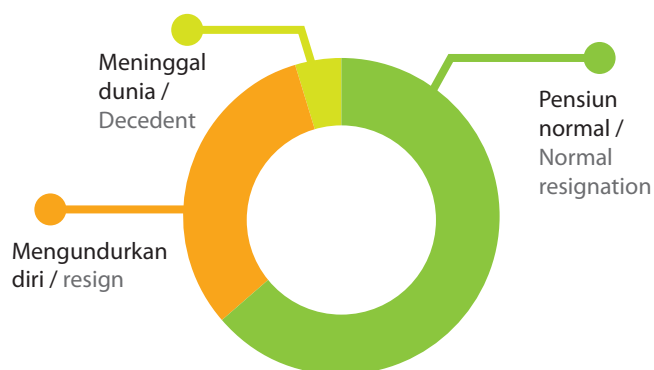
Hubungan yang terjalin antara manajemen Perusahaan dengan karyawan senantiasa menuju pada peran positif dari masing-masing pihak dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Perusahaan menerapkan pola hubungan yang komunikatif dan konsultatif terkait ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja.

Serikat pekerja yang ada di Perum Jamkrindo bernama Sekarya (Serikat Pekerja Karyawan Jamkrindo) guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 10 Tahun 2006. Sekarya berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 kelurahan Kota Baru Kecamatan Bandar Kemayoran Jakarta Pusat. Sekarya juga telah menyelenggarakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Sekarya telah tercatat di suku dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan keputusan Menteri Nomor: Kep.16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001. Seluruh keterangan persyaratan keputusan Menteri tersebut telah dipenuhi

Total of Turn Over

Data of the number of turn over in 2013 consists of normal resignation, early resignation, and decedent



Employee Union

Perum Jamkrindo realized that Employee Union is a strategic partner for delveloping Company's business. Therefore, the Company provides fredom to the Employees to establish and organize a union. Employees Union or Employees Association were formed as a media for the Employees in sharing aspirations and interests of the employees.

The relationship involved between the Company's management and employees toward the positive role of each party in the resulation of manpower issues. Company implemented a communicative and consultative regarding manpower to improve work productivity and workers' welfare.

Employee Union existing in Perum Jamkrindo is named Sekarya (Serikat Pekerja Karyawan Jamkrindo), to be in accordance with provision of Article 15 verse (1) stated in Governor Regulation of DKI Jakarta Province No 10 Year 2006. Sekarya is located on Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6, Kota Baru Sub-district, Bandar Kemayora, Central Jakarta. Sekarya has also amended its Articles of Association.

Sekarya is registered in bureau of Manpower and Transmigration based on Ministerial Decree Number: Kep.16/MEN/2001 dated February 15, 2001. All the decree's provisions have been met and registered based on letter number 382/I/P/X/2005 dated

dan dicatat sesuai dengan nomor 382/I/P/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005 oleh kepala suku dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat.

Saat ini, Perum Jamkrindo telah membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara serikat pekerja dengan Perum Jamkrindo yang berisi tentang Hak dan Kewajiban karyawan. PKB bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi hubungan seluruh karyawan dengan Perum Jamkrindo. Sekarya dan Manajemen senantiasa saling berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja.

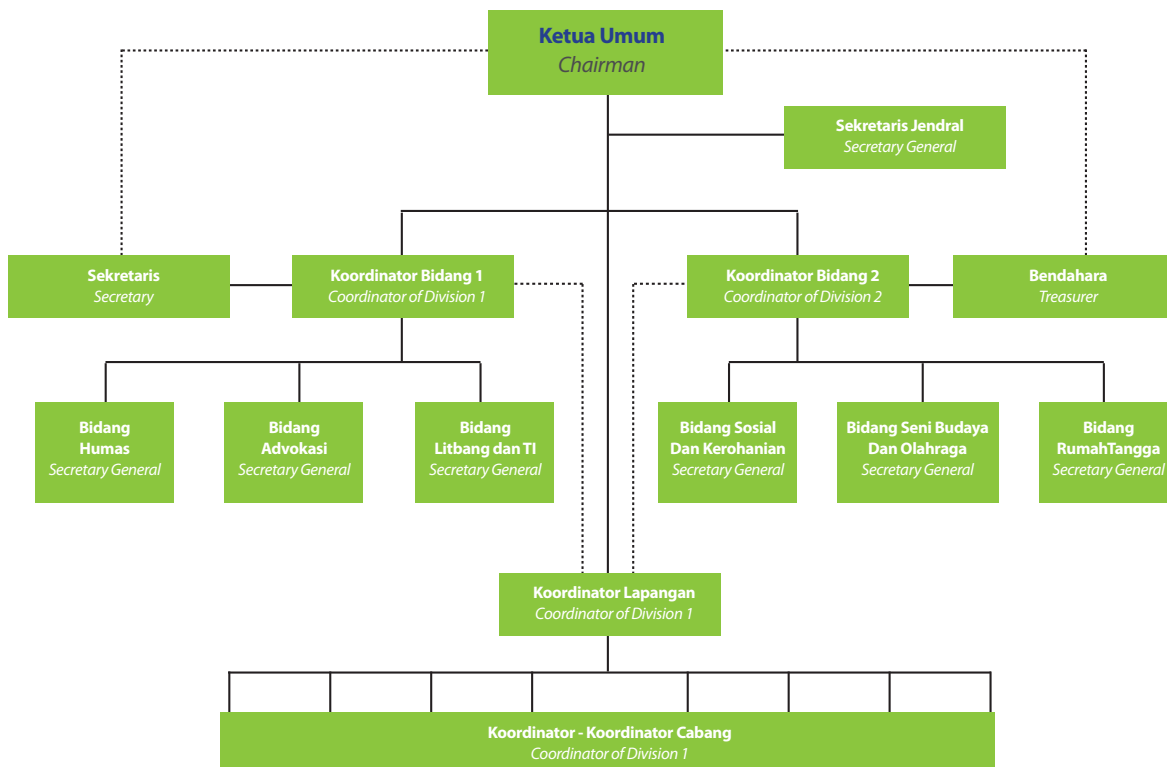
October 27, 2005 by bureau of Manpower and Transmigration of Central Jakarta.

At the moment, Perum Jamkrindo created Partnership Agreement with employee union containing Rights and Responsibilities of employees. The Partnership Agreement is designed to improve the harmonization between the Company and its workforce. Sekarya and the Management continued to communicate and consult on employment to improve work productivity and employee's welfare.

Struktur Organisasi

Organization Structure

STRUKTUR ORGANISASI SeKarya Jamkrindo Periode Tahun 2013-2015 Organization Structure of Sekarya Jamkrindo Period 2013-2015



Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2014

Kesuksesan dan keberlanjutan bisnis Perusahaan sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM, baik dari sisi pengelolaan internal maupun guna memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Perencanaan dan pengembangan SDM merupakan fungsi utama yang senantiasa dilaksanakan oleh Perusahaan. Hal tersebut diselenggarakan oleh Perum Jamkrindo guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat.

Tujuan Perencanaan SDM :

1. guna menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan
2. guna menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya.
3. guna menghindari terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas
4. guna mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga diharapkan produktivitas kerja meningkat.
5. guna menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan.
6. guna menjadi pedoman dalam menetapkan program rekrut, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan
7. menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi (vertikal atau horisontal) dan pensiun karyawan
8. menjadi Dasar dalam melakukan penilaian pegawai.

Data diklat SDM Perum Jamkrindo pada Tahun 2013 antara lain sebagai berikut:

No	Nama pelatihan / Workshop	Pelaksana Pelatihan / Training Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date	Tempat Pelatihan / Training Place	Peserta / Participants	Jumlah (orang) Total (person)	Biaya Pelatihan / Training Fee	Biaya Lain-Lain (uang transport, SPPD, penginapan)	Jumlah Biaya / Total Fee
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Fraud Auditing	YPIA	4-5 Februari 2013	Graha Sucofindo Jakarta	Dadang Ary Avianto	1	Rp2,500,000	Rp200,000	Rp2,700,000
2	Proses dan Teknik Audit Internal	YPIA	6-8 Februari 2013	Ged. Graha Sucofindo (Pasar Minggu)	Arry Andru P., Rian Widipratomo	2	Rp3,500,000	Rp450,000	Rp7,450,000
3	Sertifikasi Wakil Manajer Investasi	TICMI	8 Februari s/d 5 April 2013	UI Salemba	Henry Nur Irianto	1	Rp12,500,000	Rp3,685,000	Rp16,185,000

HR Development Plan of 2014

The success and sustainability of the Company's business is largely determined by the availability of HR, either in terms of internal management or to meet the needs of stakeholders. Planning and Development of HR is the main function of which always carried out by the Company. It is carried out by Perum Jamkrindo to ensure the availability of appropriate manpower to occupy various positions, functions, and the right job at the right time.

Purposes on HR Planning:

1. to determine the quality and quantity of employees that will occupy all positions in the company
2. to ensure the availability of manpower in the present and future, so that every job handled
3. to avoid mismanagement and overlap in the performance of duties
4. to facilitate coordination, integration, and synchronization which is expected to increase labor productivity
5. to avoid shortages or excess employees
6. to be a guideline in setting the program of recruitment, selection, development, compensation, integration, maintenance, discipline, and dismissal of employees
7. To be a guideline in conducting mutation (vertical or horizontal) and retired employees
8. To be the Foundation in assessing employee.

The HR training data of Perum jamkrindo in 2013 are as follows:

No	Nama pelatihan / Workshop	Pelaksana Pelatihan / Training Organizer	Tanggal Pelatihan / Training Date	Tempat Pelatihan / Training Place	Peserta / Participants	Jumlah (orang) Total (person)	Biaya Pelatihan / Training Fee	Biaya Lain-Lain (uang transport, SPDP, penginapan)	Jumlah Biaya / Total Fee
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Menulis Laporan Audit Internal yang Efektif	YPIA	11-12 Februari 2013	Ged. Graha Sucofindo (Pasar Minggu)	Arry Andru P., Bani Dwi Perdaniwati	2	Rp2,500,000	Rp300,000	Rp5,300,000
5	Presentasi Outlook Ekonomi 2013	PT.PP	13 Februari 2013	Grand Hyatt	Krisna Johan, Aghastyo A.	2	Rp0		Rp0
6	Workshop Knowledge Management	PT. Satkomindo Mediyasa	21 Februari 2013	Graha Niaga Lt.27	Zachri, Ringgi Galih	2	Rp0		Rp0
7	Seminar Laporan Keuangan Konsolidasi berbasis IFRS & Akuntansi Kombinasi Bisnis	Continuing Professional Education (CPE)	21 Februari 2013	JW Marriott	Imam Wahyudi, Putu Panca Nitari	2	Rp2,000,000	Rp225,000	Rp4,225,000
8	Seminar Pajak	Kanca Manado	Feb-13						Rp1,288,000
9	Workshop Pedoman Penentuan KPI Berbasis KPKU pada BUMN	Media Pekerja BUMN	8 Maret 2013	Hotel Aston Primera Pasteur	Nina Kurnia Dewi	1	Rp2,700,000		Rp2,700,000
10	Workshop Prinsip-prinsip dan Best Practice Reasuransi oleh Nico Lukum, ACII	Jamkrindo	18 Maret 2013	Swiss Bel Hotel	Seluruh Kadiv, Kakanca dan Kabag Kanpus	34	Rp3,760,000	Rp2,240,000	Rp6,000,000
11	Workshop Membangun Perusahaan yang Berintegritas dan GCG oleh Dr. Ir. Waluyo	Jamkrindo	18 Maret 2013	Swiss Bel Hotel	Seluruh Kadiv, Kakanca dan Kabag Kanpus	34	Rp4,700,000	Rp22,226,340	Rp26,926,340
12	Workshop Permen BUMN No.15 thn 2012 ttg Pengadaan Barang & Jasa BUMN oleh Hambra	Jamkrindo	18 Maret 2013	Swiss Bel Hotel	Seluruh Kadiv, Kakanca dan Kabag Kanpus	34	Rp3,760,000	Rp4,540,000	Rp8,300,000
13	IHT Host to Host BRUJamin	Jamkrindo	27-28 Maret 2013	Kanpus Jamkrindo	Lampiran 1	36	Rp11,750,000	Rp26,623,185	Rp38,373,185
14	Menulis Laporan Audit Internal yang Efektif	YPIA	3-4 Apr 2013	Graha Sucofindo Jakarta	Afhita Dias, Rian Widipratomo	2	Rp2,500,000	Rp300,000	Rp5,300,000
15	Proses dan Teknik Audit Internal	YPIA	8-10 Apr 2013	Graha Sucofindo Jakarta	Bani Dwi Perdaniwati	1	Rp3,500,000	Rp225,000	Rp3,725,000
16	Pelatihan dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jamsostek	15 Apr 2013	Hotel Le Meridien Jakarta	Wahyu Budiono	1	Rp0	Rp75,000	Rp75,000
17	Control Self Assessment	YPIA	15-17 Apr 2013	Graha Sucofindo Jakarta	Sri Lestari	1	Rp3,500,000	Rp300,000	Rp3,800,000
18	Workshop Kajian Kelayakan Proyek TI	Forum TI BUMN	18 Apr 2013	Kementrian BUMN Jakarta	Amin Mas'udi, Wildan R. Firdaus	2	Rp1,000,000	Rp200,000	Rp2,200,000
19	Advanced Mikrotik Training - Routing (MTCRE)	Mikrotik Indonesia	23-26 Apr 2013	Ged. Cyber Lt.7 PT.Indonesia Data Center	Ringgie Galih Sugestie	1	Rp2,950,000	Rp300,000	Rp3,250,000
20	Audit Intern Tingkat Lanjutan I	YPIA	29 Apr - 10 Mei 2013	Graha Sucofindo Jakarta	Sudibyo Utomo	1	Rp6,500,000	Rp1,250,000	Rp7,750,000
21	Workshop Bank Garansi	Lembaga Pusat Pengembangan Profesi Indonesia (PPPI)	7-8 Mei 2013	Hotel Oasis Amir Jakarta	Jehezkiel M, Eka Martha F, Yulisatuti	3	Rp3,250,000	Rp450,000	Rp10,200,000
			23-24 Mei 2013	Hotel Perdana Wisata Bandung	Hariyadi TP, Nisa Hanindita, Nisa Nuryah	3	Rp3,000,000	Rp225,000	Rp9,225,000

No	Nama pelatihan / Workshop	Pelaksana Pelatihan / Training Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date	Tempat Pelatihan / Training Place	Peserta / Participants	Jumlah (orang) Total (person)	Biaya Pelatihan / Training Fee	Biaya Lain-Lain (uang transport, SPPD, penginapan)	Jumlah Biaya / Total Fee
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Master Class Program Series XI "Crisis Management"	LSPMR	7-8 Mei 2013	Hotel Club Bunga Malang	Endang Sri W, Dwi Priyambodo	2	Rp4,050,000	Rp225,000	Rp8,325,000
23	Training of Trainers LHKPN	KPK	7 Mei 2013	Gedung KPK Kuningan	Santhi Dwi Rinanti	1	Rp0	Rp75,000	Rp75,000
24	Pelatihan Karakter Pancasila	BUMN Track	15-16 Mei 2013	Hotel Aryaduta	Nina KD, Arif A., Krisna Johan, Rinanto Deddy, Juli S, Trio W., Siti Maesaroh	7	Rp2,500,000	Rp1,250,000	Rp18,750,000
25	ERM : Cut The Risk By Knowing The Risk	LSPMR	20-23 Mei 2013	Hotel Maharaja Mampang	Tito Tetrasuta, Krisna Johan, Warih Nugroho, Ahmad Arifin	4	Rp7,125,000	Rp700,000	Rp29,200,000
26	Business Contract Drafting	Kontan Academy	22-23 Mei 2013	Hotel Santika Premiere Slipi	Nastiti P, Dyah Ayu K	2	Rp3,900,000	Rp300,000	Rp8,100,000
27	Pelatihan Bank Garansi	Kanca Jakarta							Rp4,750,000
28	Pelatihan	Kanca Surabaya							Rp7,763,000
29	Seminar	Kanca Denpasar							Rp450,000
30	Pelatihan Budgeting	PPM Manajemen	4-5 Juni 2013	Gedung PPM Manajemen	Hero Kesatria	1	Rp4,000,000	Rp150,000	Rp4,150,000
31	Designing SOP	PPM Manajemen	11 Juni 2013	PPM Manajemen	Ridwan Kurniawan K.	1	Rp0	Rp75,000	Rp75,000
32	Business Presentation and Writing (English)	Prasetya Mulya	11-13 Juni 2013	Prasetya Mulya	Rino Hapsoro	1	Rp3,800,000	Rp225,000	Rp4,025,000
33	Character Building 'Change Management: Be Upnormal!'	MKS Resources	14 Juni 2013	Hotel Inna Yogyakarta	Kadiv dan Kakanca	34	Rp72,600,000	Rp4,164,300	Rp76,764,300
34	Training of Trainers LHKPN	KPK	18 Juni 2013	KPK	Helena LM Simanjuntak	1	Rp0	Rp75,000	Rp75,000
35	Teknik dan Prosedur Penyusunan HPS yang Wajar dan Akuntabel dalam Pelaksanaan Pelelangan Barang/Jasa Perusahaan	INDES School of Development	17-19 Juni 2013	Hotel Saphir Yogyakarta	Arry Andru Palapi, Anna Dwiyaniti	2	Rp3,990,000	Rp150,000	Rp8,130,000
36	Pelatihan Basic ALMA	LPPI	17-20 Juni 2013	LPPI	Agus Mirazul F, Alexandry, Aloysius Prihartanto, Edward Afrizal, Etyk Turniyatun, Ika Rositawati, Irmatati, Widari Martiani, Yudy Setiaji	9	Rp5,800,000	Rp800,000	Rp49,040,000
37	Integrated New Product Development & Innovation	Prasetya Mulya	18-19 Juni 2013	Prasetya Mulya	Dwi Priyambodo, Ilham Prasajo	2	Rp4,800,000	Rp400,000	Rp10,000,000
38	Program Inventory Management	PPM Manajemen	18-20 Juni 2013	PPM Manajemen	Veronika Tri Pujiastuti	1	Rp4,700,000	Rp225,000	Rp4,925,000

No	Nama pelatihan / Workshop	Pelaksana Pelatihan / Training Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date	Tempat Pelatihan / Training Place	Peserta / Participants	Jumlah (orang) Total (person)	Biaya Pelatihan / Training Fee	Biaya Lain-Lain (uang transport, SPDP, penginapan)	Jumlah Biaya / Total Fee
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Marketing Management	PPM Manajemen	18-20 Juni 2013	PPM Manajemen	Akhmad Albaasithu, Nisa Hanindita, Yana Suryana, Bambang Hajar H, Bambang Suryo A, IGN Kwarta Haptana	6	Rp4,500,000	Rp450,000	Rp22,950,000
40	Cara Jitu Menghemat Pajak Penghasilan Badan pada Akhir Tahun Fiscal	Inti Pesan	19-20 Juni 2013	Hotel Menara Peninsula	Apip Amrulloh	1	Rp3,000,000	Rp150,000	Rp3,150,000
41	Perjanjian Kerja dan Drafting Membahas Aspek-aspek Legal dalam Berbagai Bentuk Perjanjian Kerja Termasuk PKWT dan Outsourcing	DHN Consulting Group	20 Juni 2013	Hotel Sahid Cikarang	Santhi Dwi Rinanti	1	Rp1,495,000	Rp75,000	Rp1,570,000
42	SOP Implementasi PER-19/MBU/2012 tentang Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan pada BUMN.	Media Pekerja BUMN	21 Juni 2013	Grand Royal Panghegar Bandung	Soegeng Iman W, M. Natsir Rahmadi	2	Rp3,500,000	Rp8,329,600	Rp15,329,600
43	Audit Intern Tingkat Lanjutan I	YPIA	24 Juni s/d 5 Juli 2013	YPIA	Dadang Ary Avianto	1	Rp6,500,000	Rp1,000,000	Rp7,500,000
44	Workshop Penyusunan Perjanjian Kerja Perusahaan "Mekanisme Penyusunan Perjanjian Kerja Berdasarkan PKWT, PKWTT dan Outsourcing antara Perusahaan dengan Karyawan	Indotama	24-26 Juni 2013	Jogjakarta Plaza Hotel	Zulfikar, Dyah Ayu Kusuma, Ambar Endhah P, Wahyu Sinarno	4	Rp3,825,000	Rp9,281,800	Rp24,581,800
45	Basic Accounting	PPM Manajemen	24-29 Juni 2013	PPM Manajemen	Maritza Ellanyndra	1	Rp5,000,000	Rp450,000	Rp5,450,000
46	Effective Supervisory Management	PPM Manajemen	25-27 Juni 2013	PPM Manajemen	I Made Sarwa S, Jaja Jatnika, Yendi Arbiantoro, Heri Surya, Eko Sudarto, Deden Wahyudin, Ahmad Andika P	7	Rp4,900,000	Rp9,688,100	Rp39,088,100
47	Designing Training Program	PPM Manajemen	26-28 Juni 2013	PPM Manajemen	Helena LM Simanjuntak	1	Rp4,100,000	Rp225,000	Rp4,325,000
48	Feasibility Study	PPM Manajemen	26-28 Juni 2013	PPM Manajemen	Jehezkiel M, Sigit Julianto, Pariyanti, Barlianta Jumhari S, Sylvia Indriyani JP, Hendra Musdika	6	Rp4,600,000	Rp14,716,000	Rp37,716,000

No	Nama pelatihan / Workshop	Pelaksana Pelatihan / Training Organizer	Tanggal Pelatihan / Training Date	Tempat Pelatihan / Training Place	Peserta / Participants	Jumlah (orang) Total (person)	Biaya Pelatihan / Training Fee	Biaya Lain-Lain (uang transport, SPPD, penginapan)	Jumlah Biaya / Total Fee
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Workshop Kedeputan Bidang Usaha Jasa								Rp31,268,500
50	Pelatihan	Kanca Pekanbaru							Rp5,605,700
51	Pelatihan	Kanca Palembang							Rp7,227,600
52	Pelatihan	Kanca Pontianak							Rp3,822,000
53	Pelatihan	Kanca Samarinda							Rp17,627,500
54	Pelatihan	Kanca Denpasar							Rp7,409,000
55	Pelatihan	Kanca Makassar							Rp9,219,000
56	Pelatihan	Kanca Mataram							Rp28,535,295
57	Pelatihan	Kanca Palangkaraya							Rp10,122,500
58	Pelatihan	Kanca Banjarmasin							Rp3,036,000
59	Pelatihan	Kanca Jayapura							Rp5,843,500
60	Pelatihan	Kanca Jambi							Rp10,604,000
61	Human Resources Management	PPM Manajemen	1-5 Juli 2013	PPM Manajemen	Santhi Dwi Rinanti	1	Rp5,200,000	Rp375,000	Rp5,575,000
62	Annual fee membership Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) tahun 2013	PKES	2013	PKES	Direktur Utama	1	Rp24,000,000	Rp0	
63	Update Perubahan PTKP & Perubahan SPT 21	Formasi	21-22 Agt 2013	Formasi	Etyk Turniyatun, Prastivi Widianingtyas	2	Rp4,000,000	Rp350,000	Rp4,350,000
64	Interpretasi Pemahaman dan Pendalaman Kinerja Berbasis KPU BUMN Gelombang 1	Forum Ekselen BUMN	24-25 Agt 2013	Telkom Corporate Univ. Bandung	Puspita Dewi, Panca Nitari, Dodi Rinto, Boy Priadi	4	Rp16,000,000	Rp3,200,000	Rp19,200,000
65	Pelatihan Kader Anti Narkoba	BNN	28 Agt 2013	Hotel Balairung Matraman	Dodi Novarianto, Dwi Priyambodo, Natsir Rahmadi, Heryanto Nugroho, Edward Afrizal, Hery Surya, I Made Sarwa, Wahyu Sinarno, Ary Andru P, Tubagus Mashudi	10	Rp0	Rp2,085,000	Rp2,085,000
66	Interpretasi Pemahaman dan Pendalaman Kinerja Berbasis KPU BUMN Gelombang 2	Forum Ekselen BUMN	28-30 Agt 2013	Hotel Braga Bandung	Sari Murniyati, Nina Kurnia Dewi	2	Rp7,000,000	Rp0	Rp7,000,000
67	IHT 'Peraturan dan Kebijakan Akuntansi Perusahaan'	Perum Jamkrindo	29-30 Agt 2013	Perum Jamkrindo		21			Rp52,464,674

No	Nama pelatihan / Workshop	Pelaksana Pelatihan / Training Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date	Tempat Pelatihan / Training Place	Peserta / Participants	Jumlah (orang) Total (person)	Biaya Pelatihan / Training Fee	Biaya Lain-Lain (uang transport, SPDP, penginapan)	Jumlah Biaya / Total Fee
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Workshop IT Master Plan	FORTI BUMN	29-30 Agt 2013	Telkom Data Sigma Sentul	Zachri, Ringgi Galih	2	Rp3,000,000	Rp15,350,000	Rp18,350,000
69	Pelatihan	Kanca Semarang							Rp3,076,000
70	Presentasi dan Diskusi Penyusunan RJPP 2014-2018 berbasis Malcolm Baldrige	Yuli Setiono (LMFE-UI)	2 Sept 2013	Perum Jamkrindo		34	Rp38,268,300		Rp38,268,300
71	Pengenalan Kepemimpinan Perusahaan dengan tema "Contemporary Issues On Leadership in Directorship to Add Corporate Value"	Ir. Tony Silitonga MBM, MBA DBAcan	2 Sept 2013	Perum Jamkrindo		34	Rp24,862,500		Rp24,862,500
72	Materi KPKU	Sugianto (Inspektorat Kemen BUMN)	2 Sept 2013	Perum Jamkrindo		34	Rp4,000,000		Rp4,000,000
73	Sosialisasi dan Pemahaman Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) berbasis Malcolm Baldrige Pemaparan dan Diskusi Bisnis Penjaminan Berbasis Risiko	Agus Tato (Forum Excellent BUMN)	2 Sept 2013	Perum Jamkrindo		34	Rp6,000,000		Rp6,000,000
74	ACSIC Training Program ke 23	Tokyo Jepang	2-5 Sept 2013	Tokyo Jepang	Yuliarso, Gatot Suprabowo, Wakhyu Hidayattulloh, Ilham Prasajo	4			
75	Pembahasan Perdir Pengadaan Barang dan Jasa	Nanang Waskito, Erna Zubaida	3 Sept 2013	Perum Jamkrindo		34			
76	Certified Securitiest Analyst (CSA)	Securities Analyst Standard Board Indonesia (SASB)	13 Sept - 11 Okt 2013	Wisma GKBI Lt.6	Krisna Johan, Aghastyo A.	2	Rp21,000,000	Rp2,497,000	Rp23,497,000
77	Pengantar Statistik	Program Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI (P3MUI)	17 September 2013	Kampus UI	Tito Tetrasuta	1	Rp1,100,000	Rp100,000	Rp1,200,000
78	Audit Intern Tingkat Lanjutan II	YPIA	16-27 Sept 2013	Graha Sucofindo Jakarta	Dadang Ary Avianto	1	Rp6,500,000	Rp1,000,000	Rp7,500,000
79	Workshop dan Clinic GCG : KPI dan Kontrak Manajemen Berbasis Kinerja Unggul dan Malcolm Baldrige	JSM Management Consultant	19 Sept 2013	Hotel Harris Tebet	Endang Sri W.	1	Rp2,500,000	Rp125,000	Rp2,625,000
80	Workshop Dactyloscopy Criminal	PT. Binamitra Nusantara Persada	3-4 Oktober 2013	Hotel Sentral Pramuka	Zulfikar	1	Rp3,190,000	Rp200,000	Rp3,390,000
81	Interpretasi KPKU BUMN	Forum Ekselen BUMN	7-8 Oktober 2013	Hotel Gino Feruci Bandung	Endang Sri W.	1	Rp3,500,000		Rp3,500,000

No	Nama pelatihan / Workshop	Pelaksana Pelatihan / Training Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date	Tempat Pelatihan / Training Place	Peserta / Participants	Jumlah (orang) Total (person)	Biaya Pelatihan / Training Fee	Biaya Lain-Lain (uang transport, SPPD, penginapan)	Jumlah Biaya / Total Fee
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	Evaluator KPKU BUMN	Forum Ekselen BUMN	9-11 Oktober 2013	Hotel Gino Feruci Bandung	Endang Sri W., Nina Kurnia D.	2	Rp8,000,000		Rp8,000,000
83	Peran dan Tantangan Humas BUMN di Era Digital	BUMN Forum	22 Okt 2013	Hotel Kartika Chandra	Penny Eka Yulianti	1	Rp1,500,000	Rp75,000	Rp1,575,000
84	Certified Risk Management Officer (CRMO)	LSPMR	29 Okt - 1 Nov 2013	Gedung Biru Tendea	Rahayudi, M. Robith Azmi, Rizqillah Suhaili	3	Rp18,000,000	Rp5,150,000	Rp23,150,000
85	Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)	CLE FHUI dan PERADI	19 Okt - 30 Nov 2013	FHUI Depok	Zulfikar	1	Rp5,000,000	Rp1,452,500	Rp6,452,500
86	Mdaemon Mail Server	PT. Duta Distribusi Servisindo	22-24 Okt 2013	Twin Plaza Hotel Slipi	Ringgie Galih Sugestie	1	Rp3,025,000	Rp225,000	Rp3,250,000
87	Workshop Audit Program Kecukupan Penerapan Manajemen Risiko	LSPMR	21-22 Okt 2013	Hotel Aston Tropicana Bandung	Dwi Priyambodo	1	Rp3,600,000	Rp100,000	Rp3,700,000
88	Sertifikasi Audit Intern Tingkat Dasar II	YPIA	21 Okt - 1 Nov 2013	Graha Sucofindo Jakarta	Sri Lestari	1	Rp5,500,000	Rp1,000,000	Rp6,500,000
89	Governance, Risk and Compliance Conference	PT. Interlink Technology Services Indonesia (ITSI)	27 Okt - 2 Nov 2013	Crown Promenade, Melbourne	Endang Sri Winarni, Dwi Priyambodo, Soegeng Iman W., Natsir Rahmadi	4	Rp253,432,770		Rp253,432,770
90	IHT Dasar-Dasar Penjaminan	Jamkrindo	4-8 Nov 2013	Gd. Jamkrindo Lt. 6	Terlampir	86	Rp192,630,393	Rp155,425,091	Rp348,055,484
91	IHT Karakter Pancasila	Jamkrindo	11-15 Nov 2013	Gd. Jamkrindo Lt. 7	Terlampir	138			
92	IHT Motivasi	Jamkrindo	11-15 Nov 2014	Gd. Jamkrindo Lt. 8	Terlampir	138			
93	IHT Intrapreneurship	Jamkrindo	11-15 Nov 2015	Gd. Jamkrindo Lt. 9	Terlampir	138			
94	IHT Soft Skill	Jamkrindo	11-15 Nov 2016	Gd. Jamkrindo Lt. 10	Terlampir	86			
95	Sertifikasi Audit Intern Tingkat Manajerial	YPIA	4-15 Nov 2013	Graha Sucofindo Jakarta	Dadang Ary Avianto	1	Rp7,000,000	Rp1,000,000	Rp8,000,000
96	IHT Pelatihan Penagihan IJP KUR	Jamkrindo	8 Nov 2013	Hotel Santika TMII	Terlampir	42	Rp19,885,000	Rp2,246,000	Rp22,131,000
97	ACSIC Conference ke 26	Korea Technology Finance Corporation	11-15 Nov 2013	Busan, Korea	Herry Sidharta, I. Rusdonobanu, Haryoko W., Hamim Bugi A., Rino Hapsoro, Bobby Hamzar R (Dewas), Djoko Waluyo (Asdep Pasar Modal dan LK), Heri Susanto (Kepala Bidang Perbankan, Kedeputan Korbid Fiskal dan Moneter)	8			Rp0

No	Nama pelatihan / Workshop	Pelaksana Pelatihan / Training Organizer	Tanggal Pelatihan / Training Date	Tempat Pelatihan / Training Place	Peserta / Participants	Jumlah (orang) Total (person)	Biaya Pelatihan / Training Fee	Biaya Lain-Lain (uang transport, SPDP, penginapan)	Jumlah Biaya / Total Fee
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres No.70 Tahun 2012 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 (dilengkapi Perka LKPP No.14/2012 dan Perka LKPP No.15/2012)	Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LKPN)	11-14 Nov 2013	Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih	Dyah Ayu Kusumawardhani	1	Rp3,500,000	Rp340,000	Rp3,840,000
99	Diklat Khusus Bagi Kepala SPI	Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPAK)	14 - 20 Nov 2013	Hotel Bukit Indah, Puncak	Sudibyo Utomo	1	Rp7,750,000	Rp625,000	Rp8,375,000
100	Pembinaan Mental dan Fisik	Rindam Jaya	11-15 Nov 2013	Rindam Jaya Condet		109	Rp367,330,000	Rp7,360,000	Rp374,690,000
101	Pelatihan Dasar-Dasar Perbankan dan Perkreditan	LPPI	17-29 Nov 2013	LPPI Kemang		109	Rp1,348,875,000	Rp6,885,500	Rp1,355,760,500
102	Studi Banding Certified Securities Analyst (CSA)	Asosiasi Analis Efek Indonesia	22-23 Nov 2013	Bursa Efek Singapore	Krisna Johan, Aghastyo A.	2	Rp11,300,000		Rp11,300,000
103	Pelatihan Pajak Brevet A dan B	Kanca Makassar	Nov-13						Rp7,000,000
104	Pelatihan pajak	Kanca Bandung	Nov-13						Rp1,150,000
105	Pengadaan Barang & Jasa Serta Aplikasi Whistleblowing System	FORTI BUMN	28 Nov 2013	Gd. Asuransi Jasa Indonesia	Amin Masudi, Ringgie Galih	2	Rp0	Rp210,000	Rp210,000
106	HR Summit 2013	Portal HR	5-6 Des 2013	Hotel Sultan	Deden Wahyudin, Siti Maesaroh, Alexandry	3			Rp14,025,000
107	Profesionalisme Auditor Forensik dalam Pemberantasan Korupsi	Asosiasi Auditor Forensik Indonesia	11 Des 2013	Auditorium Gandhi - Kantor BPKP		5	Rp0	Rp0	Rp0
108	Simposium Nasional Menyongsong Penerapan COSO 2013 dan ERM di Lingkungan BUMN	BPK	3 Des 2013	Auditorium Pusdiklat BPK Kalibata	Sudibyo Utomo, Dadang Ary A., Sri Lestari	3	Rp0	Rp0	Rp0
109	Workshop CRGP (Certified Risk Governance Profesional) & Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko	Hotel Best Western Premier	12-14 Des 2013	Hotel Best Western Premier Bali	Bakti Prasetyo, Nanang Waskito, Endang Sri Winarni	3	Rp24,000,000	Rp125,000	Rp24,125,000
110	Sosialisasi Reasuransi	Kanca Banjarmasin dan Pekanbaru	13 Des 2013						Rp62,043,402
111	Basic Marketing								Rp12,500,000
Jumlah						1377			Rp3,413,216,648

JARINGAN KERJA PERUM JAMKRINDO

Perum Jamkrindo terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan jaringan kerjanya di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas mitra kerja sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis Perum Jamkrindo.

Perum Jamkrindo memiliki jaringan kerja yang berjumlah 21 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan kerja tersebut telah terhubung secara *real-time on line*.

Dengan terhubungnya seluruh unit kerja dalam satu jaringan, maka Perum Jamkrindo siap menjadi Perusahaan Penjamin terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia yang dapat melayani berbagai macam kebutuhan penjaminan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau Koperasi (UMKMK) dan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta memberikan bantuan konsultasi dan manajemen kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan memudahkan aksesibilitas, Perum Jamkrindo terus melakukan pengembangan jaringan kerja hingga ke pelosok negeri. Selama 5 tahun terakhir, Perum Jamkrindo telah membuka jaringan kerja sehingga pada tahun 2005, jumlah jaringan kerja Perum Jamkrindo berjumlah 11 Kantor Cabang. Agar lebih dekat kepada mitra kerja, pada tahun 2006 Perum Jamkrindo membuka 1 Kantor Cabang yang dilanjutkan pada tahun 2007 dengan membuka 5 Kantor Anak Cabang. Pada tahun 2012 membuka 1 Kantor Cabang, serta 3 Kantor Cabang pada tahun 2013.

Perkembangan Jumlah Kantor Cabang dan Kantor Anak Cabang dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Unit Kerja / Working Unit	2009	2010	2011	2012	2013
Kantor Cabang / Branch Office	11	11	11	12	21
Kantor Anak Cabang / Branch Subsidiaries Office	6	6	6	6	-
Jumlah Unit Kerja/ Total Working Unit	17	17	17	18	21

PERUM JAMKRINDO NETWORK

Perum Jamkrindo continues to improve quality and its network in all over Indonesia. This is to increase the satisfaction and loyalty of business partners; furthermore creating positive impact on Perum Jamkrindo's business growth.

Perum Jamkrindo has networks amounted to 21 Branch Offices all over Indonesia. The network has been connected real-time on line.

With the integrated system that connects all working unit in one network, Perum Jamkrindo is ready to become the largest Guarantee Company in Indonesia that can service various needs of guarantee for Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK) and Citizen Business Loan (KUR) including giving consultancy and management to the Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK).

In order to improve the society economy and ease of accessibility, Perum Jamkrindo continues to develop its network throughout the country. Over the last 5 years, Perum Jamkrindo has opened network so that in 2005, its network has reached 11 Branch Offices. To get closer to its working partner, in 2006 Perum Jamkrindo opened 1 Branch Office that continues in 2007 by opening 5 Branch Office. In 2012 opened 1 Branch Office, and also 3 Branch Offices in 2013.

The development of the amount of Branch and Sub-Branch Office over the last 5 years, are as listed:

Pada bulan November 2013, terdapat pembukaan tiga Kantor Cabang baru yakni Kantor Cabang Khusus DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bandar Lampung. Dengan terhubungnya seluruh unit kerja dalam satu jaringan, maka Perum Jamkrindo siap menjadi Perusahaan Penjamin terbesar di Indonesia yang dapat melayani berbagai macam kebutuhan Penjaminan Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau Koperasi (UMKMK) dan Program Pemerintah seperti Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta memberikan bantuan konsultasi dan manajemen kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Perum Jamkrindo merencanakan program pengembangan sebagai berikut:

1. Menambah Kantor Cabang.
2. Kantor Unit Pelayanan (KUP) Provinsi dan Kabupaten.
3. Mengembangkan aplikasi teknologi guna mempercepat proses penjaminan yang diajukan oleh mitra kerja serta mempercepat proses pelaporan.

Dengan terus mengembangkan dan mengoptimalkan seluruh jaringan kerja, diharapkan Perum Jamkrindo dapat melayani mitra kerja secara lebih baik.

In November 2013, there were the opening of three new Branch Offices namely DKI Jakarta, Yogyakarta, and Bandar Lampung Special Branch Offices. By connecting all units in the network, then Perum Jamkrindo is ready to become the largest Insurance Company in Indonesia that serves various needs of Guarantee Credit to Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK) and the Government Program such as Guarantee of People's Business Credit (KUR) as well as provides colsulting and management assistance to Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK)

Perum Jamkrindo plans the devepment programs as follows:

1. Adding more Branch Offices
2. Services Unit Firm (KUP) of the province and district
3. Developing technology application to accelerate the assurance proposed by the partners as well as to speed up the reporting process.

By continuuing to develop and optimize the entire networks, Perum Jamkrindo is expected to be better in serving its partner.

Jaringan Pelayanan Perum Jamkrindo

Network Services Perum Jamkrindo

KANTOR PUSAT

HEAD OFFICES

Gedung Jamkrindo,
 Jl. Angkasa Blok B-9 Kavling 6
 Kota Baru Bandar Kemayoran,
 Jakarta Pusat 10720 Indonesia
 Telp : (62-21)-6540335 (hunting)
 Fax : (62-21)-6540344,6540348
 Website : www.jamkrindo.com
 E-mail : info@jamkrindo.com

KANTOR CABANG

BRANCH OFFICES

DKI Jakarta

Gedung Jamkrindo,
 Jl. Angkasa Blok B-9 Kavling 6
 Lantai Dasar
 Kota Baru Bandar
 Kemayoran Jakarta Pusat 10720
 Telp : (021) 6540409
 Fax : (021) 6540410
 E-mail : jkt@jamkrindo.com

Bandung

Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No. 722,
 Gedebage, Bandung – 40294
 Telp : (022) 781 6267/68
 Fax : (022) 780 1890
 E-mail : bdg@jamkrindo.com

Denpasar

Jl. Hang Tuah No.76
 Denpasar, Bali 80228
 Telp : (0361) 286 854
 Fax : (0361) 286 709
 E-mail : dps@jamkrindo.com

Makassar

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140
 Makassar 90125
 Telp : (0411) 873 031
 Fax : (0411) 872 707
 E-mail : mks@jamkrindo.com

Medan

Jl. Sei Serayu No.40
 Medan 20121
 Telp : (061) 4155 767
 Fax : (061) 4156 775
 E-mail : mdn@jamkrindo.com

Palembang

Jl. Residen Abdul Razak No.188-189
 Kel. Kalidoni, Palembang 30114
 Telp : (0711) 720 996
 Fax : (0711) 720 995
 E-mail : plb@jamkrindo.com

Pekanbaru

Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga
 Komp. Perkantoran Sudirman Raya
 Blok D-9, Pekanbaru 28282
 Telp : (0761) 854311
 Fax : (0761) 848801

Pontianak

Jl. Teuku Umar, Komp.
 Perkantoran Pontianak Mall
 Blok B/24, Pontianak
 Telp : (0562) 749 095
 Fax : (0562) 746 148
 E-mail : ptk@jamkrindo.com

Samarinda

Jl. Suwondo Parman,
 Komp. Mall Lembuswana Blok C-6
 Samarinda 75123
 Telp : (0541) 747 608
 Fax : (0541) 206 578
 E-mail : smd@jamkrindo.com

Surabaya

Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2-3
 Surabaya 60292
 Telp : (031) 867 3827, 867 3828
 Fax : (031) 867 3826
 E-mail : sby@jamkrindo.com

Semarang

Jl. Pamularsih No. 68 A
 Semarang 50148
 Telp : (024) 7614136, 7610129
 Fax : (024) 7614138
 E-mail : smg@jamkrindo.com

Banjarmasin

Jl. A. Yani Km. 4,6 No. 56
 Banjarmasin 70235
 Telp : (0511) 327 3345
 Fax : (0511) 327 3435
 E-mail : bjm@jamkrindo.com

Jayapura

Pusat Bisnis Jayapura
 Ruko Pasifik Permai H No. 17
 Dok II Bawah, Jayapura
 Telp : (0967) 524 424
 Fax : (0967) 524 423
 E-mail : jyp@jamkrindo.com

Kupang

Ruko Oebufu Permai K
 Jl. Perintis Kemerdekaan II, Oebufu
 Kupang, NTT – 85111
 Telp : (0380) 855 3899
 Fax : (0380) 855 4088
 E-mail : kpg@jamkrindo.com

Mataram

Komplek Ruko Airlangga Square No. 3
 Jl. Airlangga Mataram
 NTB 83125
 Telp : (0370) 644 573
 Fax : (0370) 644 572
 E-mail : mtm@jamkrindo.com

Manado

Jl. RE. Marthadinata No. 6 Manado
 Telp : (0431) 865 194, 865 198
 Fax : (0431) 873 758
 E-mail : mnd@jamkrindo.com

Palangkaraya

Jl. Christopel Mihing No. 31
 Palangka Raya 73111
 Telp : (0536) 3226 895
 Fax : (0536) 3242 394
 E-mail : plk@jamkrindo.com

Jambi

Jl. Prof. Dr. M. Yamin no.30
 Kel. Payo Lebar, Kec. Jelutung
 Jambi 36136
 Telp : (0741) 668 707
 Fax : (0741) 668 115
 E-mail : jmb@jamkrindo.com

Yogyakarta

Jl. Parangtritis KM 1 No. 96
 Kel. Brontokusuman, Kec. Mergansan
 Yogyakarta 55221
 Telp : (0274) 375 989
 Fax : (0274) 377 965
 E-mail : ygy@jamkrindo.com

Bandar Lampung

Jl. Teuku Umar No. 10 E - F
 Kedaton, Bandar Lampung 35141
 Telp : (0721) 778 511
 Fax : (0721) 778 513
 E-mail : lmp@jamkrindo.com

Kantor Cabang Khusus DKI Jakarta

Gedung Jamkrindo Lantai Dasar
 Jl. Angkasa Blok B-9 Kavling 6
 Kota Baru - Bandar Kemayoran
 Jakarta Pusat 10610
 Telp : (021) 6586 8280
 Fax : (021) 6586 8278
 E-mail : jkk@jamkrindo.com

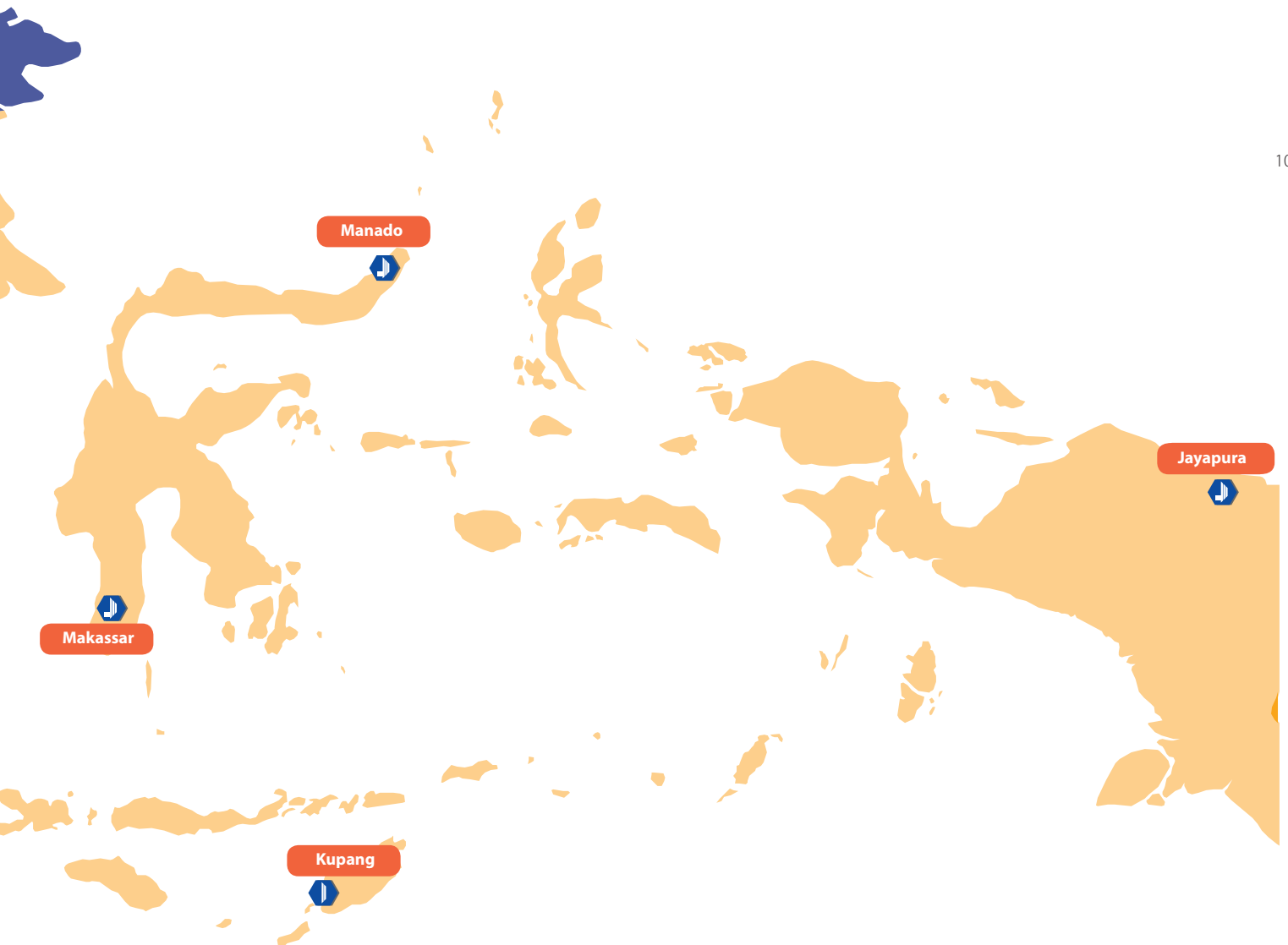
Peta Jaringan Kerja Perum Jamkrindo

Map Network Perum Jamkrindo



KANTOR CABANG / BRANCH OFFICES

Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Lampung, Yogyakarta, Pekanbaru, Pontianak, Palembang, Samarinda, Medan, Kupang, Jambi, Palangkaraya, Mataram, Banjarmasin, Manado, dan Jayapura



Batik Pekalongan

Sejarah Batik di Pekalongan dimulai dari pasca peperangan dan perpecahan di lingkungan kerajaan Mataram yang waktu itu dipimpin oleh rajanya Panembahan Senopati. Peperangan melawan kolonial belanda maupun perpecahan di antara lingkungan kraton memang kerap kali terjadi, hingga pada suatu saat kondisi yang paling parah menyebabkan banyak keluarga-keluarga raja yang mengungsi dan menetap di daerah-daerah baru antara lain ke Pekalongan. Keluarga-keluarga kraton yang memang telah mempunyai tradisi batik dan mengungsi inilah yang mengembangkan pembatikan ke daerah pengungsian di Pekalongan.

History of batik in Pekalongan started from post-war and schism in the kingdom of Mataram, once led by the king Panembahan Senopati. The battle against the Dutch colonial or split between the palaces was often the case, until at one point the most severe conditions caused many royal families moved and settled in new areas such as to Pekalongan. The Royal families inherited tradition of batik developed batik into evacuation areas in Pekalongan.



Analisis dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perusahaan

**Management Discussion and Analysis on Company
Performance**

Analisis dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perusahaan

Management Discussion And Analysis On Company Performance

TINJAUAN UMUM

Sektor keuangan merupakan elemen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi perbedaan pendapatan, serta meringankan kemiskinan. Sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Sektor keuangan mampu menyediakan para peminjam dari berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan risiko rendah. Hal ini menjadi salah satu alasan krusial pentingnya sektor keuangan dalam menambah investasi dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, lebih meratakan pertumbuhan dengan menyebarkan manfaat ke seluruh lapisan masyarakat, memangkas kemiskinan, dan akan memperkuat status Indonesia sebagai negara berkembang dengan penghasilan menengah. Dalam hal ini, diperlukan pemeliharaan dan penguatan stabilitas sistem keuangan secara kontinyu. Pada tahun 2013, sektor keuangan tumbuh dengan ditopang oleh perekonomian domestik yang didukung oleh industri keuangan bank dan non bank telah memainkan peran yang cukup signifikan sebagai penggerak roda perekonomian nasional seperti, jenis pinjaman yang didorong oleh sektor konsumsi.

Membaiknya kondisi perekonomian global, khususnya di beberapa negara maju pada tahun 2013 telah memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 tumbuh sebesar 5,78%. Meski angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Turunnya angka pertumbuhan ekonomi dalam negeri turut berkontribusi pada pertumbuhan kredit.

Hingga triwulan IV-2013 mengindikasikan pertumbuhan kredit masih dalam tren melambat. Indikasi tersebut tercermin dari angka saldo bersih tertimbang (SBT) hasil survei permintaan kredit baru triwulan IV-2013 yang turun dari 90,0% di triwulan sebelumnya menjadi 88,5%. Perlambatan tercatat pada seluruh sektor dan seluruh jenis penggunaan kredit. Penurunan terbesar terhadap permintaan kredit baru terjadi pada KPR/KPA sebagai respons atas kenaikan suku bunga dan diterapkannya kebijakan lanjutan Bank Indonesia mengenai *Loan to Value* (LTV).

OVERVIEW

Financial sector is a crucial element in improving economic growth, reducing income gap and alleviating poverty. Financial sector becomes strategic locomotive to boost the real sector growth through capital accumulation and technology innovation. It provides debtors from various financial instruments a high quality credit with low risk. This is also other important reason behind the importance of financial sector in increasing investment and bolstering economic growth. A good economic system will accelerate economic growth, help reduce the growth gap by delivering benefit to all levels of society, alleviate poverty and emphasize Indonesia's status as a middle-income developing country. In this regard, it is truly crucial to maintain and strengthen the economic stability continually. In 2013, financial sector rose on the back of domestic economic growth and banking and non-banking financial industry's role which is significant in being a catalyst of the national economic development, in this case, the growth of credit use on the back of consumption sector.

The recovery of global economy, especially in most developed countries in 2013, contributed to the positive trend of growth in many developing countries, including Indonesia where Indonesia's economy is recorded to grow by 5.78%. Even though the figure decreased compared to the previous year, Indonesia remains a step ahead compared to other developing countries. This decrease in domestic economic growth contributed to the credit growth.

Up to the fourth quarter of 2013, the credit growth still indicated a decelerating trend, reflected from the weighted net balance. Based on a survey of a new credit demand in the fourth quarter of 2013, the figure fell from 90.0% to 88.5% this year. This slowdown was recorded in the whole sectors and the use of credit. The most dramatic decrease in new credit demand was in KPR/KPA as a response of the interest rate hike as well as the implementation of an extended policy released by Bank Indonesia (BI) on *Loan to Value* (LTV).

Meski demikian, pendapatan perkapita dalam negeri pada tahun 2013 mengalami peningkatan dan tercatat sebesar Rp36,5 juta. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan pendapatan perkapita tahun sebelumnya sebesar Rp33,5 juta. Sedangkan angka inflasi relatif terkendali pada kisaran sebesar 8,38%. Nilai aset yang dikelola maupun transaksi ekonomi yang ditimbulkan oleh keseluruhan kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai entitas bisnis penyedia jasa keuangan, telah meningkat secara signifikan sejalan dengan perbaikan fundamental makro ekonomi Indonesia. Hal ini dapat diukur dari berbagai indikator seperti pertumbuhan indeks harga saham, tingkat kapitalisasi pasar, nilai dana kelolaan, nilai kekayaan/aset lembaga keuangan, nilai premi, nilai imbal jasa penjaminan, dan lain sebagainya.

Perlambatan pertumbuhan kredit diperkirakan berlanjut pada 2014. Kondisi ini tercermin pada sebagian besar responden yang memperkirakan pertumbuhan kredit menjadi 19,1% (yoy), melambat dibandingkan perkiraan pertumbuhan kredit tahun 2013 (20,8%, yoy). Pertimbangan utama responden dalam memproyeksikan perlambatan pertumbuhan kredit yakni tren pelemahan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan suku bunga kredit.

Dari sisi internal Perusahaan, sepanjang tahun 2013, Perum Jamkrindo menunjukkan kinerja yang sangat membanggakan, dengan peningkatan yang signifikan dibandingkan periode tahun 2012. Berikut adalah beberapa indikator kinerja utama Perum Jamkrindo:

1. Kredit Yang Dijamin

Jumlah kredit yang dijamin tahun 2013 sebesar Rp45,843 triliun atau mencapai 85,05% dari jumlah yang ditargetkan tahun 2013 sebesar Rp53,899 triliun dan mencapai 85,62% dibandingkan dengan realisasi tahun 2012.

2. Total Aset

Total aset Perum Jamkrindo pada akhir tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu sebesar 24,47%, dari tahun 2012 sebesar Rp6,66 triliun menjadi Rp8,29 triliun pada tahun 2013.

Nevertheless, last year's domestic income per capita experienced an increase as much as Rp. 36.5 million. The amount increased compared to the previous year at Rp33.5 million. Meanwhile, the amount of inflation was relatively controllable in the range of 8.38%. The asset value under management or economic transaction made during the period carried out by the whole business entities from financial sector increased significantly in line with the fundamental recovery of Indonesia's macro-economy. It can be measured by various indicators such as stock price index, level of market capitalization, the value of fund under management, property/asset of financial entity, premium value, return of guarantee, and so forth.

The credit growth slowdown is estimated to continue by 2014. Many respondents estimated that the credit growth will decrease to 19.1% (yoy) compared to the projection of credit growth 2013 of 20.8% yoy. Such projection was particularly based on observation to the decelerating trend of economy and an increase in credit interest rate.

Seeing from the internal side of the Company, during 2013, Perum Jamkrindo managed to show an encouraging performance with significant improvement compared to 2012. Here are the details of the Company's performance indicators:

1. Guaranteed credit

The number of loans guaranteed in 2013 amounted to Rp45, 843 trillion or 85.05% of the targeted amount in 2013 amounted to Rp53, 899 trillion and reached 85.62% compared with the year 2012

2. Total Assets

Perum Jamkrindo's total assets at the end of 2013 grew significantly by 24.47%, from Rp6.66 trillion in 2012 to Rp8.29 trillion in 2013.

3. Ekuitas

Selama periode tahun 2013, Total Ekuitas Perum Jamkrindo mengalami peningkatan, yaitu tumbuh 29,96%, dari tahun 2012 sebesar Rp5,04 triliun menjadi Rp6,55 triliun pada akhir tahun 2013.

4. Pendapatan Usaha

Pada tahun 2013, pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Perum Jamkrindo tercatat sebesar Rp1.600,96 miliar mengalami kenaikan 14,43% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp1.399,06 miliar.

5. Laba Tahun Berjalan

Pada tahun 2013, Perum Jamkrindo sukses mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp525,21 miliar, mengalami peningkatan Rp15,69 miliar atau sebesar 3,08% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp509,52 miliar.

3. Equity

During 2013, the Total Equity of Perum Jamkrindo significantly increased by 29,96% from Rp5.04 trillion in 2012 to Rp6,55 trillion by the end of 2013.

4. Operating Revenues

In 2013, Return on Revenue of Guarantee of Perum Jamkrindo was recorded at Rp1.600,96 billion, a hike of 14,43% compared to 2012 at Rp 1,399.06 billion.

5. Current Year Profit

In 2013, Perum Jamkrindo succeeded to record current year profit of Rp525,21 billion, an increase of Rp15,69 billion or 3,08% compared to 2012 at Rp509.517 billion.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Kegiatan Penjaminan

1. Pola Penjaminan

a) Pola Penjaminan Konvensional

Pola penjaminan konvensional muncul sejalan dengan adanya kebutuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang mempunyai usaha yang layak (*feasible*) namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan khususnya untuk pemenuhan agunan (*tidak bankable*), dalam rangka mengakses fasilitas Kredit/ Pembiayaan ke Bank, Non Bank dan Kreditur konvensional lainnya.

Proses penjaminan kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit yang dalam hal ini disebut Penerima Jaminan, debitur kredit yang dalam hal ini disebut Terjamin, dan Perusahaan penjaminan kredit konvensional yang dalam hal ini disebut Penjamin.

Dalam bidang penjaminan ini, Perum Jamkrindo memiliki pengalaman lebih dari 32 tahun dalam bidang Penjaminan ini dan telah bekerjasama dengan lebih dari 70 mitra

OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Guarantee Activity

1. Guarantee Patterns

a) Conventional Guarantee Pattern

This pattern emerges in line with the need of Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK) having viable businesses (*feasible*) but do not meet the technical requirements of banks, especially for the fulfillment of collateral (*not bankable*), in order to access the facilities of Credit/Financing to Banks, Non-Bank and other conventional lenders.

The credit guarantee process involves 3 (three) parties, the lender as the Guarantee Recipient, the creditor called Guaranteed, and the credit guarantee company, in this respect called as the Guarantor.

In terms of guarantee, Perum Jamkrindo has more than 31 years of experience in this Guarantee sector and has cooperated with more than 70 partners in banking /

kerja perbankan/non bank, terdiri dari Bank BUMN, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Swasta Nasional serta Mitra Non Bank sebagai berikut:

1. Bank BUMN: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).
2. Bank Pembangunan Daerah (BPD): 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia.
3. Bank Swasta Nasional : Bank CIMB Niaga, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Persyarikatan, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Bank Permata, Bank Sriparta, Bank Agroniaga, Bank Artos Indonesia, Bank Bumiputra, Bank Yudha Bhakti, Bank Internasional Indonesia (BII).
4. Mitra Non Bank : PT. PNM, PT. Jabar Ventura, PT. Astra Mitra Ventura, Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah)-BMT, Kospin Jasa, Sarana Jateng Ventura, Sarana Jatim Ventura, Sarana Sumut Ventura, IKSP, YKKBI, KOPEBI, PT. Tri Pilar Beton Mas, PT. Semen Gresik, PT. Eternit Gresik, PT. Nusantara B Industries.

b) Pola Penjaminan Syariah/Kafalah

Ekonomi syariah mulai berkembang sejak tahun 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta pemerintah melalui UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menggantikan UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan.

Akibat perkembangan tersebut pada tahun 1997, pemerintah mengubah UU No. 7 tahun 1992 dan mengesahkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang menyebutkan secara khusus tentang prinsip ekonomi syariah. Perkembangan perbankan syariah diikuti oleh Perum Jamkrindo untuk memberikan layanan penjaminan yang berbasis syariah.

Seiring perkembangan perekonomian berbasis syariah, Perum Jamkrindo membentuk Divisi Penjaminan Syariah pada 13 Februari 2007. Pembentukan ini juga merupakan amanat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merekomendasikan

non-bank, consisting of: a state-owned bank, regional development banks (BPD), the National Private Banks and Non-Bank Institutions. Those partners are:

1. State-owned banks: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).
2. Regional Development Bank (BPD) of 26 BPD throughout Indonesia.
3. National Private Bank: Bank CIMB Niaga, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Persyarikatan, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Bank Permata, Bank Sriparta, Bank Agroniaga, Bank Artos Indonesia, Bank Bumiputra, Bank Yudha Bhakti, Bank Internasional Indonesia (BII).
4. Non Bank Institutions: PT. PNM, PT. Jabar Ventura, PT. Astra Mitra Ventura, Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah)-BMT, Kospin Jasa, Sarana Jateng Ventura, Sarana Jatim Ventura, Sarana Sumut Ventura, IKSP, YKKBI, KOPEBI, PT. Tri Pilar Beton Mas, PT. Semen Gresik, PT. Eternit Gresik, PT. Nusantara B Industries.

b) The pattern of Sharia Guarantee / Kafalah

Sharia economy has been developing since 1990 with the establishment of Bank Muamalat as the initiative of Indonesia Ulama Council (MUI) and Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) and the government by virtue of Regulation No. 7 year 1992 on banking as the amendment of Regulation No. 14 year 1967 on banking fundamentals.

Due to the dramatic slump in the conventional economic system in 1997, the government amended Regulation No. 7 in 1992 and ratified Regulation No. 10 year 1998 on banking, specifically stated on the principles of the sharia economy. The development of sharia banking is responded by Perum Jamkrindo by establishing guarantee division on the basis of sharia principles.

In line with the development of the sharia economy, Perum Jamkrindo established the Sharia Guarantee Division on February 13, 2007. This formation is also the mandate of the National Islamic Council of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) who recommended the establishment of a

pembentukan divisi khusus untuk melayani penjaminan pembiayaan syariah melalui surat bernomor: U-217/DSN-MUI/IX/2006 tanggal 15 September 2006, dan diresmikan pada tanggal 13 Februari 2007.

Selanjutnya DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang Penjaminan Syariah Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah. Ketentuan Umum dalam fatwa ini, Penjaminan Syariah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah.

Prinsip-prinsip Transaksi Syariah (Pembiayaan dan atau Penjaminan) yang membedakan dengan Transaksi konvensional antara lain adalah:

1. Tidak ada unsur bunga (*riba*).
2. Tidak mengandung unsur judi (*maisyr*).
3. Tidak mengandung unsur ketidakjelasan dalam akad (*gharar*).
4. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain (*dharar*).
5. Tidak mengandung unsur kezaliman.
6. Tidak ada unsur penipuan.
7. Tidak mengandung materi yang diharamkan.

Terkait dengan kegiatan tersebut, ekonomi syariah telah mengatur ketentuan penjaminan dalam kegiatan perekonomian (*muamalah*) syariah dengan menggunakan Akad Kafalah.

Adapun jenis-jenis akad dalam pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah* yaitu pembiayaan dari Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*) berupa jual beli barang antara Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*) dengan Terjamin (*Makfuul 'Anhu*) dengan harga asal (pokok pembiayaan) ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati.
2. Pembiayaan *Salam* yaitu pembiayaan dari Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*) berupa jual beli barang antara Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*) dengan Terjamin (*Makfuul 'Anhu*) dimana barang yang dibeli Terjamin (*Makfuul 'Anhu*) akan diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

special division to serve the Islamic financing guarantees through letter No.: U-217/DSN-MUI/IX/2006 September 15, 2006, and inaugurated on February 13, 2007.

Furthermore, DSN MUI has issued a fatwa on the Islamic Guarantee Number: 74/DSN-MUI/I/2009 on Sharia Guarantee. The fatwa mentioned that sharia guarantee is the guarantee between the parties based on sharia principles.

Sharia transaction principles (or the Financing and Guarantee) that differentiates it from conventional transactions include:

1. There is no element of interest (*riba*).
2. Contains no element of gambling (*maisyr*).
3. Do not contain elements of ambiguity in the contract (*gharar*).
4. Do not endanger itself or the other party (*dharar*).
5. Do not contain elements of tyranny.
6. There is no element of fraud.
7. Do not contain material that is forbidden.

Associated with these activities, sharia principle regulates that the economic activities (*muamalah*) sharia is using Akad Kafalah.

The Types of contract in Islamic finance are as follows:

1. *Murabahah* financing is the financing of the Guarantee Recipients (*Makfuul Lahu*) in the form of sale of goods between the Guarantee Recipient (*Makfuul Lahu*) with Guaranteed (*Makfuul 'Anhu*) at the principal of financing plus a margin or profit agreed upon.
2. *Salam* financing is the financing of the Guarantee Recipients (*Makfuul Lahu*) in the form of sale of goods between the Guarantee Recipient (*Makfuul Lahu*) and Guaranteed (*Makfuul 'Anhu*) where goods are bought by Guarantee (*Makfuul' Anhu*) to be delivered in the future, while payments are made in advance.

3. Pembiayaan Istishna yaitu pembiayaan dari Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*) berupa jual beli barang antara Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*) dengan Terjamin (*Makfuul 'Anhu*) dimana jual beli tersebut berupa pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu antara Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*) dengan Terjamin (*Makfuul 'Anhu*), sedangkan pembayaran dapat dilakukan dimuka, dicicil atau ditangguhkan pada masa yang akan datang.
4. Pembiayaan Musyarakah yaitu pembiayaan berupa kerja sama antara Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*) dengan Terjamin (*Makfuul 'Anhu*) untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi kepada Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*) dan Terjamin (*Makfuul 'Anhu*) sesuai dengan nisbah/bagi hasil yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai dengan kontribusi dana masing-masing.
5. Pembiayaan Mudarabah yaitu pembiayaan berupa kerja sama antara Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*) dengan Terjamin (*Makfuul 'Anhu*) dimana Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*) menyediakan seluruh modal, sedangkan Terjamin (*Makfuul 'Anhu*) mengelola usaha tersebut dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang timbul dari usaha tersebut akan dibagi kepada Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*) dan Terjamin (*Makfuul 'Anhu*) sesuai dengan nisbah/bagi hasil yang disepakati.
6. Pembiayaan Ijarah yaitu pembiayaan berupa pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dari Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*) dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa dari Terjamin (*Makfuul 'Anhu*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
7. Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik yaitu pembiayaan berupa pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dari Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*) dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa dari Terjamin (*Makfuul 'Anhu*), dengan disertai opsi membeli /tidak membeli barang pada akhir pembiayaan.
3. Istishna financing is the financing of the Guarantee Recipients (Makfuul Lahu) in the form of sale of goods between the Recipient Guarantee (Makfuul Lahu) and Guaranteed (Makfuul'anhu) in which the sale of certain goods in the form of book-making criteria and specific requirements of the Guarantee Recipients (Makfuul Lahu) by Guaranteed (Makfuul 'Anhu), while payments can be made in advance, in instalments or deferred in the future.
4. Musharaka financing is a financing cooperation between the Guarantee Recipients (Makfuul Lahu) with Guaranteed (Makfuul 'Anhu) for a particular business, in which each party contributes funds to a deal that would split the profits between the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and the Guaranteed (Makfuul 'Anhu) in accordance with the ratio/for an agreed outcome and the risk will be borne according to the contribution of each fund.
5. Mudarabah financing is a financing cooperation between the Guarantee Recipients (Makfuul Lahu) with the Guaranteed (Makfuul'anhu) in which the guarantee recipient (Makfuul Lahu) provides the entire capital, while the Guaranteed (Makfuul' Anhu) manages the business with an agreement that the profits arising from business Recipients will be shared with guarantee (Makfuul Lahu) and Guaranteed (Makfuul 'Anhu) in accordance with the ratio/ for an agreed outcome.
6. Ijarah financing is the financing of the transfer of use rights (benefits) of a receiver of goods or services of Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) within a specified time through lease payments from the Guaranteed (Makfuul 'Anhu), without being followed by the transfer of ownership of the goods themselves.
7. Ijarah financing Muntahiyah Bittamlik is the financing of the transfer of use rights (benefits) of a receiver of goods or services of Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) within a specified time through lease payments from the Guaranteed (Makfuul 'Anhu), along with an option to buy / not buy the goods at the end of the financing.

Adapun Mitra Kerja Penjaminan Syariah sebagai berikut:

- Mitra Bank Syariah : Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Niaga Syariah, Bank Bukopin Syariah, BTN Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Panin Syariah, BJB Syariah, Bank Jatim Syariah, BPD DIY Syariah, Bank Jateng Syariah, Bank Riau Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank Kaltim Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Dinar Asri Syariah, Bank Sulsel Syariah, BPR Harta Insan Karimah.
- Mitra Syariah Non Bank: Pegadaian Syariah, PNM Syariah.

2. Jenis Penjaminan

a) Penjaminan Kredit Program

Di Indonesia Kredit Program sudah mulai dikenal sejak tahun 1960 dan diarahkan guna membiayai ekonomi produktif dan berorientasi untuk pengembangan usaha. Awal mula munculnya kredit ini difokuskan untuk pembiayaan sektor pertanian, terkait dengan kebijakan intensifikasi pertanian.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM definisi Kredit Program adalah pembiayaan sistem Kredit Bank yang diarahkan untuk kepentingan pembangunan Perekonomian Nasional.

Penjaminan Kredit Program merupakan salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh Perum Jamkrindo dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga Penjamin dalam mendukung kebijakan Kredit Program Pemerintah dalam meningkatkan volume Kredit kepada UMKMK.

Beberapa Penjaminan Kredit Program yang saat ini dilakukan oleh Perum Jamkrindo adalah:

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.6 tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK serta perkuatan Perusahaan Penjaminan dengan memperkuat modal dan perluasan jangkauan pelayan maka sebagai implementasinya Perum Jamkrindo telah mendapat tugas untuk berperan dalam Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

The Islamic Guarantee Partners:

- Islamic Bank partners: Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Niaga Syariah, Bank Bukopin Syariah, BTN Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Panin Syariah, BJB Syariah, Bank Jatim Syariah, BPD DIY Syariah, Bank Jateng Syariah, Bank Riau Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank Kaltim Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Dinar Asri Syariah, Bank Sulsel Syariah, BPR Harta Insan Karimah.
- Non Bank Sharia Partners: Pegadaian Syariah, PNM Syariah.

2. Types of Guarantees

a) Credit Guarantee Program

In Indonesia, the loan government program has been around since 1960 and directed to finance the productive sector in the economy and oriented to business development. The emergence of credit is initially focused on financing the agricultural sector, associated with intensification of agriculture policy.

According to the Ministry of Cooperatives and SMEs, the definition of Government Credit Program is a financing system geared to the interests of national economy development.

Credit Guarantee Program is one of the activities conducted by Perum Jamkrindo in carrying out its function as an institution of Credit Guarantee Program in support of Government policy to increase the volume of credit to SMEs.

Some of the Credit Guarantee Program currently undertaken by Perum Jamkrindo is:

1. KUR Guarantee Program

In accordance with Presidential Instruction (Instruction) No. 6 year 2007 dated June 8, 2007 on the Acceleration of Real Sector Development and Empowerment and Enhancement of MSMEs Guarantee Company by increasing capital and expanding service reach, in its implementation, Perum Jamkrindo has played a major role in KUR Guarantee Program (KUR).

Untuk program penjaminan KUR tersebut, Pemerintah menempatkan sejumlah dana sebagai tambahan modal Pemerintah untuk perkuatan Perum Jamkrindo.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/Pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK dibidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable* dengan plafond Kredit sampai dengan Rp500 juta yang sebagian dijamin oleh Perusahaan Penjaminan.

KUR yang disalurkan oleh bank pelaksana dijamin secara Otomatis Bersyarat (*Conditional Automatic Cover/CAC*) oleh Perusahaan Penjaminan dengan nilai Penjaminan sebesar:

- 80% (delapan puluh persen) untuk sektor pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, industri kecil dan TKI.
- 70% (tujuh puluh persen) untuk sektor lainnya.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) meliputi:

- KUR Mikro, dengan plafond sampai dengan Rp20 juta per debitur dengan tingkat suku bunga maksimal 22% p.a.
- KUR Ritel, yang memiliki plafond kredit di atas Rp20 juta sampai dengan Rp500 juta dengan tingkat suku bunga maksimal 13% p.a.

Mekanisme penyaluran KUR diatur sebagai berikut :

- Penyaluran langsung dari Bank Pelaksana kepada UMKMK.
- Tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing*.
- Tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan pola *chanelling*.

Jangka waktu KUR ditetapkan sebagai berikut :

- Jangka waktu KUR tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk Modal Kerja dan 5 (lima) tahun untuk Kredit/ Pembiayaan Investasi.
- Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi maka jangka waktu kredit dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 (enam) tahun untuk Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan 10

In KUR guarantee program, the Government placed a sum of state capital as additional government capital to strengthen Perum Jamkrindo.

KUR is a credit/financing for working capital or investment to UMKMK that are productive and viable but not bankable with a credit limit of up to Rp500 million, partially guaranteed by the Guarantee Company.

KUR distributed by the executing bank is guaranteed by Perum Jamkrindo in Conditional Automatic guarantee (conditional automatic cover/CAC) with the value of:

- 80% (eighty percent) for agricultural, marine, fisheries, forestry, small industry and workers.
- 70% (seventy percent) for other sectors.

KUR Loan includes:

- KUR Micro, with a ceiling of up to Rp20 million per debtor with a maximum rate of 22% p.a.
- KUR Retail, which has a credit limit above Rp. 20 million up to Rp500 million with a maximum rate of 13% p.a.

KUR mechanism is set as follows:

- Direct distribution of Executing Bank to SMEs.
- Indirectly through linkage with the pattern of the executing agency.
- Indirectly through linkage with the institution channelling pattern

KUR period shall be as follows:

- KUR period not exceeding 3 (three) years for working capital and 5 (five) years for the Credit / Investment Financing.
- In the event that an extension, suppletion and restructuring is needed, the loan period can be extended to a maximum of 6 (six) years for Credit/ Working Capital Financing, and 10 (ten) years for

(sepuluh) tahun untuk Kredit/Pembiayaan Investasi terhitung sejak tanggal perjanjian awal.

- Jangka waktu Kredit/Pembiayaan Investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras dapat diberikan langsung maksimal 13 (tiga belas) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

the Credit/Investment Financing effective from the date of the initial agreement.

- Duration of Credit/Financing of Investment for plantation crops can be directly given in a maximum of 13 (thirteen) years and cannot be extended.

Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah bekerjasama dengan Perum Jamkrindo antara lain: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan 26 Bank Pembangunan Daerah.

Executing Bank of KUR, which has been working with Perum Jamkrindo include: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and 26 regional development banks.

2. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK.05/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang KKP-E yang dimaksud KKP-E adalah Kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bakar Nabati. Adapun kegiatan usaha yang dibiayai KKP-E meliputi: pengembangan tanaman pangan, pengembangan tanaman hortikultura, pengembangan tanaman perkebunan, pengadaan pangan (berupa gabah, jagung, kedelai dan perikanan), peternakan, penangkapan dan pembudidayaan ikan, pengadaan/peremajaan peralatan, mesin dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha tersebut.

Tingkat suku bunga KKP-E ditetapkan maksimal sebesar tingkat bunga pasar yang berlaku untuk kredit sejenis dengan ketentuan:

- Untuk KKP-E pengembangan tebu paling tinggi sebesar suku bunga penjaminan simpanan pada bank umum yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di tambah 5%(lima persen); dan
- Untuk KKP-E lainnya paling tinggi sebesar suku bunga penjaminan simpanan pada bank umum yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di tambah 6%(enam persen).

Bunga tersebut sebagian menjadi beban debitor dan sebagian lagi menjadi beban pemerintah (subsidi).

2. Loan for Food Security and Energy (KKP-E)
Based on Regulation of the Minister of Finance dated July 17, 2007 No.79/ PMK.05/2007 on KKP-E, KKP-E is the investment credit or the working capital given to support the implementation of the Food Security Program and Program Development of Bio Fuel Plant Raw Materials. The business activities funded by KKP-E include: the development of food crops, the development of horticulture crops, plantation development, procurement of food (in the form of grain, corn, soy and fish), animal husbandry, fishing and fish farming, procurement equipment, machinery and tools, and other activities needed to support these efforts.

The interest rates on KKP-E are set at a maximum of prevailing market rate for similar loans with the following provisions:

- For KKP-E development of sugar cane, a maximum interest rate on bank deposit insurance is determined by the Deposit Insurance Corporation (LPS) plus 5% (five percent), and
- For other KKP-E, a maximum interest rate on bank deposit insurance is generally set by the Deposit Insurance Corporation (LPS) plus 6% (six percent).

The interest is partly borne by the debtor and partly borne by the government (subsidies).

Bank Pelaksana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang telah bekerjasama dengan Perum Jamkrindo antara lain: PT. Bank Jabar Banten Tbk, PT BPD Kalimantan Selatan, PT. BPD Jateng, PT. BPD Jatim, PT. BPD Papua serta PT. BPD Nusa Tenggara Barat.

3. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)

Sehubungan dengan usaha pembibitan sapi yang dilakukan peternak di Indonesia masih berjalan lambat dan usaha pembibitan sapi belum banyak dilakukan oleh pelaku usaha, diperlukan peran Pemerintah untuk mendorong pelaku usaha untuk bergerak dibidang pembibitan sapi melalui penyediaan Skim Kredit dengan bunga bersubsidi. Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah menetapkan Skim Kredit yang bersumber dari perbankan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) beserta perubahannya dan kelancaran pelaksanaan pemanfaatan Kredit dimaksud telah ditetapkan suatu pedoman pelaksanaan KUPS dengan Peraturan Menteri pertanian No.12/Permentan/PD.400/3/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) merupakan Kredit yang diberikan Bank Pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah dengan tujuan untuk mendukung pendanaan pelaksanaan Usaha Pembibitan Sapi secara berkelanjutan. Obyek yang dibiayai KUPS adalah Usaha Pembibitan Sapi untuk produksi bibit sapi potong atau sapi perah yang dilengkapi dengan nomor identifikasi berupa *microchip*.

Tingkat suku bunga KUPS ditetapkan maksimal sebesar tingkat bunga pasar yang diatur oleh Pemerintah dengan ketentuan sebesar 5% (lima persen) menjadi beban Pelaku Usaha (Debitur) dan sisanya menjadi beban Pemerintah (subsidi).

Bank Pelaksana Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) yang telah melakukan kerjasama Penjaminan dengan Perum Jamkrindo antara lain: Bank Nagari, BPD Jatim dan BPD NTB.

Executing Banks for Food Security and Energy (KKP-E) who has worked with Perum Jamkrindo are: PT. Bank Jabar Banten Tbk, BPD Kalimantan Selatan, PT. Bank Jateng, PT. Bank Jatim, PT. Bank Papua and bpd Nusa Tenggara Barat.

3. Credit of Cattle Breeding (KUPS)

With regard to the breeding cattle business operated by ranchers in Indonesia in which not many people are engaged in the cattle breeding business, the role of the government is essential to encourage people to move into the field of cattle breeding by providing credit with a subsidized interest rate scheme. On that basis, the government has set up a Credit Scheme sourced from banks with the Ministry of Finance No. 131/PMK.05/2009 on Credit of Cattle Breeding (KUPS) and regarding the smooth implementation of the utilization of the credit, the guidelines for the implementation of the Regulation of the Minister of Agriculture No.12/Permentan/PD.400/3/2012 on Guidelines of the Credit of Cattle Breeding (KUPS).

The credit of Cattle Breeding (KUPS) is the loan given by the Executing Bank to finance the Cattle Breeding Business with the interest rate subsidy from the Government with an aim to support the implementation of a sustainable Cattle Breeding Business. Objects funded by KUPS loans are Cattle Breeding for seed production of beef cattle or dairy cows equipped with a microchip identification number.

The interest rate is set at a maximum of KUPS market interest rates by the Government with the provisions of 5% (five percent) to the farmer/ borrower (Debtor) and the rest is borne by the government (subsidies).

Executing Bank of Loan for Cattle Breeding (KUPS) that has been cooperating with Perum Jamkrindo include: Bank Nagari, BPD Jatim and Bank NTB.

b) Penjaminan *Existing* (korporasi)

Penjaminan *Existing* merupakan penjaminan kredit yang selama ini dijalankan oleh Perum Jamkrindo, yang diciptakan dan dikembangkan sendiri oleh Perusahaan mengikuti kebutuhan pihak perbankan.

Perum Jamkrindo melakukan Penjaminan *Existing* baik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Pemberian Kredit secara langsung diberikan oleh Penerima Jaminan kepada UMKMK, sementara untuk penyaluran kredit secara tidak langsung Penerima Jaminan bekerjasama dengan Lembaga *Linkage* dengan Pola *Executing* maupun *Channeling*.

Produk-produk Penjaminan eksisting yang selama ini dijalankan oleh Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

b) Corporate (Existing) Credit Guarantee

Existing Guarantee is a guarantee of credit that has been run by Perum Jamkrindo, developed by the Company following the needs of the banks.

Perum Jamkrindo made the existing guarantee whether committed directly or indirectly. Loan on direct lending is provided by banks of Guarantee Recipients to UMKMK, while for indirect lending, the banks or guarantee Recipient cooperates with the linkage institution (cooperatives etc) with the pattern of Executing and Channelling.

Existing Guarantee products that had been run by Perum Jamkrindo are as follows:

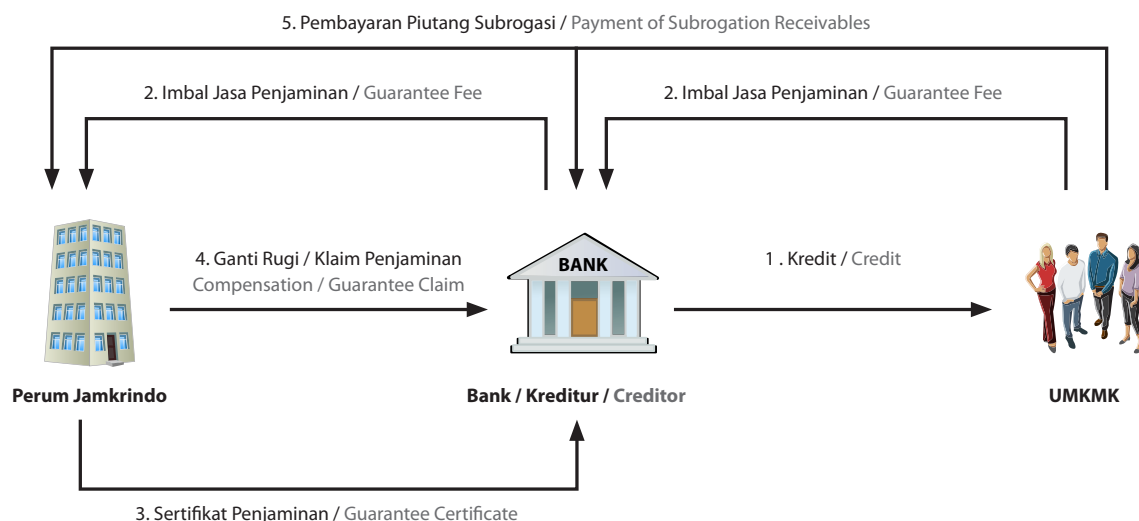
No.	Produk Penjaminan Kredit <i>Credit Guarantee Product</i>
1	Penjaminan Kredit Mikro <i>Micro Credit Guarantee</i>
2	Penjaminan Kredit Umum <i>Commercial Credit Guarantee</i>
3	Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa <i>Credit Guarantee Construction and Procurement of Goods/Services</i>
4	Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi) / <i>Counter Bank Guarantee</i>
5	Penjaminan Distribusi Barang <i>Distribution of Goods Guarantee</i>
6	Penjaminan Kredit Multiguna <i>Multipurpose Credit Guarantee</i>
7	<i>Surety Bond</i>

3. Proses Penjaminan

Proses Penjaminan Kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara Perum Jamkrindo (Penjamin) dan Penerima Jaminan, dan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit dan/atau Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3).

3. Guarantee Process

Credit Guarantee process is implemented in accordance with the terms and condition agreed upon between Perum Jamkrindo (Guarantor) and the Guarantee Recipient (Banks) and documented in the Credit Guarantee Agreement and or Letter of Credit Guarantee Approval (SP3)



Secara umum mekanisme proses penjaminan yang berlaku di Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

a. **Penjaminan Kasus Per Kasus (Case By Case/CBC)**

Penjaminan Kasus Per Kasus (Case By Case/CBC) adalah penjaminan yang proses persetujuan dilakukan secara kasus per kasus atas kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan, dimana Perum Jamkrindo melakukan evaluasi kelayakan usaha calon Terjamin terlebih dahulu atas setiap pengajuan penjaminan sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) sebagai bentuk persetujuan penjaminan. Dalam hal ini Perum Jamkrindo dapat menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan penjaminan tersebut.

Penjaminan kasus per kasus diberikan untuk produk penjaminan Kredit Umum, Kredit Mikro, Kredit Kontruksi dan Pengadaan Barang/Jasa, Kontra Bank Garansi, Distribusi Barang dan beberapa jenis Kredit Multiguna.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penjaminan kredit kasus per kasus adalah sebagai berikut:

1. Terjamin dan Penerima Jaminan atau mitra kerja bank/non bank mengajukan permohonan penjaminan kredit kepada penjamin dengan melampirkan beberapa dokumen antara lain

In general, the mechanism of credit guarantee processes that apply in Perum Jamkrindo are as follows:

a. **Case by Case (CBC) Guarantee**

Case by Case (CBC) Guarantee is a guarantee of which the approval process conducted on a case by case basis on the credits granted by the banks/Guarantee Recipients, in which Perum Jamkrindo will evaluate the feasibility of the Guaranteed's application in advance of any filing prior to the issuance of Guarantee Approval (SP3). In this case Perum Jamkrindo can approve or not approve the application of such credit guarantee proposal.

The method of case by case basis applies for Commercial Loans, Micro Credit, Construction and Procurement of Goods/Services Credit, Counter Bank Guarantee, distribution of goods and certain types of Multipurpose Credit.

The steps in the case by case method are as follows:

1. The borrower (UMKMK) and the bank applies for a credit guarantee to Perum Jamkrindo by attaching several documents, among others, business proposal, the applicant's identity and the legality

proposal usaha, identitas dan legalitas usaha pemohon sebagaimana permohonan kredit dari Terjamin UMKMK kepada Penerima Jaminan.

2. Setelah melakukan analisa kelayakan penjaminan, maka Penjamin menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) kepada Penerima Jaminan yang berisi tentang ketentuan dan persyaratan penjaminan, dan menyampaikan surat penolakan apabila Penjamin tidak menyetujui permohonan penjaminan tersebut.
3. Penerima Jaminan menyampaikan surat persetujuan atas seluruh ketentuan dalam SP3 Penjamin, apabila menyetujui ketentuan dalam SP3 tersebut.
4. Penerima Jaminan atau mitra kerja bank/non bank dapat melakukan perjanjian (akad) kredit dan merealisasikan kreditnya kepada nasabah(Terjamin) UMKMK
5. Penerima Jaminan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) kepada Penjaminan dengan melampirkan beberapa dokumen antara lain copy Perjanjian Kredit beserta *Addendum*-nya dan bukti pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP).
6. Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) kepada Penerima Jaminan.

b. Penjaminan Otomatis Bersyarat (*Conditional Automatic Cover/CAC*)

Penjaminan Otomatis Bersyarat (*Conditional Automatic Cover/CAC*) adalah penjaminan diberikan secara otomatis oleh Perum Jamkrindo atas kredit yang direalisasikan oleh Penerima Jaminan kepada UMKMK dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah disepakati yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Penjaminan antara Perum Jamkrindo dengan Penerima Jaminan.

Penjaminan Otomatis Bersyarat diberikan untuk produk penjaminan KUR, Kredit Mikro, Kredit Kontruksi dan Pengadaan Barang/Jasa dalam batasan jumlah tertentu, Kontra Bank Garansi dan Kredit Multiguna.

of the business as what the borrower proposed as credit documents to the bank.

2. After analyzing the feasibility of the guarantee application, the Guarantor issues a Letter of Guarantee Approval (SP3) to the bank/ Guarantee Recipient that contains the guarantee terms and conditions, or issues a disapproval letter if Perum Jamkrindo as the Guarantor do not approve the application of credit guarantee.
3. The Bank submits a letter of consent agreed to all provisions in the Guarantee Approval, if they agree to the terms of the SP3.
4. Guarantee Recipient or bank/non-bank may sign the credit agreement with the UMKMK or borrower.
5. After the credit agreement, Bank requests the issuance of Guarantee Certificates (SP) by attaching several documents including a copy of the Credit Agreement and its Addendum, and the receipt of Guarantee Fee payment (IJP).
6. Guarantee Certificate is issued by Perum Jamkrindo or the Guarantor to the bank/Guarantee.

b. Conditional Automatic Cover/CAC

Conditional Automatic Cover/CAC is a guarantee provided automatically by Perum Jamkrindo for the credit guarantee application that is proposed by the bank for UMKMK with respect to the terms agreed upon in the Credit Guarantee Agreement between Perum Jamkrindo and the Guarantee Recipient.

Conditional Automatic Cover is given to all credit guarantee products including KUR Guarantee, Micro Credit, Credit Construction and Procurement of Goods and Services, the Counter Bank Guarantee and Loan Multipurpose within the limits of a certain amount of credit.

Penjaminan Bersama (Co Guarantee)

Sebagai salah satu upaya untuk mitigasi risiko serta memperluas jaringan pasar Perum Jamkrindo telah melakukan kerja sama Penjaminan (*Co Guarantee*) dengan beberapa Perusahaan Asuransi sebagai mitra kerja *Co Guarantee* Penjaminan melalui Penjaminan Bersama KUR, Kredit Multiguna dan *Co-Branding*.

1. Penjaminan Bersama (Co Guarantee) KUR

Dalam rangka pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK, Pemerintah memprogramkan penjaminan KUR tahun 2011 sebesar Rp30 triliun yang dijamin oleh 2 (dua) perusahaan, yaitu Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo.

Sejak tahun 2010, Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo menyepakati satu bentuk kerjasama penjaminan bersama (*Co Guarantee*), disamping untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target penyaluran KUR dari pemerintah, hubungan kerjasama penjaminan bersama (*Co Guarantee*) dilakukan dengan dasar sebagai berikut:

- Perum Jamkrindo dan PT Askrindo (Persero) merupakan BUMN, dibawah satu naungan kementerian negara BUMN.
- Perum Jamkrindo dan PT Askrindo (Persero) sama-sama mendapatkan tambahan dana PMN.
- Perum Jamkrindo dan PT Askrindo (Persero) juga sama-sama mendapatkan tugas menjamin KUR.
- Bank pelaksana yang menyalurkan KUR adalah sama.
- Mekanisme penjaminan KUR bersifat otomatis bersyarat (*conditional automatic cover*).

Perum Jamkrindo menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) berdasarkan permohonan dari Bank Pelaksana, setelah SP terbit selanjutnya Perum Jamkrindo mengajukan Penjaminan bersama kepada PT. Askrindo. Demikian juga sebaliknya PT. Askrindo mengajukan Penjaminan bersama kepada Perum Jamkrindo atas Sertifikat Penjaminan yang diterbitkannya.

Co Guarantee

As an effort to mitigate risks and expand the network and markets, Perum Jamkrindo have been cooperating with several insurance companies as a partner of co-guarantee for some guarantee products such as KUR Guarantee, Multipurpose and Micro Credit and Co-Branding.

1. Co-Guarantee of KUR

As a commitment to implementing Presidential Instruction No. 6 Year 2007 dated June 8, 2007 on the Acceleration of Real Sector Development and Empowerment of UMKMK, the Government allocated Rp30 trillion for KUR assurance program in 2011, of which program was guaranteed by 2 (two) companies, namely Perum Jamkrindo and PT. Askrindo.

Since 2010, Perum Jamkrindo and P. Askrindo agreed on co guarantee cooperation to support the government to achieve targets on KUR Program. The basic reason for the agreement in the co guarantee of KUR Program between two institutions are as follows:

- Perum Jamkrindo and PT Askrindo are state owned enterprises under the Ministry of SOEs.
- Perum Jamkrindo and PT Askrindo, both get an additional government shares (PMN.)
- Perum Jamkrindo and P. Askrindo both have the assignment to guarantee KUR Program.
- The executing Banks of KUR are the same banks and all have cooperation between Perum Jamkrindo and PT. Askrindo.
- The mechanism of KUR Guarantee is conditional automatic cover.

Perum Jamkrindo issues a Guarantee Certificate (SP) which is based on the request of the Executing Bank. After the issuance, Perum Jamkrindo submits the certificate to PT Askrindo and vice versa.

2. Penjaminan Bersama (Co Guarantee) Kredit Multiguna

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Mitra Penjaminan untuk menjamin pemberian Kredit Multiguna kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota POLRI/TNI, Pegawai BUMN/ BUMD dan Pegawai Perusahaan Swasta yang bonafid, dimana salah satu risiko kreditnya adalah kematian terjamin, maka sebagai sebagai salah satu mitigasi risiko, Perum Jamkrindo telah menandatangani kerjasama penjaminan bersama (*Co Guarantee*) dengan Perusahaan-perusahaan Asuransi.

Atas risiko-risiko kredit yang disebabkan oleh kematian Terjamin dapat diklaimkan kembali kepada perusahaan-perusahaan Asuransi yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama *Co Guarantee*. Risiko yang ditanggung oleh mitra *Co Guarantee* adalah risiko kemacetan kredit yang disebabkan Terjamin meninggal dunia, baik akibat kematian biasa atau *personal accident* sejak 3 bulan pertama dari tanggal realisasi kredit.

3. Penjaminan Co-Branding

Untuk memenuhi kebutuhan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam menjamin pemberian pembiayaan kepada Pengusaha mikro kecil dimana salah satu risiko kreditnya adalah kematian terjamin, maka sebagai sebagai salah satu mitigasi risiko, Perum Jamkrindo telah menandatangani kerjasama *Co-Branding* dengan PT. Asuransi Jiwasraya.

Melalui kerjasama ini Perum Jamkrindo dan PT. Asuransi Jiwasraya sama-sama melakukan kerjasama Penjaminan/ Asuransi atas pembiayaan kepada Debitur PT. PNM dengan penjaminan risiko yang berbeda. Perum Jamkrindo menjamin risiko kemacetan kredit sementara PT. Asuransi Jiwasraya melindungi risiko kematian Terjamin.

Dalam kerjasama ini Perum Jamkrindo menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) kepada PT. PNM sebagai bukti penjaminan, yang sekaligus mencantumkan pernyataan (*statement*) penjaminan atas risiko jiwa Debitur dari PT. Asuransi Jiwasraya.

2. Co-Guarantee for Multipurpose Credit

In order to meet the needs of partners for the guarantee of Multipurpose Credit to the employees (Civil Service, Member of the police/ military, employees of state-owned enterprise/local enterprises and those from reputable private company), in which one of the credit risks is the death of the person that is guaranteed, Perum Jamkrindo has signed a joint guarantee or Co Guarantee agreement with insurance companies.

Credit risks due to the death of the guaranteed can be reclaimed to the insurance company by signing to the Co-Guarantee. Risks borne by the Co-Guarantee partners is a non performing loan risk due to the death of the Guaranteed, because of personal accident or others since the first 3 months after the credit disbursements.

3. Guarantee of Co-Branding Product

To meet the needs of PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) for the micro and small enterprises including the risk of the death of the guaranteed, Perum Jamkrindo signed a Co-Branding cooperation with PT Asuransi Jiwasraya as one means to mitigate such risk.

Through this cooperation, Perum Jamkrindo and PT. Asuransi Jiwasraya are both cooperating with Guarantee/ Insurance for the expenses to cover the Debtors of PT. PNM with different risk guarantees. Perum Jamkrindo is responsible for the credit risks while PT. Asuransi Jiwasraya is responsible for the death risks.

In this partnership, Perum Jamkrindo issues Guarantee Certificate (SP) to PT. PNM as a guarantee proof, including statement to cover the death risk of the Debtor from PT. Asuransi Jiwasraya.

PT. PNM melimpahkan IJP hak Perum Jamkrindo serta premi hak PT. Asuransi Jiwasraya melalui Perum Jamkrindo di mana premi tersebut akan diteruskan oleh Perum Jamkrindo kepada PT. Asuransi Jiwasraya.

Apabila terjadi klaim atas kematian Debitur maka PT. PNM mengajukan klaim tersebut melalui Perum Jamkrindo dan Perum Jamkrindo akan meneruskan pembayaran sesaat setelah klaim tersebut telah dibayar oleh PT. Asuransi Jiwasraya.

PT. PNM pays the guarantee fee to Perum Jamkrindo, including the insurance/premium fee to PT. Asuransi Jiwasraya where the fee will be forwarded to PT. Asuransi Jiwasraya.

Should there be a claim of the death of the Debtor, PT. PNM files a claim through Perum Jamkrindo where the payment will be forwarded once the claim is paid by PT. Asuransi Jiwasraya.

Kinerja Penjaminan Kredit

Selama periode tahun 2013, total kredit yang dijamin Perum Jamkrindo adalah sebesar Rp45,84 triliun atau mencapai 85,05% dari target RKAP tahun 2013 sebesar Rp53,90. Volume kredit yang dijamin Perum Jamkrindo tersebut terdiri dari penjaminan bank dan penjaminan bukan bank. Penjaminan bank pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp44,81 triliun yang berasal dari penjaminan konvensional sebesar Rp40,92 triliun dan penjaminan syariah sebesar Rp3,88 triliun. Sedangkan penjaminan bukan bank tercatat sebesar Rp1,15 triliun.

Peningkatan Kapasitas Penjaminan Kredit

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, *Gearing Ratio* adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Penjamin dalam melakukan kegiatan Penjaminan.

Gearing Ratio merupakan ukuran kemampuan menjamin oleh suatu Perusahaan Penjamin yang direpresentasikan oleh perbandingan antara total nilai *outstanding* Penjaminan yang ditanggung sendiri dengan modal sendiri bersih pada suatu waktu tertentu. Modal sendiri bersih adalah total Ekuitas Perum Jamkrindo atau Total Aset Perusahaan dikurangi total Kewajibannya.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.010/2011, khususnya pada pasal 42, ayat (4) dan ayat (5), disebutkan bahwa:

Performance of Credit Guarantee

During the period of 2013, total loans guaranteed by Perum Jamkrindo amounted to Rp45.84 trillion or 85.05% of the RKAP target in 2013 amounted to Rp53.90. the loan volume guaranteed by Perum Jamkrindo consists of banks and non-bank guarantee. Bank guarantee in 2013 amounted to Rp44.81 trillion derived from conventional guaranteed amounted to Rp40.92 trillion and Sharia guarantee amounted to Rp3, 88 trillion. While non bank guarantee stood at Rp1.15 trillion.

The Increase in Credit Guarantee Capacity

Pursuant to the Regulation of the Minister of Finance Number 99/PMK.010/2011 on Amendments to the Minister of Finance Regulation No. 222/PMK. 010/2008 On the Credit Guarantee and Reguarantee Company, *Gearing Ratio* is defined as the limit to measure the ability of the Credit Guarantee Company in the Guarantee activities.

Gearing Ratio is a measure of the ability of a guarantee by the Credit Guarantee Company represented by the ratio between the total outstanding value of credit guaranteed by the net the worth at any given time. The net worth itself is the total Equity of the Company or the Company's total assets reduced with the total obligations.

As stipulated by the Minister of Finance Regulation No. 99/PMK.010/2011, in particular in article 42, paragraph (4) and paragraph (5), it is stated that:

1. *Gearing Ratio* untuk Usaha Produktif ditetapkan paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) kali
2. Total *Gearing Ratio* ditetapkan paling tinggi sebesar 40 (empat puluh) kali.

Pada tahun 2013, Perum Jamkrindo menerima Penyerahan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,12 triliun yang menjadikan modal sendiri bersih Perum Jamkrindo bertambah menjadi sebesar Rp5,33 triliun, maka kapasitas Perum Jamkrindo dalam melakukan kegiatan usaha Penjaminan Kredit menjadi semakin meningkat.

Pendapatan Usaha

1. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP)

Pada tahun 2013, total pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Perusahaan tercatat sebesar Rp1.600,96 miliar naik 14,43% dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp1.399,06 miliar.

Perkembangan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Perum Jamkrindo selama periode 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

dalam miliar rupiah / in billion rupiah

	2011	2012	2013
IJP <i>Gross Guarantee Fee</i>	969.158	1.399.062	1.600,96

2. Pendapatan Investasi

Pendapatan investasi pada tahun 2013 sebesar Rp286,81 miliar, naik 39,36% dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp205,80 miliar.

Perkembangan pendapatan hasil Investasi Perum Jamkrindo selama periode 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(miliar Rupiah / billion rupiah)

	2011	2012	2013
Pendapatan Investasi <i>Investment Revenue</i>	132.028	205.802	286.81

1. *Gearing Ratio* for Productive Enterprises set at a maximum of 10 (ten) times
2. Total *Gearing Ratio* is set at a maximum of 40 (forty) times.

In addition, Perum Jamkrindo received an Addition of State Capital (PMN) amounting to Rp1,12 trillion, which made its own net capital increased to Rp5,33 trillion. The capacity of Perum Jamkrindo in conducting its Credit Guarantee activities also improved.

Operating Revenues

1. Income of Guarantee Fee (IJP)

In 2013, the total income of Credit Guarantee Fee (IJP) in 2012 amounted to Rp1,600.96 billion. It significantly grew by 14,43% compared to 2012 at Rp1,399.06 billion.

The growth of the income of the Guarantee Fee of Perum Jamkrindo over the last 3 (three) years is as follows:

2. Income of Investment

The investment income in 2013 was Rp286.81 billion, an increase of 39.36% compared to 2012 at Rp205.80 billion.

The trend of the investment income of Perum Jamkrindo during the last 3 (tiga) years is as follows:

Imbal Jasa Penjaminan Bersih

1) Imbal Jasa Penjaminan Bruto

Sejak awal pendiriannya, Perum Jamkrindo berkomitmen untuk turut serta menunjang kebijakan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional dengan melaksanakan kegiatan Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Realisasi imbal jasa penjaminan bruto pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp1,60 triliun, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp201,90 miliar atau 14,43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,40 triliun.

2) Pendapatan Komisi Re Asuransi

Jumlah pendapatan komisi re asuransi Perum Jamkrindo pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp844, 53 miliar.

3) Premi Co Guarantee

Premi co guarantee pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp253,40 triliun, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp22,62 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp230,78 miliar.

4) Premi Re Asuransi

Pada tahun 2013, premi re asuransi mencapai Rp4,20 miliar.

5) Fee Based Income

Fee based income tercatat sebesar Rp4,67 miliar dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp2,29 miliar.

6) Fee Agent

Fee agent mencapai Rp3,49 miliar pada tahun 2013.

7) Restitusi IJP

Sedangkan restitusi IJP pada tahun 2013 mencapai Rp4,56 miliar.

Net Underwriting Compensation

1) Gross Underwriting compensation

Since the beginning of its establishment, Perum Jamkrindo has been committed to participate and to support government programs in the field of economic policy and national development by conducting Credit Guarantee for Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK). One of them is by optimizing Kredit Usaha Rakyat (Small Loans) (KUR) programs

The realization of gross underwriting in 2013 recorded at Rp1.60 trillion, the nominal value increased by Rp201.90 billion or 14,43% compared to the previous year which only amounted to Rp1.40 trillion.

2) Reinsurance Commission Revenue

The total reinsurance commission revenue of Perum jamkrindo in 2013 reached by Rp844.53 billion.

3) Co Guarantee Premium

Co guarantee premium in 2013 was recorded at Rp253.40 trillion, the nominal value increased by Rp22.62 billion compared to the previous year which amounted to Rp230.78 billion.

4) Reinsurance Premium

In 2013, the reinsurance premium reached by Rp4.20 billion.

5) Fee Based Income

The Fee based income recorded at Rp4.67 billion compared to 2012 which was Rp2.29 billion.

6) Fee Agent

Fee Agent achieved by Rp3.49 billion in 2013

7) IJP Restitution

Meanwhile for the IJP Restitution in 2013 reached by Rp4.56 billion.

Secara keseluruhan, total imbal jasa penjaminan bersih Perum Jamkrindo pada tahun 2013 naik 14,19% menjadi Rp1,33 triliun dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp1,17 triliun.

Overall, the total net underwriting compensation of Perum Jamkrindo in 2013 rose 14.19% to Rp1.33 trillion compared to 2012 which was recorded at Rp1.17 trillion.

Uraian / Description	2013	2012	%
Total Imbal Jasa Penjaminan Bersih / Total Net Underwriting Compensation	1,33	1,17	14,19

Kinerja Penjaminan Syariah

Sharia Guarantee Performance

Uraian / Description	Realisasi / Realization 2013 Rp	RKAP 2013 Rp	Realisasi / Realization 2012 Rp	% Realisasi / Realization 2013 (2 : 3) (2 : 4)	
1	2	3	4	5	6
Penjaminan Syariah / Sharia Guarantee					
- Agrobisnis / Agrobusiness	326.638	288,905	497.655	113,06%	65,64%
- INKRA	53.543	40,858	52.760	131,05%	101,49%
- Jasa dan Perdagangan / Service and Trading	3.504.505	4.106,807	4.586.933	85,33%	76,40%
Sub Jumlah / Sub Total	3.884.686	4.436.570	5.137.348	87,56%	75,62%
Jumlah A / Total A	44.808.556	49.393.676	52.158.415	90,72%	85,91%

Pertumbuhan Volume Penjaminan Syariah

Pada tahun 2013, total volume penjaminan syariah tercatat sebesar Rp3,88 triliun mencapai 75,62% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp5,13 triliun atau mencapai 87,56% dari target RKAP tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp4,44 triliun.

Volume Growth of Sharia Guarantee

In 2013, total sharia guarantee volume was Rp3.88 trillion or reaching 75.62% from the target of 2012's RKAP of Rp5.13 trillion or reaching 87.56% which was recorded at Rp4.44 billion.

Realisasi volume Penjaminan syariah Perum Jamkrindo senantiasa terjaga dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari volume yang dijamin, seperti pada tahun 2011 sebesar Rp4,686 triliun, pada tahun 2012 sebesar Rp5,235 triliun, dan pada tahun 2013 sebesar Rp3,884 triliun.

Realization of sharia guarantee volume of Perum Jamkrindo always properly maintained. This can be seen from the guaranteed volume, such as in 2011 at Rp4.686 trillion which in 2012 was at Rp5.235 trillion, and in 2013, it was Rp3.884 trillion.

Profitabilitas

1. Perolehan Laba Perusahaan

(miliar Rupiah / billion rupiah)

Uraian / Description	2011	2012	2013
Laba Sebelum Pajak (EBT) / Profit Before Tax	378.988	562.273	596.107
Laba Tahun Berjalan (Setelah Pajak) / Current Year Profit (After Tax)	372.371	509.516	525.209
Laba Komprehensif Tahun Berjalan (Setelah Pajak) / Current Year Comprehensive Profit (After Tax)	372.544	517.669	445.139

2. Rasio Efektifitas Operasional

Rasio Efektivitas Operasional merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dan pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP). Rasio efektifitas operasional Perum Jamkrindo pada tahun 2013 sebesar 41,07%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, rasio operasi mengalami kenaikan dan tercatat sebesar 40,18%.

Rasio Efektifitas Operasional tersebut menunjukkan Perum Jamkrindo cukup efektif dalam menjalankan operasional kegiatan Perusahaan.

3. Return on Assets (ROA)

ROA Perum Jamkrindo tahun 2013 sebesar 6,61%. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan ROA tahun sebelumnya, dimana ROA tahun 2012 sebesar 8,79%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penambahan Penyertaan Modal Negara.

4. Return on Equity (ROE)

ROE Perum Jamkrindo tahun 2013 sebesar 36,18%. Nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan ROA tahun sebelumnya, dimana ROA tahun 2012 sebesar 10,09%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penambahan Penyertaan Modal Negara.

Profitability

1. Company Profit

2. Operational Effectiveness Ratio

Operational Effectiveness Ratio is the comparison between gross profit margin and income guarantee fee (IJP). The operational effectiveness ratio of Perum Jamkrindo in 2013 was amounted to 41,07%. Compared to 2012, operational ratio increased and was recorded at 40,18%.

The Operational Effectiveness Ratio shows Perum Jamkrindo's effectiveness in conducting its operational activities.

3. Return on Assets (ROA)

The ROA of Perum Jamkrindo in 2013 was amounted to 6,61%, an decreased compared to the previous ROA in 2012, which was amounted to 8.79%. This increase was due to the addition of State Equity Participation.

4. Return on Equity (ROE)

The ROE of Perum Jamkrindo in 2013 was amounted to 36,18%, an increase compared to the previous ROA in 2012 which was amounted to 10.09%. The increase was due to the addition of State Equity Participation.

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

1. Laporan Posisi Keuangan

Aset (Aktiva)

Berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) Perum Jamkrindo, Aset Lancar, Aset Tidak lancar, dan Jumlah Aset Perum Jamkrindo periode 31 Desember 2012 dan periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

(Disajikan dalam Rupiah) / (Expressed in Rupiah)

ASET / ASSETS	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalent	4,711,774,750,747	4,279,058,647,035
Efek-efek / Marketable Securities:		
- Dimiliki Hingga Jatuh Tempo / Held to Maturity	523,602,230,000	347,517,959,880
- Tersedia Untuk Dijual / Available For Sale	930,400,172,330	666,253,229,545
Piutang IJP KUR Kepada Pemerintah / Piutang Co-Guarantee / Co Guarantee Receivable	862,234,407,631	309,836,402,176
Piutang Penjaminan Ulang / Co-Guarantee Receivable	120,583,795,519	25,408,715,226
Piutang yang diberikan / Loans	1,297,400,099	1,672,066,476
Piutang lain-lain / Other Receivables	27,596,443,977	13,508,306,435
Beban Dibayar Dimuka / Prepaid Expenses	553,068,468,726	533,717,383,806
Properti Investasi / Investment Property	14,981,219,414	15,327,182,736
Aset Tetap / Fixed Assets	37,840,551,952	36,141,076,104
Aset Pajak Tangguhan / Deferred tax Assets	141,500,601,350	128,426,955,968
Aset Lain-lain / Other Assets	368,501,660,187	304,209,015,035
JUMLAH ASET / TOTAL ASSETS	8,293,381,701,932	6,661,076,940,422

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dapat digambarkan sebagai berikut

1. Total Aset

Total Aset Perum Jamkrindo per 31 Desember 2013 sebesar Rp8,29 triliun naik 24,51% dari total aset per 31 Desember 2012. Kenaikan aset sebesar Rp1,63 triliun, kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh adanya penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,12 triliun dari Pemerintah.

COMPANY'S FINANCIAL PERFORMANCE

1. Report on Financial Position

Aset (Aktiva)

Based on the Financial Report (*Audited*) of Perum Jamkrindo, the Current Asset, Noncurrent Asset, and Total Asset of Perum Jamkrindo for the period of December 31 2012 and periodic December 31 2013 are as follow:

ASET / ASSETS	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalent	4,711,774,750,747	4,279,058,647,035
Efek-efek / Marketable Securities:		
- Dimiliki Hingga Jatuh Tempo / Held to Maturity	523,602,230,000	347,517,959,880
- Tersedia Untuk Dijual / Available For Sale	930,400,172,330	666,253,229,545
Piutang IJP KUR Kepada Pemerintah / Piutang Co-Guarantee / Co Guarantee Receivable	862,234,407,631	309,836,402,176
Piutang Penjaminan Ulang / Co-Guarantee Receivable	120,583,795,519	25,408,715,226
Piutang yang diberikan / Loans	1,297,400,099	1,672,066,476
Piutang lain-lain / Other Receivables	27,596,443,977	13,508,306,435
Beban Dibayar Dimuka / Prepaid Expenses	553,068,468,726	533,717,383,806
Properti Investasi / Investment Property	14,981,219,414	15,327,182,736
Aset Tetap / Fixed Assets	37,840,551,952	36,141,076,104
Aset Pajak Tangguhan / Deferred tax Assets	141,500,601,350	128,426,955,968
Aset Lain-lain / Other Assets	368,501,660,187	304,209,015,035
JUMLAH ASET / TOTAL ASSETS	8,293,381,701,932	6,661,076,940,422

Based on the table above, the description can be written as follow:

1. Total Aset

The Total Asset of Perum Jamkrindo per December 2013 was amounted to Rp8.29 trillion, increasing by 24,51% of total assets as of December 31, 2012. Such increase was due to the addition of State Equity Participation (PMN) of Rp1,12 trillion from the Government.

2. Aset Lancar

a. Kas dan Setara Kas

Posisi kas dan setara kas per 31 Desember 2013 tercatat sebesar Rp4,71 triliun naik 10,10% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp4,27 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya dana PMN.

b. Aset Keuangan

Aset keuangan merupakan Investasi dalam bentuk Deposito, Obligasi dan Saham per 31 Desember 2013 sebesar Rp1,45 triliun mengalami kenaikan 43,43% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp1,01 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya dana PMN.

c. Piutang Co-Guarantee

Piutang *Co-Guarantee* per 31 Desember 2013 mengalami kenaikan dari sebesar Rp25,40 miliar pada posisi 31 Desember 2012 menjadi Rp120,58 miliar atau naik 374,58%. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pembayaran klaim yang menjadi tanggungjawab mitra *co-guarantee* dan belum dibayarkannya reimburse klaim oleh mitra *co-guarantee* kepada Perum Jamkrindo.

d. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2013 mengalami kenaikan sebesar 3,63% dari sebesar Rp533,71 miliar pada posisi 31 Desember 2012 menjadi Rp553,07 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan premi *co-guarantee* dan *fee base* untuk bank dari volume penjaminan.

3. Aset Tidak Lancar

a. Aset Tetap

Aset Tetap Perusahaan per 31 Desember 2013 mengalami kenaikan sebesar 4,70% dari sebesar Rp36,14 miliar pada posisi 31 Desember 2012 menjadi Rp37,84 miliar. Penurunan tersebut disebabkan karena meningkatnya biaya penyusutan.

2. Current Asset

a. Cash and Cash Equivalents

The position of cash and cash equivalents per December 31 2013 was recorded at Rp4.71 trillion, increasing by 10.10% compared to 2012, which was amounted to Rp.4.27 trillion. The increase was due to the presence of PMN budget.

b. Financial Asset

Financial Asset was Investment in the form of Deposit, Obligation, and Capital per December 31 2013 which was amounted to Rp1.45 trillion, increasing by 43.43% compared to 2012 which was Rp1.01 trillion. The increase was due to the presence of PMN budget.

c. Co-Guarantee Revenue

Co-Guarantee Receivables as of December 31, 2013 increased from Rp25.40 billion on December 31, 2012 to Rp120.58 billion or rose by 374.58%. This increase was due to increased claim payment which became the responsibility of co-guarantee partner and non reimbursement claims by co-guarantee partners to Perum Jamkrindo.

d. Prepaid Expenses

The Prepaid Expenses as of December 31 2013 increased by 3.63% from Rp533.71 billion on December 31 2012 to Rp553.07 billion. The increase was due to the increase of co-guarantee premium and fee-base for the bank from the guarantee volume.

3. Non Current Asset

a. Current Asset

The Current Asset of the Company per December 31 2013 increased by 4.70% from Rp37.84 billion. The decrease was due to the increase in depreciation cost.

b. Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan per 31 Desember 2013 mengalami kenaikan sebesar 10,18%, dari Rp128,42 miliar pada posisi 31 Desember 2012 menjadi Rp141,50 miliar. Kenaikan aset pajak tangguhan ini akibat penerapan PSAK 50 dan 55 dimana pada tahun 2010.

c. Aset Lain-lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2013 mengalami kenaikan menjadi Rp368,50 miliar atau sebesar 21,13% dari sebesar Rp45,60 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp304,21 miliar.

Liabilitas

Berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) Perum Jamkrindo, Liabilitas Jangka Pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas Perum Jamkrindo periode 31 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

LIABILITAS / LIABILITIES	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Hutang Klaim / Claim Payable	45.180.582.714	22.056.514.565
Cadangan Klaim / Claim Reserve	452.121.969.352	395.874.829.797
Hutang penjaminan ulang / Co Guarantee payable	41.712.936.083	2.607.675.669
Pendapatan ditangguhkan / Deferred Revenue	1.103.427.896.654	1.120.831.964.142
Hutang Pajak / Tax Payable	24.242.476.126	32.008.718.569
Hutang Lain-Lain / Other Liabilities	76.557.601.893	38.066.682.982
JUMLAH LIABILITAS / TOTAL LIABILITIES	1.743.243.462.822	1.611.446.405.724

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dapat digambarkan sebagai berikut

1. Total Liabilitas

Posisi kewajiban Perum Jamkrindo per 31 Desember 2013 mengalami kenaikan sebesar 8,18%, dari Rp1,61 triliun pada posisi 31 Desember 2012 menjadi Rp1,74 triliun. Komponen terbesar kenaikan pos kewajiban berasal dari Pendapatan Diterima Dimuka yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

2. Hutang Klaim

Hutang klaim per 31 Desember 2013 mengalami kenaikan sebesar 104,84% dari sebesar Rp22,05 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp45,18 miliar. Hutang klaim ini terjadi karena telah disetujuinya Pengajuan Klaim dari Penerima Jaminan.

b. Deferred Tax Asset

The Deffered Tax Asset per December 31 2013 increased by 10.18% from Rp128.42 billion on December 31 2012 to Rp141.50 billion. The increase of deferred tax asset was due to the implementation of PSAK 50 and 55 in 2010.

c. Other Asset

Other asset per December 31 2013 increased be Rp368.50 billion or amounted to 21.13% from Rp45.60 billion on December 31 2012 to Rp304.21 billion.

Liability

Based on Perum Jamkrindo Financial Report (*Audited*), Short Term Liability, long term liability, and total liability of Perum Jamkrindo as of December 31 2012 up to December 31 2013 are as follow:

Based on the table above, the description can be illustrated as follow

1. Total Liability

The total liabilities of Perum Jamkrindo as of December 31 2013 increased by 8.18% from Rp1.61 trillion on December 31 2012 to Rp1.74 trilion. The largest component of total liability came from Unearned Revenue that significantly increased.

2. Claim Payable

The claim payable as of December 31 2013 increased by 104.84% from Rp22.05 billion on December 31 2012 to Rp45.18billion. The claim payable was due to the approval of debts claim from the Guarantee Recipient.

3. Cadangan Klaim

Cadangan klaim per 31 Desember 2013 mengalami kenaikan sebesar 14,21% dari sebesar Rp395,87 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp452,12 miliar. Kenaikan Cadangan Klaim sebagai akibat meningkatnya portofolio Penjaminan Perum Jamkrindo, baik penjaminan KUR maupun Existing.

4. Hutang Co-Guarantee

Hutang co-guarantee per 31 Desember 2012 sebesar Rp2,60 miliar naik 1.499,62% dibandingkan dengan per 31 Desember 2013 yang tercatat sebesar Rp41,71 miliar. Hutang co-guarantee pada tahun 2013 merupakan hutang atas kerjasama *co-guarantee* penjaminan kredit multiguna.

5. Hutang Pajak

Hutang pajak per 31 Desember 2013 mengalami penurunan sebesar 24,26% dari Rp32,00 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp24,24 Miliar. Penurunan hutang pajak terjadi karena peningkatan laba perusahaan di tahun 2013.

6. Hutang Lain-lain

Hutang lain-lain per 31 Desember 2013 mengalami kenaikan sebesar 101,11% dari Rp38,06 miliar pada posisi 31 Desember 2012 menjadi Rp76,56 miliar.

Ekuitas

Berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) Perum Jamkrindo, Ekuitas Perum Jamkrindo sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

EKUITAS / EQUITY	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Penyertaan Modal Negara / Government's Share Placement	5,338,733,365,160	4,218,733,365,160
Cadangan-Cadangan / Appropriate Retained Earnings	757,940,218,914	313,055,484,298
Komponen Ekuitas Lainnya / Other Equity Components	(71,744,405,302)	8,324,950,625
Saldo Laba / Retained Earnings	525,209,060,338	509,516,734,615
JUMLAH EKUITAS / TOTAL EQUITY	6,550,138,239,110	5,049,630,534,698

3. Claim Reserve

The claim reserve as of December 31 2013 increased by 14.21% from Rp395.87 billion on December 31 2012 to Rp452.12 billion. The increase of Claim Reserves was due to the increasing portfolion of Perum Jamkrindo Guarantee, both the existing guarantee and KUR guarantee.

4. Co-Guarantee

Co-guarantee payable as of December 31 2012 which was amounted to Rp2.60 billion increased by 1,499.62% compared to as of December 31 2013 which was recorded at Rp41.71 billion. The co-guarantee payable on 2013 was for the co-guarantee partnership with multipurpose credit guarantee.

5. Tax Payable

The tax payable as of December 31 2013 decreased by 24.26% from Rp32.00 billion on December 31, 2012 to Rp24.24 billion. The decrease of tax payable was due to the increase in company profit in 2013.

6. Other Payable

The other payables as of December 31 2013 increased by 101.11% from Rp35.47 billion on December 31 2012 to Rp76,56 billion.

Equity

Based on the Financial Statement (*Audited*) of Perum Jamkrindo, the Equity of Perum Jamkrindo up to December 31 2013 is as follows:

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Total Ekuitas

Total ekuitas Perum Jamkrindo pada tahun 2013 mengalami peningkatan 29,72% dari Rp5,04 triliun pada 31 Desember 2012 menjadi Rp6,55 triliun.

2. Penyertaan Modal Pemerintah

Penyertaan Modal Pemerintah per 31 Desember 2013 mengalami kenaikan sebesar 26,55% dari Rp4,21 triliun pada 31 Desember 2012 menjadi Rp5,34 triliun. Kenaikan ini dikarenakan pada tahun 2013 Perusahaan menerima tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,12 triliun dari Pemerintah.

3. Cadangan-Cadangan

Cadangan-cadangan per 31 Desember 2013 sebesar Rp757,94 miliar, naik 142,11% jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp313,05 miliar.

4. Komponen Ekuitas Lainnya

Komponen ekuitas lainnya adalah Laba (rugi) yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual per 31 Desember 2013 yaitu rugi sebesar Rp71,74 miliar.

Based of the above table, it can be concluded

1. Total Equity

The total equity of Perum Jamkrindo in 2013 increased by 29.72% from Rp5.04 trillion on December 31 2012 to Rp6.55 trillion.

2. Government's Share Placement

The Government's Share Placement as of December 31 2013 increased by 26.55% from Rp4.21 trillion on December 31 2012 to Rp5.34 trillion. The increase was due to the additional Government share of State Capital (PMN) of Rp1,12 trillion from the Government.

3. Appropriate Retained Earnings

The appropriate retained earnings per December 31 2013 was amounted to Rp757.94 billion, increasing by 142.11% compared to 2012 which was amounted to Rp313.05 billion.

4. Other Equity Components

The other equity components were unrealized Profit (loss) on securities available for sale as of December 31 2013 which was loss amounted to Rp71.74 billion.

Laporan Laba / Rugi

Berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) Perum Jamkrindo, Laporan Laba (Rugi) Komprehensif Perum Jamkrindo untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Income Statement

Based on the Financial Statements (*Audited*) of Perum Jamkrindo, the Comprehensive Income (Loss) of Perum Jamkrindo for the year ended on December 31 2013 and December 31 2012 is as follows:

(Disajikan dalam Rupiah) / (Expressed in Rupiah)

URAIAN / DESCRIPTION	31 Desember 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011
PENDAPATAN PENJAMINAN / GUARANTEE REVENUES			
Imbal Jasa Penjaminan Bruto / Gross Guarantee Fee	1,600,961,372,287	1,399,062,673,556	969,158,565,210
Pendapatan Komisi Re Asuransi / Re Insurance Comission Fee	844,526,272	-	-
Premi Co Guarantee / Co Guarantee Premium	(253,402,175,909)	(230,775,492,171)	(188,798,401,771)
Premi Re Asuransi / Re Insurance Premium	(4,204,367,559)	-	-
Fee Based Income / Fee Based Income	(4,668,600,023)	(2,291,852,370)	(1,401,789,633)
Fee Agent / Fee Agency	(3,485,849,403)	-	-

URAIAN / DESCRIPTION	31 Desember 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Restitusi IJP / Guarantee Restitution	(4,560,059,814)	-	-
Imbal Jasa Penjaminan Bersih / Net Guarantee Revenues	1,331,484,845,851	1,165,995,329,015	778,958,373,806
BEBAN KLAIM / CLAIM EXPENSES			
Beban Klaim / Claim Expenses	(898,582,003,777)	(618,015,662,668)	(333,070,345,921)
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim / Increase (Decrease) in Reserve Claim	(39,541,500,471)	(89,820,948,419)	(140,024,547,203)
Beban Pencegahan Klaim / Claim Prevention Expense	(937,683,469)	-	-
Kerugian Penurunan Nilai Piutang Co Guarantee / Impairment Losses on Co Guarantee Receivable	(8,563,736,757)	(62,405,502,284)	(1,736,008,557)
Provisi Kerugian Klaim Co Guarantee / Provision for Claim Losses Co Guarantee	(16,705,639,084)	-	-
Jumlah Beban Klaim / Total Claim Expenses	(964,330,563,558)	(770,242,113,371)	(474,830,901,681)
PENJAMINAN BERSIH / NET GUARANTEE INCOME	367,154,282,293	395,753,215,644	304,127,472,125
Pendapatan Investasi Bersih / Investment Income - Net	286,814,758,443	205,802,142,173	132,028,163,985
Pendapatan Lain-Lain Bersih / Others Income - Net	162,646,571,794	110,504,205,512	65,842,097,878
BEBAN USAHA / OPERATING EXPENSES			
Beban Operasional / Operating Expenses	(35,819,923,140)	(24,704,213,962)	(15,446,577,154)
Beban Sumber Daya Manusia / Human Resources Expenses	(115,761,687,179)	(88,588,657,630)	(72,064,180,531)
Beban Administrasi dan Umum / General and Administrative Expenses	(64,212,211,219)	(36,288,146,414)	(34,499,463,598)
Beban Sistem, Teknologi, & Pengembangan Usaha / Technology, System, & Development Expense	(4,714,770,785)	(204,950,000)	(1,000,000,000)
Jumlah Beban Usaha / Total Operating Expenses	(220,508,592,323)	(149,785,968,006)	(123,010,221,283)
LABA SEBELUM PAJAK / INCOME BEFORE TAX	596,107,020,207	562,273,595,323	378,987,512,705
BEBAN PAJAK PENGHASILAN / INCOME TAX EXPENSES			
Beban Pajak Kini / Current Income Tax	(83,971,605,250)	(89,980,684,750)	(50,450,165,750)
Manfaat Pajak Tangguhan / Deferred Tax Benefit	13,073,645,381	37,223,824,042	43,833,846,962
Jumlah Beban Pajak Penghasilan / Total Tax Expenses	(70,897,959,869)	(52,756,860,708)	(6,616,318,788)
LABA TAHUN BERJALAN / PROFIT FOR THE YEAR	525,209,060,338	509,516,734,615	372,371,193,917

Perum Jamkrindo menunjukkan peningkatan kinerja Perusahaan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 Perum Jamkrindo sukses membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp525,21 miliar, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang memperoleh laba bersih sebesar Rp509,52 miliar. Meningkatnya Pendapatan Operasional dari IJP dan Pendapatan Investasi mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi tercapainya peningkatan Laba Perusahaan.

Perum Jamkrindo's performance shows improvement in 2013 compared to the previous year. In 2013, Perum Jamkrindo managed to obtain profit for the year of Rp525.21 billion, an increase compared to 2012 with net profit amounted to Rp509.52 billion. The increasing Operational Income from IJP and the investment income had a significant impact on the achievement of the Company's increasing Profit.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP)

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan selama tahun 2013 tercatat sebesar Rp1,60 triliun naik 14,43% dari tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp1,39 triliun. Pengakuan pendapatan IJP tersebut telah diakui secara aktual. Pertumbuhan IJP antara lain dipengaruhi oleh adanya peningkatan pendapatan IJP Penjaminan Kredit Existing maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2) Premi Co-guarantee

Premi *Co-guarantee* mengalami kenaikan sebesar 9,80% menjadi sebesar Rp253,40 miliar pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp230,77 miliar. Kenaikan biaya Co-Guarantee diakibatkan meningkatnya jumlah Penjaminan Existing untuk Kredit Multiguna.

3) Fee Based Income

Selama tahun 2013 *Fee Based Income* yang menjadi pengurang pendapatan IJP tercatat sebesar Rp4,67 miliar naik 103,70% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp2,29 miliar untuk pihak bank pelaksana.

4) Beban Klaim Penjaminan

a) Beban Klaim

Beban Klaim Penjaminan tahun 2013 sebesar Rp898,58 miliar, mengalami kenaikan 45,40% dari tahun 2012 sebesar Rp618,01 miliar. Kenaikan biaya klaim sebanding dengan meningkatnya portofolio penjaminan Perum Jamkrindo, baik Penjaminan KUR maupun *Existing*.

b) Beban Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim

Beban kenaikan cadangan klaim tahun 2013 sebesar Rp39,54 miliar, turun sebesar 55,98% dari Rp89,82 miliar pada tahun 2012. Hal ini seiring dengan meningkatnya Volume Penjaminan Perum Jamkrindo baik Penjaminan KUR maupun *Existing*.

5) Pendapatan Investasi

Selama tahun 2013 Pendapatan Investasi Perum Jamkrindo tercatat sebesar Rp286,81 miliar naik 39,36% dibandingkan

Based on the above table, it can be concluded:

1) Gross Guarantee Fee

Gross Guarantee Fee during 2013 was recorded at Rp1.60 trillion, increasing by 14.43% from 2012 which was amounted to RpRp 1.39 trillion IJP revenue recognition had been recognized as accrued. IJP growth was influenced by an increase in revenue in guarantee fee of Existing Credit Guarantee and guarantee fee of KUR.

2) Co-guarantee Premium

Co-guarantee Premium increased by 9.80% to Rp253.40 billion in 2013 compared to 2012 which was amounted to Rp230.77 billion. The increase of Co-Guarantee cost was due to the increasing amount of existing Credit Guarantees for Multipurpose Credit.

3) Fee Based Income

During 2013, the Fee Based Income that deducted revenue of the guarantee fee was recorded at Rp4.67 billion, increasing by 103.70% compared to 2012 which was amounted to Rp2.29 billion for the ordering banks.

4) Guarantee Claim Expenses

a) Claim Expenses

Guarantee Claim Expense in 2013 was amounted to Rp898.58 billion, increasing by 45.40% from 2012 which was amounted to Rp618.01 billion. The increase in claim cost is proportional with the increasing guarantee portfolio of Perum Jamkrindo, both KUR or the Existing Guarantee.

b) Increase (Decrease) of Claim Reserves

The increase in claim reserves in 2013 was amounted to Rp39.54, decreasing by 55.98% from Rp89.82 billion in 2012. This is in line with the increase in Guarantee Volume of Perum Jamkrindo, both KUR and Existing Guarantee.

5) Investment Income

During 2013, the Investment Income of Perum Jamkrindo was recorded at Rp286.81 billion, increasing by 39.36%

dengan tahun 2012 sebesar Rp205,80 miliar. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan jumlah dana yang ditempatkan. Perum Jamkrindo melakukan Penempatan Investasi dalam bentuk Deposito, Obligasi dan Saham serta Reksadana. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK No. 222 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PMK No. 99/PMK.010/2011.

compared to 2012 which was amounted to Rp205.80 billion. The increase was due to the increaasing amount of deposited fund. Perum Jamkrindo placed its Investment in the form of Deposits, Bonds, Shares, and Mutual Funds. This is in accordance withe the PMK regulation No. 222 Year 2008 as amended by PMK No.99/PMK.010/2011.

6) Pendapatan Lain-lain Bersih

Pendapatan lain-lain bersih selama tahun 2013 sebesar Rp162,65 miliar, naik 47,19% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp110,50 miliar terdiri dari Pendapatan Subrogasi, Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Sewa Gedung, dan Pendapatan Operasional Lain (selisih klaim) serta *Leader Fee* Penjaminan.

6) Other Income

Other income during 2013 was amounted to Rp162,65 billion, increasing by 47.19% compared to 2012 which was amounted to Rp110.50 billion which consisted of Subrogation Income, Revenue of Clearing Service, Sharing Revenue, Building Rental Revenue, and Other Operational Income (claim difference) and the Leader Fee of Guarantee.

7) Beban Operasional

Selama tahun 2013, jumlah Beban Operasional Perusahaan mengalami kenaikan sebesar 45,00% dari Rp24,70 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp35,82 miliar. Kenaikan Biaya Operasional disebabkan meningkatnya kegiatan usaha Perusahaan dan kenaikan harga-harga yang mempengaruhi pos-pos Biaya Operasional.

7) Operational Expenses

During 2013, the Company's Operational Expenses increased by 45.00% from Rp24,70 billion in 2012 to Rp35.82 billion. The increase in Operational Expense was due to the increase in business activities and the increase of item price that affect Operational Expenses.

8) Beban Sumber Daya Manusia

Beban Sumber Daya Manusia meningkat sebesar 30,67% menjadi Rp115,76 miliar dibandingkan pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp88,58 miliar. Kenaikan biaya disebabkan oleh adanya penambahan jumlah SDM, peningkatan kesejahteraan karyawan, dan program Pengembangan SDM Perusahaan.

8) Human Resources Expenses

Human Resources Expenses increased by 30.67% to Rp115.76 billion compared to the previous year which was recorded at Rp88.58 billion. The increasing expenses was due to the additional number of human resources, employees welfare imporvement, and Human Resources Development program.

9) Beban Administrasi & Umum

Seiring dengan efisiensi yang telah dilakukan dalam Operasional Perusahaan, biaya-biaya yang berhubungan dengan Biaya Administrasi dan Umum tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 76,95% dari Rp36,28 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp64,21 miliar.

9) General and Administrative Expenses

In line with the efficiency that had been done in the Company's Operation, the costs associated with General and Administrative Costs in 2013 increased by 76.95% from Rp36.28 billion in 2012 to Rp64.21 billion.

10) Pendapatan Komprehensif

Pendapatan komprehensif lainnya adalah Laba (rugi) yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual per 31 Desember 2013 yaitu rugi sebesar Rp80,07 miliar.

10) Comprehensive Income

Other comprehensive income was unrealized Profit (loss) on securities available for sale as of December 31 2013 which amounted loss to Rp445.13 billion.

Laporan Arus Kas

Jumlah kas dan setara kas Perum Jamkrindo pada akhir tahun 2013 tercatat sebesar Rp4,71 Triliun, naik 10,11% dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp4,28 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan pada tahun 2013 perusahaan memperoleh tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,12 triliun.

Cash Flow Statement

The total cash and cash equivalents of Perum Jamkrindo at the end of 2013 was recorded at Rp4.71 trillion, increasing by 10.11% compared to 2012 which was recorded at Rp4.28 trillion. The increase was due to the increase of Government Shares of State Capital (PMN) in 2013 which amounted to Rp1.12 trillion.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN TAHUN 2013

Evaluasi tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada Keputusan Menteri Negara BUMN nomor : KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI nomor: PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Jaminan. Perum Jamkrindo telah mengaplikasikannya dengan Surat Menteri Negara BUMN nomor: S-314/MBU.4/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan.

Dari perhitungan tingkat kesehatan Perusahaan, sesuai dengan evaluasi tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI nomor: PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 disertai dengan Surat Menteri Negara BUMN nomor: S-314/MBU.4/2011 tanggal 13 Oktober 2011, maka dengan total skor 93,56 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia berada pada kategori "SEHAT AA" sementara tahun 2012 dengan skor 93,35 Perusahaan masuk dalam kategori "SEHAT AA".

COMPANY CAPABILITY RATE IN 2013

Evaluation is based on the level of health SOE State Owned Enterprises Minister Decree number: KEP-100/MBU/2002 on Evaluation of Health and Minister of State SOE SOE RI number: PER-04/MBU/2011 dated August 19, 2011 on Soundness Indicators Assessment Enterprises State-owned Financial Services Line of Business Insurance and Assurance Services. Housing Jamkrindo have to apply to the Minister for State Enterprises Letter number: S-314/MBU.4/2011 dated October 13, 2011 as the basis for the rating.

Calculation of the level of health of the Company, in accordance with the evaluation of the soundness of SOEs based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 and the Regulation of the Minister of State Enterprises RI number: PER-04/MBU/2011 dated August 19 2011 accompanied by a letter from the Ministry of State Enterprises number: S-314/MBU.4/2011 dated October 13, 2011, then by a total score of 93.56 Public Enterprise Credit Guarantee Indonesia is in the category of "HEALTHY AA" while in 2012 with a score of 93.35 companies in the category of "HEALTHY AA".

Penilaian / Assesment	Score	Proporsi Joint Cost	Proporsi Score
1	2	3	4 = 2 X 3
Tingkat Kesehatan Korporasi	75,50	19,74%	14,90
Penugasan (Penjaminan KUR)	98,00	80,26%	78,66
Total Score			93,56
PREDIKAT PENILAIAN		SEHAT	AA

PENINGKATAN DAN PENURUNAN MATERIAL DARI PENJUALAN/PENDAPATAN BERSIH

Selama tahun buku 2013, Perum Jamkrindo tidak mencatat adanya peningkatan dan penurunan material dari penjualan/pendapatan bersih, sehingga informasi mengenai hal tersebut tidak dapat disampaikan dalam laporan tahunan ini.

MATERIAL INCREASE AND DECREASE FROM NET SALES/INCOME

During the financial year of 2013, Perum Jamkrindo did not record material increase and decrease from net sales/income. Therefore, the information cannot be disclosed in this annual report.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN RKAP 2013

A. Hasil Usaha

Realisasi hasil usaha tahun 2013 dibandingkan dengan RKAP tahun 2013 dan realisasi tahun 2012 menunjukkan kondisi sebagai berikut:

COMPARISON BETWEEN REALIZATION AND RKAP 2013

A. Results of Operations

Realized net income in 2013 compared to 2013 and the realization of RKAP in 2012 showed the following conditions:

(dalam jutaan)

(in millions)

Uraian / Description	Realisasi 2013 Rp	RKAP 2013 Rp	Realisasi 2012 Rp	% Realisasi 2013	
				(2 : 3)	(2 : 4)
1	2	3	4	5	6
Pendapatan Operasional / Operating Revenue	1.618.300	1.545.071	1.371.797	104,74%	117,97%
Beban Operasional / Operating Expense	(1.184.839)	(1.193.819)	(919.890)	99,25%	128,80%
Laba Operasional / Operating Profit	433.460	351.252	451.908	123,40%	95,92%
Pendapatan (Beban) Operasional / Operating (Expense) Revenue	162.647	187.138	110.366	86,91%	147,37%
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	596.107	538.390	562.274	110,72%	106,02%

Pendapatan operasional tahun 2013 sebesar Rp1,62 triliun atau mencapai 104,74% dibandingkan dengan RKAP 2013 atau mencapai 117,97% dari realisasi tahun 2012. Peningkatan yang signifikan terjadi karena peningkatan penjaminan kredit terutama dari sektor jasa dan perdagangan dan peningkatan pada pendapatan investasi.

Operating income in 2013 amounted to Rp1.62 trillion or 104.74% as compared with 2013, RKAP reached 117.97% of the realization in 2012. Significant increases occurred primarily due to an increase in loan guarantee from the service sector and trade and an increase in investment income.

Meskipun terjadi peningkatan pendapatan operasional, beban operasional masih dibawah anggarannya yaitu mencapai 99,25% dibandingkan RKAP tahun 2013 dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 mencapai 128,80%. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan beban klaim terutama untuk sektor jasa dan perdagangan. Pendapatan non

Despite an increase in operating income, operating expenses are still under budget, reaching 99.25% in 2013 compared to RKAP and when compared with the realization in 2012 reached 128.80%. This increase was primarily due to the increase in claims expenses primarily for services and trade sectors. Non-operating net income reached 86.91% compared with the 2013

operasional bersih mencapai 86,91% dibandingkan dengan target 2013 atau mencapai 147,37% dibandingkan realisasi tahun 2012. Akibatnya, tahun 2013 Perusahaan memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp596,17 miliar atau mencapai 110,72% dibandingkan RKAP tahun 2013 dan 106,02% dibandingkan dengan realisasi tahun 2012.

target or reach 147.37% compared to the year 2012. As a result, in 2013 the Company made a profit before tax of Rp596,17 billion or 110.72% compared to RKAP in 2013 and 106.02% compared with the year 2012.

B. Pendapatan Penjaminan

a. Volume Kredit Jasa Penjaminan

(dalam jutaan)

Uraian	(in millions)				
	Realisasi 2013 Rp	RKAP 2013 Rp	Realisasi 2012 Rp	% Realisasi 2013	
1	2	3	4	(2 : 3) 5	(2 : 4) 6
A. Penjaminan Bank					
1. Penjaminan Konvensional					
- Agrobisnis	3.504.758	2.854.761	3.739.766	122,77%	93,72%
- INKRA	670.831	495.303	636.305	135,44%	105,43%
- Jasa dan Perdagangan	36.748.282	41.607.043	42.644.996	88,32%	86,17%
Sub Jumlah	40.923.870	44.957.106	47.021.067	91,03%	87,03%
2. Penjaminan Syariah					
- Agrobisnis	326.638	288,905	497.655	113,06%	65,64%
- INKRA	53.543	40,858	52.760	131,05%	101,49%
- Jasa dan Perdagangan	3.504.505	4.106,807	4.586.933	85,33%	76,40%
Sub Jumlah	3.884.686	4.436.570	5.137.348	87,56%	75,62%
Jumlah A	44.808.556	49.393.676	52.158.415	90,72%	85,91%
B. Penjaminan Bukan Bank					
- Agrobisnis	-	-	-	-	-
- INKRA	-	-	-	-	-
- Jasa dan Perdagangan	1.034.840	4.505.872	1.384.327	22,97%	74,75%
Jumlah B	1.152.748	1.034.840	4.505.872	22,97%	74,75%
Total (A + B)	45.843.396	53.899.549	53.542.742	85,05%	85,62%

Realisasi jumlah kredit yang dijamin tahun 2013 sebesar Rp45,843 triliun atau mencapai 85,05% dari jumlah yang ditargetkan tahun 2013 sebesar Rp53,899 triliun dan mencapai

The realization of the amount of credit secured in 2013 amounted to Rp45,843 trillion or 85.05% of the targeted amount in 2013 amounted to Rp53,899 trillion and reached 85.62%

85,62% dibandingkan dengan realisasi tahun 2012. Realisasi penjaminan bank pada tahun 2013 sebesar Rp44,81 triliun dari penjaminan kredit bank dan penjaminan kredit non bank Rp4,506 triliun.

Dari jumlah kredit bank yang dijamin yang bersumber dari kredit bank konvensional Rp40,924 triliun atau sebesar 91,03% dibandingkan dengan target tahun 2013 sebesar Rp44,957 triliun dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 mencapai 87,03%. Pembiayaan bank syariah Rp3,885 triliun yaitu 87,56% dibandingkan dengan target 2013 sebesar Rp4,437 triliun dan 75,62% dibandingkan dengan realisasi 2012.

compared with the year 2012. Realization of bank guarantee in 2013 amounted to Rp44.81 trillion of credit guaranteeing bank and non-bank credit guarantee Rp4.506 trillion.

Of the amount of bank credit guaranteed sourced from a conventional bank loan of Rp40, 924 trillion or 91.03% compared with a target of 2013 amounted to Rp44, 957 trillion, and when compared with the year 2012 reached 87.03%. Islamic bank financing Rp 3, 885 trillion, which is 87.56% compared to the 2013 target of Rp 4, 437 trillion and 75.62% compared with the 2012.

b. Imbal Jasa Penjaminan

(dalam jutaan)

Uraian	Realisasi 2013 Rp	RKAP 2013 Rp	Realisasi 2012 Rp	% Realisasi 2013	
				(2 : 3)	(2 : 4)
1	2	3	4	5	6
A. Penjaminan Bank					
1. Penjaminan Konvensional					
- Agrobisnis	156.827	145.673	123.550	107,66%	126,93%
- INKRA	31.935	25.330	23.971	126,08%	133,22%
- Jasa dan Perdagangan	1.261.513	1.160.961	1.122.578	108,66%	112,38%
Sub Jumlah	1.450.275	1.331.965	1.270.099	108.88%	114,19%
2. Penjaminan Syariah					
- Agrobisnis	9.569	14.514	7.591	65,93%	126,06%
- INKRA	1.781	3.366	1,385	52,91%	128,60%
- Jasa dan Perdagangan	125.790	100.107	108/604	125,66%	115,82%
Sub Jumlah	137.140	117.987	117.580	116,23%	116,64%
Jumlah A	1.587.415	1.449.951	1.387.679	109,48%	114,39%
B. Penjaminan Bukan Bank					
- Agrobisnis	38	-	29	-	132,67%
- INKRA	5	-	0,24	-	2164,63%
- Jasa dan Perdagangan	13.503	34.323	11.355	39,34%	118,92%
Jumlah B	13.547	34.323	11.384	39,47%	119,00%
Total (A + B)	1.600.961	1.484.274	1.399.063	107,86%	114,43%

b. Return Guarantee Services

(in millions)

Total imbal jasa penjaminan yang diperoleh tahun 2013 sebesar Rp1,60 triliun atau mencapai 114,43% dibandingkan dengan tahun 2012. Imbal jasa penjaminan bank sebesar Rp1,59 triliun mencapai 109,48% dari RKAP tahun 2013 yang terdiri dari imbal jasa penjaminan bank konvensional Rp1,450 triliun atau mencapai 108,88% dibandingkan dengan target 2013 serta mencapai 114,19% dari realisasi 2012 dan imbal jasa penjaminan bank syariah sebesar Rp137,14 miliar atau mencapai 116,23% dibandingkan target 2013 dan mencapai 116,64% dibandingkan realisasi tahun 2012. Imbal jasa penjaminan bank tersebut sangat signifikan diperoleh dari sektor jasa dan perdagangan, yaitu konvensional Rp1,26 triliun dan syariah Rp125,79 miliar.

Realisasi imbal jasa penjaminan bukan bank tahun 2013 sebesar Rp13,54 miliar atau mencapai 39,47% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2013, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, maka pendapatan jasa penjaminan bukan bank mencapai 119,00%. Jumlah kredit dan imbal jasa penjaminan bukan bank didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan. Dalam jasa penjaminan bukan bank, Perusahaan bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM), PT PNM Syariah, Perum Pegadaian, PT Semen Gresik, Koperasi Pegawai Bank Indonesia (KOPEBI), Tripilar Betonmas, Obligee Surety dan YKKBI.

PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 2014

Proyeksi keuangan tahun 2014 tertulis dalam RKAP 2014 yang dibuat berdasarkan hasil analisis terhadap asumsi-asumsi yang digunakan, baik asumsi internal maupun eksternal. Proyeksi keuangan tahun tersebut menggambarkan kondisi Perum Jamkrindo untuk tahun buku 2014.

Proyeksi keuangan Perum Jamkrindo yang tertulis dalam RKAP 2014 adalah sebagai berikut:

Total underwriting compensation earned in 2013 amounted to Rp1.60 trillion or 114.43% as compared to 2012. Reward bank guarantee amounting to Rp1.59 trillion reached 109.48% of RKAP in 2013 which consisted of conventional bank underwriting compensation Rp1,450 trillion or 108.88% compared with the 2013 target and reached 114.19% of actual 2012 and returns service Islamic bank guarantee amounting to Rp137.14 billion or 116.23% compared to the target of 2013 and reached 116.64% compared to the year 2012. Compensation is very significant bank guarantee obtained from the services and trade sectors, namely conventional Rp1.26 trillion and sharia Rp125.79 billion.

Realization of non-bank underwriting compensation in 2013 amounted to Rp13.54 billion or 39.47% of the target set in the 2013 RKAP, and when compared to realization in 2012, it is not a bank guarantee services revenue reached 119.00%. The number of credit and non-bank underwriting compensation is dominated by the service sector and trade. In the non-bank guarantee services, the Company is working with PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM), PT PNM Sharia, Perum Pegadaian, PT Semen Gresik, Indonesia Employee Cooperative Bank (KOPEBI), Tripilar Betonmas, Obligee Surety and YKKBI.

FINANCIAL PROJECTION FOR 2014

The financial projection for 2014 is written in RKAP 2014, which was composed based on the analysts on both external and internal assumptions. The financial projection shall illustrate the condition of Perum Jamkrindo for the financial year of 2014.

The financial projection of Perum Jamkrindo written in RKAP 2014 is as follows:

URAIAN / Description	2013	RKAP 2014
Pendapatan Usaha / Operating Income	1,331,484	1,596,432
Beban Klaim / Claim Expense	(964,330)	(1,122,392)
Penjaminan Bersih / Net Guarante Income	367,154	474,040

URAIAN / Description	2013	RKAP 2014
Pendapatan Investasi Bersih / Investment Income - Net	286,815	420,050
Pendapatan Lain-lain Bersih / Others Income - Net	162,647	196,855
Beban Usaha / Operating Expenses	(220,509)	(385,269)
Laba Sebelum Pajak / Income Before Tax	596,107	705,676
Laba Bersih / Net Profit	525,209	604,020
Aset Lancar / Current Asset	7,090,379	9,521,963
Aset Tidak Lancar / Non current Asset	1,203,003	1,538,720
Liabilitas Lancar / Current Liability	701,979	1,067,395
Liabilitas Tidak Lancar / Non Current Liability	1,041,265	1,571,172
Ekuitas / Equity	6,550,138	8,422,116
Total Aset/Liabilitas dan Ekuitas / Total Asset / Liability and Equity	8,293,382	11,060,683

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Pengelolaan terhadap struktur modal Perum Jamkrindo dilakukan untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga Perusahaan dapat memberikan imbal hasil bagi Pemegang Saham dan manfaat bagi Pemangku Kepentingan lainnya serta mempertahankan struktur permodalan yang optimal guna mengurangi biaya modal.

Struktur modal yang optimal akan memaksimalkan nilai Perum Jamkrindo. Kondisi struktur modal yang optimal tersebut dicapai dengan modal rata-rata tertimbang atau *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) yang minimal. Dengan pertambahan penggunaan utang, akan meminimalkan WACC karena biaya utang (*cost of debt*) lebih murah dibandingkan dengan biaya modal sendiri (*cost of equity*). Di samping itu, penggunaan hutang juga akan mengurangi biaya kena pajak sehingga akan terjadi penghematan pajak. Meski demikian, peningkatan hutang yang dilakukan Perum Jamkrindo akan meningkatkan biaya beban bunga yang selanjutnya akan mengurangi nilai Perum Jamkrindo secara keseluruhan. Untuk itu, perlu kompromi perpaduan antara penggunaan hutang dan modal sendiri sehingga diperoleh kondisi yang optimum.

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT CAPITAL STRUCTURE POLICY

The management towards capital structure of Perum Jamkrindo was conducted in order to protect the Company's ability in maintaining the business continuity so that the Company can provide returns for shareholders and benefit for other Stakeholders as well as maintaining an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The optimal capital structure will maximize the value of Perum Jamkrindo. Condition of optimal capital structure achieved by a minimum Weighted Average Cost of Capital (WACC). The increase in the use of debt will minimize WACC because cost of debt was cheaper than the cost of equity. In addition, the use of debt would also reduce taxable cost so that there would be tax savings. However, the utilization of debt will reduce the taxable cost. Nevertheless, the increase in debt would also increase the cost of interest expense which will reduce the value of the whole Perum Jamkrindo. Thus, it was necessary to compromise between the use of a mixing debt and equity capital in order to obtain an optimum condition.

Struktur modal Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

Capital structure of Perum Jamkrindo is described as follows:

Uraian/Description	2013	Persentase Total Modal/ Total Capital Percentage	2012	Persentase Total Modal/ Total Capital Percentage
Liabilitas/ Liabilities	1,743,243,462,822	21.02%	1,611,446,405,724	24.19%
Ekuitas/ Equity	6,550,138,239,110	78.98%	5,049,630,534,698	75.81%
Liabilitas dan Ekuitas/ Liabilities and Equity	8,293,381,701,932	100%	6,661,076,940,442	100%

Selain itu, Perum Jamkrindo sebagai perusahaan *non listed*, berencana untuk mengajukan tambahan ekuitas dari Pemerintah dengan tujuan untuk mengoptimalkan struktur modal dan memelihara rasio *debt to equity ratio* (DER).

In addition, Perum Jamkrindo as a non-listed company, plans to submit additional equity from the Government aiming to optimize capital structure and maintain the debt to equity ratio (DER).

DER merupakan perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas. Rasio *Debt To Equity* Perum Jamkrindo untuk posisi 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

DER is the comparation between total debt and total equity. Ratio of Debt to Equity of Perum Jamkrindo of December 31, 2012 and December 31, 2013 are presented as follows:

Uraian/Details	2013	2012
Debt to equity	26,61%	31.91%

Berdasarkan indikator rasio *Debt To Equity* tersebut, maka risiko kegagalan membayar hutang Perum Jamkrindo relatif kecil, dimana pada tahun 2013 menjadi lebih kecil (lebih baik) dibandingkan tahun 2012.

According to the ratio indicator of Debt To Equity, the risk of failure to pay debt of Perum Jamkrindo was relatively small, whereas in 2013 was better than 2012.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Laporan Akuntan sampai dengan laporan ini diterbitkan yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyajian Laporan Keuangan Perum Jamkrindo.

INFORMATION AND MATERIAL FACT SUBSEQUENT TO THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT

There were no significant events after the Accountant's Report to the published report that significantly affected the Financial Statement of Perum Jamkrindo.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Pembagian laba tahun

RUPS pada tahun 2013 memutuskan usulan pembagian laba tahun buku 2012 sebagai berikut:

- Dividen sebesar Rp64,63 miliar (12,68% dari laba bersih)
- Cadangan teknis sebesar Rp169,40 miliar (33,25% dari laba bersih) untuk keperluan tambahan dana cadangan klaim tahun 2013.
- Cadangan tujuan sebesar Rp85,90 miliar (16,86% dari laba bersih) untuk keperluan sumber pendanaan belanja modal tahun 2013.
- Cadangan umum sebesar Rp358,98 miliar (70,46% dari laba bersih) untuk memperkuat gearing ratio (GR) dalam rangka mendukung pengembangan bisnis eksisting.

Jumlah Dividen

Jumlah Dividen yang dibayarkan oleh Perum Jamkrindo kepada Pemerintah selaku 100% Pemegang Saham Perusahaan, adalah sebagai berikut:

Dalam miliar rupiah

Uraian / Description	2013	2012
Jumlah Dividen / Total Dividend	64,63	55,77

- 1) Jumlah Dividen untuk periode Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2011 dan dibayarkan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp55,77 miliar atau 14,98% dari laba bersih perusahaan.
- 2) Jumlah Dividen untuk periode laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2012 dan dibayarkan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp64,63 miliar atau 12,68% dari Laba Bersih perusahaan.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

Berdasarkan status hukum Perusahaan yang merupakan BUMN, dimana 100% saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan atau manajemen Perusahaan.

DIVIDEND POLICY

Profit Distribution of the year

GMS in 2013 decided the profit distribution proposal of the financial year 2012 as follows:

- Dividend amounted to Rp64.63 billion (12.68% from net income)
- Technical reserves amounted to Rp169.40 billion (33.25% from net income)
- Purpose Reserves amounted to Rp85.90 billion (16.86% of net income) for the purposes of capital expenditure funding sources in 2013.
- The general reserve amounted to Rp358.98 billion (70.46% of net income) to strengthen the gearing ratio (GR) in order to support the development of existing businesses.

Total Dividends

Total Dividends paid by Perum jamkrindo to Government as 100% Shareholder of the Company, are as follows:

- 1) Total Dividends for Financial Statements ended on December 31, 2011 and paid in 2012 amounted to Rp55.77 billion or 14.98% of net income.
- 2) Total dividend for the financial statement period ended December 31, 2012 and paid in 2013 amounted to Rp64.63 billion, or 12.68% of the net income of the Company.

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM

Based on legal status of the Company as SOE, in which 100% of their shares are owned by the Government, the Company does not have employee and/or management stock ownership program.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perum Jamkrindo tidak dapat menyampaikan informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dikarenakan saat ini Perum Jamkrindo belum tercatat di bursa manapun.

REALIZATION OF USE OF THE FUNDS GENERAL OFFERING RESULT

Perum Jamkrindo cannot convey information regarding the realization of the use of a public offering proceeds due to the current Perum Jamkrindo has not been listed in any stock exchange.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG/MODAL

Sepanjang tahun 2013, Perum Jamkrindo tidak memiliki Informasi material mengenai ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal. Adapun investasi yang dilakukan pada tahun 2013 yang ditujukan guna mengoptimalkan kinerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

INFORMATION OF MATERIAL TRANSACTION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER, ACQUISITION OF DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Throughout the year 2013, Perum Jamkrindo not have material information regarding expansion, divestiture, merger / consolidation, acquisition or restructuring debt / equity. The investments made in 2013, which aimed to optimize the performance of the Company is as follows:

(dalam Jutaan)

Uraian	Realisasi 2013 Rp	RKAP 2013 Rp	Realisasi 2012 Rp	% Realisasi 2013	
				(2 : 3)	(2 : 4)
1	2	3	4	5	6
Tanah dan Bangunan	896	102.400	-	0,87%	-
Gedung	-	-	-	-	-
Rumah Dinas	-	6.400	48	-	-
Inventaris Kantor	4.599	2.800	2.099	164,25%	219,12%
Inventaris Rumah Dinas	69	1.900	33	3,64%	205,34%
Kendaraan	-	-	31	-	-
Renovasi Kantor	-	-	619	-	-
Partisi, Penambahan Instalasi	-	-	-	-	-
Jumlah	5.564	113.500	2.831	4,90%	196,54%

Total realisasi investasi (belanja modal) tahun 2013 sebesar Rp5,56 milyar atau hanya 4,90% dari RKAP tahun 2013. Kondisi tersebut disebabkan realisasi investasi perusahaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan operasional tahun berjalan, namun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 mencapai 196,54%.

Total realized investment (capital expenditure) in 2013 amounted to Rp5.56 billion, or just 4.90% of RKAP in 2013. The condition is caused by the realization of the investment company adapted to the conditions and operational needs of the current year, but when compared with the year 2012 reached 196.54%.

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Perusahaan memiliki target investasi barang modal pada tahun 2013 sebesar Rp113,5 milyar sementara realisasi investasi barang modal tahun 2013 sebesar Rp5,56 milyar atau 196,54% dibandingkan realisasi tahun 2012. Hal ini disebabkan karena tidak terealisasinya pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp102,40 milyar.

CAPITAL GOODS INVESTMENT REALIZED IN THE END OF FISCAL YEAR

The company has a target capital goods investment in 2013 amounted to Rp113.5 billion while capital goods investment realization in 2013 of Rp5.56 billion or 196.54% compared to the year 2012 realization. This is due to the realization of not purchasing land and buildings amounting to Rp102.40 billion.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Pada tahun 2013, tidak ada Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi yang dapat disajikan oleh Perum Jamkrindo.

MATERIAL TRANSACTION INFORMATION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND TRANSACTION WITH AFFILIATE PARTIES

In 2013, there were no information material involving conflict of interest and/or transactions with affiliates that may be presented by Perum Jamkrindo.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH

Sepanjang tahun 2013, tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perum Jamkrindo

SIGNIFICANT CHANGES IN REGULATION

Throughout 2013, there were no change in regulations that significantly influence Perum Jamkrindo.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan Perum Jamkrindo disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. Selama tahun 2013, tidak terdapat perubahan atas kebijakan akuntansi.

ACCOUNTING POLICY

Changes in Accounting Policy

The financial report of Perum Jamkrindo crated in accordance with Financial Accounting Standard Statement (PSAK) that applicable in Indonesia. During the year 2013, there were no changes to accounting policies.

PERPAJAKAN PERUSAHAAN

Pada tahun 2013 Perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakan berupa pemungutan dan penyetoran berbagai jenis pajak dengan rincian sebagai berikut:

CORPORATE TAXATION

In 2013 the Company has conducted a poll tax obligation and deposit various types of taxes with the following details:

Uraian Description	Saldo Awal Beginning Balance (Rp)	Mutasi Tahun 2013 / Transfer 2013		Saldo Akhir Ending Balance (Rp)
		Kewajiban Rp Payable (Rp)	Penyetoran Rp Payment (Rp)	
I. Uang muka pajak / Tax Advanced Payment				
Pajak Pertambahan Nilai / Tax of Value Addition	-	52.150.546	52.150.546	-

Uraian Description	Saldo Awal Beginning Balance (Rp)	Mutasi Tahun 2013 / Transfer 2013		Saldo Akhir Ending Balance (Rp)
		Kewajiban Rp Payable (Rp)	Penyetoran Rp Payment (Rp)	
II. Hutang Pajak / Tax Payable				
Pajak Penghasilan / Income Tax				
Pajak Penghasilan pasal 21 / Income Tax of Article 21	2.468.917.615	12.413.419.859	12.099.482.714	2.782.854.760
Pajak Penghasilan pasal 23/26 / Income Tax of Article 23/26	22.499.484	506.182.056	350.917.858	177.763.682
Pajak Penghasilan pasal 25 / Income Tax of Article 25	5.517.723.896	63.360.988.600	63.138.819.788	5.739.892.708
Pajak Penghasilan pasal 4 (2) / Income Tax of Article 4 (2)	20.769.788	143.371.790	97.121.899	67.019.679
Pajak Penghasilan pasal 29 / Income Tax of Article 29	23.767.997.998	15.092.892.755	23.767.997.998	15.092.892.755
Total Pajak Penghasilan / Total Income Tax	31.797.908.781	91.516.855.060	99.454.340.257	23.860.423.584
Pajak Pertambahan Nilai / Tax of Value Addition				
Pajak Pertambahan Nilai / Tax of Value Addition	210.809.788	289.018.655	117.775.901	382.052.542
Total Pajak Pertambahan Nilai / Total Tax of Value Addition	210.809.788	289.018.655	117.775.901	382.052.542
Pajak Bumi dan Bangunan / Property tax				
Pajak Bumi dan Bangunan / Property tax	-	377.609.662	377.609.662	-
Total Pajak Bumi dan Bangunan / Total Property tax	-	377.609.662	377.609.662	-
Total Hutang Pajak / Total Tax Payable	32.008.718.569	92.183.483.377	99.949.725.820	24.242.476.126

Pajak Penghasilan (PPh)

Jumlah saldo awal Kewajiban Pajak Penghasilan pada tahun 2013 adalah Rp31.797.908.781 dan Kewajiban Pajak Penghasilan selama tahun 2013 adalah sebesar Rp91.516.855.060. Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan dan menyetor ke kas Negara sebesar Rp99.454.340.257, sehingga hutang PPh per 31 Desember 2013 sebesar Rp23.860.423.584.

Income Tax (VAT)

Total Income Tax Liability beginning balance in 2013 was Rp31.797.908.781 and income tax liabilities for the year 2013 amounted to Rp91.516.855.060. The Company has fulfilled tax obligations and deposit into the state treasury for Rp99.454.340.257, so the income tax payable by December 31, 2013 amounted to Rp23.860.423.584.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perum Jaminan Kredit Indonesia memiliki saldo awal PPN pada tahun 2013 sebesar Rp210.809.788, dan kewajiban PPN selama tahun 2013 sebesar Rp289.018.655. Jumlah PPN yang disetorkan pada tahun 2013 sebesar Rp117.775.901 sehingga saldo akhir PPN tahun 2013 Perum Jaminan Kredit Indonesia sebesar Rp382.052.542.

Value Added Tax (VAT)

Housing Credit Guarantee Indonesia has a beginning balance of VAT in 2013 amounted Rp210.809.788 and VAT liabilities for the year 2013 amounted to Rp289.018.655. The amount of VAT paid in 2013 amounted to Rp117.775.901 so that the final balance VAT of 2013 Housing Credit Guarantee for Rp382.052.542 Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sebagai wajib pajak, Perum Jaminan Kredit Indonesia telah memenuhi kewajiban membayar PBB sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterima pada tahun 2013 sebesar Rp377.609.662.

Land and Building Tax (PBB)

As a taxpayer, Indonesia Housing Credit Guarantee UN has fulfilled its obligations to pay in accordance with the Income Tax (SPPT) received in 2013 amounted to Rp377.609.662.

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran

Perum Jamkrindo menerapkan strategi pemasaran yang proaktif untuk produk-produk penjaminan kredit baik kredit KUR/kredit program lainnya, maupun untuk penjaminan existing (Non KUR/Program). Hal tersebut juga diterapkan baik untuk skim penjaminan konvensional maupun skim penjaminan syariah. Secara kontinyu, selain menerapkan strategi pemasaran yang proaktif, Perum Jamkrindo juga melakukan strategi pemasaran lainnya yaitu strategi intensifikasi dan ekstensifikasi.

Secara khusus, Divisi Penjaminan Program melakukan strategi pemasaran yang dilakukan pada tahun 2013, sebagai berikut:

1. Mempertahankan market share Perum Jamkrindo di masing-masing Bank Pelaksana KUR.

Penerapan strategi ini dijalankan dengan meningkatkan service level agreement (SLA); menyempurnakan perjanjian kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan Bank Pelaksana KUR sehingga dapat lebih menguntungkan kedua belah pihak; serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder KUR dan internal Perum Jamkrindo.

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penjaminan Program Lain (Non KUR)

Strategi ini ditempuh dengan meningkatkan service level agreement (SLA) Penjaminan KKPE dan KUPS; serta penambahan kerjasama penjaminan dengan bank penyalur KKPE dan KUPS.

Strategi Surety Bond

Pada tahun 2012, telah diluncurkan produk *Surety Bond*. Produk ini merupakan upaya Perusahaan untuk menjawab kebutuhan pasar, dan menyediakan pilihan lain atas kebutuhan Surety Bond yang selama ini dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Guna mendukung kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan adanya ketentuan bahwa produk *Surety Bond* yang dapat disediakan oleh Perusahaan Penjaminan sebagaimana Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka Jamkrindo merupakan perusahaan penjaminan pertama yang menerbitkan *Surety Bond* untuk UMKMK. Produk surety bond telah mewarnai kegiatan promosi dan sosialisasi produk di tahun 2012 juga mewarnai kegiatan perusahaan dan outlet (Kantor Cabang) Jamkrindo di seluruh Indonesia.

MARKETING ASPECTS

Marketing Strategy

Perum Jamkrindo implemented a proactive marketing strategy for credit guarantee products either for credit of KUR credit/other program credit, or existing guarantee (Non KUR/Program). This strategy also implemented for a conventional guarantee scheme or sharia-based guarantee. Continually, in spite of conducting a proactive marketing strategy, Perum Jamkrindo also deployed other marketing strategy namely intensification and extensification strategies.

In particular, the Division of Insurance Programs that perform marketing strategy in 2013, as follows:

1. Perum Jamkrindo maintain market share in each of the Implementing Bank KUR.

The implementation of this strategy is executed by improving service level agreement (SLA); enhance cooperation agreement between Perum Jamkrindo and Bank Pelaksana KUR so it can be beneficial to both parties, as well as improve coordination and communication with KUR stakeholders and Perum Jamkrindo.

2. Intensification and extensification of Other Assurance Program (Non-KUR)

This strategy pursued by increasing the service level agreement (SLA) guarantee KKPE and KUPS, as well as the addition of co-operation with a bank guarantee and KUPS KKPE dealer.

Strategi Surety Bond

In 2012, Surety Bond was launched. The product was created by the Company to meet market's demands and enrich customers' choices for Surety Bond that has been offered by other insurance companies. In order to support the procurement of goods and services of the government and regarding to the regulation on Surety Bond that can be provided by Guarantee Companies in reference to Presidential Regulation No. 54/2012 regarding the regulation on the Government's Goods and Services Procurement, Jamkrindo is the first guarantee company issuing Surety Bond for UMKMK. Surety Bond and other products were promoted and socialized in 2012 in Jamkrindo's outlets (Branch Offices) Jamkrindo throughout Indonesia.

Pada tahun 2013, Perum Jamkrindo memperoleh daftar Perusahaan penjaminan yang dapat melakukan penjaminan pengadaan barang dan/atau Jasa (*surety bond*) sebagai berikut:

In 2013, Perum Jamkrindo obtained a list of companies that was able to conduct goods and/or services (*Surety Bond*) procurement gurantee of as follows:

No.	Nama Perusahaan / Name	Izin Usaha	
		Nomor	Tanggal
1	Perusahaan Umum jaminan kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)	KEP-77/KM.10/2009	22 April 2009
2	PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (PT PKPI)	328/KMK.017/1997	21 Juli 1997
3	PT Jamkrinda Jatim	KEP-471/KM.10/2009	17 Desember 2009
4	PT Jamkrinda bali Mandara	KEP-720/KM.10/2010	30 Desember 2010
5	PT Jamkrinda Riau	KEP-375/KM.10/2009	1 Agustus 2012
6	PT Jamkrinda NTB Bersaing	KEP-652/KM.10/2009	6 Desember 2012
7	PT Jamkrinda Jabar	KEP-05/D.05/2013	30 Januari 2013
8	PT Jamkrinda Sumbar	KEP-62/D.05/2013	26 Juli 2013

Sehubungan kegiatan pemasaran perusahaan, pada Desember 2013 telah dibuka 3 (tiga) kantor cabang baru yakni kantor cabang Jakarta Khusus, kantor cabang Yogyakarta, dan kantor cabang Bandar Lampung. Pembukaan kantor cabang baru merupakan upaya perusahaan untuk menjawab kebutuhan pasar di provinsi-provinsi yang selama ini masih bergabung dengan kantor cabang di provinsi lain dan untuk memperluas pangsa penjaminan Perum Jamkrindo terhadap UMKMK.

Regarding to company's marketing, in December 2013 opened 3 (three) new branch offices namely Special Jakarta Branch Office, Yogyakarta Branch Office and Bandar Lampung Branch Office. The opening of new branches was the company's efforts to respond to market needs in the provinces that still joined with branch office in other provinces and to expand the share of guarantee Perum Jamkrindo towards UMKMK.

Pangsa Pasar

Volume kredit yang dijamin Jamkrindo di tahun 2013 adalah Rp45,83 triliun yang terdiri dari penjaminan KUR sebesar Rp 20,93 triliun dan eksisting (non KUR) sebesar Rp24,90 triliun, dimana kredit eksisting terdiri dari kredit produktif sebesar Rp7,04 triliun dan kredit konsumtif Rp17,85 triliun. Bila digolongkan berdasar jenis kredit, volume penjaminan Perum Jamkrindo untuk kredit produktif (KUR dan eksisting produktif) adalah Rp27,98 triliun dan kredit konsumtif adalah sebesar Rp17,85 triliun.

Market Share

The credit volume guaranteed by Jamkrindo in 2013 was Rp45,83 trillion, composing of KUR guarantee at Rp22,79 trillion and the existing non KUR at Rp 24,90 trillion where the existing credit comprises of productive credit at Rp7,04 trillion and consumptive credit at Rp17,85 trillion. Based on the credit type, total gurantee volume of Perum Jamkrindo for productive credit (KUR and existing productive) was Rp27,98 trillion and consumptive credit was Rp17,85trillion.

Dibandingkan dengan data penyaluran kredit konsumtif nasional berdasarkan laporan Bank Indonesia tahun 2013 sebesar Rp117,60 triliun, maka penjaminan kredit konsumtif Perum Jamkrindo menguasai pangsa pasar sekitar 15,18%. Sedangkan untuk kredit produktif, mempertimbangkan data

Compared to national consumptive credit disbursement data of Rp117.60 trillion based on Bank Indonesia report of 2013, the consumptive credit guarantee of Perum Jamkrindo had 15.18% market share. For productive credit, the national UMKMK credit disbursement was Rp68.97 trillion, thus, market share of Perum

penyaluran kredit UMKM nasional sebesar Rp68,97 triliun, maka pangsa pasar penjaminan kredit produktif Perum Jamkrindo sebesar 40,57%. Sehingga total pangsa pasar penjaminan Perum Jamkrindo di tahun 2013 adalah sebesar 24,56%.

Jamkrindo's productive credit guarantee was 40.57%. In this regard, total market share of Perum Jamkrindo's guarantee in 2013 was 24.56%.

Pangsa pasar untuk Penjaminan Konvensional ditinjau dari jumlah bank

Market share for Conventional Guarantee reviewed from the total bank

No.	Uraian / Description	Data Nasional / National Data	Market Share Perum Jamkrindo (yg sudah bekerjasama)	%
A	Bank			
1	Bank BUMN / SOE Bank	4 unit	4 unit	100
2	Bank Swasta Nasional Devisa / Foreign Exchange Private National Bank	31 unit	3 unit	9,7
3	Bank Swasta Nasional Non Devisa / Non Foreign Exchange Private National Bank	24 unit	0 unit	0
4	Bank Daerah / Local Bank	26 unit	25 unit	96
5	Bank Campuran / Joint venture bank	14 unit	0 unit	0
6	Bank Asing / Foreign Bank	10 unit	0 unit	0
B	Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non Bank Financial Institution	>100 unit	8 unit	±8

Untuk produk penjaminan syariah, saat ini Perum Jamkrindo telah bekerjasama dengan 8 Bank Umum Syariah, 16 Unit Usaha Syariah dan 2 BPRS. Sementara itu pangsa pasar penjaminan di tahun 2013, Perum Jamkrindo masih mendapat porsi yang kecil dari pasar pembiayaan syariah yaitu 11,91% (Rp 3,97 triliun) dari total pembiayaan syariah di Indonesia sebesar Rp 33.32 triliun.

For sharia guarantee products, Perum Jamkrindo has cooperated with 8 Sharia banking, 16 sharia business units, and 2 BPRS. In view of guarantee market share in 2013, Jamkrindo's guarantee market share is relatively small at 11.91% or Rp33,32 trillion of total sharia financing market in Indonesia that reaches Rp88,623 trillion,

Pangsa pasar untuk Penjaminan Syariah ditinjau dari jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)

Market shares for Sharia Guarantee are reviewed from the total of sharia banking and business sharia units.

	Uraian / Description	Data Nasional / National Data	Market Share Perum Jamkrindo / Perum Jamkrindo's Market Share (yg sudah bekerjasama) / cooperating	%
A	Bank			
1	Bank Umum Syariah (BUS) / Sharia Banking	11 BUS	8 BUS	72,73
2	Unit Usaha Syariah (UUS) / Sharia Business Unit	23 UUS	16 UUS	69,57
3	Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) / People's Sharia Credit Bank	160 unit	2 unit	1,25

	Uraian / Description	Data Nasional / National Data	Market Share Perum Jamkrindo / Perum Jamkrindo's Market Share (yg sudah bekerjasama) / cooperating	%
B	Lembaga Keuangan Bukan Bank Syariah / Non Sharia Bank of Financial Institution	19 unit	2 unit	10,5
C	Pembiayaan Syariah / Sharia Financing	Rp 33.32 triliun	Rp 3,97 triliun	11,91

Strategi Pemasaran Tahun 2014

Seiring pesatnya persaingan usaha penjaminan di tahun 2014, Perum Jamkrindo menerapkan strategi pemasaran yang aktif, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk semua produk penjaminan baik penjaminan kredit program maupun kredit eksisting. Sasaran penjaminan kredit KUR sesuai dengan Inpres No.6 Tahun 2007 adalah:

- Mempermudah UMKMK mengakses perbankan melalui penjaminan sehingga UMKMK menjadi lebih terberdayakan (empowered).
- Meningkatkan kapasitas penjaminan sehingga jumlah UMKMK yang dilayani semakin meningkat, dengan volume Penjaminan sebesar Rp 24,05 triliun, dengan tingkat risiko yang rendah.
- Memperluas jangkauan pelayanan sehingga lebih mendekati UMKMK dan mitra kerja penjaminan, dengan jumlah UMKMK yang dilayani sebesar 1.393.270 UMKMK.
- Menggerakkan sektor produktif dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dengan tenaga kerja 1.798.944 orang.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, Perusahaan melakukan strategi sebagai berikut:

- Mempertahankan market share Perum Jamkrindo dengan melakukan kerja sama penjaminan kredit dengan Bank pelaksana yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah serta Bank-Bank Pembangunan Daerah yang mendapat penugasan untuk menyalurkan KUR.
- Menciptakan positioning yang kuat di Perbankan
- Melakukan penanggungan ulang (reasuransi) produk Penjaminan KUR
- Mengoptimalkan penjaminan kredit program lainnya.

Marketing Strategy 2014

In line with the increasingly tight guarantee business competition in 2014, Perum Jamkrindo implements an active marketing strategy, both by intensification and extensification, for all guarantee products, both for the credit program or the existing credit. Target KUR loan guarantee in accordance with the Presidential Decree 6 of 2007 is):

- Facilitate MSME banking by guaranteeing access to UMKMK become more empowered (empowered).
- Increasing the capacity of assurance that UMKMK number served increased, the volume of Rp 24.05 trillion guarantee, with a low level of risk.
- Expanding the range of services that more closely UMKMK and underwriting partners, the number of MSME MSME served by 1.39327 million.
- Moving the productive sector and increase employment, with a workforce of 1,798,944 people.

To achieve these objectives, the Company made the following strategies:

- Maintain Perum Jamkrindo's market share by working together with the Bank's credit insurance executive is BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN our bank, Bank Syariah Mandiri and Bank BNI Syariah and the Regional Development Banks gets the assignment for KUR.
- Creating a strong positioning in Banking
- Perform re-underwriting (Reinsurance) Insurance of KUR products
- Optimizing other credit guarantee programs.

Program kerja dan Langkah Kegiatan Tahun 2014

Perum Jamkrindo berencana untuk melakukan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 24,05triliun. Kredit dimaksud akan disalurkan kepada UMKMK 1.393.270 UMKMK yang akan menyerap 1.798.944 tenaga kerja.

Untuk mencapai sasaran dimaksud, maka pada tahun 2014 program kerja dan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Mengoptimisasi sistem penjaminan KUR secara Online dengan Bank Pelaksana, sehingga diharapkan penjaminan kepada UMKMK dapat lebih mudah dan cepat.
- Menjalin kerjasama dengan Mitra Reasuransidalam pelaksanaan penanggungan ulang produk Penjaminan KUR dalam rangka meminimalisir risiko.
- Melakukan koordinasi dengan Komite Kebijakan KUR terkait pelaksanaan Penjaminan KUR
- Melakukan business meeting dengan Bank Pelaksana KUR baik ditingkat pusat maupun dengan perbankan di daerah.
- Rekonsiliasi dan evaluasi penjaminan KUR secara periodik dengan Bank Pelaksana KUR.
- Melakukan koordinasi internal dengan Kantor Cabang Perum Jamkrindo terkait pelaksanaan penjaminan KUR.
- Percepatan problem solving dengan Bank Pelaksana KUR terkait permasalahan KUR.
- Sosialisasi ketentuan dan persyaratan program KUR, baik kepada pihak perbankan maupun instansi-instansi pembina UMKMK terkait.
- Melakukan pengawasan pelaksanaan KUR secara administratif dan on the spot secara periodik.

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang terus tumbuh, dan tingkat stabilitas makro ekonomi yang tetap terjaga, akan mendorong pertumbuhan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Salah satu karakteristik yang melekat pada sebagian besar UMKMK dan sekaligus menjadi sumber permasalahannya adalah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses kepada sumber pembiayaan (perbankan) yang disebabkan oleh adanya keterbatasan agunan.

Work Program And Activities in 2014

Perum Jamkrindo plans to conduct underwriting People's Business Credit (KUR) of Rp. 24.05 trillion. Credit is going to be channeled to SMEs 1,393,270 1,798,944 SMEs will absorb labor.

To reach the intended target, the 2014 work program and activities to be implemented steps are as follows:

- Optimize system KUR Online with Bank Executor, so expect the guarantee to UMKMK can more easily and quickly.
- Cooperating with partners in the implementation of underwriting reinsurance re KUR Assurance products in order to minimize risk.
- To coordinate the implementation of the Policy Committee related KUR KUR Guarantee
- Conducting business meeting with Bank of KUR Implementation both at central and at local banks.
- Reconciliation and periodic evaluation KUR KUR Executing Bank.
- Conducting internal coordination with the Office of Housing Jamkrindo Branch regarding the conduct of KUR.
- Acceleration problem solving with the Executing Bank KUR KUR-related problems.
- Socialization terms and conditions of the KUR program, both to the banks and institutions related UMKMK builder.
- To supervise the implementation of the KUR administrative and on the spot periodically.

COMPANY BUSINESS PROSPECTS

The increasing domestic economic growth and stable macro-economy will bolster the growth of Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK). One of the characteristics embedded in most UMKMK besides the source of most of the problems is the lack of capital structure and access to financing sources (banking) due to the collateral constraints.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah UMKMK di Indonesia, serta ketersediaan fasilitas Penjaminan Kredit, akan berdampak pada meningkatnya permintaan kredit, dan akan memberikan peluang bagi industri Penjaminan Kredit di Indonesia untuk tumbuh secara berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Disamping kegiatan usaha Penjaminan Kredit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011, tanggal 8 Juli 2011, sebagai Perusahaan Penjamin, Perum Jamkrindo masih mempunyai peluang untuk memperluas kegiatan usaha yang dijalankan dan tidak terbatas pada kegiatan usaha pemberian jasa Penjaminan Kredit, antara lain :

1. Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
2. Penjaminan Kredit dan/atau Pinjaman Program Kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
3. Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan Jaminan Gadai dan Fidusia;
4. Penjaminan atas Surat Utang;
5. Penjaminan Transaksi Dagang;
6. Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*surety bond*);
7. Penjaminan Bank Garansi (kontra bank garansi);
8. Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
9. Penjaminan *Letter of Credit* (L/C);
10. Penjaminan Kepabeanan (custom bond);
11. Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
12. Penyediaan informasi/database Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
13. Penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan Menteri.

Sehubungan dengan peluang bisnis Penjaminan Kredit di Indonesia yang masih cukup luas, Perum Jamkrindo yang merupakan Perusahaan Penjamin Kredit yang berskala nasional dan telah memiliki jaringan pelayanan terluas yaitu di 18 (delapan belas) kota di seluruh Indonesia, mempunyai peluang usaha untuk terus tumbuh dan berkesinambungan dalam jangka panjang.

The economic growth and the number of UMKMK in Indonesia, as well as the availability of Credit Guarantee facilities, will result in the increasing demand for credit and provide opportunities for the industry of Credit Guarantees in Indonesia to grow sustainably in the future.

Besides Credit Guarantee, as provided in the Minister of Finance Regulation Number 99/PMK.010/2011, dated July 8, 2011, Perum Jamkrindo still has the opportunity to expand their business activities that is run and not only limited to the Credit Guarantee.

1. Providing Guarantees for loans given to its members;
2. Providing Guarantees for loan that are m channelled by State Owned Enterprises (SOEs) for Partnership and Environment Development Program (PKBL);
3. Providing Guarantee with the Loan guaranteed by Liens and the Fiduciary;
4. Providing Guarantee for the Bonds;
5. Providing Guarantee for Trade/Commerce Transactions;
6. Providing Guarantee for the Procurement of Goods and Services (*surety bond*);
7. Providing Guarantee for Bank Guarantees (Counter Bank Guarantee);
8. Providing Guarantee for Domestic Letter of Credit (SKBDN);
9. Providing Guarantee for Letter of Credit (L / C);
10. Providing Guarantee for customs (custom bond);
11. Providing Management Consulting Services related to Business Activity of the Guarantee;
12. Provision of Information / Database related to Business Activity of Guarantee;
13. Other business upon the approval of the Minister.

Pertaining to the wide Credit Guarantee business opportunities in Indonesia, Perum Jamkrindo is a national Credit Guarantee Company and has the most extensive service network in 18 (eighteen) cities throughout Indonesia. Perum Jamkrindo has good business opportunities to achieve long term sustainability.

Bisnis utama Perum Jamkrindo adalah Penjaminan Kredit UMKMK, baik Penjaminan Kredit Korporasi (*existing*), maupun Penjaminan Kredit Program (Kredit Usaha Rakyat) yang ditujukan kepada Usaha Mikro dan Kecil yang layak tapi belum bankable.

Pada tahun-tahun mendatang, Perum Jamkrindo akan terus melakukan pengembangan produk penjaminan, baik penjaminan atas kredit tunai maupun non tunai, yang disalurkan oleh Perbankan maupun Lembaga Non Bank. Pengembangan tersebut dilakukan oleh Perum Jamkrindo untuk memenuhi kebutuhan UMKMK dan Mitra Perbankan / Penerima Jaminan dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya.

Surety Bond yang diluncurkan sejak tahun 2012 belum memberikan gambaran prospek yang baik. Penjaminan kredit konstruksi, kredit umum, dan distribusi barang kurang dapat ditangani dengan baik mengingat telah tercapainya kapasitas kerja maksimum sejak produk KUR melonjak tinggi.

Pada masa-masa yang akan datang, penjaminan kredit konstruksi, kredit umum, dan distribusi barang diperkirakan memiliki prospek yang semakin baik seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kesiapan organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, maupun pemanfaatan *Information and Communication Technology* (ICT) Perum Jamkrindo perlu mendapatkan perhatian lebih untuk dapat merealisasikan prospek tersebut.

RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perum Jamkrindo dalam lima tahun ke depan (2014-2018) adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dikembangkan menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional, khususnya dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) serta usaha lainnya yang mendukung pengembangan UMKMK di Indonesia.
2. Perusahaan diarahkan untuk mendukung pengembangan bisnis UMKMK sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional melalui layanan yang luas dan berkualitas tinggi

The core business of Perum Jamkrindo is providing Credit Guarantee or UMKMK, both for the existing credit guarantee business and KUR Guarantee Program, to SMEs that are feasible yet not bankable.

In the coming years, Perum Jamkrindo will continue to develop these credit products, both cash and non cash guarantees, which is provided by banks and non-bank institutions. The development is carried out by Perum Jamkrindo to meet the needs of the UMKMK and the banks to foster business activities.

Surety Bond launched since 2012 had not indicated good outlook. The guarantee of construction credit, general credit and goods distribution was not properly handled considering that the maximum work performance was met since the peak of KUR product's demands.

In the future, the construction credit guarantee, general credit and goods distribution are projected to remain buoyant in line with the national economic growth. The readiness of the organization, human resources, and business process, as well as the *Information and Communication Technology* (ICT) of Perum Jamkrindo need to be given extra attention to realize the prospects.

LONG TERM CORPORATE PLAN

Long Term Corporate Plan of Perum Jamkrindo in the next five years (2014-2018) is as follows:

1. The Company is being developed into the Leading Guarantee Company that supports the national economic development, particularly in developing Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK) and other business that supports the development of UMKMK in Indonesia.
2. The Company is being directed to support UMKMK business development as part of the national economic development through extensive and high quality service

di bidang penjaminan kepada UMKMK dan mitra bisnis serta memberikan manfaat kepada *stakeholders* sesuai prinsip bisnis yang sehat.

3. Perusahaan dikembangkan untuk menjadi organisasi yang terus tumbuh secara berkesinambungan dengan sistem manajemen yang handal dan terintegrasi.
4. Perusahaan dikembangkan untuk selalu mencari inovasi-inovasi baru dalam memperkuat berbagai lini bisnis yang ada dengan menerapkan sistem *e-guarantee*.
5. Perusahaan diarahkan supaya berkembang dengan ditunjang oleh perusahaan-perusahaan anak untuk menjalankan usaha yang berkaitan dan sinergis dengan usaha utama Perum Jamkrindo.

Perusahaan dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi *stakeholders* sesuai prinsip bisnis yang sehat.

Dengan arah tersebut diharapkan dapat tercapai sasaran Perum Jamkrindo pada tahun 2018 sesuai dengan visi perusahaan untuk Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional. Sasaran Perusahaan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap I Tahun 2014-2015: Pertumbuhan Dengan Fokus Penguatan Daya Saing.
Pada tahun pertama dan kedua (tahun 2014-2015), sasaran utama yang ingin dicapai adalah efisiensi dan efektivitas operasional Perusahaan dalam mendukung kekuatan Perusahaan yang saat ini telah dimiliki. Pada tahap ini tercipta sistem manajemen operasional Perusahaan yang optimal dengan didukung oleh organisasi yang adaptif dan gesit, SDM yang berkualitas serta teknologi informasi dan komunikasi yang efektif. Pertumbuhan pendapatan penjaminan tetap terjaga untuk menjamin Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan berkelanjutan. Pada periode ini, diversifikasi usaha juga sudah mulai dilakukan.
- b. Tahap II Tahun 2016-2017: Pertumbuhan Dengan Fokus Penguatan Pasar dan Inovasi Produk.

in guarantee to UMKMK and business partners, as well as to provide benefit to stakeholders according to the healthy business principles.

3. The Company is being developed into an organization that continues to grow sustainably through reliable and integrated management system.
4. The Company is being developed to always seek for new innovations in strengthening various lines of business available by implementing *e-guarantee* system,
5. The Company is being directed to develop, supported by subsidiaries to run the related business with synergy with the main business of Perum Jamkrindo.

The Company is being developed into providing benefit to stakeholders according to healthy business principles.

With such direction, it is expected that the goal of Perum Jamkrindo in 2018 meets the vision of the company to become the Leading Guarantee Company Supporting the Development of National Economy. The Company's target for the next 5 (five) years is:

- a. Stage I Year 2014-2015: Growth with Focus on Improvement of Competitive Power
In the first and second year (in 2014-2015), the main target to achieve is efficiency and effectiveness of the Company's operation in supporting the Company's current strength. In this stage, the optimum management system of the Company's operation which is adaptive and responsive, as well as quality human resources and effective information and communication technology, will have been realized. The growth of guarantee revenue remains stable to ensure the sustainability of Perum Jamkrindo. In this period, business diversification will commence.
- b. Stage II Year 2016-2017: Growth with Focus on Market Improvement and Product Innovation

Pada tahun ketiga dan keempat (tahun 2016-2017), sasaran yang ingin dicapai adalah pengembangan pasar melalui penguasaan pangsa pasar secara signifikan (*market leader*) untuk semua produk Perusahaan, baik untuk pasar yang saat ini dilayani maupun peningkatan basis pelanggan yang belum dilayani Perusahaan. Untuk bidang keuangan, profitabilitas Perusahaan meningkat baik melalui hasil operasi Perusahaan maupun hasil investasi. Pada bidang sistem teknologi informasi dan komunikasi (ICT), JODIS (*Jamkrindo Online Decision and Information Support*) telah berada pada tahap implementasi. Sedangkan di bidang SDM dan organisasi telah dimulai budaya organisasi yang kompetitif dan berorientasi pada pasar. Pada periode tahun ini, pengembangan produk melalui inovasi produk-produk baru telah menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi Perusahaan.

In the third and fourth year (in 2016-2017), the target to achieve is market development through domination of market share (*market leader*) for all products of the Company, both for current market and the increase in customer bases that have not been reached by the Company. For finance, the Company's profitability increased, seen from the Company's operational result and investment. In information and communication technology system (ICT), JODIS (*Jamkrindo Online Decision and Information Support*) will have been implemented. In human resources and organization, competitive organization culture oriented to market will also have started. During this period, product development through new product innovation has gained significant revenue for the Company.

- c. Tahap III Tahun 2018 dan Seterusnya: Mempertahankan dan Memantapkan Akselerasi Pertumbuhan.
 Pada tahun terakhir periode RJPP (tahun 2018), sasaran yang ingin dicapai adalah mempertahankan dan memantapkan akselerasi pertumbuhan yang telah dicapai pada periode tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, sejalan dengan pengembangan produk-produk baru serta diversifikasi usaha terkait (*related diversification*) melalui pembentukan anak-anak perusahaan, maka pengembangan kompetensi baru juga menjadi sasaran yang ingin dicapai pada periode ini.

- c. Stage III Year 2018 and so on: Maintaining and Enhancing Accelerated Growth.
 During the last year of RJPP period (2018), the target to achieve is maintaining and enhancing the accelerated growth that has been achieved in the previous period. In addition, in line with the new product development and related business diversification through the establishment of subsidiaries, the development of new competency is also a target to achieve this year.

Road Map RJPP Jamkrindo



Road Map of Jamkrindo's RJPP

Batik Toraja

Budaya tenun di Toraja telah menjadi warisan secara turun temurun, dengan tetap mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang kegiatan menenun. Warna khas batik Toraja adalah hitam, merah, putih dan kuning. Batik Toraja mulai diperkenalkan secara resmi tahun 2004 dengan ide menuangkan karya ukir dalam kain dan merupakan perpaduan antara nilai tradisional dengan post-modern

Selain itu, karena tenun telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian yang berbasis budaya, maka aktivitas tersebut sangat membantu melestarikan budaya itu sendiri.

Weaving culture in Toraja has become a legacy for generations, while still teaching their kids about weaving activities. The typical colors of Batik Toraja are black, red, white and yellow. Batik Toraja was officially introduced in 2004 with the idea of carving work and was a combination of traditional values with post-modern ones.

Additionally, because weaving has been one of the livelihoods in culture, the activities support its culture heritage.



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



156

PELAKSANAAN GCG

Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum JAMKRINDO) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dengan tujuan melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan Pemerintah di bidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan jalan melakukan kegiatan usaha Penjaminan, serta bantuan Manajemen dan Konsultasi.

Pelayanan maksimal dan cara kerja yang profesional dalam pengelolaan perusahaan menjadi komitmen yang senantiasa dijaga sehingga mampu berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi, menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), menuntut Perum Jamkrindo untuk terus menjaga penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsistensi dan berkomitmen tinggi.

GCG IMPLEMENTATION

Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum JAMKRINDO) is a State-Owned Enterprise (BUMN) established to conduct and support the Government policies in developing Micro, Small, Medium Enterprise and Cooperative (UMKMK) by running Guarantee business, as well as Management and Consulting Service.

Premier service and professional performance in managing the company are the commitments which the Company constantly maintains in order to develop and have high competitive power, creating added value for the stakeholders and highly encouraging Perum Jamkrindo to continually implement Good Corporate Governance consistently with high commitment.

Komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG telah berlandaskan pada budaya Perusahaan yaitu berorientasi pada kepuasan konsumen, proaktif terhadap perubahan lingkungan usaha, bersikap jujur, berpikir positif dan berdedikasi tinggi, bekerja tekun dan disiplin dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan, selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi Perusahaan. Nilai-nilai budaya Perum Jamkrindo ini telah diimplementasikan diseluruh jajaran Perum Jamkrindo yang juga merupakan kode etik Perum Jamkrindo sehingga manajemen dan karyawan memiliki acuan yang jelas dan terukur dalam berfikir dan bertindak sehingga membawa Perum Jamkrindo pada tujuan tata kelola Perusahaan yang baik.

KEBIJAKAN DAN PRAKTIK GCG

Terkait dengan komitmen pelaksanaan GCG, Dewan Pengawas dan Direksi telah membuat Surat Keputusan bersama untuk Pedoman *Good Corporate Governance* dengan nomor 88/Kep-Dir/XII/2012—KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012. Selain berdasarkan *Board Manual* pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan juga didasarkan pada aturan-aturan internal lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengacu kepada prinsip-prinsip GCG.

Sosialisasi terus dilakukan ke seluruh jajaran dengan tujuan agar seluruh jajaran Perusahaan memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam lingkungan kerja sehari-hari guna menghindari perilaku menyimpang dari setiap jajaran unit kerja.

Praktek GCG terus menerus ditingkatkan di Perum Jamkrindo, dengan monitoring dari unit kerja terkait Kantor Pusat atas implementasi *Code of Conduct* (CoC). Apabila ditemukan benturan kepentingan atau penyalahgunaan jabatan yang menimbulkan tindakan fraud dari jajaran Perusahaan, maka akan diselesaikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

The commitment to implement GCG principles has its basis on the Company's culture, i.e. oriented to customers' satisfaction, proactive to the change of business environment, honest, think positively and have high dedication, being determined and dilligent in working by upholding the Company's interest, as well as continuously improving professionalism for achieving added value for the Company. This value has been internalized in all corporate activities, serving also as the guidelines of Perum Jamkrindo; guiding the personnels to take clear and measurable action to bring Perum Jamkrindo to its corporate governance objectives.

GCG POLICY AND PRACTICE

With regard to the commitment of GCG implementation, Board of Supervisors and Board of Directors has prepared Decree number 88/Kep-Dir/XII/2012-KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 dated December 3, 2012 regarding GCG policies. In addition to referring to Board Manual, the implementation of Good Corporate Governance is referred to other existing regulation enacted in accordance with the prevailing regulation and GCG principles.

Dissemination is continually carried out to all staffs so as to understand and implement GCG principles in day-to-day business activities to prevent any fraud within all working units.

GCG practices are continued to be enhanced in Perum Jamkrindo through monitoring from work unit of Headquarter on the implementation of Code of Conduct (CoC). In the event there is found a conflict of interests or the position misuse which arise fraud indication from the Company's officers, so it will be settled and followed up based on the applicable regulations.

KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

Substansi dan ketentuan terkait gratifikasi secara umum telah diatur dalam Pedoman *Good Corporate Governance* yang memuat komitmen Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan tidak boleh menerima gratifikasi, penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan harus dilaporkan Divisi SDM sebagai unit pelaksana kebijakan gratifikasi, serta sanksi atas pelanggaran kebijakan pengendalian gratifikasi.

Kebijakan pelaporan apabila ada dugaan penyimpangan secara umum telah diatur dalam Pedoman *Good Corporate Governance* dan Pedoman Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan pada Perusahaan (*Whistle Blowing System*).

PENILAIAN GCG

Perum Jamkrindo melakukan pengukuran dan penilaian atas implementasi GCG secara berkala yang bertujuan untuk:

- Menguji dan menilai penerapan GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan.
- Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan GCG, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian.
- Memantau konsistensi penerapan GCG di lingkungan organisasi Perusahaan, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG.
- Mendorong pengelolaan Perusahaan yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.

Dasar pelaksanaan penilaian/evaluasi atas penerapan GCG pada Perum Jamkrindo mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 dan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012

COMMITMENT TO CONTINUOUSLY IMPLEMENT CORPORATE GOVERNANCE

The substance and the relevant regulations of gratification in general have been set in the Good Corporate Governance guidelines which include the commitment of the Supervisory Board, Directors and employees must not accept gratuities, gratuities claimed as a bribe must be reported to the Division of Human Resources as a gratuity policy implementation unit, as well as sanctions for violations of the control gratification policy.

According to reporting policy, Guidelines of Good Corporate Governance and Guidelines of Reporting of Suspected Deviation of the Company (*Whistle Blowing System*) has generally covered provisions on suspected deviation.

GCG ASSESSMENT

Perum Jamkrindo periodically conducts and assessment on GCG implementation which aims to:

- Test and assess the GCG implementation through elaboration of GCG implementation condition and comparison with predetermined assessment indicator and parameter.
- Provide illustration on measurement result through assignment of GCG implementation, as well as the suggested repairment recommendation, in order to decrease the gap between practice and assessment indicator and parameter.
- Supervise the consistency of GCG implementation in the Company's organization environment, and to receive input for the improvement and development of GCG policy.
- Encourage the professional, transparent, and efficient Company management, to empower the function and to improve the independency of the Company's Instrument.

Basic implementation of assessment / evaluation of the implementation of GCG in Perum Jamkrindo refers to the Minister of State Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at SOE as amended by Regulation of the Minister of State Owned Enterprises number: PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 and the decision of the Secretary of the Ministry of State Owned Enterprise number: SK-16/S.

tentang Indikator/parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Perum Jamkrindo senantiasa memastikan bahwa sistem GCG yang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan melakukan evaluasi atas penerapan GCG tahun 2013 meliputi pelaksanaan tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian penerapan GCG tahun sebelumnya dan pelaksanaan *self assessment* terhadap penerapan GCG tahun berjalan. Pelaksanaan *self assessment* terhadap penerapan GCG tahun 2013 telah dibentuk Tim Evaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2013 yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor: 10/Kep-Dir/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 dan pelaksanaan tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian penerapan GCG telah dibentuk Tim Improvement Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2012 yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor: 123/Kep-Dir/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013.

Tahapan Pelaksanaan *Self Assessment*

Berdasarkan tahapan pelaksanaannya *self assessment* GCG pada Perusahaan mencakup:

1. Tahap Pendahuluan
 - a. Pembicaraan Pendahuluan
 - b. Penyamaan Persepsi
 - c. Menyiapkan bahan materi GCG
 - d. Pembentukan Tim Evaluasi Penerapan GCG

MBU/2012 dated June 6, 2012 on indicators / parameters Assessment and Evaluation of the Implementation of Corporate Governance (*Good Corporate Governance*).

Perum Jamkrindo always ensure that the GCG system is run in accordance with the provisions of the applicable legislation. The Company evaluated the implementation of GCG in 2013 include the follow-up the recommendations of the previous evaluation of GCG implementation and execution of self-assessment on the implementation of good corporate governance for the year. The implementation of self-assessment on the implementation of GCG in 2013 had established the Evaluation Team Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2013 are set out in the Directors Decision No. 10/Kep-Dir/II/2014 dated February 5, 2014 and the follow-up results of assessment of the implementation of good corporate governance recommendations Improvement team was formed Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2012 are set out in the Directors decision No. 123/Kep-Dir/X/2013 dated October 2, 2013.

Phases of Self Assessment Implementation

Based on its implementation phases, the Company's GCG Self assessment include:

1. Introduction Phase
 - a. Introduction discussion
 - b. Perception in common
 - c. Preparing GCG materials
 - d. Establishment of Evaluation Team for GC implementation

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

2.1 Pengumpulan data:

a. Reviu Dokumen

Reviu dokumen dilakukan terhadap beberapa dokumen Perusahaan yang diperlukan seperti Perangkat GCG, Risalah Rapat, RKAP, kebijakan dan peraturan Perusahaan, ketentuan ekstern yang terkait dan dokumen lainnya yang relevan.

b. Wawancara

Berdasarkan hasil pengkajian dokumen dan pengamatan maka dilakukan pertemuan dengan Tim Evaluasi Penerapan GCG untuk melakukan diskusi dan wawancara.

c. Observasi

Metode pengumpulan data juga dilakukan melalui kegiatan pengamatan, terutama sebagai konfirmasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen.

2.2 Analisis/Pengolahan Data

a. Tabulasi Data

Seluruh data yang diperoleh dari reviu dokumen, simpulan hasil wawancara dan observasi ditabulasikan dalam bentuk angka yang memberikan prediksi tingkat pemenuhan parameter.

b. Pemberian skor

Dalam melakukan *assessment* GCG, diberikan penilaian/skor terhadap praktik GCG di Perum Jamkrindo berdasarkan tingkat capaian aktual dari tiap aspek yang dinilai, dibandingkan dengan bobot dari aspek tersebut.

2.3 Analisis dan Penyusunan *Draft* Laporan

Berdasarkan informasi yang diperoleh maka Tim Evaluasi Penerapan GCG melakukan pengisian Kertas Kerja *Assessment* dan memberikan penilaian. Kertas Kerja tersebut menjadi dasar penyusunan *draft* laporan untuk disampaikan kepada Direksi. Format laporan disusun sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* dari Sekretaris Kementerian Negara BUMN.

2.4 Penyampaian Hasil Sementara ke Direksi

Tim Evaluasi Penerapan GCG menyerahkan *draft* laporan hasil *self assessment* ke Direksi untuk melakukan pembahasan.

2. Field Practices Phase

2.1 Data Collecting:

a. Document review

Documents review is performed on some of the Company's documents needed like GCG devices, Minutes of Meeting, RKAP, the Company's policies and regulations, related external provisions, and other relevant documents.

b. Interview

Based on the results of the documents review and observations, there was conducted meetings with Evaluation Team of GCG Implementation to conduct discussions and interviews.

c. Observation

Methods of data collection are also conducted through observation, especially as confirmation of the implementation of management policies.

2.2 Data Analayis

a. Data Tabulation

All data obtained from a documents review, interviews and observations are tabulated in the form of numbers that give the prediction of level of parameters fulfillment.

b. Scoring

In performing GCG assessment, given the assessment/scoring to the GCG practices in Perum Jamkrindo by actual achievement levels from each aspect assessed, compared with the weight from these aspects.

2.3 Analysis and Preparation of Reports Draft

Based on the information gathered thus the evaluation team of GCG implementation conducted Assessment Worksheet and provided an assessment. The Worksheet provides the basis for the preparation of the draft report submitted to the Board of Directors. The report format was prepared in accordance with Reference of Assessment Implementation from the Secretary of the Ministry of BUMN.

2.4 Temporary Results Submission to Board of Directors

Evaluation team of GCG Implementation submitted report dratf of self assessment result ot Board of Directors to take a discussion.

2.5 Penyampaian Laporan Final

Setelah dikonfirmasi kepada organ Perusahaan maka akan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil *Self Assessment* dan diserahkan kepada Dewan Pengawas. Selain memberikan penjelasan mengenai hal *assessment* penerapan praktik GCG pada Perum Jamkrindo selama tahun 2013, laporan tersebut juga akan mengungkapkan bidang penerapan GCG yang masih memerlukan upaya perbaikan (*area of improvement*) termasuk rekomendasinya serta monitoring tindak lanjut *assessment* GCG tahun 2012.

Dasar Pelaksanaan *Self Assessment*

Dasar pelaksanaan *self assessment* atas penerapan GCG Perum Jamkrindo untuk periode tahun 2013 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 dan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perum Jamkrindo menunjuk dan membentuk Tim yang menilai penerapan GCG yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor: 10/Kep-Dir/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2013.

Tujuan *Assessment*

Tujuan pelaksanaan *assessment* penerapan GCG di Perusahaan, sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* dan *Re-assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* di BUMN, adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG perusahaan melalui evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan pada Perum Jamkrindo, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya.

2.5 Final Report Submission

Once confirmed by the Company's organ, there will be set forth in the Report of the Self Assessment form and submitted to the Supervisory Board. In addition to providing an explanation regarding the assessment of the GCG practices implementation of Perum Jamkrindo during 2013, the report will also reveal areas of GCG implementation which still requires improvement efforts (*area of improvement*) including recommendation and monitoring of GCG follow-up assessment in 2012.

Basis of *Self Assessment* Implementation

The basis of self assessment implementation of GCG practices of Perum Jamkrindo for period in 2013 refers to the Regulations of Ministry of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Good Corporate Governance implementation on State-owned Enterprises as to be changed with the Regulation of Ministry of State Owned Enterprises Number: PER-09/MBU/2012 on July 6, 2012 and Secretary of Ministry of BUMN Number: SK-16/S.MBU/2012 on June 6, 2012 on the indicators/Parameter on the Assessment and Evaluation on the Good Corporate Governance implementation on State-Owned Enterprises.

As to the case, Perum Jamkrindo appointed and established a Team to assess GCG implementation set forth in the Decree of Board of Directors Number: 10/Kep-Dir/II/2014 on February 5, 2014 on the establishment of Evaluation Team on Good Corporate Governance implementation (GCG) in 2013.

Purposes of *Assessment*

The purposes of assessment implementation on GCG practices in the Company based on Reference of Assessment and Re-assessment Implementation of Good Corporate Governance in BUMN are:

1. Measuring the quality of the Company's GCG implementation through evaluation of the level of compliance with GCG criteria as applied to the Perum Jamkrindo through scoring/ value of the GCG implementation and its implementation quality category.

2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (gap) antara kriteria GCG dengan penerapan pada Perum Jamkrindo.
3. Memonitor konsistensi penerapan GCG pada Perum Jamkrindo dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* di lingkungan perusahaan.

2. Identifying strengths and weaknesses of the Company's GCG implementation, as well as propose recommendations for improvement to reduce the gap between the criteria of GCG and the implementation in Perum Jamkrindo.
3. Monitoring the implementation of GCG consistency of Perum Jamkrindo and obtaining input for the improvement and development of corporate governance policies in a corporate environment.

Hasil *assessment* diharapkan dapat menjadi landasan untuk peningkatan dan perbaikan penerapan praktik GCG di Perum Jamkrindo. Selanjutnya penerapan praktik GCG tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara transparan, profesional, dan efisien sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dalam bentuk *trend* kinerja Perusahaan yang tinggi (*high performance*), dan citra Perusahaan yang baik (*good corporate image*), serta kepercayaan *stakeholders* (pengguna jasa, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan) terhadap Perum Jamkrindo.

Periode Assessment

Periode penerapan praktek GCG di Perusahaan yang dinilai dalam pelaksanaan *assessment* GCG ini adalah periode tahun 2013. Pelaksanaan *self assessment* dilakukan mulai tanggal 6 s.d 25 Februari 2014.

The results of the assessment are expected to be the basis for the enhancement and improvement of the implementation of GCG practices in Perum Jamkrindo. Furthermore, the implementation of GCG practices is also expected to provide benefits to trigger the management of the Company in a transparent, professional, and efficient way so as to increase the value of the Company in the form of the Company's trend of high performance and good corporate image, and trust from stakeholders (service users, employees, and society as a whole) to Perum Jamkrindo.

Assessment Period

The period of implementation of GCG practices assessed in the implementation of GCG is the assessment period in 2013. Implementation of self-assessment is conducted from May 6 to February 25, 2014.

Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG

Assessor menetapkan klasifikasi peringkat kualitas penerapan GCG baik indikator, aspek maupun keseluruhan, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Classification of GCG Implementation Quality

Assessors assign ratings classification good indicator of the quality of the implementation of good corporate governance, as well as the overall aspect, based on the following criteria:

Tingkat / Grade	Capaian / Achievement	Peringkat / Rate
1	Nilai di atas 85 / Values above 85	Sangat Baik / Excellent
2	75 < Nilai ≤ 85 / 75 <value ≤ 85	Baik / Good
3	60 < Nilai ≤ 75 / 60 <value ≤ 75	Cukup Baik / Fair
4	50 < Nilai ≤ 60 / 50 <value ≤ 60	Kurang Baik / Poor
5	Nilai ≤ 50 / Value ≤ 50	Tidak Baik / Very Poor

Assessment penerapan Good Corporate Governance (GCG) tahun 2012 dilaksanakan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) selaku assessor.

Assessment implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2012 conducted by the BPK (Financial and Development Supervisory Agency) as the assessor.

Penilaian GCG Tahun 2013

Adapun hasil penilaian/evaluasi GCG Perum Jamkrindo dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

GCG Assessment in 2013

Evaluation of Perum Jamkrindo can be summarized as follows:

Aspek / Aspect		Bobot / Weight	Tahun 2013 (Self Assessment)		Tahun 2012 (Assessment)	
			Nilai / Score	% Pencapaian / % of Achievement	Nilai / Score	% Pencapaian / % of Achievement
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan / Commitment on sustainable implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,361	90,862	5,187	74,100
II	Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal / Shareholders and GMS/ Owners of Capital	9,00	8,463	94,039	7,427	82,522
III	Dewan Pengawas / Board of Supervisors	35,00	31,308	89,453	27,982	79,949
IV	Direksi / Board of Directors	35,00	32,312	92,319	28,871	82,488
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information and Transparency Disclosure	9,00	7,890	87,663	6,415	71,278
VI	Aspek Lainnya / Other Aspects	5,00	3,750	75,000	-	-
SKOR KESELURUHAN / Total Score		100,00	90,084	90,084	75,882	75,882
KLASIFIKASI PERINGKAT KUALITAS PENERAPAN GCG CLASSIFICATION OF GCG APPLICATION QUALITY RANK			SANGAT BAIK / Excellent		BAIK / Good	

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)/ RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA (RPB)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Pembahasan Bersama (RPB) merupakan organ perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Perum Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di Bidang Penjaminan Kredit yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, dan oleh karenanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 41 Tahun 2008 bahwa Pertanggungjawaban Pengelolaan Perusahaan disampaikan oleh Direksi kepada Pemerintah melalui Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS) / DISCUSSION OF JOINT MEETING (RPB)

General Meetings of Shareholders (GMS) or Discussion of Joint Meetings (RPB) is the Company's instrument which has authority not granted to the Board of Directors or Board of Supervisors, of which limitation is determined and stated in the Government Regulation of Republic of Indonesia Number 41 Year 2008 regarding Public Company (Perum) of Indonesia Credit Guarantee.

Perum Jamkrindo is a State Owned Enterprise operating in Credit Guarantee where all capitals are owned by the state. This refers to the country's assets separated and not divided by share. Thus, in accordance with Government Regulation Number: 41 Year 2008, the responsibility of the company's management is held by Board of Directors to Government through Minister appointed and/or granted authorities to represent the Government as the shareholder in the Company by compliance

pemilik modal pada Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Pembahasan Bersama (RPB)

Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham/ Menteri Negara BUMN dalam hal ini adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- 1) Penambahan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya
- 2) Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan
- 3) Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah
- 4) Menetapkan jumlah anggota Direksi Perusahaan, dan jumlah anggota Dewan Pengawas
- 5) Pengesahan Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan
- 6) Pengesahan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
- 7) Memberikan Persetujuan Rancangan perubahan rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang telah disahkan, apabila terdapat perubahan rencana kerja dan anggaran Perusahaan
- 8) Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan
- 9) Pengesahan atas auditor eksternal yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan, dan melakukan pengesahan atas laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal dimaksud
- 10) Menetapkan alokasi penggunaan laba bersih Perusahaan, termasuk jumlah penyesihan untuk cadangan
- 11) Menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas
- 12) Melakukan penilaian (evaluasi) kinerja Direksi, dan Dewan Pengawas

DEWAN PENGAWAS

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas untuk:

- 1) Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

to regulation.

Authorities of General Meeting of Shareholders (GMS) / Discussion of Joint Meeting (RPB)

The authorities of General Meeting of Shareholders/State Minister of SOEs, in this regard, a Minister appointed and/ or granted authorities to represent the Government as the shareholder in the Company by compliance to regulation, are as follows:

- 1) Increase in Investment of State Capital, having its source from reserve capitalization and other sources.
- 2) Ratification of amendment of Articles of Association
- 3) Appointment and dismissal of members of Board of Directors, Board of Supervisors, and Board of Shariah Supervisors
- 4) Determination of total members of Board of Directors and total members of Board of Supervisors
- 5) Ratification of Draft of Long Term Corporate Plan
- 6) Ratification of Draft of Work Plan and Budget
- 7) Approval of change in work plan and budget ratified, if any.
- 8) Ratification of the Company's Annual Report
- 9) Ratification of external auditor appointed to audit and ratify the result.
- 10) Determination of allocation of net profit use, including total allocation for reserve.
- 11) Determination salary of Board of Directors and Board of Supervisors
- 12) Assessment of performance of Board of Directors and Board of Supervisors

BOARD OF SUPERVISORS

Duties and Responsibilities of Board of Supervisors

The Board of Supervisors is the Company's instrument which is in charge of:

- 1) Monitoring the Company management by Board of Directors.

- 2) Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.

Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas dalam rangka menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Pengawas berkewajiban:

- Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan.
- Melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
- Meneliti dan menelaah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
- Memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- Mengadakan rapat secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan.

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Perum Jamkrindo berjumlah 5 orang yang seluruhnya diangkat oleh Menteri BUMN melalui Keputusan Menteri Negara BUMN :

Nama Dewan Pengawas / Name of Board of Supervisors	Surat Keputusan / Decree
CHOIRUL DJAMHARI	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor: KEP-195/MBU/2009 tanggal 17 September 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, mengangkat Choirul Djamhari sebagai Ketua Dewan Pengawas. Decree of the Minister of State Owned Enterprises (BUMN) as Capital owner of Perum Jamkrindo Number: KEP-195/MBU/2009 dated 17 September 2009 on the Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo, appointed Choirul Djamhari as Chairman of the Board of Supervisory.

- 2) Providing input to Board of Directors regarding the Company's governance.

The Board of Supervisors conducts supervision to assess the Company by comparison of the actual condition and the required action, in both finance and operational technique.

To implement duties as required, Board of Supervisors is required to:

- Provide input to the Minister regarding Long Term Corporate Plan and Work Plan and Budget recommended by Board of Directors
- Keep up with the development of the Company's activity, give opinion and advice to the Minister for problems of concerns to the Company's management
- Immediately report to the Minister regarding the indicators of the downgrading company performance.
- Examine and review Periodical Report and Annual Report prepared by Board of Directors and sign the Annual Report .
- Monitor and ensure the effective and sustainable implementation of GCG principles .
- Hold meeting in a periodical basis, at the least once a month.

Number and Composition of Members of Board of Supervisors

Board of Supervisors of Perum Jamkrindo has 5 personnel, all of whom is appointed by Minister of SOE through Decree of State Minister of State Owned Enterprise:

Nama Dewan Pengawas / Name of Board of Supervisors	Surat Keputusan / Decree
NASARUDDIN UMAR	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor: SK-409/MBU/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, mengangkat Nasaruddin Umar sebagai Anggota Dewan Pengawas. Decree of Minister of BUMN as Capital Owner of Perum Jamkrindo Number: SK-409/MBU/2012 dated on November 19, 2012 on the Dismissal and Appointment of Supervisory Board's members of Perum jamkrindo, appointing Nasaruddin Umar as the member of Supervisory Board.
DAHLAN SIAMAT	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor: SK-297/MBU/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, mengangkat Dahlan Siamat sebagai Anggota Dewan Pengawas. Decree of the Ministry of BUMN as Capital owner of Perum Jamkrindo Number: : SK-297/MBU/2013 dated June 28, 2013 on the Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo, Mr. Dahlan Siamat as the member of Supervisory Board.
BANDUNG PARDEDE*	Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-195/MBU/2009 tanggal 17 September 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, mengangkat Bandung Pardede sebagai anggota Dewan Pengawas. Decree of the Ministry of BUMN Number: : KEP-195/MBU/2009 dated September 17, 2009 on the Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo, Appointing Mr. Bandung Pardede as the member of Supervisory Board.
BOBBY HAMZAR RAFINUS*	Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-204/MBU/2013 tanggal 9 April 2013 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, mengangkat Bobby Hamzar Rafinus sebagai anggota Dewan Pengawas. Decree of the Ministry of BUMN Number: : KEP-204/MBU/2013 dated April 9, 2013 on the Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo, Appointing Mr. Bobby Hamzar Rafinus as the member of Supervisory Board.

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas Per tanggal 31 Desember 2013 telah dilakukan pergantian Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Bandung Pardede digantikan oleh Ony Suprihartono dan Bobby Hamzar Rafinus digantikan oleh Subandriyo.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas

Ketua dan anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo pada tahun 2013 diberi penghasilan yang berupa : Honorarium, Tunjangan, Fasilitas, serta Tantiem yang jenis dan jumlahnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Nomor: KEP-24/

Change of Composition of Board of Supervisors

As of December 31, 2013, there was a change in the roster of Perum Jamkrindo's Board of Supervisors. Bandung Pardede is replaced by Ony Suprihartono, while Bobby Hamzar Rafinus is replaced by Subandriyo.

Remuneration Determining Procedure of Board of Supervisors

Head and members of Board of Supervisors of Perum Jamkrindo in 2013 were provided income in the form of: Honorarium, Allowance, Facility, and similar Tantiem in which the amount was stipulated in Decree of Capital Owner of Public Company (Perum) of Indonesia Credit Guarantee, Number:

D4.MBU/2011, tanggal 28 Juli 2011, Tentang Penetapan Penghasilan Tahun 2011 Dan Tantiem Tahun Buku 2010 Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Remunerasi Dewan Pengawas

Sesuai Keputusan Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Nomor : KEP-24/D4.MBU/2011, tanggal 28 Juli 2011, Tentang Penetapan Penghasilan Tahun 2011 Dan Tantiem Tahun Buku 2010 Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Penghasilan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo terdiri dari:

- 1) Honorarium
- 2) Tunjangan:
 - a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan
 - b. Tunjangan Komunikasi
 - c. Tunjangan Santunan Purna Jabatan
 - d. Tunjangan Pakaian
 - e. Tunjangan Transportasi.
- 3) Fasilitas
 - a. Pemeliharaan kesehatan
 - b. Kebersertaan dan perkumpulan profesi
 - c. Bantuan hukum
- 4) Tantiem
 Pemberian tantiem bagi Dewan Pengawas juga mengacu pada ketentuan diatas antara lain:
 - Tantiem diberikan dalam hal BUMN memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan.
 - Tantiem diberikan apabila pencapaian ukuran Kinerja Utama (KPI) lebih dari 70% dan tingkat kesehatan dengan nilai lebih dari 70%.

KEP-24/D4.MBU/2011, dated July 28, 2011 regarding the Determination of Salary 2011 and Tantiem of Fiscal Year 2010 of Board of Directors and Board of Supervisors of Public Company (Perum) of Indonesia Credit Guarantee.

Remuneration of Board of Supervisors

In accordance with Decree of Owners of Public Company (Perum) of Indonesia Credit Guarantee Number : KEP-24/D4.MBU/2011, dated July 28, 2011, On Salary Determination for 2011 and Tantiem of Fiscal Year 2010 of Board of Directors and Board of Supervisors of Public Company (Perum) Indonesia Credit Guarantee, the Salary of Board of Supervisors of Perum Jamkrindo is composed of:

- 1) Honorarium
- 2) Allowance:
 - a. Allowance of Religious Holiday
 - b. Communication Allowance
 - c. Post Assignment Allowance
 - d. Clothing Allowance
 - e. Transportation Allowance
- 3) Facilities
 - a. Health protection
 - b. Membership and professional associations
 - c. Legal assistance
- 4) Tantiem
 Tantiem for Board of Supervisors refers to the aforementioned provisions, such as:
 - Tantiem is given within the related fiscal year
 - Tantiem is given if the Key Performance Indicator and the Company's sound performance is above 70%.

Besaran Remunerasi Dewan Pengawas Tahun 2013

The amount of the Remuneration of Supervisory Board in 2013

	Dewan Pengawas / Supervisory Board	Ketua / Chairman	Anggota / Member
1	Gaji/Honorarium / Salary/Honorarium	33.200.000	29.880.000
2	THR Per Tahun / THR Per Tahun / Allowance/Year	66.400.000	59.760.000
3	Komunikasi Per Bulan / Communication / Month	500.000	500.000
4	Pakaian per tahun / Cloths per year	10.000.000	10.000.000
5	Cuti per tahun (1xGaji/Honor per Bulan / On leave per year(1x salary/honoraria per month	-	-
6	Tunjangan Perumahan/ Per Bulan*) / Housing Allowance/Per Month*)	-	-
7	Tantiem/ Bonus TB 2013 Sblm Pph 21**) / Bonuses/TB before Pph 21**)	582.524.272	524.271.845

*) Sesuai Keputusan Menteri BUMN nomor: PER-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas BUMN, maka Direksi yang mendapatkan Tunjangan Perumahan apabila tidak mendapatkan fasilitas Rumah Jabatan

**) Sesuai Keputusan Menteri BUMN pajak Tantiem/ Bonus diterima ybs/ penerima

*) In pursuant to the Decision of Minsitry of BUMN number: PER-07/MBU/2010 dated on December 27 on the Guidelines of the Determination of Salary of Board of Directors and Supervisory Board of BUMN, therefore the Board of Directors is the one that ibtain Housing Allowance if initially had no Executive Housing facility.

**) In pursuant to the Decision of Ministry of BUMN of Bonus taxes obtained by the the receivers.

Frekuensi Pertemuan Dan Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas Dalam Pertemuan

Dewan Pengawas mengadakan rapat rutin sekali dalam setiap bulan, yaitu; Rapat Internal Dewan Pengawas yang dihadiri oleh Komite Audit, dan Komite Investasi dan Risiko Usaha serta Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi. Namun dalam hal dipandang penting, Dewan Pengawas juga melakukan rapat-rapat insidental, baik dengan Komite-komite maupun dengan Direksi.

Meeting Frequency and Attendance Level of Board of Supervisors

Board of Supervisors hold periodical meeting once a month: Internal Meeting of Board of Supervisors attended by Audit Committee, and Business Risk and Investment Committee, and Joint meeting of Board of Supervisors with Board of Directors. For matters considered important, Board of Supervisors also holds incidental meeting, both with Committee and Board of Directors.

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Meeting Attendance	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran / Percentage Attendance
CHOIRUL DJAMHARI	Ketua / Chairman	13	13	100%
ANIS BARIDWAN	Anggota / Member	1	1	100%
BANDUNG PARDEDE	Anggota / Member	13	12	92,31%
NASARUDDIN UMAR	Anggota / Member	13	12	92,31%
BOBBY HAMZAR RAFINUS	Anggota / Member	10	9	90%
DAHLAN SIAMAT	Anggota / Member	6	5	83,33%
ONY SUPRIHARTONO	Anggota / Member	-	-	-
SUBANDRIYO	Anggota / Member	-	-	-

Keterangan:

1. Pemberhentian Anis Baridwan sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo sesuai dengan SK-160/MBU/2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo tanggal 27 Februari 2013.
2. Pengangkatan Bobby Hamzar Rafinus sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo berdasarkan KEP-204/MBU/2013 tanggal 9 April 2013 .
3. Pengangkatan Dahlan Siamat sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo berdasarkan SK-297/MBU/2013

Description:

1. The dismissal of Anis Baridwan as a member of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo in line with the Decree (SK)-160/MBU/2013 on the Dismissal of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo dated February 27, 2013.
2. The appointment of Bobby Hamzar Rafinus as the member of Supervisory Board of Perum jamkrindo based on KEP-204/MBU/2013 dated April 9, 2013.
3. The appointment of Dahlan Siamat as the member of Supervisory Board of Perum jamkrindo based onSK-297/MBU/2013.

4. Pemberhentian Dahlan Siamat dan Bobby Hamzar Rafinus sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo dan pengangkatan Ony Suprihartono dan Subandriyo sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo sesuai dengan SK-435/MBU/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo tanggal 31 Desember 2013

Agenda dan Hasil Rapat Dewan Pengawas

Selain evaluasi kinerja per bulan, beberapa hasil tindakan lanjut rapat Dewan Pengawas antara lain sebagai berikut:

1. KUR

Terkait pembuatan SOP Pengawasan Pelaksanaan KUR, mengingat pentingnya SOP Pengawasan Pelaksanaan KUR tersebut bagi Perum Jamkrindo sebagai penjamin KUR perlu mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pembuatan SOP tersebut. Akan lebih baik apabila terdapat usulan kepada Komite Kebijakan penjaminan KUR untuk pembentukan Tim yang dimaksud atas dasar kesepakatan tertulis (MOU) dengan BPKP.

Terkait pembuatan surat kepada Bank pelaksana KUR yang memiliki tingkat NPL tinggi agar lebih selektif dalam memilih debitur dan sektor usaha yang akan dibiayai sehingga dapat mengurangi risiko NPL yang tinggi. Dalam pelaksanaannya pembuatan surat dimaksud diserahkan kepada cabang terkait, untuk itu perlu dimonitor pelaksanaan dan efektivitas perkembangan surat dimaksud dengan cara cabang memberikan laporan secara khusus mengenai perkembangan NPL KUR bank terkait secara periodik.

2. Perubahan Struktur Organisasi

Perubahan struktur organisasi dan penambahan hierarki serta jumlah personil SDM di lingkungan Perum Jamkrindo perlu dilakukan secara serius, termasuk pemenuhan aspek legal dan teknis operasionalnya, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dalam mendukung pengembangan Perusahaan di masa yang akan datang. Dalam hal ini, perlu penjelasan Direksi mengenai prosesnya guna memberikan gambaran kepada Dewan Pengawas secara lengkap.

4. The dismissal of Dahlan Siamat and Bobby Hamzar Rafinus as the member of Supervisory Board of Perum Jamkrindo and the appointment of Ony Suprihartono and Subandriyo as the member of Supervisory Board of Perum Jamkrindo based on SK-435/MBU/2013 on the Dismissal and the Appointment of member of Supervisory Board of Perum Jamkrindo on December 31, 2013.

Meeting Agenda and Results of Supervisory Board

In addition to performance evaluation every month, some further results of meeting of Supervisory Board include some of these followings:

1. KUR

Related to the Supervisory SOP preparation on the Implementation of KUR, the importance of the Supervisory SOP on the KUR Implementation for Perum Jamkrindo as KUR loans provider needs to get more information about the making the SOP. It would be better if there were proposals to the KUR Policy Committee for the establishment of the team based on written agreement (MOU) with the BPKP.

Related to the preparation of letters to Bank that runs KUR which has high NPL to be more selective in choosing debtors and business sectors that will be funded so that can reduce the high NPL risk. In its implementation, the letter preparation is submitted to the concerned branch, therefore, the improvement of the letter preparation needs to be monitored through the report from the branch specially on the development of NPL KUR of the concerned bank periodically.

2. Change on Organization Structure

Changes in organization structure and the addition of hierarchy as well as the HR personnel number in Perum Jamkrindo seriously needs to be done, including legal compliance and its technical operation, so as to provide optimal results in supporting the development of the Company in the future. In this case, the Board of Directors needs an explanation about the process in order to give an overview fully to Supervisory Board.

3. Program pengenalan anggota Dewan Pengawas baru

Rapat diawali perkenalan anggota baru Dewan Pengawas Perum Jamkrindo dengan menyampaikan beberapa hal terkait dengan peran dan fungsi Dewan Pengawas dalam hal berinteraksi dengan Direksi sebagai berikut:

- Dewan Pengawas adalah mitra Direksi sehingga perlu dikembangkan *trust/kepercayaan* antara Direksi dengan Dewan Pengawas.
- Dewan Pengawas akan bertindak sebagai *collegial team*.
- Dewan Pengawas juga tidak akan membiarkan Direksi mengalami kesulitan serta mengatasi dan menghadapi permasalahan yang dapat mengakibatkan penyelesaian yang berlarut-larut.
- Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, dapat dipelajari melalui materi program pengenalan Dewan Pengawas baru.

4. Penyusunan RJPP Tahun 2014-2018

Mengingat bahwa RJPP merupakan suatu rencana strategis yang memuat saran dan tujuan yang hendak dicapai Perum Jamkrindo dalam lima tahun mendatang, maka penyusunan RJPP 2014-2018 harus dilakukan dengan baik untuk mengarahkan pelaksanaan dan mengukur hasilnya.

5. BUMN Bersih

Dalam rangka Program BUMN Bersih, Direksi diminta untuk mempersiapkan perangkat yang dipersyaratkan, sesuai Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-05/MBU/2013 tanggal 30 September 2013, antara lain:

- Whistle Blowing System*
- Code of Conduct* terkini
- Melengkapi LHKPN sekurang-kurangnya 3 jenjang jabatan
- Corporate Social Responsibility*
- Kewajiban-kewajiban lain secara hukum dan etika

6. Progres pelaksanaan upgrading program TI Perum Jamkrindo

Pelaksanaan *upgrading* yang dikerjakan oleh PT Sigma Cipta Caraka mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, perlu disarankan kepada Direksi untuk

3. Introduction Program to the new members of Supervisory Board

The meeting was started with the introduction of the new members of Supervisory Board of Perum jamkrindo by delivering some things related to the role and function of Supervisory Board in interacting with Board of Directors as follows:

- Supervisory Board is a partner for Board of Directors, hence it is necessary to build trust between Board of Directors and Supervisory Board.
- Supervisory Board will act as collegial team.
- Supervisory Board also does not let Board of Directors get difficulty and address and face problems that may cause the unclear settlement.
- To gain deeper understanding, it can be gotten through the introduction program of new member of Supervisory Board.

4. RJPP Preparation 2014-2018

Considering that RJPP is a strategic plan that includes suggestions and goals to be achieved by Perum Jamkrindo in the next five years, the preparation of the 2014-2018 RJPP should be made well to direct the implementation and measure the results.

5. BUMN Bersih (BUMN Clean)

In BUMN Bersih Program, the Board of Directors is required to prepare the required devices, according Circular Letter of Minister of BUMN No. SE-05/MBU/2013 September 30, 2013, include:

- Whistle Blowing System
- Code of Conduct terkini
- Completing LHKPN at least for 3 level of position
- Corporate Social Responsibility
- Other obligations legally and ethically.

6. Upgrading progress of IT program of Perum Jamkrindo

Upgrading performed by PT Sigma Cipta Caraka got lateness in its implementation. Therefore, the Board of Directors is suggested to conduct addendum of contract clausal

dilakukan penyesuaian (*addendum*) klausul kontrak atau ada kebijakan Direksi guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran atas ketentuan pengadaan jasa konsultasi.

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan
- c. Melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
- d. Meneliti dan menelaah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan
- e. Memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan
- f. Mengadakan rapat secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan .

Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas selama tahun 2013

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasehat, selama tahun 2012, melalui mekanisme rapat tersebut, dalam tahun 2013 Dewan Pengawas telah memberikan saran/rekomendasi, nasehat, dan persetujuan dalam setiap rapat yang telah diselenggarakan, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan pelaksanaan GCG, Dewan Pengawas menyarankan agar dilakukan assessment oleh Konsultan Independen. Setelah dilakukan penunjukan Konsultan Independen, Direksi diminta untuk melakukan komunikasi dengan Konsultan tersebut, khususnya perihal kualifikasi calon assesor pelaksanaan GCG dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian tersebut. Di samping itu, sebagai kelengkapan pedoman pelaksanaan GCG, Dewan Pengawas meminta agar Audit Charter dan SPI Charter segera difinalisasi.
- 2) Terkait dengan penerapan PSAK No. 50 dan 55 serta perubahan Kebijakan Akuntansi dari cash basis menjadi accrual basis, Dewan Pengawas meminta agar pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

or policy to anticipate the violation on the regulations of consultant services procurement.

Guidelines of Board of Supervisors

Board of Supervisors is required to:

- a. Provide input and advice to the Minister regarding Long Term Corporate Plan and Work Plan and Budget recommended by Board of Directors
- b. Keep with the development of the Company's activities, giving opinion and advice to the Minister concerning problems that is of concerns to the Company's management.
- c. Immediately report to the Minister regarding the indicators of the downgrading company performance.
- d. Examine and review the Periodical Report and Annual Report prepared by the Board of Directors and sign the Annual Report
- e. Monitor and ensure the effective and sustainable implementation of GCG principles
- f. Hold meetings on a periodical basis, at the least once a month

Duty Implementation of Board of Supervisors during 2013

In order to manage the supervisor and advising for the duties, throughout 2012, through the meetings' mechanism, in 2013 the Board of Supervisors had provided advices/recommendations, suggestions, and approval at each meeting, which are listed below:

- 1) Related to the implementation of GCG, the Board of Supervisors advised on an assessment to be conducted by an Independent Consultant. Subsequent to the appointment of Independent Consultant, the Board of Directors was asked to conduct communication with the Consultant, specifically the qualification of assessor-to-be of GCG implementation and to supervise the implementation of the assessment. Besides, as the completion of GCG implementation guide, Board of Directors requested the Audit Charter and SPI Charter to be immediately finalized.
- 2) Related to the implementation of PSAK No. 50 and 55 and the change of Accounting Policies from cash basis to accrual basis, Board of Supervisors requested the implementation to be conducted in accordance with the existing regulation.

- 3) Dewan Pengawas meminta Direksi untuk menyusun masterplan/blueprint tentang pengembangan SDM dan diharapkan dengan penyempurnaan pengelolaan SDM juga dapat meningkatkan kinerja Perusahaan secara signifikan.
 - 4) Untuk menindaklanjuti terbitnya PMK Nomor 99/PMK.010/2011, Perusahaan perlu melakukan penyesuaian pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan 222/PMK.010/2008 menjadi PMK Nomor 99/PMK.010/2011, terutama berkaitan dengan:
 - a) Perhitungan Gearing Ratio,
 - b) Pengaturan portofolio Investasi dan dibuat aturan pelaksanaannya. Khusus mengenai investasi, penempatan dana agar lebih diprioritaskan dalam bentuk Deposito pada Bank-bank Pemerintah dan Obligasi Pemerintah (SUN/ SUKUK).
 - c) Pencadangan klaim,
 - d) Kemungkinan perubahan Struktur Organisasi Dewan Pengawas meminta Direksi agar menyusun kajian mengenai kemungkinan perubahan organisasi dengan beberapa alternatif penambahan Divisi dan penambahan Direktorat, tidak terfokus hanya pada penambahan Divisi.
 - e) Direksi diminta menyampaikan kajian dan implikasi perkembangan Bisnis Penjaminan dan kajian sehubungan dengan terbitnya PMK No. 99/2011 tentang Perusahaan Penjaminan.
 - 5) Dewan Pengawas telah melaksanakan pembahasan bersama RKAP 2013 antara Dewan Pengawas dengan Direksi. Berdasarkan atas pembahasan tersebut, Dewan Pengawas telah memberikan beberapa arahan untuk penyempurnaan RKAP 2013.
 - 6) Terkait dengan rencana Pembukaan KAC Jambi, Dewan Pengawas meminta Direksi agar disusun kajian kelayakannya. Di samping itu, Direksi diminta untuk menyusun dan memaparkan kebijakan yang memuat kriteria/parameter pembukaan KC/KAC dan peningkatan KAC menjadi KC.
- 3) Board of Supervisors requested the Board of Directors to compile a masterplan/Blueprint of Human Resources Development and expected to see a significant rise in the Company's performance due to the improvement of Human Resources Management.
 - 4) To follow up the issued PMK Number 99/PMK.010/2011, it is necessary for the Company to conduct an adjustment of implementation of the Regulation of Minister of Finance 222/PMK.010/2008 to 99/PMK.010/2011, specifically related to:
 - a) Calculation of Gearing Ratio,
 - b) The handling of Investment portfolio and creating the implementation's rules. In case of the investment, the placement of fund was advised to be more prioritized in a form of deposits in Governmental Banks and Governmental Bonds (SUN/SUKUK).
 - c) Claim Allowance
 - d) The possibility of a change in the structure of Organization. The Board of Supervisors asked the Board of Directors to compile a study regarding the possibility of a change in the structure of the organization with some alternatives of additional divisions and directorates, focuses not only on the addition of Divisions.
 - e) The Board of Directors was asked to submit a study and implication of the development of Guarantee Business and a study regarding the issued PMK No. 99/PMK.010/2011 of Guarantee Company.
 - 5) Board of Supervisors had conducted a co-discussion of RKAP 2012 with the Board of Directors. Based on the discussion, Board of Supervisors had provided some suggestions to improve RKAP 2012.
 - 6) Related to the plan of Opening of JAC Jambi, Board of Supervisors requested the Board of Directors to compile the qualification study. Besides that, Board of Directors was also requested to compile and present the policies containing the criteria/parameters of KC/KAC opening and the improvement of KAC to KC.

7) Terkait dengan arahan Kementerian BUMN kepada Direksi untuk melakukan kajian Aspek Legal dan Bisnis atas Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perum menjadi Persero, Dewan Pengawas meminta Direksi untuk menyusun kajian dengan menunjuk Konsultan Independen.

Program Pelatihan Dewan Pengawas

Pada tahun 2013, Dewan Pengawas Perum Jamkrindo telah mengikuti ACSIC Conference ke-26 yang diselenggarakan Korea Technology Finance Corporation pada 11-15 Nov 2013.

KOMISARIS INDEPENDEN

Perusahaan tidak memiliki Komisaris Independen karena seluruh Dewan Pengawas Perum Jamkrindo berasal dari instansi pemerintah.

KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DEWAN PENGAWAS

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungnya, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Audit dan Komite Investasi dan Risiko Usaha.

Pembentukan Komite Audit serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah R.I. No. 41 tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Peraturan Pemerintah R.I. No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.

Sedangkan pembentukan Komite Investasi dan Risiko Usaha pada awal bulan Desember 2011 didasarkan pada Peraturan Pemerintah R.I. No. 41/2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Negara BUMN No. S-328/MBU.4/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG Perum Jamkrindo Tahun 2010 dengan memperhatikan kondisi bahwa:

7) Related to the direction of Ministry of State-Owned Enterprises to Board of Directors to conduct a study of Legal and Business Aspects of the Change of Legal Form from Perum to Persero, Board of Supervisors requested the Board of Directors to compile a study by appointing an Independent Consultant.

Training Program of Board of Supervisors

In 2013, the Company's Board of Supervisors has attended 26th ACSIC Conference held by Korea Technology Finance Corporation in November 11-15, 2013.

INDEPENDENT COMMISSIONER

The Company does not have Independent Commissioner as all Board of Supervisors comes from Government Institutions.

THE COMMITTEES UNDER THE BOARD OF SUPERVISORS

In conducting their duties and responsibilities, the Board of Supervisors is assisted by the Audit Committee and the Investment and Business Risk Committee.

The establishment of the Audit Committee and the implementation of the duties and responsibilities is based on the Government Regulation R.I No. 41 year 2008 regarding Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Government Regulation No. 45 Year 2005 on Establishment, Arrangement, supervision, and dissolution of State-Owned Enterprises, and Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2006 regarding the Audit Committee for State-Owned Enterprises.

Whilst the establishment of the Investment and Business Risk Committee at the beginning of December 2011 was based on the Government Regulation No. 41/2008 regarding Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia as the follow up of Official Letter of Minister of State-Owned Enterprises No. S-328/MBU.4/2011 dated 25 October 2011 regarding the Report of Assesment Result of Perum Jamkrindo's implementation of GCG in 2010 by minding the conditions which:

- 1) Perum Jamkrindo mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi, yang menghadapi risiko tinggi, terutama risiko pembayaran klaim (tagihan ganti rugi dari pihak perbankan selaku pemberi kredit) akibat kredit macet.
- 2) Perum Jamkrindo mengelola dana dalam jumlah relatif besar yang pengelolaannya perlu diselenggarakan dengan baik melalui penempatan pada berbagai instrumen investasi keuangan dengan memperhatikan keamanan dan optimalisasi pendapatan.

- 1) Perum Jamkrindo has a major duty in conducting a credit guarantee for Micro, Small, and Middle Enterprises, also Cooperatives, which face high risk, especially the claim payment risk (compensation bill from the bank as the credit provider) due to non-performing credit.
- 2) Perum Jamkrindo manages a relatively huge amount of funds which management needs to be arranged carefully through placements in various financial investments instruments by minding the safety and optimization of income.

DIREKSI

Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan (vide pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1) Jumlah, Komposisi, dan Independensi Anggota Direksi

Direksi Perum Jamkrindo berjumlah 5 orang pada tahun 2013, yang seluruhnya diangkat oleh Menteri BUMN, melalui Keputusan Menteri Negara BUMN:

Nama Direksi / Name of Board of Directors	Jabatan / Position
Diding S. Anwar	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor: SK-316/MBU/2012 tanggal 7 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, mengangkat Sdr. Diding S. Anwar sebagai Direktur Utama dan Sdr. Bakti Prasetyo sebagai Direktur Pengembangan.
Bakti Prasetyo	Decree of the Ministry of BUMN as Capital owner of Perum Jamkrindo Number: SK-316/MBU/2012 dated 7 September 2012 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo, Apointing Mr. Diding S. Anwar as President Director and Mr. Bakti Prasetyo as Director of Development.

BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors is the Company's instrument responsible for the Company's governance for the interest and objective of the Company, as well as representing the Company both inside and outside the court (Article 1 verse 4 Government Regulation No. 41 Year 2008 On Public Company (Perum) Indonesia Credit Guarantee).

Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Directors

1) Number, Composition, and Independency of Members of Board of Directors

Board of Directors of Perum Jamkrindo has 5 personnel in 2013, all of whom is appointed by Minister of SOE by virtue of Decree of State Minister of SOE:

Nama Direksi / Name of Board of Directors	Jabatan / Position
Herry Sidharta	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor: SK-78/MBU/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, mengangkat Sdr. Herry Sidharta sebagai Direktur Keuangan. Decree of the Ministry of BUMN as Capital owner of Perum Jamkrindo Number: SK-78/MBU/2011 dated 30 March 2011 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo, Apointing Mr. Herry Sidharta as Director of Finance.
I Rusdonobanu	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo Nomor: SK-12/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Jamkrindo, mengangkat Sdr. Nanang Waskito sebagai Direktur SDM dan Umum, Sdr. I Rusdonobanu sebagai Direktur Keuangan dan Investasi.
Nanang Waskito	Decree of the Minister of BUMN as Capital owner of Perum Jamkrindo Number: SK-12 / MBU/2013 dated January 15, 2013 on Dismissal, Change of Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo, Appointing Mr. Nanang Waskito as Director of Human Resources and General, Mr. I Rusdonobanu as Director of Finance and Investment.

175

2) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Tugas Pokok Direksi:
1. Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku Pimpinan dalam pengurusan tersebut.
 2. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
 3. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
- b) Tanggung Jawab Direksi:
1. Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan peraturan dan pengelolaan Perusahaan, serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Perusahaan dan mewakili Perum Jamkrindo di dalam dan di luar pengadilan.
 2. Secara bersama-sama atau individual, bertanggungjawab segala kerugian yang timbul pada kekayaan Perusahaan akibat tindakan Direksi yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau

2) Duties and Responsibilities

- a) Main duties of Board of Directors:
1. Managing the Company for the interest and objective of the Company and taking action as Chairman within the management.
 2. Representing the Company inside and outside the court
 3. Maintaining and managing the Company's property.
- b) Responsibilities of Board of Directors:
1. Board of Directors is responsible for the Company's management and enactment of regulation and perform legal action for and on behalf of the Company, as well as represent Perum Jamkrindo both inside and outside the court.
 2. Collectively or individually responsible for any loss in the Company's assets due to violation or neglecting action by Board of Directors, as regulated in the Company Regulation and laws.

kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan.

3. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Pengawas secara tepat waktu dan lengkap.
4. Tanggung jawab lain sesuai ketentuan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Ensuring the timely and complete delivery of company information to Board of Supervisors.
4. Other responsibilities in accordance with provisions of the Company and applicable laws.

176

c) Tugas dan Wewenang Masing-masing Direksi

c) Tugas dan Wewenang Masing-masing Direksi

Nama / Name	Jabatan / Position	Tugas dan Wewenang	Duties and Authority
Diding S. Anwar	Direktur Utama President Director	a. Pengawas Intern b. Sekretariat c. Humas d. Riset dan Perencanaan e. Pengembangan Produk dan Usaha	a. Internal Supervision b. Secretariat c. Public Relation d. Research and Planning e. Product and Business Development
Bakti Prasetyo	Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi Director of Risk Management and IT	a. Manajemen Risiko b. Teknologi Informasi c. Klaim dan Subrogasi	a. Risk Management b. Technology Information c. Claim and Subrogation
Nanang Waskito	Direktur SDM dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	a. Administrasi SDM b. Pengembangan SDM dan Organisasi c. Umum d. Pengelolaan Aset e. Hukum dan Kepatuhan	a. HR Administration b. HR Development c. General d. Asset Management e. Law and Compliance
Herry Sidharta	Direktur Operasi Director of Operations	a. Penjaminan Syariah b. Pengendalian Penjaminan Syariah c. Penjaminan Kredit Produktif d. Penjaminan Kredit Konsumer e. Pengendalian dan Penjaminan Ulang f. Penjaminan Kredit Program g. Pengendalian Penjaminan Kredit Program	

Nama / Name	Jabatan / Position	Tugas dan Wewenang	Duties and Authority
I Rusdonobanu	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	a. Anggaran b. Treasury c. PKBL d. Investasi e. Akuntansi f. Pelaporan	a. Investment b. Treasury c. Partnership & Environmental Community Development d. Investment e. Accounting f. Reporting

177

d) Rapat Direksi:

1. Pelaksanaan Rapat Direksi

- Direksi wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu bulan sekali, atau atas usul dari sesama anggota Direksi dengan menyebutkan agenda atau hal-hal yang akan dibicarakan.
- Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama atau apabila Direktur Utama berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh anggota Direksi yang hadir atau diwakili.

2. Keputusan Rapat Direksi

- Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- Semua keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah dan apabila dengan cara musyawarah tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- Kuorum (jumlah minimal kehadiran yang harus dipenuhi) dapat tercapai bila setidaknya setengah dari jumlah anggota Direksi hadir dalam rapat.
- Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- Dalam keadaan dimana rapat Direksi tidak dapat diadakan seperti biasa, maka dapat diambil keputusan yang sah tanpa dilakukannya rapat Direksi, dengan ketentuan

d) Board of Directors Meeting:

1. Implementation of Meeting of Board of Directors

- Board of Directors is required to hold meeting at the least once a month, or by recommendation of other members with clear agenda.
- Meeting of Board of Directors is chaired by President Director or if the President Director is absent, the meeting will be chaired by one of members appointed by the attending members or representatives of the Board of Directors.

2. Resolution of Meeting of Board of Directors

- All resolutions are made in the meeting.
- All resolutions of the meeting is taken by consensus agreement. If the agreement is not reached, the decision will be made through voting.
- The quorum (minimum attendance level that should be met) is reached when a half of the members attend the meeting.
- A member of Board of Directors can only be represented in the meeting by other member of the Board of Directors based on letter of authority.
- Within the condition where the meeting is held beyond schedule, decision can be officially made without Board of Directors' meeting, provided that all members of Board of Directors

semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat memberikan persetujuan dalam rapat serta memberikan persetujuan dengan menandatangani persetujuan tersebut.

has been informed in a written consent and all members attending the meeting give approval by signing the agreement.

3. Risalah Rapat Direksi:

- a. Dalam setiap rapat harus dibuat risalah rapat. Risalah rapat harus menyajikan dinamika rapat yaitu segala hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk bila ada perbedaan pendapat dalam rapat Direksi.
- b. Risalah rapat Direksi dibuat oleh petugas yang ditunjuk atau salah satu anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
- c. Risalah rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat dan salah seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat Direksi tersebut.
- d. Risalah rapat Direksi menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Pengawas dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat Direksi.
- e. Segala hal yang diputuskan dalam rapat Direksi harus dibuat Berita Acara.
- f. Risalah rapat Direksi harus diberikan kepada semua anggota Direksi paling lambat 1 (satu) minggu setelah rapat diadakan, dan koreksi atas risalah tersebut sudah harus diterima paling lambat 1 (satu) minggu setelah itu.
- g. Risalah rapat Direksi ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir. Risalah rapat Direksi yang asli disimpan oleh salah seorang yang ditunjuk Direksi untuk menyimpan dokumentasi tersebut, sedangkan setiap anggota Direksi menyimpan fotokopi dari risalah tersebut.

3. Minutes of Meeting of Board of Directors

- a. A minutes of meeting is necessary to be made in every meeting. The minutes of meeting shall provide the dynamics of the meeting, which are everything discussed and decided, including the opinions' differences in the meeting of Board of Directors.
- b. The minutes of meeting of Board of Directors is made by the appointed person or one of the Board of Directors' members who are present in the meeting.
- c. The minutes of meeting is signed by the chief of the meeting and one of the other members of Board of Directors who is appointed to ensure the completeness and accuracy of the aforementioned Board of Directors' Minutes of Meeting.
- d. The minutes of meeting of Board of Directors has become the legitimate proof for all members of Board of Supervisors and the third parties regarding the decisions and any other matters which take place in the meeting of Board of Directors.
- e. Each decision made in the meeting of Board of Directors shall be documented into a Minutes of Meeting.
- f. The minutes of meeting of Board of Directors shall be distributed to ever member of Board of Directors no longer than a week after the meeting is held, and the corrections of the minutes of meeting shall be distributed a week after the first distribution.
- g. The minutes of meeting of Board of Directors is signed by the present members of Board of Directors. The genuine minutes of meeting of Board of Directors is stored by the person appointed by the Board of Directors to store the document, whilst each member of Board of Directors is given the copies of the minutes of meeting.

- h. Risalah rapat Direksi harus sudah disahkan sebelum rapat berikutnya diadakan.
- i. Risalah rapat adalah satu dari buku, catatan dan dokumen yang wajib dipelihara oleh Direksi dalam rangka pengelolaan Perusahaan.

Kebijakan Kepengurusan Perusahaan

Kebijakan Kepengurusan Perusahaan ditetapkan oleh Direksi. Dalam melaksanakan Kepengurusan Perusahaan Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan, dengan syarat semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.

Jika Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, maka ditetapkan salah seorang Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dengan urutan sebagai berikut:

- a. Salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Direksi yang ada berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- c. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada butir (b) tidak dilakukan, salah seorang Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
- d. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang. Direktur sebagaimana dimaksud pada butir (c) yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnyanya di tahun 2013 anggota Direksi melakukan tugasnya berdasarkan SK Direksi nomor 78/Kep-Dir/XI/2012 tanggal 26 November 2012 dengan pembagian supervisi Direktur atas Divisi dan Kantor Cabang, sebagai berikut:

- h. The minutes of meeting of Board of Directors shall be approved before the next meeting takes place.
- i. The minutes of meeting is a part of the books, notes, and documents which shall be maintained by the Board of Directors in managing the Company.

Management Policy of the Company

The Company Management Policy is stipulated by Board of Directors. In conducting the management of the Company, the President Director is rightfully legal and authorized to conduct the management on behalf of the Board of Directors and the Company, in condition of acquiring the approval in the meetings of Board of Directors.

If the President Director is not present due to any circumstances, it is required that one of the authorized Directors to act for and on behalf of Board of Directors by the sequence listed below:

- a. One of the Directors appointed by President Director is authorized to act for and on behalf of Board of Directors
- b. If the President Director has not appoint anybody, one of the Directors appointed by and amongst the present members of Board of Directors may act for and on behalf of the Board of Directors
- c. If what is stated on point (b) has not been conducted, one of the Directors whose service period as the members of Directors is the longest, may act for and on behalf of the Board of Directors
- d. If there are more than one Director whose service period is the longest, the intended Director in point (c) is the oldest one of the Board, who may act for and on behalf of the Board of Directors.

In conducting the duties and authorizations amongst the members of Board of Directors, based on the Deed of Board of Directors number 78/Kep-Dir/XI/2012 dated 26 November 2012, the supervision duty of Divisions and Branch Offices by the Directors are as listed below:

- a) Direktur Utama;
Membawahi Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Perusahaan, Divisi Hukum dan Kepatuhan dan seluruh Kantor Cabang.
- b) Direktur Penjaminan;
Membawahi Divisi Penjaminan 1, Divisi Penjaminan 2, dan Divisi Penjaminan Syariah, serta seluruh Kantor Cabang.
- c) Direktur Keuangan;
Membawahi Divisi Keuangan, Divisi Umum, Divisi Investasi, dan seluruh Kantor Cabang.
- d) Direktur Pengembangan;
Membawahi Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Perencanaan dan Pengembangan, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Manajemen Risiko dan seluruh Kantor Cabang.

Kemudian di tahun 2013 anggota Direksi menjalankan tugas dan wewenangny berdasarkan Keputusan Direksi No. 04/2013, tanggal 15 Januari 2013 dengan pembagian supervisi Direktur atas Divisi dan Kantor Cabang, sebagai berikut:

- Direktur Utama membawahi SPI, Sekretaris Perusahaan dan Divisi Perencanaan dan Pengembangan.
- Direktur Operasi membawahi Divisi Penjaminan Komersial, Divisi Penjaminan Program, Divisi Penjaminan Syariah.
- Direktur Keuangan & Investasi membawahi Divisi Keuangan, Divisi Akuntansi dan Divisi Investasi.
- Direktur SDM & Umum membawahi Divisi Umum, Divisi SDM, Divisi Hukum & Kepatuhan.
- Direktur Manajemen Risiko & TI membawahi Divisi Manajemen Risiko, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Klaim & Subrogasi.

Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Pengawas Dan Direksi

Selama tahun 2013, Dewan Pengawas dan Direksi telah menyelenggarakan rapat yang ditujukan untuk optimalisasi sistem tata kelola perusahaan dalam proses pengawasan dan pengelolaan Perusahaan. Secara rinci, frekuensi rapat yang dilakukan sebagai berikut:

- a) President Director;
Responsible for Internal Control Unit, Corporate Secretary, Division of Law, Compliance, and the entire Branch Offices.
- b) Director of Guarantee
Responsible for Division of Guarantee 1, Division of Guarantee 2, and Division of Sharia Guarantee, and the entire Branch Offices.
- c) Director of Finance
Responsible for Division of Finance, Division of General Affairs, Division of Investment, and the entire Branch Offices.
- d) Director of Development
Responsible for Division of Human Resources, Division of Planning and Development, Division of Information Technology, Division of Risk Management and the entire Branch Offices.

In 2013, members of Board of Directors perform their duties and authorities based of Decree of Board of Directors Number. 04/2013 dated January 15, 2013 with the segregation of Board of Directors' supervisory function for Divisions and Branch Office as follows:

- President Director oversees SPI, Corporate Secretary, and Planning and Development Division.
- Director of Operations oversees Commercial Guarantee Division, Program Guarantee Division, and Sharia Guarantee Division.
- Director of Finance & Investment oversees Finance Division, Accounting Division, and Investment Division.
- Director of Human Resources and General Affairs oversees General Affairs Division, Human Resources Division, and Law & Compliance Division.
- Director of Risk Management & IT oversees Risk Management Division, Information Technology Division, and Claim & Subrogation Division.

Attendance percentage of Joint Meeting of Supervisory Board and Board of Directors

During 2013, Supervisory Board and Board of Directors held meeting aimed to optimize the supervisory process and the Company's management. In details, the meeting frequency conducted is described as follows

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Meeting Attendance	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran / Percentage Attendance
DEWAN PENGAWAS / Board of Supervisors				
Choirul Djamhari	Ketua Dewan Pengawas / Chairman of Board of Supervisors	16	16	100%
Anis Baridwan	Anggota Dewan Pengawas / Member of Board of Supervisors	16	16	100%
Bandung Pardede	Anggota Dewan Pengawas / Member of Board of Supervisors	16	14	87,50%
Nasaruddin Umar	Anggota Dewan Pengawas / Member of Board of Supervisors	16	14	87,50%
Bobby Hamzar Rafinus	Anggota Dewan Pengawas / Member of Board of Supervisors	11	10	90,91
Dahlan Siamat	Anggota Dewan Pengawas / Member of Board of Supervisors	7	6	85,71%
Ony Suprihartono	Anggota Dewan Pengawas / Member of Board of Supervisors	-	-	-
Subandriyo	Anggota Dewan Pengawas / Member of Board of Supervisors	-	-	-
DIREKSI / Board of Directors				
Diding S. Anwar	Direktur Utama / President Director	16	16	100%
Herry Sidartha	Direktur SDM dan Umum / Director of Human Resources and General Affairs	16	16	100%
I. Rusdonobanu	Direktur Keuangan & Investasi / Director of Finance and Investment	16	15	93,75%
Nanang Waskito	Direktur SDM dan Umum / Director of Human Resources and General Affairs	16	15	93,75%
Bakti Prasetyo	Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi / Director of Bank Guarantee	16	16	100%

Pelatihan Direksi 2013

Board Of Directors Training 2013

No	Nama pelatihan/ Workshop	Pelaksana Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Peserta	Biaya Pelatihan	Biaya Lain- Lain (uang transport, SPPD)	Jumlah Biaya
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Annual fee membership Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) tahun 2013	PKES	2013	PKES	Direktur Utama	Rp24,000,000	Rp0	Rp24,000,000
2	ACSIC Conference ke 26	Korea Technology Finance Corporation	11-15 Nov 2013	Busan, Korea	Herry Sidharta, I. Rusdonobanu, Haryoko W., Hamim Bugi A., Rino Hapsoro, Bobby Hamzar R (Dewas), Djoko Waluyo (Asdep Pasar Modal dan LK), Heri Susanto (Kepala Bidang Perbankan, Kedeputian Korbid Fiskal dan Moneter)			Rp0
3	Workshop CRGP (Certified Risk Governance Profesional) & Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko	Hotel Best Western Premier	12-14 Des 2013	Hotel Best Western Premier Bali	Bakti Prasetyo, Nanang Waskito, Endang Sri Winarni	Rp24,000,000	Rp125,000	Rp24,125,000
Jumlah								Rp48,125,000

KEBIJAKAN MENGENAI RENCANA SUKSESI DIREKSI

Sukseksi Direksi menjadi momentum membangun tradisi alih generasi dan *role model* bagi Perum Jamkrindo, selain sebagai tantangan bagi Direksi terpilih dan segenap karyawan untuk menjawabnya dengan prestasi dan kinerja terbaik.

Untuk memastikan perusahaan dikelola oleh manajemen yang memiliki keahlian dan kompetensi yang semestinya, Perusahaan melakukan proses suksesi Direksi dimana penetapan calon Direksi Perum Jamkrindo ditetapkan berdasarkan pemenuhan Peraturan Menteri Negara BUMN NOMOR: PER-04/MBU/2009 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/pojk.05/2014. Adapun proses pemilihan Direksi dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Eselon I terkait dan Sekretaris Kementerian. Proses penyeleksian oleh Tim Evaluasi, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemanggilan terhadap Calon Anggota Direksi yang termasuk dalam Daftar Calon yang telah disetujui oleh Menteri, untuk mengikuti UKK.
2. Melakukan pengujian terhadap Calon Anggota Direksi, jika pengujian tidak menggunakan Lembaga Profesional;
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian Lembaga Profesional, jika pengujian menggunakan Lembaga Profesional;
4. Mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi atas penilaian yang dilakukan.
5. Menetapkan hasil akhir evaluasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim Evaluasi, untuk disampaikan kepada Menteri guna mendapatkan penetapan;
6. Menyampaikan seluruh dokumen UKK kepada Sekretaris Kementerian untuk diadministrasikan;
7. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri dalam rangka memperlancar proses UKK.

POLICY ON THE SUCCESSION PLAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

The succession of the Board of Directors becomes a momentum to build regeneration tradition and role model for Perum Jamkrindo, besides as challenges for the selected Board of Directors and employees to prove their achievement and best performance.

To ensure that the company is managed by the management having required skills and competency, the Company undertook success process for the Board of Directors, in which the nomination of Perum Jamkrindo's Board of Directors is determined based on the Regulation of the Minister of SOE NUMBER: PER-04/MBU/2009 and Regulation of the Financial Services Authorities Number 5/pojk.05/2014. The selection process of the Board of Directors is conducted by the Evaluation Team determined by the Ministry based on the proposal from the Echelon I concerned and the Secretary to the Ministry. The selection process by the Evaluation Team is as follows:

1. Call the candidates of the Board of Directors included in the List of Candidates approved by the Minister to attend UKK.
2. Test the candidates, in the event that Professional Institution is not hired for the job;
3. Evaluate the test results from the Professional Institutions, if using their services;
4. Make decision and give recommendation on the assessment.
5. Determine final result of the evaluation signed by the Chairman and Vice Chairman of the Evaluation Team to be submitted to the Minister for approval;
6. Submit all documents of UKK to the Secretary to the Ministry for administration;
7. Perform other duties given by the Minister to run the smooth process of UKK.

Tim Evaluasi memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menentukan calon terbaik. Sedangkan pembobotan dalam penilaian terhadap persyaratan materil calon Direksi, adalah sebagai berikut:

- a. Integritas dan moral diberikan bobot penilaian sebesar 35% dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur), diberikan bobot sebesar 10%;
 2. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
 3. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
 4. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 5%;
- b. Kompetensi teknis/keahlian diberikan bobot penilaian sebesar 55% dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pengetahuan di bidang usaha BUMN yang bersangkutan diberikan bobot 5%
 2. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan diberikan bobot 10%
 3. Pengalaman dalam pengelolaan BUMN/Perusahaan/Lembaga diberikan bobot 10%.
 4. Kemampuan memimpin dan bekerja sama diberikan bobot 10%
 5. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN diberikan bobot 20%.
- c. Psikologis diberikan bobot penilaian sebesar 10%,

The Evaluation Team provides recommendation to the Minister to determine the best candidates. The percentage of the material requirements of the Board of Directors' candidates is as follows:

- a. Integrity and moral takes up 35% of the total score. The details are:
 1. Never being involved in making-up and deviation action while working in their former position before nomination (committed to dishonesty), the score is 10%.
 2. Never being involved in breach of agreement which may be categorized as not committed to comply with the agreement made while working in their former position before nomination (committed to dishonesty), the score is 10%.
 3. Never being involved in an action categorized as corruption of which benefit is for personal or other parties before nomination (unethical behavior), the score is 10%;
 4. Never being involved in an action categorized as violation to provisions related to the principles of healthy company management (unethical behavior), the score is 5%.
- b. Technical competency/expertise is given 55% of the total score with the following detail:
 1. Knowledge in business activities of the related SOE, the score is 5%
 2. The understanding on management and corporate governance is given 10%
 3. Experience in SOE management/Company/Institution is given 10%
 4. Capacity of leadership and cooperation is given 10%
 5. Capacity to formulate and implement strategic policies in developing SOE is given 20%
- c. Psychology is given 10%.

ASSESSMENT DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Proses Pelaksanaan Assessment

Secara keseluruhan, RUPS merupakan pihak yang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam tahun yang bersangkutan. Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun buku 2013 dilakukan dalam RUPS Perum Jamkrindo akan diselenggarakan di tahun 2014.

Kriteria dan Penilaian terhadap Dewan Komisaris

Indikator penerapan GCG untuk Dewan Komisaris/Dewan Pengawas disampaikan sebanyak 12 (dua belas) indikator, yaitu:

1. Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan.
2. Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
3. Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
4. Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
5. Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
6. Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak Perusahaan/ Perusahaan patungan.
7. Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.
8. Dewan Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.
9. Dewan Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

ASSESSMENT OF BOARD OF SUPERVISORS AND BOARD OF DIRECTORS

Assessment Implementation Process

The GMS is responsible for conducting assessment on the performance of Board of Supervisors and Board of Directors in relation to the implementation of duties and responsibilities within the related year. The accountability of duties and responsibilities implementation of Board of Supervisors and Board of Directors for the financial year of 2013 is conducted in Perum Jamkrindo GMS in 2014.

Criteria and Assesment on Board of Commissioners

The indicator of GCG implementation for Board of Commissioners/ Supervisory Board was delivered in 12 (tweleve) indicators, namely:

1. Supervisory Board conducted training/learning programs sustainably.
2. Supervisory Board held division of duties, aythorities and responsibilities clearly and determined factors needed to support the implementation of Supervisory Board's duties.
3. Supervisory Board gave approval on the RJPP plan and RKAP delivered to Board of Directors.
4. Supervisory Board provided advice to Board of Directors on the implementation the Company's plans and policies.
5. Supervisory Board conducted supervisory to Board of Directors on the implementation of the Company's plans and policies.
6. Supervisory Board performed supervisory to the implementation of the management policies of Subsidiaries.
7. Supervisry Board palyed a part of Directors' members nomination, assessed the performance of Board of Directors (individual and collegial) and proposed performance bonuses/incentives based on the applicable regulations and considered the Board of Directors' Performance
8. Supervisory Board took anticipation to the potential conflict of interest related to themesleves
9. Supervisory Board monitored and ensured that the practices of good corporate governance of the Company have been implemented effectively and continuously.

10. Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kesekretariatan Dewan Pengawas.
12. Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Pengawas yang efektif.

10. Supervisory Board conducted meeting of Supervisory Baord effectively and attended the meeting in accordance with the legislations.
11. Supervisory Board has a Secretary for Supervisory Board to support the secretarial of Supervisory Board
12. Supervisory Board has effective Committee of Supervisory

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap penerapan 12 (dua belas) indikator diatas melalui pengujian 43 (empat puluh tiga) paramater dengan skor yang dicapai **31,308** dari bobot **35,00** atau setara prosentase pencapaian sebesar **89,45%**.

Based on the assessment results to the implementation of 12 indicators above through the assessment of 43 (forty three) parameters with the score achieved by **31.308** out of **35.00** or the percentage of the accomplishment at **89.45%**.

Kriteria dan Penilaian Terhadap Direksi

Indikator penerapan GCG untuk Direksi adalah sebanyak 13 (tiga belas) indikator, yaitu:

1. Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
2. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.
3. Direksi menyusun perencanaan Perusahaan.
4. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan.
5. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
6. Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.
7. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan *stakeholders*.
8. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajamen di bawah Direksi.
9. Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Modal tepat waktu.
10. Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Criteria and Assessment on board of Directors

Indicator of GCG implementation to Board of Directors in 13 (thirteen) indicators, namely:

1. Board of Directors conducted training/learning program sustainably.
2. Board of Directors conducted division of duties/function, authorities and responsibilities clearly.
3. Board of Directors planned the Company's projects
4. Board of Directors took part in the Company's target fulfilment.
5. Board of Directors performed operational and financial control on the implementation of the Company's plans and policies.
6. Board of Directors performed the Company's management based on the applicable regulations and Artcles of Association.
7. Board of Directors performed cooperation tgat added values for the Company and stakeholders.
8. Board of Directors monitored and managed the potential conflict of interest of Directors' members and management under Board of Directors.
9. Board of Commissioners ensures that the Company performed information and communication transparency based on the applicable regulations and information delivery to Supervisory Board and the Capital Owner timely.
10. Board of Directors conducted of Board of Directors Meeting and attended the meeting based on the legislation.

11. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.
12. Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif.
13. Direksi menyelenggarakan RPB Tahunan dan RPB lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap penerapan 13 (tiga belas) indikator diatas melalui pengujian 52 (lima puluh dua) parameter dengan skor yang dicapai **32,312** dari bobot **35,00** atau setara prosentase pencapaian sebesar **92,32%**.

11. Board of Directors is required to conduct qualified and effective internal supervisory.
12. Board of Directors conducted the function of qualified Corporate Secretary
13. Board of Directors conducted Annual RPB and other RPB in line with the regulations and laws.

Based on the assessment results to the implementation of 13 indicators above through the assessment of 52 (fifty two) parameters with the score achieved by **32.312** out of **35.00** or the percentage of the accomplishment at **92.32%**.

URAIAN TENTANG REMUNERASI DIREKSI

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Besarnya remunerasi yang diterima oleh setiap anggota Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.

Remunerasi Direksi Perusahaan diusulkan dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan membahas pertimbangan usulan, hasil survey dengan industri sejenis dan sektor lainnya, bersama-sama Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS, dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri di atas dan kemampuan Perusahaan, untuk kemudian ditetapkan dalam RUPS. Untuk tahun 2013 penetapan dilakukan saat Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2012 yang dilaksanakan pada Senin 30 April 2013.

Dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1. Penghasilan Direksi, terdiri dari:
 - a. Gaji/ Honorium per bulan;
Besaran Faktor Jabatan Direksi ditetapkan dengan komposisi:
 - i. Faktor Jabatan Direktur Utama : 100%
 - ii. Faktor Jabatan Direktur : 90% dari Direktur Utama

DESCRIPTION OF REMUNERATION OF BOARD OF DIRECTORS

Remuneration Determination Procedure of Board of Directors

The amount of remuneration received by members of Board of Directors refers to Regulation of State Minister of State Owned Enterprise of the Republic of Indonesia Number: PER-07/MBU/2010 on Income Determination Guidelines of Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State Owned Enterprise and its amendments.

Remuneration of Board of Directors is proposed in Board of Commissioners' Meeting, which discusses the consideration of input, survey results with similar industry and other sectors. The proposal was submitted together with Board of Commissioners to the GMS, by referring to the Minister's Regulation above and the Company's ability, to then be stipulated in the GMS. In 2013, the stipulation was conducted during the Ratification of Financial Report for Financial Year 2012 conducted on Monday, April 30 2013.

Details of calculation are as follow:

1. Board of Directors' Salary, including:
 - a. Salary/Honorarium per month;
The Scale of Position of Board of Directors is determined with the composition:
 - i. President Director Position: 100%
 - ii. Director: 90% of the President Directors'

b. Tunjangan;

Tunjangan Direksi diberikan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- i. Atas persetujuan RUPS/Menteri, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, telah diberikan sebesar 2 (dua) kali Gaji/ Honorium sesuai dengan maksimal pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
- ii. Tunjangan Komunikasi bagi Direksi sebesar pemakaian (at cost).
- iii. Selama Tahun Buku 2013 tidak ada dicairkan Asuransi Santunan Purna Jabatan, namun premi sebesar per tahun maksimum 25% kali Gaji/ Honorium setahun, yang telah dianggarkan dalam RKAP dan ditetapkan oleh RUPS tetap dibayarkan Perusahaan.
- iv. Tunjangan pakaian, sesuai yang dianggarkan dalam RKAP.
- v. Tunjangan Cuti Tahunan diberikan setiap tahun sebanyak 1 (satu) kali Gaji/Honorium, setelah Direksi bekerja Selama minimal 6 (enam) bulan berturut-turut.
- vi. Tunjangan Cuti Besar, diberikan paling banyak 2 (dua) kali Gaji/Honorium per bulan apabila Direksi bekerja 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam satu periode jabatan. Selama Tahun Buku 2013 Perusahaan tidak mengeluarkan Tunjangan Cuti Besar.
- vii. Perusahaan tidak memberikan fasilitas Rumah Jabatan namun Tahun Buku 2013 Perusahaan telah memberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Gaji/Honorium dengan ketentuan paling banyak Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta).
- viii. Tunjangan Biaya Utilitas diberikan at cost paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Tunjangan Perumahan.
- ix. Pajak Tunjangan ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.

b. Allowance;

Board of Directors is given allowance in accordance with the Company's financial condition and the rules and regulations.

- i. Pursuant to the approval from GMS/Minister, the Religious Allowance is given 2 (two) times the Salary / Honorium in line with the maximum provision of Religious allowance.
- ii. Communication Allowance is given at cost.
- iii. During the Financial Year of 2013 there were no disbursment of Post Assignment Allowance. However, the Company shall pay the premier with the amount of 25% times the annual Salary/ Honorium, which had been budgeted in RKAP and ratified by the GMS.
- iv. Clothing allowance, in accordance to the budget in RKAP.
- v. Annual Leave Allowance was given as many as 1 (one) time every year, after Board of Directors had worked for the minimum of 6 (six) months consecutively.
- vi. Grand Leave Allowance is given at the maximum of 2 (two) times the Salary/Honorium per month should the Board of Directors had worked for 3 (three) months consecutively in one office period. During the Financial Year 2013 the Company did not issue the Grand Leave Allowance.
- vii. The Company did not give Home Office facility. However, for the Financial Year of 2013 the Company had given 30% (thirty percents) of monthly Housing Allowance from the Salary Honorium with the maximum provision of Rp 21,000,000 (twenty one million).
- viii. Utility Allowance was given at cost with the maximum amount of 30% (thirty percents) of Housing Allowance.
- ix. Allowance Tax was bored by the Company.



c. Fasilitas;

- i. Diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- ii. Fasilitas Kendaraan bagi Direksi sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta pemeliharaan dan operasionalnya. Spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh RUPS. Fasilitas kendaraan ini harus dikembalikan kepada dalam 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat.
- iii. Perusahaan telah memberikan fasilitas berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas kepada seluruh Direksi beserta biaya pemeliharaan dan operasional, sehingga tidak diberikan lagi Tunjangan Transportasi.
- iv. Fasilitas-fasilitas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- v. Fasilitas uang pangkal dan iuran tahunan pada paling banyak 2 (dua) perkumpulan profesi.
- vi. Fasilitas biaya representasi Direksi mewakili Perusahaan sebesar at cost yang disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan dan batas maksimumnya ditetapkan oleh RUPS.
- vii. Fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.
- viii. Pajak yang timbul akibat pemberian Fasilitas ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.

c. Facilities;

- i. Facilities were provided in accordance with the Company's financial soundness and in line with the rules and regulations.
- ii. Transportation Facility for Board of Directors was given in the form of 1(one) unit of service vehicle and its maintenance ad operational. The vehicle specification and standard were determined by the GMS. The transportation facility should be returned within 30 (thirty) days post servitude.
- iii. The Company provided facility in the form of 1 (one) unit of service vehicle to the Board of Directors with its maintenance and operational cost, thus Transportation Allowance would not be provided.
- iv. Health facilities in line with the Company's provision.
- v. Entrance fee and annual dues for as many as 2 (two) professional associates.
- vi. Representative Allowance for Board of Directors at cost in accordance with the Company's soundness and the maximum amount was determined by the GMS.
- vii. Legal aid facility in terms of actions for and on behalf of the position in relation to the means and purposes of the Company's business activities.
- viii. Taxes due to the provision of Facilities were bored and become the Company's expenses.

- d. Tantiem/Insentif Kinerja, jumlahnya ditetapkan sesuai RUPS yang disesuaikan dengan pencapaian KPI dan tingkat kesehatan Perusahaan.
 - e. Faktor Pajak atas Gaji/Honorium, Tunjangan, Fasilitas Direksi ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.
 - f. Faktor Pajak atas Tantiem Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi.
2. Di luar hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini, Direksi tidak diperkenankan untuk membebankan biaya kepada Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
 3. Ketentuan mengenai gaji/honorium, fasilitas Direksi ini dimulai tanggal 1 Januari 2013.
Gaji dan fasilitas Direksi selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :
 1. Penghasilan Direksi, terdiri dari:
 - a. Gaji/ Honorium per bulan;
Besaran Faktor Jabatan Direksi ditetapkan dengan komposisi:
 - i. Faktor Jabatan Direktur Utama : 100%
 - ii. Faktor Jabatan Direktur : 90% dari Direktur Utama
 - b. Tunjangan;
Tunjangan Direksi diberikan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - i. Atas persetujuan RUPS/Menteri, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, telah diberikan sebesar 2 (dua) kali Gaji/ Honorium sesuai dengan maksimal pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
 - ii. Tunjangan Komunikasi bagi Direksi sebesar pemakaian (at cost).
 - iii. Selama Tahun Buku 2013 tidak ada dicairkan Asuransi Santunan Purna Jabatan, namun premi sebesar per tahun maksimum 25% kali Gaji/ Honorium setahun, yang telah dianggarkan dalam RKAP dan ditetapkan oleh RUPS tetap dibayarkan Perusahaan.
 - iv. Tunjangan pakaian, sesuai yang dianggarkan dalam RKAP.
 1. Board of Directors' allowance comprise:
 - a. Salary/Honorarium per month;
The amount of the salary/honorarium as measured by position is determined with the following calculation
 - i. President Director: 100%
 - ii. Director: 90% of the President Director
 - b. Allowance;
The Board of Directors' allowance is given in accordance with the conditions and financial capacity of the Company which does not conflict with legislation.
 - i. Upon approval from the GMS/The Minister, Religious Holiday Allowance is given in an amount equivalent with 2 (times) of the Salary/Honorarium, as adjusted by the maximum amount of the Religious Holiday Allowance.
 - ii. Communication Allowance for the Board of Directors at cost.
 - iii. During Fiscal Year 2013, post-employment insurance was not claimed, yet premium value per year was determined for 25% times the Salary/Honorarium per year at the maximum, which had been calculated in the budget in the RKAP and set by the GMS, all of which were paid by the Company.
 - iv. Clothing allowance, according to the budget in RKAP.
 2. Board of Directors was prohibited to charge expenses on the Company for personal interests outside the matters regulated in this provision.
 3. Provision on Board of Directors' salary/honorium facilities started on January 1 2013.
The Board of Directors' salary and facilities during 2013 are as follow:
 1. Board of Directors' allowance comprise:
 - a. Salary/Honorarium per month;
The amount of the salary/honorarium as measured by position is determined with the following calculation
 - i. President Director: 100%
 - ii. Director: 90% of the President Director
 - b. Allowance;
The Board of Directors' allowance is given in accordance with the conditions and financial capacity of the Company which does not conflict with legislation.
 - i. Upon approval from the GMS/The Minister, Religious Holiday Allowance is given in an amount equivalent with 2 (times) of the Salary/Honorarium, as adjusted by the maximum amount of the Religious Holiday Allowance.
 - ii. Communication Allowance for the Board of Directors at cost.
 - iii. During Fiscal Year 2013, post-employment insurance was not claimed, yet premium value per year was determined for 25% times the Salary/Honorarium per year at the maximum, which had been calculated in the budget in the RKAP and set by the GMS, all of which were paid by the Company.
 - iv. Clothing allowance, according to the budget in RKAP.

- | | |
|--|---|
| <p>v. Tunjangan Cuti Tahunan diberikan setiap tahun sebanyak 1 (satu) kali Gaji/Honorium, setelah Direksi bekerja Selama minimal 6 (enam) bulan berturut-turut.</p> <p>vi. Tunjangan Cuti Besar, diberikan paling banyak 2 (dua) kali Gaji/Honorium per bulan apabila Direksi bekerja 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam satu periode jabatan. Selama Tahun Buku 2013 Perusahaan tidak mengeluarkan Tunjangan Cuti Besar.</p> <p>vii. Perusahaan tidak memberikan fasilitas Rumah Jabatan namun Tahun Buku 2013 Perusahaan telah memberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Gaji/Honorium dengan ketentuan paling banyak Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta).</p> <p>viii. Tunjangan Biaya Utilitas diberikan at cost paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Tunjangan Perumahan. Pajak Tunjangan ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.</p> <p>c. Fasilitas;</p> <p>i. Diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>ii. Fasilitas Kendaraan bagi Direksi sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta pemeliharaan dan operasionalnya. Spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh RUPS. Fasilitas kendaraan ini harus dikembalikan kepada dalam 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat.</p> <p>iii. Perusahaan telah memberikan fasilitas berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas kepada seluruh Direksi beserta biaya pemeliharaan dan operasional, sehingga tidak diberikan lagi Tunjangan Transportasi.</p> <p>iv. Fasilitas-fasilitas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.</p> <p>v. Fasilitas uang pangkal dan iuran tahunan pada paling banyak 2 (dua) perkumpulan profesi.</p> <p>vi. Fasilitas biaya representasi Direksi mewakili Perusahaan sebesar at cost yang disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan dan batas maksimumnya ditetapkan oleh RUPS.</p> | <p>v. Annual leave allowance is given every year for as much as once of the Salary/Honorarium after the Director works 6 (six) months consecutively at minimum.</p> <p>vi. Leave Allowance, is given at maximum 2 (two) times of the Salary/Honorarium per month if the Director has worked for 3 (three) months consecutively within the period. During fiscal year 2013, the Company does not issue Leave Allowance.</p> <p>vii. The Company does not provide government housing units, yet the Company has provided housing allowance every month at 30% (thirty per cent) of the Salary/Honorarium with the provision of Rp,21.000.000 (twenty million Rupiah) at maximum.</p> <p>viii. Utility Cost Allowance is given at cost at maximum of 30% (thirty per cent of the Housing Allowance. Allowance Tax is borne and declared as expenses of the Company.</p> <p>c. Facilities;</p> <p>i. Given according to financial condition and capacity of the Company which does not conflict with legislation.</p> <p>ii. Vehicle facilities for the Board of Directors for 1 (one) unit of official vehicle and its maintenance and operation. The specification and standard of the vehicle is determined by the GMS. This facility must be returned within 30 (thirty days) following the post-employment.</p> <p>iii. The Company has provided facilities of 1 (one) unit of official vehicle to all Directors and its maintenance and operation, thus Transportation Allowance is no longer given.</p> <p>iv. Health facilities according to the applicable regulation in the Company.</p> <p>v. Facilities of entrance fee and annual fee at maximum at 2 (two) professional association.</p> <p>vi. Facilities of the Board of Directors' representative cost in terms of representing the Company, paid at cost, in accordance with the Company's capacity and its maximum limit is determined by GMS.</p> |
|--|---|

vii. Fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.

viii. Pajak yang timbul akibat pemberian Fasilitas ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.

d. Tantiem/Insentif Kinerja, jumlahnya ditetapkan sesuai RUPS yang disesuaikan dengan pencapaian KPI dan tingkat kesehatan Perusahaan.

e. Faktor Pajak atas Gaji/Honorium, Tunjangan, Fasilitas Direksi ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.

f. Faktor Pajak atas Tantiem Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi.

vii. Facilities of legal assistance in the event of action for an on behalf of the related position according to the intention and purpose and business activities of the Company.

vii. Tax that arises from the provision of facilities borne and become the expense of the Company.

d. Tantiem/Performance Incentives, of which amount is stipulated according to the GMS, as adjusted to the KPI achievement and the Company's sound performance.

e. Tax factor over Salary/Honorarium, Allowance, Facilities of the Board of Directors is borne and become the Company's expenses.

f. Tax factor over Tantiem of the Board of Directors is borne and become the expense of each Director.

Besaran Remunerasi Direksi

The amount of Remuneration of Board of Directors

	Direksi / Board of Directors	Direktur Utama President Director	Anggota Direksi Member of Board of Directors
1	Gaji/Honorarium / Salary/Honorarium	83.000.000	74.700.000
2	THR Per Tahun / THR Per Tahun / Allowance/Year	166.000.000	149.400.000
3	Komunikasi Per Bulan / Communication / Month	500.000	500.000
4	Pakaian per tahun / Cloths per year	25.000.000	25.000.000
5	Cuti per tahun (1xGaji/Honor per Bulan) / On leave per year (1x salary/honoraria per month)	83.000.000	74.700.000
6	Tunjangan Perumahan/ Per Bulan*) / Housing Allowance/Per Month*)	21.000.000	21.000.000
7	Tantiem/ Bonus TB 2013 Sblm Pph 21**) / Bonuses/TB before Pph 21**)	1.456.310.680	1.310.679.612

*) Sesuai Keputusan Menteri BUMN nomor: PER-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas BUMN, maka Direksi yang mendapatkan Tunjangan Perumahan apabila tidak mendapatkan fasilitas Rumah Jabatan

**) Sesuai Keputusan Menteri BUMN pajak Tantiem/ Bonus diterima ybs/penerima.

*) In pursuant to the Decision of Minsitry of BUMN number: PER-07/MBU/2010 dated on December 27 on the Guidelines of the Determination of Salary of Board of Directors and Supervisory Board of BUMN, therefore the Board of Directors is the one that ibtain Housing Allowance if initially had no Executive Housing facility.

**) In pursuant to the Decision of Ministry of BUMN of Bonus taxes obtained by the the receivers.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Kualitas setiap insan dalam Perusahaan merupakan faktor yang amat signifikan dalam menunjang kemajuan Perusahaan pada masa mendatang. Kualitas ini dapat dilihat baik dari segi keterampilan, kompetensi maupun etos kerja yang dipandang sebagai kunci utama keberhasilan dan kemajuan Perusahaan.

VARIETY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF SUPERVISORS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The quality of each personnel in the Company is a very significant factor to support the Company's progress in the future. This quality is apparent in their skills, competency or work ethos considered as the main key of success and porogress of the Company.

Kualitas khususnya dibutuhkan bagi kepemimpinan. Oleh karenanya, Perusahaan memandang perlu adanya kompetensi yang beragam serta mendukung peningkatan kompetensi serta berfokus untuk memiliki keberagaman keahlian guna memenuhi kelengkapan keahlian yang diperlukan dalam jajaran kepemimpinan khususnya bagi jajaran Dewan Pengawas serta Direksi.

The quality is especially needed for leadership. Therefore, the Company sees the importance of skill sets and support the improvement of competency and focus on having the variety of skills to meet the required qualifications for leaders, especially the Board of Supervisors and the Board of Directors.

Oleh karenanya pelaksanaan tata kelola perusahaan dirancang untuk dapat menciptakan iklim yang mendorong adanya partisipasi konkret seluruh pemangku kepentingan serta adanya keberagaman dalam susunan komposisi Dewan Pengawas maupun Direksi. Keberagaman ini diwujudkan melalui pembentukan komposisi Dewan Pengawas maupun Direksi yang memenuhi berbagai aspek yang diperlukan baik dari segi kualifikasi akademis, keterampilan, usia serta atas dasar prinsip anti diskriminasi.

Therefore, the implementation of good corporate governance is designed to create a climate that may encourage the real participation from all stakeholders and the variety in the Board of Supervisors and the Board of Directors. This variety is realized through the formation of the Board of Supervisors and the Board of Directors where they can fulfill many required aspects, such as academic qualifications, skills, age and principles of anti-discrimination.

Implementasi dari proses pembentukan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang memperhatikan kualifikasi akademik, keterampilan serta usia yang beragam, dapat dilihat melalui tabel berikut:

The implementation of the formation process of the Board of Commissioners and the Board of Directors' roster which considers the varied academic qualification, skills and age, can be seen through the following table:

Komposisi Dewan Pengawas

Board of Supervisor's Composition

Nama / Name	Jabatan / Position	Usia / Age	Kualifikasi Akademik / Academic Qualification
Choirul Djahhari	Ketua / Chairman	57	- Gelar Sarjana dari Universitas Gadjah Mada untuk jurusan Peternakan / Bachelor Degree from Gadjah Mada University in Animal Husbandry - Meraih MSc dari University of Wisconsin / Earned MSc from University of Wisconsin - Gelar Doctor of Philosophy di McGill University – Montreal, Canada / Doctor of Philosophy at McGill University – Montreal, Canada
Subandriyo	Anggota / Member	58	- Meraih gelar Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada / Earned Bachelor Degree from Faculty of Agriculture, Gadjah Mada University
Nasaruddin Umar	Anggota / Member	55	- Gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dari IAIN Alauddin Ujung Pandang / Bachelor Degree from Sharia Faculty, IAIN Alauddin Ujung Pandang - Gelar Master dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta / Master Degree from IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta - Gelar Doktor dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta / Doctoral Degree from IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ony Suprihartono	Anggota / Memb	44	- Sarjana Akuntansi Universitas Jenderal Sudirman / Bachelor Degree in Accounting from Jenderal Sudirman University - Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada / Master Degree in Management from Gadjah Mada University
Dahlan Siamat	Anggota / Member	60	- Sarjana Muda Akuntansi di Universitas Jayabaya Jakarta / Bachelor Degree in Accounting from Jayabaya University, Jakarta - Postgraduate Diploma in International Banking and Financial Studies, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, UK. - Magister Manajemen Keuangan, STIE IPWI, Jakarta / Master Degree in Financial Management, STIE IPWI, Jakarta

Komposisi Direksi

Board of Directors Composition

Nama / Name	Jabatan / Position	Usia / Age	Kualifikasi Akademik / Academic Qualification
Diding S. Anwar	Direktur Utama / President Director	60	- Menamatkan Sarjana Ekonomi di Universitas Pasundan (Unpas) Bandung / Earned Bachelor Degree in Economics from Pansundan University (Unpas) Bandung - Magister Manajemen Keuangan pada Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang / Earned Master Degree in Financial Management from Sriwijaya University (Unsri) Palembang - Menamatkan pendidikan Doktor Manajemen Pendidikan pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jakarta / Earned Doctoral degree in Education Management from State University of Jakarta (UNJ)
Nanang Waskito	Direktur SDM dan Umum / Director of Human Resources and General Affairs	56	- Sarjana Peternakan pada Institut Pertanian Bogor / Bachelor Degree in Animal Husbandry from Bogor Agricultural University - Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta / Master Degree in Management from Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta
Herry Sidharta	Direktur Operasi / Director of Operations	57	- S1 Jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Pancasila Jakarta / Bachelor Degree in Financial Management in Pancasila University, Jakarta - Master dalam jurusan Manajemen Keuangan di Rensselaer Polytechnic Institute, New York, USA / Master Degree in Financial Managemetn in Rensselaer Polytechnic Institute, New York, USA
Bakti Prasetyo	Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi / Director of Bank Guarantee	56	- Meraih gelar Sarjana Perikanan pada Institut Pertanian Bogor / Earned Bachelor Degree in Fishery major from Bogor Agricultural University - Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta / Master Degree in Management from Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta
I. Rusdonobanu	Direktur Keuangan & Investasi / Director of Finance and Investment	55	- Sarjana bidang Manajemen Perusahaan di Universitas Pancasila / Bachelor Degree in Managemetn from Pancasila University - Master of Science pada Jurusan Ekonomi Northeastern University Boston USA / Master of Science in Economics from Northeastern University Boston USA

INFORMASI PEMEGANG SAHAM

Perum Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya dimiliki 100% oleh negara dan hingga tahun 2013 jumlah Penyertaan Modal Negara (PMN) di Perum Jamkrindo sebesar Rp1,12 triliun.

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN PENGAWAS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Perum Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh negara sehingga baik jajaran Direksi maupun Dewan Pengawas merupakan utusan Pemerintah yang menduduki jabatan di Perum Jamkrindo selaku pemegang saham utama.

KOMITE AUDIT

Komite Audit bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Komite Audit memiliki independensi dalam pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Susunan Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP-04/DP-JAMKRINDO/VII/2013, komposisi dan masa tugas Ketua dan Anggota Komite Audit selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Masa Tugas / Effect Period
Anis Baridwan	Ketua / Chairman	1 hingga 31 Januari 2013 / January 1 to 31, 2013
Dahlan Siamat*	Ketua / Chairman	26 Juli hingga 31 Desember 2013 / July 26 to December 31, 2013
Achmad M.M. Jogasara	Anggota / Member	1 Januari hingga 31 Desember 2013 / January 1 to December 31, 2013
Aan Rosyianto	Anggota / Member	1 Januari hingga 26 Juli 2013 / January 1 to July 26, 2013
Fajar Karyanto**	Anggota / Member	26 Juli hingga 31 Desember 2013 / July 26 to December 31, 2013

* menggantikan Anis Baridwan

** menggantikan Aan Rosyianto

INFORMATION OF SHAREHOLDERS

Perum Jamkrindo is a State Owned Enterprises where the state owns 100% of its shares. Up to 2013, total State Capital Investment in Perum Jamkrindo is Rp1.12 trillion.

AFFILIATION AMONG MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF SUPERVISORS, AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

Perum Jamkrindo is a State Owned Enterprises where the state owns 100% of its shares, thus the Board of Directors and Board of Supervisors represent the Government to serve as the major shareholders in Perum Jamkrindo.

AUDIT COMMITTEE

Audit Committee works collectively and serves to assist the Supervisory Board in carrying out its duties. The Audit Committee has independence in the execution of its duties and is responsible to the Supervisory Board.

Composition of Audit Committee

Based on the Decree of the Supervisory Board Number: KEP-04/DP-JAMKRINDO/VII/2013, composition and work period of the Chairman and Member of the Audit Committee for the year 2013 are as follows:

* replacing Anis Baridwan

** replacing Aan Rosyianto

Struktur, Keanggotaan, Integritas, Keahlian, dan Independensi Komite Audit

Komite Audit dan Komite Investasi Risiko Usaha Perum Jamkrindo adalah organ Dewan Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas Perum Jamkrindo.

Keanggotaan, keahlian, dan Independensi Komite Audit Perum Jamkrindo sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN dan Surat Menteri Negara BUMN No. S-375/MBU.Wk/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Kebijakan Menteri Negara BUMN dalam Pengurusan dan Pengawasan BUMN. Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari anggota Dewan Pengawas, dan jumlah anggota Komite Audit yang berasal dari luar Dewan Pengawas adalah sebanyak 2 (dua) orang. Anggota Komite Audit memiliki integritas yang baik dan mempunyai pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan. Selain itu, anggota Komite Audit Perum Jamkrindo mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan dan memahami industri bisnis Perum Jamkrindo dan tidak mempunyai potensi benturan kepentingan dengan Perum Jamkrindo.

Uraian Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Memperhatikan kewajiban yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 41 tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dan Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, Dewan Pengawas Perum Jamkrindo telah membentuk Komite Audit.

Pembentukan Komite Audit serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah R.I. No. 41 tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Peraturan Pemerintah R.I. No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.

Structure, Membership, Integrity, Expertise, and Independence of Audit Committee

Perum Jamkrindo's Audit Committee and Committee of Business Risk Investment are the instruments of Board of Supervisors under the management and is responsible to the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo.

The membership, expertise, and independence of the Audit Committee of Perum Jamkrindo has met the regulation stipulated in the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2006 regarding Audit Committee for State-Owned Enterprises and Official Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-375/MBU.Wk/2011 dated 5 December 2011 regarding the Policy of Minister of State-Owned Enterprises in the Management and Supervision of State-Owned Enterprises. Audit Committee is led by a chief from the members of Board of Supervisors, and the Audit Committee consists of two (2) members. The members of the Audit Committee own an impeccable integrity and adequate experiences in supervision/investigation field. Moreover, the members of Perum Jamkrindo's Audit Committee own an accounting and finance education, and understands that Perum Jamkrindo's business industry does not contain any potential conflict of interest with Perum Jamkrindo.

Functions and Duties of The Audit Committee

Based on the obligations stipulated in the Articles of Association of Perum Jamkrindo in Government Regulation No. 41 Year 2008 on Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia and the Government Regulation No. 45 Year 2005 on The Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises, the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo established an Audit Committee.

The establishment of the Audit Committee and the implementation of the duties and responsibilities is based on the Government Regulation of R.I No. 41 Year 2008 regarding Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Government Regulation of R.I No. 45 Year 2005 on the Establishment, Management and Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises, and the Regulation from the Minister of SOE No. PER-05/MBU/2006 on the Audit Committee for SOE.

Komite Audit Perum Jamkrindo bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit Perum Jamkrindo memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan efektivitas pelaksanaan Tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internal.
- 2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal.
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan Sistem Pengendalian Manajemen serta pelaksanaannya.
- 4) Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perum Jamkrindo.
- 5) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Pemilik Modal.
- 6) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas lainnya.
- 7) Melakukan identifikasi tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas, antara lain:
 - Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen, dan informasi lainnya.
 - Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit 2013

Realisasi pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Komite Audit dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian terhadap Sistem Pengendalian Internal.
- 2) Penilaian terhadap Satuan Pengawasan Intern (SPI).
- 3) Penilaian terhadap pelaksanaan Audit Eksternal (General Audit).
- 4) Penilaian terhadap kelayakan Prosedur *Review* atas Informasi yang dihasilkan oleh Perum Jamkrindo.
- 5) Hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas dan tugas-tugas lainnya dari Dewan Pengawas.

Audit Committee of Perum Jamkrindo works collectively and serves to assist the Board of Supervisors in conducting their duties. In conducting its functions, the Audit Committee of Perum Jamkrindo performs these following tasks:

- 1) Assisting the Board of Supervisors in ensuring the effectiveness of Internal Control System and the effectiveness of the implementation of the External and Internal Auditor
- 2) Assessing the work and the audit result of the Internal and External Auditor.
- 3) Providing recommendations on the improvement of Management Control Systems and their implementation
- 4) Ensuring the satisfactory procedure of review of all information which is released by Perum Jamkrindo
- 5) Identifying the matters in need of attention of the Board of Supervisors
- 6) Conducting other duties in accordance with the provisions of legislation and/or determined by the Board of Supervisors.
- 7) Melakukan identifikasi tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas, antara lain:
 - Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen, dan informasi lainnya.
 - Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.

Implementation of Audit Committee in 2013

The implementation of duties conducted by the Audit Committee in 2012 were as listed below:

- 1) Assessment of the Internal Control Systems
- 2) Assessment of the Internal Auditor (Internal Audit)
- 3) Assessment of the implementation of External Audit (General Audit)
- 4) Assessment of the feasibility of Review Procedure on information generated by Perum Jamkrindo
- 5) The things that require the attention of the Board of Supervisors and other duties of the Board of Supervisors

6) Kejadian Penting yang Memberikan Pengaruh yang Material Terhadap Perum Jamkrindo, seperti Perubahan Peraturan Perundang-undangan, dan sebagainya.

6) Significant Events which provided Material Effects to Perum Jamkrindo, such as the Amendment of Rules and Regulations, etc.

Besaran Remunerasi Komite Audit

The Amount of Remuneration of Audit Committee

	Komite Audit / Audit Committee	Anggota Member	Anggota Member
1	Gaji/Honorarium / Salary/Honorarium	16.600.000	16.600.000
2	THR Per Tahun / THR Per Tahun / Allowance/Year	33.200.000	33.200.000
3	Komunikasi Per Bulan / Communication / Month	-	-
4	Pakaian per tahun / Cloths per year	-	-
5	Cuti per tahun (1xGaji/Honor per Bulan / On leave per year(1x salary/honoraria per month	-	-
6	Tunjangan Perumahan/ Per Bulan*) / Housing Allowance/Per Month*)	-	-
7	Tantiem/ Bonus TB 2013 Sblm Pph 21**) / Bonuses/TB before Pph 21**)	-	-

Frekuensi Rapat Komite Audit

Selama tahun 2013, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Secara rinci, frekuensi rapat yang dilakukan sebagai berikut:

Meeting Frequency of Audit Committee

During 2013, the Audit Committee has conducted meeting aimed to assist the duties of Board of Commissioners in supervising the Company's management. In detail, meeting frequency held is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Meeting Attendance	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran / Percentage Attendance
Anis Baridwan	Ketua / Chairman	1	1	100%
Achmad M.M. Jogasara	Anggota / Member	13	13	100%
Fajar Karyanto	Anggota / Member	6	4	66,67%

KOMITE INVESTASI DAN RISIKO USAHA

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Audit dan Komite Investasi dan Risiko Usaha. Sedangkan pembentukan Komite Investasi dan Risiko Usaha pada awal bulan Desember 2011 didasarkan pada Peraturan Pemerintah R.I. No. 41/2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai tindaklanjut atas Surat Menteri Negara BUMN No. S-328/MBU.4/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG Perum Jamkrindo Tahun 2010 dengan memperhatikan kondisi bahwa:

BUSINESS RISK AND INVESTMENT COMMITTEE

In conducting duties and responsibilities, Board of Supervisors is assisted by the Audit Committee and Investment and Business Risk Committee. Whilst the establishment of Investment and Business Risk Committee at the beginning of December 2011 was based on the Government Regulation No. 41/2008 regarding Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia as the follow up of Official Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-328/MBU.4/2011 dated October 25, 2011 regarding the Report of Assessment Result of Perum Jamkrindo's implementation of GCG in 2010 by considering the following condition:

- 1) Perum Jamkrindo mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi, yang menghadapi risiko tinggi, terutama risiko pembayaran klaim (tagihan ganti rugi dari pihak perbankan selaku pemberi kredit) akibat kredit macet.
- 2) Perum Jamkrindo mengelola dana dalam jumlah yang relatif besar yang pengelolaannya perlu diselenggarakan dengan baik melalui penempatan pada berbagai instrumen investasi keuangan dengan memperhatikan keamanan dan optimalisasi pendapatan.

Masa Kerja Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha

Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 1 Desember 2012, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Tugas Komite Investasi dan Risiko Usaha

Memperhatikan Surat Menteri Negara BUMN No. S-328/MBU.4/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG Perum Jamkrindo Tahun 2010, Dewan Pengawas Perum Jamkrindo telah membentuk Komite Investasi dan Risiko Usaha pada awal bulan Desember 2011. Pembentukan Komite Investasi dan Risiko Usaha tersebut berlandaskan pada Anggaran Dasar, pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah 41/2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Perum Jamkrindo mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi, yang menghadapi risiko tinggi, terutama risiko pembayaran klaim (tagihan ganti rugi dari pihak Perbankan selaku pemberi kredit) akibat kredit macet, dan
- 2) Bahwa Perum Jamkrindo mengelola dana dalam jumlah yang relatif besar yang pengelolaannya perlu diselenggarakan dengan baik melalui penempatan pada berbagai instrumen investasi keuangan dengan

- 1) Perum Jamkrindo has a major duty to conduct a credit guarantee for Micro, Small and Medium Enterprises, also Cooperatives, which face high risk, especially the claim payment risk (compensation bill from the bank as the credit provider) due to non-performing credit.
- 2) Perum Jamkrindo manages a relatively huge amount of fund, of which management need to be conducted carefully through placement in various financial investment instruments by considering the safety and optimization of income.

Tenure of the Investment and Business Risk Committee

The Investment and Business Risk Committee has 1 (one) year of tenure, effective from December 1, 2011 until December 1, 2012 without dampening the Board of Supervisors' rights to dismiss them at any time.

Duties of Investment and Business Risk Committee

Considering the Official Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-328/MBU.4/2011 dated October 25, 2011 regarding the Report on Assessment Result of GCG Implementation of Perum Jamkrindo Year 2010, the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo has established Investment and Business Risk Committee at the beginning of December 2011. The establishment of the Investment and Business Risk Committee is based on the Articles of Association, Article 85 Paragraph (1) of Government Regulation 41/2008 of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia by considering the matters as listed below:

- 1) That Perum Jamkrindo has a main duty to conduct a Credit Guarantee for Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives, which face high risk, especially the claim payment risk (compensation bill from the bank as the credit provider) due to non-performing credit.
- 2) Perum Jamkrindo manages a relatively huge amount of fund, of which management needs to be conducted carefully through placement in various financial investment instruments by considering the safety and optimization

memperhatikan keamanan dan optimalisasi pendapatan. Komite Investasi dan Risiko Usaha bertugas membantu Dewan Pengawas melakukan fungsi pengawasan (oversight responsibility) terhadap penetapan standar, pedoman, perencanaan serta pelaksanaan investasi (penempatan dana) dan pengelolaan risiko usaha yang dijalankan oleh Direksi Perum Jamkrindo.

of income. Investment and Business Risk Committee assists the Board of Supervisors to perform the function of supervision (oversight responsibility) against the stipulation of standard, guidance, planning and execution of investments (placement of fund) and risk management business conducted by the Board of Directors of Perum Jamkrindo.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Investasi dan Risiko Usaha

Selama tahun 2013, Komite Investasi dan Risiko Usaha telah melakukan pertemuan dengan manajemen dan staf Perum Jamkrindo juga rapat internal guna menindaklanjuti informasi terkait banyaknya divisi. Rapat internal Komite Investasi dan Risiko Usaha dilakukan setiap bulan.

Report of the Implementation of Duties and Responsibilities of Investment and Business Risk Committee

Throughout 2012, Investment and Business Risk Committee has held internal meetings and joint meetings with the management and staffs of Perum Jamkrindo to follow-up the information related to the large number of divisions. The internal meeting of Investment and Business Risk Committee is held every month.

Besaran Remunerasi Komite Investasi dan Risiko

Komite Investasi dan Risiko / Investment and Risk Committee		Anggota Member	Anggota Member
1	Gaji/Honorarium / Salary/Honorarium	16.600.000	16.600.000
2	THR Per Tahun / THR Per Tahun / Allowance/Year	33.200.000	33.200.000
3	Komunikasi Per Bulan / Communication / Month	-	-
4	Pakaian per tahun / Cloths per year	-	-
5	Cuti per tahun (1xGaji/Honor per Bulan / On leave per year(1x salary/honoraria per month	-	-
6	Tunjangan Perumahan/ Per Bulan*) / Housing Allowance/Per Month*)	-	-
7	Tantiem/ Bonus TB 2013 Sblm Pph 21**) / Bonuses/TB before Pph 21**)	-	-

Total Remuneration of Investment and risk Committee

Frekuensi Rapat Komite Investasi dan Risiko Usaha

Selama tahun 2013, Komite Investasi dan Risiko Usaha telah menyelenggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Secara rinci, frekuensi rapat yang dilakukan sebagai berikut:

Meeting Frequency of Investment and risk Committee

During 2013, the Audit Committee has conducted meeting aimed to assist the duties of Board of Commissioners in supervising the Company's management. In detail, meeting frequency held is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Meeting Attendance	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran / Percentage Attendance
Bandung Pardede	Ketua / Chairman	13	12	92,31%
Mustamar	Anggota / Member	13	13	100%
Syaiful	Anggota / Member	13	11	84,62%

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Komite Penjaminan Kredit

Komite Penjaminan Kredit (KPK) adalah forum pengambilan keputusan-keputusan penting yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan, yang dilaksanakan baik di tingkat Direksi, Direktorat, maupun Kantor Cabang/Kantor Anak Cabang Perusahaan.

1. Struktur dan Keanggotaan Komite Penjaminan Kredit (KPK)
 - a. Komite Direksi

Ketua	:	Direktur Utama
Anggota	:	1. Direktur Operasi 2. Direktur Keuangan & Investasi 3. Direktur SDM & Umum 4. Direktur Manajemen Risiko dan TI
 - b. Komite Direktorat

Ketua	:	Direktur Operasi
Anggota	:	1. Kepala Divisi 2. Kepala Divisi
 - c. Komite Kantor Cabang

Ketua	:	Kepala Kantor Cabang
Anggota	:	1. Kepala Bagian yang menangani Penjaminan 2. Kepala Bagian yang menangani Administrasi & Keuangan
2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Penjaminan Kredit (KPK)

Tugas Komite Penjaminan Kredit (KPK) adalah memberikan persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh Direksi.

Adapun tanggung jawab Komite Penjaminan Kredit (KPK) adalah :

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Credit Guarantee Committee

Credit Guarantee Committee (KPK) is a forum to make important decision related to the operations of credit guarantee services in Perum Jamkrindo, which is conducted at the level of Board of Directors, the Directorate, as well as Branch or sub-branch Office.

1. Structure and Membership of Credit Guarantee Committee (KPK)
 - a) Committee of Board of Directors

Chairman	:	President Director
Members	:	1. Director of Operations 2. Director of Finance & Investment 3. Director of Human Resources & General Affairs 4. Director of IT and Management Risk
 - b) Committee of Directorate

Chairman	:	Director of Credit Guarantee
Members	:	1. Head of Division 2. Head of Division
 - c) Committee of Branch Offices

Chairman	:	Head of Branch Office
Members	:	1. Head of Department who is in charged of Credit Guarantee 2. Head of Department who is in charged of Administration & Finance
2. Duties and Responsibilities of Credit Guarantee Committee (KPK)

The duties of the Credit Guarantee Committee (KPK) are to give approval or rejection of the credit guarantee proposal based on the authority stipulated by the Board of Directors.

The responsibilities of Credit Guarantee Committee (KPK) are:

- a. Melaksanakan tugas dalam pemberian keputusan Penjaminan Kredit berdasarkan asas kehati-hatian (prudent), profesional, jujur, cermat dan seksama.
- b. Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan Penjaminan Kredit yang bersifat formalitas.
- c. Menandatangani Berita Acara Komite Penjaminan Kredit (KPK) sebagai bukti pemberian putusan Penjaminan Kredit sebagai wujud tanggung jawab Komite Penjaminan Kredit (KPK) .

Oleh karena itu, sebelum menandatangani Berita Acara, Komite Penjaminan Kredit (KPK) harus memastikan bahwa setiap Kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan Penjaminan Kredit.

Komite Manajemen Risiko (KMR)

Komite Manajemen Risiko (KMR) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia adalah komite yang bertugas membantu Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dalam melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko Perusahaan, tata cara meminimalisasi risiko, dalam hubungannya dengan risiko usaha.

Struktur Keanggotaan Komite Manajemen Risiko (KMR)

Struktur dan tugas keanggotaan Komite Manajemen Risiko (KMR) berbeda baik di tingkat Korporat yaitu Kantor Pusat dengan di tingkat Unit Proses Bisnis (UPB) yaitu Kantor Cabang dan Kantor Anak Cabang, disesuaikan dengan pihak yang mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut, dengan pihak yang melaksanakan keputusan.

- a. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Tingkat Korporasi
 1. Ketua KMR Korporat : Direktur Utama
 2. Sekretaris KMR Korporat : merangkap anggota Kepala Bagian Manajemen Risiko
 3. Anggota KMR Korporat :
 - Direktur MRTI
 - Direktur Operasi
 - Direktur Keuangan dan Investasi
 - Direktur SDM dan Umum
 - Seluruh Kepala Divisi

- a. Conducting the duties in providing decisions on credit guarantee proposal based on the prudent, professional, honest and careful principles.
- b. Rejecting the request and or influence from the parties concerned to provide the Credit Guarantee approval.
- c. Signing the official document of Credit Guarantee Committee (KPK) as evidence of a decision and a form of responsibility of the committee (KPK).

Therefore, before signing the documents, the Credit Guarantee Committee (KPK) should ensure that any decision is in compliance with the provisions of Credit Guarantee.

Risk Management Committee

Risk Management Committee (RMC) of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia is a committee who is assigned to assist Board of Directors of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia to conduct regular assessments and provide recommendations on the Company's risk, the procedures to minimize risks, in connection with the business risk.

The membership structure of the Risk Management Committee (RMC)

The structure and tasks of the Risk Management Committee membership (KMR) is different at the Corporate level and at the process business unit or the Branch and Sub-Branch Office, adapted to whom the decisions are made and the responsibility for the decision and the person who should implement the decision.

- a. Membership of the Corporate Risk Management Committee
 1. Head of Corporate KMR : President Director
 2. Secretary of KMR who is also a member: Head of Risk Management
 3. KMR Corporate Members :
 - Director of Risk Management and IT
 - Director of Operation
 - Director of Finance and Investment
 - Director of Human Resource and General Affairs
 - All Head of Divisions

b. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Tingkat Unit Proses Bisnis (UPB)

1. Ketua KMR Unit Proses Bisnis: Kepala Unit Kerja
2. Sekretaris KMR UPB merangkap anggota : PIC ERM
3. Anggota KMR Unit Proses Bisnis: Seluruh Kepala Bagian/ Kepala Seksi di dalam Unit Kerja

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko (KMR)

a. Tujuan dan Manfaat dari Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Strategi dan Pengambilan Keputusan Risiko Strategis Perusahaan Komite Manajemen Risiko membangun strategi pengelolaan risiko strategis sekaligus mengambil keputusan terkait risiko strategis Perusahaan.
2. Komite Manajemen Risiko melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaporan risiko yang dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko (UMR) dan Risk Taking Unit (RTU/Risk Owner/ Pemilik Risiko).
3. Komite Manajemen Risiko memberikan pengawasan independen atas proses Manajemen Risiko dan pelaksanaan tindak lanjut penanganan risiko.
4. Komite Manajemen Risiko juga memberikan rekomendasi tentang risiko usaha, tata cara meminimalisasi risiko, dalam hubungannya dengan risiko usaha.

b. Tugas Komite Manajemen Risiko Korporat adalah :

1. Menetapkan kebijakan penanganan risiko yang terdiri dari sistem respon pusat, batas toleransi risiko, dan peta risiko perusahaan.
2. Memutuskan risiko-risiko strategis dan kritis di level Korporat
3. Membangun/menyetujui revisi Manual Manajemen Risiko.
4. Memutuskan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk Strategi Manajemen Risiko dan contingency plan apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
5. Memberikan masukan pada Dewan Direksi atas tindakan-tindakan yang diperlukan baik diminta atau tidak apabila risiko dianggap membahayakan kelangsungan usaha.

b. Membership of the Risk Management The Committee in the Business Processes Unit (UPB)

1. Chairman of KMR Business Process Unit: Head of Unit
2. Secretary of KMR UPB and member: PIC ERM
3. Member of the Business Process Unit KMR: All Heads of Department / Head of Section at the Working Unit

1. Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee (RMC)

a. Objectives and Benefits of Risk Management Committee are as follows:

1. In terms of determination of the Strategy and Corporate Strategic Decision Making, Risk Management Committee establishes the strategic risk management and makes decisions related to the Company's strategic risks.
2. Risk Management Committee conducts an independent supervision of the risk reporting process implemented by the Risk Management Unit (UMR) and Risk Taking Unit (RTU)/Risk Owner.
3. Risk Management Committee provides independent oversight of the Risk Management process and implementation of follow-up of the risk.
4. Risk Management Committee also provides recommendation on business risks, procedures for minimizing risks, in connection with business risks.

b. Duties of Corporate Risk Management Committee are:

1. Establishing the risk management policy consisting of central response, risk tolerance, and Company's risk maps,
2. Deciding the strategic and critical risks at the corporate level,
3. Building/approving the revised Risk Management Manual,
4. Deciding the Risk Management Policy and its amendments, including the Risk Management Strategy and the contingency plan if the external conditions do not normally occur,
5. Providing input for the Board of Directors of the actions needed, whether requested or not in case the risk is considered harmful to the business continuity.

c. Tugas Komite Unit Proses Bisnis adalah :

1. Memeriksa pelaksanaan metodologi identifikasi dan penilaian risiko untuk mendapatkan jaminan yang wajar atas kelengkapan dan ketepatan register risiko.
2. Melakukan evaluasi efektivitas strategi mitigasi untuk mengatasi risiko dari unit kerjanya.
3. Memberikan masukan pada Kepala Unit Kerja atas tindakan-tindakan yang diperlukan (sistem respon risiko) baik diminta atau tidak apabila risiko dianggap membahayakan kelangsungan usaha.
4. Memberikan masukan pada Kepala Unit Kerja atas tindakan-tindakan yang diperlukan baik diminta atau tidak apabila risiko dianggap membahayakan kelangsungan usaha di tingkat Unit Proses Bisnis.
5. Menetapkan risiko kritis dalam Unit Proses Bisnis.
6. Melakukan Sosialisasi Risiko Manajemen tingkat Unit Proses Bisnis.

d. Komite Manajemen Risiko tingkat Korporat bertanggung jawab atas :

1. Formulasi kebijakan dan strategi pengelolaan risiko.
2. Implementasi atas arahan pengelolaan risiko.
3. Penyempurnaan praktek pengelolaan risiko.
4. Melakukan kontrol atas keputusan bisnis ditingkat Perusahaan yang bertentangan dengan kebijakan pengelolaan risiko.

e. Komite Manajemen Risiko tingkat Unit Proses Bisnis bertanggung jawab atas :

1. Implementasi pengelolaan risiko.
2. Penyempurnaan praktek pengelolaan risiko.
3. Melakukan kontrol atas keputusan bisnis di tingkat Unit Proses Bisnis yang bertentangan dengan kebijakan pengelolaan risiko.

2. Manajemen Risiko Penjaminan

Risiko Manajemen Kredit merupakan Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan nasabah perbankan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam mengelola risiko Penjaminan tersebut maka diperlukan Sistem Manajemen Risiko Penjaminan Kredit. Sistem Manajemen Risiko Penjaminan Kredit Perum

c. Duties of Business Process Unit Committee are:

1. Examining the implementation of identification and risk assessment methodology to obtain reasonable assurance on the completeness and accuracy of risk registers,
2. Conducting an evaluation of the effectiveness of mitigation strategies to address the risks of the working unit,
3. Providing input to the Head of Working Unit for the necessary actions (risk response system), whether requested or not in case the risk is considered harmful to business continuity.
4. Providing input to the Head of Working Unit for the actions needed, whether requested or not in case that the risk is considered dangerous to the business' continuity in the Business Process Unit level,
5. Determining a critical risk in the Business Process Unit,
6. Conducting a Dissemination of Risk Management in Business Process Unit level.

d. The Corporate Risk Management Committee is responsible for:

1. Formulation of the policies and strategies of risk management,
2. Implementation of the direction of risk management,
3. Improvement of risk management practices,
4. Conducting control over business decisions in the level of Company that conflicts with the risk management policy.

e. Risk Management Committee of the Business Process Unit is responsible for:

1. Implementation of risk management,
2. Improvement of risk management practices,
3. Conducting a control over business decisions at the Business Process Unit that conflicts with the risk management policy.

2. Management of Guarantee Risk

Credit Guarantee Risk is a Risk which appears as an impact of the inability of banking customers in meeting their obligation. To manage this Guarantee Risk, there shall be a Management System of Credit Guarantee Risk. The Management of Guarantee Risk of Perum Jamkrindo is a

Jamkrindo adalah sistem yang meliputi rangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan Penjaminan Kredit.

Dalam pelaksanaannya, Sistem Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif pada seluruh tahapan kegiatan Penjaminan Kredit disesuaikan dengan kemampuan sumber daya Perusahaan serta karakteristik dan risiko kredit yang dijamin.

Pada tahapan implementasi dilakukan proses identifikasi risiko yang bertujuan untuk memprediksi risiko atas kredit yang diajukan Penjaminannya oleh Penerima Jaminan. Prediksi risiko tersebut dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Persetujuan Penjaminan yang dituangkan dalam hasil evaluasi Kelayakan Penjaminan sesuai dengan sistem dan prosedur penjaminan terkait. Pendekatan yang dilakukan dalam identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu Prospect, Productivity, Payment, dan Personality. Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait.

Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya Risiko Penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem scoring. Berdasarkan score ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing Terjamin atau sekelompok Terjamin, atau suatu produk baru.

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu Pengajuan Penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah Rapat Komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari Pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan

system which covers a series of procedures used to identify, measure, observe, and control the risks surfaced from the Credit Guarantee.

In practice, Risk Management System is conducted effectively on every level of Credit Guarantee, made to be suited along with the capability of the Company's resources and credit guarantee's characteristics and risks.

In the implementation level, a risk identification process is conducted to predict the risk of the credit of which guarantee is proposed by the Guarantee Recipient. The risk prediction will be turned into one of the considerations in the decision-making of Guarantee Approval in an evaluation of Guarantee Feasibility in accordance with the related guarantee system and procedure.

The method used in indentifying the risk is the 4P method, which is Prospect, Productivity, Payment, and Personality. The items taken into consideration for each aspect are different, seeing the guaranteed credit characteristics, and these will be explained in the related guarantee system and procedure.

The result of the risk identification is then being followed up by the determination of guarantee risk prediction to calculate the amount of Guarantee Risk. In its implementation, risk prediction may be conducted qualitatively and/or quantitatively with scoring system for the 4P aspects. Based on the stipulated score, the guarantee risk prediction is able to be stipulated for a Guaranteed or a group of Guaranteed, or a new product.

Subsequently, for decision making of whether a Guarantee Proposal may be approved or not, a Committee meeting is held. In line with the prudence principle, the members of the committee consist of the Official who is involved directly with risk taker unit and the Official who is involved

Penjaminan (risk taker unit) dan Pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (risk financing unit). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih obyektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi.

Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan Penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan Sistem Manajemen Risiko adalah pelaporan dan evaluasi. Setiap unit kerja yang ter-expose oleh risiko harus menyampaikan laporan terkait dengan risiko tersebut. Atas laporan tersebut, bagian yang menangani Manajemen Risiko melakukan pengolahan data dan informasi sebagai dasar penetapan kebijakan dalam meminimalisasi Risiko Penjaminan Kredit.

3. Operasional Risk Management

Pengelolaan Risiko Operasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Manajemen Risiko Perum Jamkrindo yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dan dampak kerugian risiko operasional. Sesuai dengan peraturan Direksi Perum Jamkrindo, risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

Risiko operasional tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: kegagalan sistem/downtime & teknologi, kesalahan manusia (human error), peralatan (mechanical and engineering), pihak external, fraud, kegagalan proses internal, organisasi & SDM, Counterpart, HSE (Health, Safety and Environment), dan Teknologi Informasi/Information Technology (IT).

directly with the risk financing unit. By this mechanism in which decision making involves two or more parties from the different sides, the decision is expected to be made more objective and potential risk of wrong decision-making may be minimized.

Besides being used to assist the Guarantee decision-making, the result of risk analysis is also turned into one of the considerations in conducting the observation of the running credit. For the high risk credit, the observation is conducted more intensively.

Reporting and evaluation are inseparable parts of the Risk Management System. Each working unit which is exposed by the risk shall submit a report related to the risk. By this report, the division who handles the Risk Management will process the data and information as a basis of policy's stipulation in minimizing the Credit Guarantee Risk.

3. Operational Risk Management

Operational Risk Management is an inseparable part from Risk Management of Perum Jamkrindo which is intended to minimize the the possibility and impact of operational loss. In line with the regulation of Board of Directors of Perum Jamkrindo, the operational risk is the risk caused by the inadequacy or malfunction of internal process, human error, system failure, or an external problem which influence the Company's operational system.

Operational Risks may be caused by some factors, such as the failure of system and technology (downtime). Human error, mechanical engineering, external parties, fraud, the failure of internal process, organization and Human Resources, Counterpart, HSE (Health, Safety, and Environment) and Information Technology (IT).

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Operasional Perum Jamkrindo telah memiliki panduan untuk melaksanakan Risk and Control Self Assessment (RCSA). RCSA tersebut dilaksanakan dengan pendekatan bottom up, dimana identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan oleh Kepala Bagian/Seksi di Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Anak Cabang. Penetapan level pelaksana identifikasi dan penilaian risiko tersebut didasarkan pada pertimbangan level tersebut merupakan Pejabat yang terendah di unit kerjanya, sehingga mereka mengetahui permasalahan teknis dan kaitan antara permasalahan teknis tersebut dengan pencapaian tujuan Perusahaan.

In order to implement the Operational Risk Management, Perum Jamkrindo owns a guide in conducting the Risk and Control Self Assessment (RCSA). RCSA is conducted with bottom-up method, in which the risk identification and assessment is conducted by the Head Division/Section of the Working Unit in Head Office, Branch Office, and Sub-Branch Office. The stipulation of risk identification and assessment conductor level is based on the level consideration, which is the lowest level of Official in the working unit, hence they are able to figure out the technical problems and the relation of the technical problem with the Company's objective achievement.

207



WAWAN CHAERUL ANWAR
 Sekretaris Dewan Pengawas
 Board Supervisor Secretary

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS / BOARD SUPERVISOR SECRETARY

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, menduduki jabatan Sekretaris Dewan Pengawas sejak tahun 2012. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik tahun 2010. Menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi pada Universitas Jayabaya pada tahun 1994.

An Indonesian citizen, 44 years old, serving as the secretary of the Board of Supervisors since 2012. He was previously Head of the Sub-Division of Infrastructure and Logistics in 2010. Receiving his Bachelor's degree in Economics at Jayabaya University in 1994.

Tugas Sekretaris Dewan Pengawas

Pelaksanaan kegiatan meliputi komunikasi Perusahaan, protokoler, sekretariat, administrasi persuratan, humas dalam rangka pengelolaan Perusahaan, antara lain :

- Melaksanakan kegiatan komunikasi perusahaan, termasuk penyusunan strategi dan perencanaan kegiatan komunikasi Dewan Pengawas.
- Melaksanakan kegiatan protokoler dan kesekretariatan Perusahaan.

Duties of the Board Supervisor Secretary

Duties of the Secretary include company communication, protocols, secretariat, correspondence, and public relations for the Company's management. The duties are as follows:

- Performing corporate communication function, including preparing strategies and planning communication activities for the Board of Supervisors
- Performing protocol and secretariat activity

- Melaksanakan kegiatan adminsitratif dan memfasilitasi Dewan Pengawas dengan Pihak Eksternal.
- Melaksanakan kegiatan agenda rapat Dewan Pengawas dan RPB.
- Melaksanakan kegiatan humas dalam pertemuan dengan pihak internal maupun eksternal terkait kepentingan Perusahaan.
- Melaksanakan kegiatan pengelolaan dokumen/kearsipan Perusahaan.
- Menyusun materi dan Berita Acara Komite Audit dan Komite Risiko Usaha sesuai bidang tugasnya.
- Melaksanakan dan mengawasi penerapan Good Corporate Governance di bidang tugasnya.
- Melaksanakan kegiatan Manajemen Risiko sesuai bidang tugasnya.
- Melaksanakan, memelihara dan mengolah data base sesuai bidang tugasnya.
- Melakukan penatausahaan berkas/dokumentasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- Menyusun laporan kegiatan dan berkala di bidang tugasnya.
- Menyediakan data dan informasi untuk keperluan pemeriksaan internal/eksternal serta menindaklanjuti rekomendasi Auditor tersebut sesuai bidang tugasnya.
- Membina, mengarahkan dan menilai kinerja seluruh staff dan pelaksana pada bagian Sekretariat & Humas.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dan pelaksana bagian Sekretariat dan Humas.
- Performing administrative activity and facilitates Board of Supervisors with External Parties
- Preparing meeting agenda for the Board of Supervisors and RPB
- Performing a public relations function to facilitate the meetings for internal and external parties for the Company's interest
- Managing and filing documents
- Preparing materials and Minutes of Meeting of the Audit Committee and Business Risk Committee in accordance with the duties
- Performing and supervising the implementation of good corporate governance in accordance with the duties
- Performing Risk Management activity in accordance with the duties
- Performing, maintaining, and managing database in accordance with the duties
- Administering documents related to the duties
- Preparing periodical reports of activity in accordance with the duties
- Providing data and information for auditing internal and external activity and following-up the recommendation of the Auditor in accordance with the duties
- Developing, directing, and assessing performance of all staffs and executing officer in the Secretariat & Public Relation
- Performing supervisory function to the implementation of duties of Board of Directors and executing officer in the Secretariat and Public Relation.

SEKRETARIS PERUSAHAAN / CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perum Jamkrindo berusia 52 tahun, menjabat sejak 28 Juni 2013. Beliau mengawali karir di Perum Jamkrindo sejak tahun 1987 dan telah menduduki beberapa jabatan manajerial antara lain: Kepala Divisi Penjaminan 2 (2010-2012), Kepala Divisi Penjaminan dan Pemasaran (2006-2010), Kepala Divisi Penjaminan dan Pembiayaan (2005-2006), Kepala Divisi Pembiayaan Usaha (2003-2005), Kepala Cabang Denpasar (2012), Kepala Cabang Makassar (1999-2002) dan Bandung (2002-2003).

Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Hasanudin (1985), dan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan seperti: ACSIC (Asian Credit Supplementation System Confederation) Training Program di Seoul (1995), Leaderships for Manager, Penjaminan Syariah (Kafalah), Kontra Bank Garansi, Surety Bond dan Custom Bond, Enterprise Risk Management, Negotiation Skill dan Team Building.

Corporate Secretary of Perum Jamkrindo is 52 years old, serving since June 28, 2013. He started his career at Perum Jamkrindo since 1987 and has held several managerial positions such as: Head of Guarantee 2 Division (2010-2012), Head of Marketing and Guarantee Division (2006-2010), Head of Financing and Guarantee Division (2005-2006), Head of Business Financing Division (2003-2005), Head of Denpasar Branch Office (2012), Head of Makassar Branch Office (1999-2002), and Bandung Branch Office (2002-2003).

He received his Bachelor's degree from Hasanudin University (1985) and attended trainings and courses such as ACSIC (Asian Credit Supplementary System Confederation) Training Program at Seoul (1995), Leaderships for Manager, Sharia Kafalah Guarantee, Contra Bank Guarantee, Surety Bond and Custom Bond, Enterprise Risk Management, Negotiation Skill and Team Building



YULIARSO
 Sekretaris Perusahaan
 Corporate Secretary

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Pelaksanaan kegiatan di bidang Sekretaris Perusahaan yang meliputi kegiatan komunikasi Perusahaan, protokoler, sekretariat, administrasi persuratan, humas dalam rangka pengelolaan Perusahaan, antara lain:

- Menyusun dan mengusulkan serta melaksanakan Rencana Jangka Panjang sesuai bidang tugasnya.
- Menyusun, mengusulkan dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bagian Sekretariat & Humas.
- Merumuskan, menyusun, mengusulkan dan melaksanakan kebijakan, sisdur dan SOP sesuai bidang tugasnya.

Duty Implementation of the Corporate Secretary

The duty implementation of the Corporate Secretary which covers the Company's communication activities, protocol, secretary, administration and letters, public relation in managing the Company, such as:

- Compiling, proposing, and conducting Long-Term Plans in accordance with the field of duties
- Compiling, proposing and conducting the Work Plan and Annual Budget of Secretary and Public Relation
- Creating, compiling, proposing and conducting the policies, system and procedure and SOP in line with the field of duties

- Melaksanakan kegiatan komunikasi perusahaan, termasuk penyusunan strategi dan perencanaan kegiatan komunikasi Perusahaan.
- Melaksanakan kegiatan protokoler dan kesekretariatan Perusahaan.
- Melaksanakan kegiatan administatif dan memfasilitasi Direksi dan Dewan pengawas dengan Pihak Eksternal.
- Melaksanakan kegiatan agenda rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dan RPB.
- Melaksanakan kegiatan humas dalam pertemuan dengan pihak internal maupun eksternal terkait kepentingan Perusahaan.
- Melaksanakan kegiatan pengelolaan dokumen/kearsipan Perusahaan.
- Menyusun materi dan Berita Acara Komite Direktorat dan Direksi sesuai bidang tugasnya.
- Melaksanakan dan mengawasi penerapan Good Corporate Governance di bidang tugasnya.
- Melaksanakan kegiatan Manajemen Risiko sesuai bidang tugasnya.
- Melakukan kerjasama dengan Kepala Bagian pada Divisi Umum, SPI, Divisi lainnya, dan Kantor Cabang serta Kantor Anak Cabang dalam rangka koordinasi dan penyelesaian pekerjaan.
- Melaksanakan, memelihara dan mengolah data base sesuai bidang tugasnya.
- Melakukan penatausahaan berkas/dokumentasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- Menyusun laporan kegiatan dan berkala di bidang tugasnya.
- Menyediakan data dan informasi untuk keperluan pemeriksaan internal/eksternal serta menindaklanjuti rekomendasi Auditor tersebut sesuai bidang tugasnya.
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian anggaran di bidang tugasnya.
- Membina, mengarahkan dan menilai kinerja seluruh staff dan pelaksana pada bagian Sekretariat & Humas.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas seluruh staff dan pelaksana bagian Sekretariat dan Humas.
- Conducting the Company's communication activities, including compiling strategies and planning of the Company's communication activities
- Conducting the protocol and secretary activities of the Company
- Conducting the administrative and facilitate the Board of Directors and Board of Supervisors with External Parties
- Conducting the meeting agenda of Board of Directors, meetings of Board of Directors, Board of Commissioners and RPB
- Conducting the public relation activities in the meetings with internal or external parties related to the interest of the Company
- Conducting the management of document/archives of the Company
- Compiling the material and Minutes of Meeting of the Directorate Committee and Board of Directors in accordance with the field of duties
- Conducting and supervising the implementation of Good Corporate Governance in its field of duties
- Conducting the Risk Management activities in line with the field of duties
- Conducting a cooperation with the Head Division in Division of General Affairs, Internal Control Unit, other Divisions, Branch Offices, and Sub-Branch Offices in coordinating and completing the works
- Conducting, maintaining and processing the database in accordance with the field of duties
- Conducting the administration of archives/documentation related to the field of duties
- Compiling the activities report periodically in the field of duties
- Providing the data and information for an internal/ external inspection and following up the Auditor's recommendation in line with the field of duties
- Conducting the monitoring and evaluation of budget achievement in the field of duties
- Establishing, directing, and appraising the performance of the entire staffs and managers of Secretary and Public Relations.
- Supervising the implementation of duties of all staffs and executing officer in Secretariat and Public Relation Division

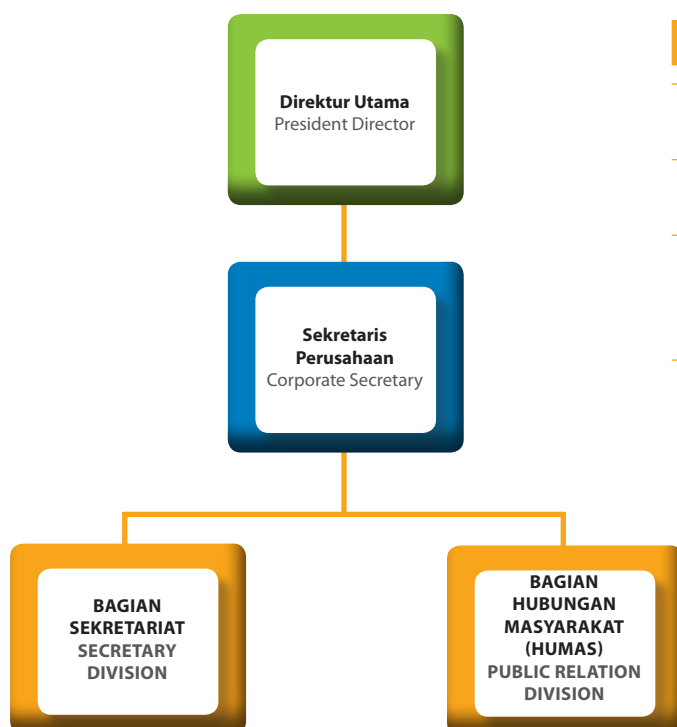
Penyampaian Laporan Manajemen

Penyampaian Laporan Manajemen kepada Dewan Pengawas, yaitu:

Report Submission of Managemnt

Report Submission of Management to Supervisory Board, namely:

Jenis Laporan / Type of Report	Standar Waktu / Time Standard	Penyampaian / Submission
Laporan Triwulanan / Quarterly Report		
TW I/2013 / Quarter I/2013	7 April 2013 / April 7, 2013	1 Mei 2013 / May 1, 2013
TW II/2013 / Quarter II/2013	7 Juli 2013 / July 7, 2013	29 Juli 2013 / July 29, 2013
TW III/2013 / Quarter III/2013	7 Oktober 2013 / October 7, 2013	31 Oktober 2013 / October 31, 2013
TW IV/2013 / Quarter IV/2013	31 Januari 2014 / January 31, 2014	10 Februari 2014 / February 10, 2014

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS
PERUSAHAAN**

**ORGANIZATION STRUCTURE OF CORPORATE
SECRETARY**

NO.	Jabatan / Position	Nama / Name
1.	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Yuliarso
2.	Kepala Bagian Sekretariat Head of Secretary Division	Dody Novariantio
3.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Head of Public Relation Division	Boy Priadi Koeswoyo

**URAIAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(RUPS) TAHUN 2012**
Keputusan RUPS Tahun 2012

Selama tahun 2012, Perum Jamkrindo menyelenggarakan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Pembahasan Bersama yaitu:

**DESCRIPTION OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (GMS) 2012**
Resolution of GMS 2012

Throughout 2012, Perum Jamkrindo held 2 (two) General Meeting of Shareholders/Discussion of Joint Meeting:

- 1) Rapat Pembahasan Bersama tentang Pembahasan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tahun buku 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2012, yang menghasilkan keputusan:
 - a) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2011 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni Mucharam Rasyidi dengan opini wajar tanpa pengecualian
 - b) Persetujuan dan pengesahan laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2011
 - c) Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Pengawas
 - d) Penggunaan Laba Tahun Buku 2011
 - e) Penyesuaian remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo tahun 2012
 - f) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas
 - g) Eliminasi saldo laba negatif akibat penerapan PSAK 50 dan 55 serta perubahan kebijakan akuntansi
 - h) Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Direksi dan Dewan Pengawas.
- 2) Rapat Pembahasan Bersama tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusaan (RKAP) tahun 2013 dan RKA PKBL tahun 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2012, yang menghasilkan keputusan yaitu:
 - a) Pengesahan RKAP 2013
 - b) Pengesahan business plan tambahan dana PMN
 - c) Penetapan Skor Tingkat Kesehatan Perum Jamkrindo
 - d) Saldo Laba Negatif akan dieliminasi dari cadangan-cadangan, tidak melalui revaluasi aset
 - e) Pengesahan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) Tahun 2013.

Realisasi Hasil RUPS Tahun 2012

Seluruh hasil RUPS pada tahun 2012 telah dipatuhi dan direalisasikan pada tahun 2013 oleh Perusahaan.

- 1) Joint Meeting Discussion concerning the Discussion of Financial Statements of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia for fiscal year 2011 conducted on May 3, 2012, with the following resolution:
 - a) Approval of Annual Report and Ratification of Company Annual Calculation for fiscal year 2011, audited by Public Accounting Firm Husni Mucharam Rasyidi with "unqualified opinion".
 - b) Approval and ratification of Partnership and Environmental development program for fiscal year 2011
 - c) Granting acquit et decharge to Board of Directors and Board of Supervisors
 - d) Utilization of Profit of Fiscal Year 2011
 - e) Adjustment of remuneration of Board of Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo for 2012
 - f) Tantiem for Board of Directors and Board of Supervisors
 - g) Elimination of negative retained earnings due to the implementation of PSAK 50 and 55 and the change in accounting policy.
 - h) Matters of concerns to Board of Directors and Board of Supervisors
- 2) Joint Meeting Discussion of Ratification of Work Plan and Budget (RKAP) for 2013 and of Partnership and Environmental Development Program 2013, conducted on December 13, 2012, with the following resolution:
 - a) Ratification of RKAP 2013
 - b) Ratification of business plan and incentives of PMN
 - c) Score determination of Sound Performance of Perum Jamkrindo
 - d) Negative Retained Earnings will be eliminated from reserves, not through asset revaluation
 - e) Ratification of partnership of environmental development program of 2013.

Realization of GMS Decision 2012

All decisions of GMS 2012 have been complied and realized in 2013 by the Company

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Upaya Perusahaan untuk mendukung kemajuan dan peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan adalah dalam rangka mengoptimalkan kinerja Sekretaris Perusahaan bagi kemajuan Perusahaan. Sepanjang tahun 2013, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa program pelatihan, yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Competency Development Program of Corporate Secretary

The Company's effort to support the progress and improvement of competency of the Corporate Secretary aims to optimize the performance of Corporate Secretary for the development of the Company. During 2013, the Company has attended several training programs, clearly seen in this following table:

No	Nama pelatihan/ Workshop	Pelaksana Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Peserta	Jumlah (orang)	Biaya Pelatihan	Biaya Lain- Lain (uang transport, SPPD, penginapan)	Jumlah Biaya
1	Interpretasi Pemahaman dan Pendalaman Kinerja Berbasis KPKU BUMN Gelombang 1 Interpretasi Pemahaman dan Pendalaman Kinerja Berbasis KPKU BUMN Gelombang 1	Forum Ekselen BUMN	24-25 Agt 2013	Telkom Corporate Univ. Bandung	Boy Priadi	4	Rp16,000,000	Rp3,200,000	Rp19,200,000
2	Pelatihan Kader Anti Narkoba Pelatihan Kader Anti Narkoba	BNN	28 Agt 2013	Hotel Balairung Matraman	Dodi Novariantio	10	Rp0	Rp2,085,000	Rp2,085,000
3	Peran dan Tantangan Humas BUMN di Era Digital Peran dan Tantangan Humas BUMN di Era Digital	BUMN Forum	22 Okt 2013	Hotel Kartika Chandra	Penny Eka Yulianti	1	Rp1,500,000	Rp75,000	Rp1,575,000

SATUAN PENGAWAS INTERN

Fungsi Audit Internal Perusahaan dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). SPI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Didalam melaksanakan Audit Internal, SPI selalu diposisikan sebagai mitra strategis bagi manajemen yang dipercaya, profesional, obyektif, dan independen yang dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Perusahaan dengan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan yang baik.

INTERNAL AUDIT

The Company's Internal Audit Function is conducted by Internal Audit. The Internal Audit is chaired by Head of Internal Audit appointed and dismissed by the President Director by the approval of the Board of Commissioners.

In implementing the Internal Audit function, the Internal Audit is always positioned as strategic partner for management who is reliable, professional, objective and independent, as well as those who can provide added value for the Company to reach its objective by improving the effectiveness of risk management, control and good corporate governance.

SUDIBYO UTOMO



SUDIBYO UTOMO
Kepala Satuan Pengawas Intern
Chairman of Internal Auditor

Profil Kepala Satuan Pengawas Intern

Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern sejak 2012, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perum Jamkrindo cabang Bandung (2011-2012) dan Medan (2005- 2011).

Beliau berhasil menamatkan Sarjana Ekonomi pada tahun 1990 di Universitas Airlangga dan memperoleh gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Labora pada tahun 2000.

Dibidang audit beliau telah memperoleh gelar Profesional Internal Audit (PIA) dari Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPA&K) pada tahun 2013.

Profile of Chairman of Internal Auditor

Prior to serving as Head of Internal Auditor since 2012, he served as Head of Branch Office in Bandung (2011-2012) and Medan (2-5-2011).

He received his Bachelor of Economics in 1990 from Airlangga University and his Master's degree in Management from Sekolah Tinggi Manajemen Labora in 2000.

In audit field, he has earned Professional Internal Audit title (PIA) from Financial and Accounting Development Center (PPA&K) in 2013.

Jumlah Pegawai Audit Internal

Mengingat tugas pengawasan yang diemban SPI memegang peranan yang sangat penting, maka jumlah dan kualitas personil SPI diupayakan memadai sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugasnya. Pada periode 2013, jumlah pegawai Audit Internal adalah 7 (tujuh) orang, dengan rincian, sebagai berikut:

1. Kepala SPI : 1 orang
2. Kepala Bagian : 2 orang
3. Auditor : 3 orang
4. Agendaris : 1 orang

Total Employees of Internal Audit

Considering the important role of supervisory function of the Internal Audit, the number and quality of Internal Audit personnel will be improved to support the duty implementation. In 2013, total employees of Internal Audit are 7 (seven) members, with detail as follows:

1. Head of SPI : 1 member
2. Head of Division : 2 members
3. Auditor : 3 members
4. Agendaris : 1 member

Informasi Sertifikasi Profesi Audit Internal

Kepala SPI : Sudibyo Utomo

Profession Certification Information of Internal Audit

Head of SPI : Sudibyo Utomo

No.	Jenis Pendidikan / Type of Education	Nama Penyelenggara / Name of Organizer	Tahun / Year
1	Workshop: - Prinsip-prinsip dan <i>Best Practice</i> Reasuransi oleh Nico Lukum, ACII. - Membangun Perusahaan yang Berintegritas dan <i>Good Corporate Governance</i> oleh Dr. Ir. Waluyo. - Permen BUMN Nomor: 15 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang & Jasa BUMN oleh Hambra	Perum Jamkrindo	2013
	- Reinsurance Best Practices and Principles by Nico Lukum, ACII - Building Integrated Company and Good Corporate Governance by Dr.ir.Waluyo - Regulations of Minister of BUMN Number: 15 of 2012 on the Goods and Services Procurement by Hambra		
2	Audit Internal Tingkat Lanjutan I Sustainable Internal Audit I	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Audit Internal Education Foundation (YPIA)	2013
3	Workshop: <i>"Building Sustainable Performance"</i> terkait penyusunan RJPP dan Evaluasi atas implementasi pengukuran GCG berdasarkan indikator pengukuran GCG yang terbaru. Workshop: <i>"Building Sustainable Performance"</i> related to RJPP Preparation and Evaluation on GCG Assessment based on the latest GCG Assessment Indicator.	Kedeputan Bidang Usaha Jasa Keuangan Kementerian BUMN Deputy Ministry of BUMN Financial Services Business	2013
4	Character Building Change Management To be Upnormal Character Building Change Management To be Upnormal	MKS Resources	2013
5	Diklat Khusus Bagi Kepala SPI (Sertifikasi Profesi Internal Audit/PIA) Special Training for Head of SPI (Profession Certification for Internal Audit/PIA)	Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPAK) Accounting and Financial Development Center (PPAK)	2013
6	Simposium Nasional : Menyongsong Penerapan COSO 2013 dan ERM di lingkungan BUMN National Symposium: Welcoming Implementation of the COSO and ERM in 2013 in the BUMN environment	BPK-RI	2013

Partisipasi Dalam Perhimpunan Profesi Auditor Internal

Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perum Jamkrindo aktif sebagai Anggota dan menjabat sebagai Bendahara pada Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Asuransi Negara dan Jasa Keuangan. Keikutsertaan SPI dalam forum tersebut berguna untuk sharing pengetahuan dan informasi mengenai kegiatan pemeriksaan intern sesama BUMN.

Participation in Professional Association of Internal auditors

Internal Audit of Perum Jamkrindo is active as Member and serves as Treasurer in Communication Forum of Internal Audit (FKSPI) of State Insurance and Financial Service. The participation of the Internal Audit in the forum is useful for knowledge and information sharing on internal monitoring for SOEs.

Pengembangan Sumber Daya Auditor

Dalam rangka memastikan kesinambungan pengembangan SDM, baik sisi kompetensi maupun *soft-skill*, Auditor terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dengan mengikuti seminar, *workshop*, studi banding, pelatihan dan pendidikan bersertifikasi Auditor Internal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang kompeten, baik untuk pendidikan kompetensi audit maupun *Good Corporate Governance* (GCG).

Development of Auditor Resources

To ensure the sustainability of HR development in competency and soft skills, Auditors continue improving knowledge and skills by attending seminars, workshops, study visit, training and educations for the certificatio of Internal Audit held by competent educational institution. This covers education in audit competency and good corporate governance.

Struktur organisasi Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Dalam Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh seorang kepala yang berada langsung di bawah Direktur Utama dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

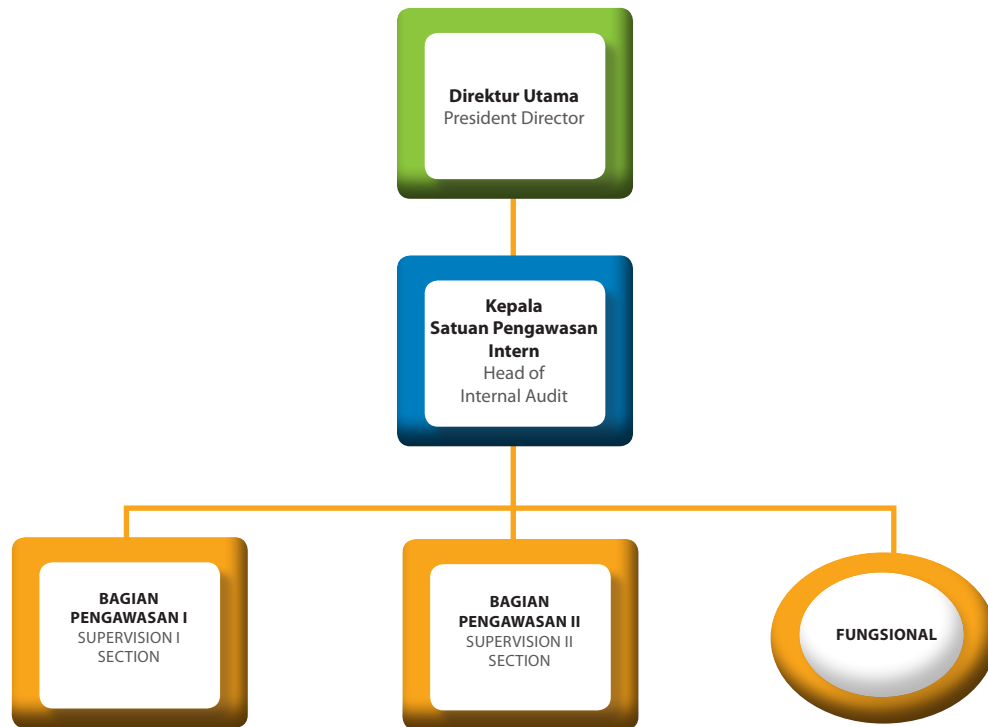
Structure/Position of Internal Audit

Within its organization structure, the Internal Audit is chaired by a supervisor under the President Director who is directly responsible to President Director.

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI, setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, jika Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dengan berdasarkan peraturan yang berlaku.

The Head of Internal Audit was dismissed by the President Director by approval from the Board of Supervisors. This might happen if the Head of the Internal Audit fails to meet the obligations as the internal auditor in accordance with the applicable laws.

No.	Jabatan / Position	Nama / Name
1.	Kepala Satuan Pengawas Intern / Head of Internal Audit	Sudibyo Utomo
2.	Kabag. Pengawasan I / Head Supervision I	Dadang Ary Avianto
3.	Kabag. Pengawasan II / Head Supervision II	Sri Lestari



Tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertugas:

1. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan Operasional dan Keuangan Perusahaan, menilai Pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran perbaikannya.
2. Memberikan laporan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) kepada Direktur Utama.
3. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertanggung jawab untuk:

1. Menyelenggarakan program kerja pengawasan atas pelaksanaan semua kebijakan dan keputusan Direksi serta program kerja Perusahaan.
2. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada bidang Pengawasan Intern Perusahaan yang berkaitan dengan pemeriksaan kegiatan Operasional dan Administrasi & Keuangan.

Duties of Internal Audit Unit

Duties of Internal Audit Unit are to:

1. Assist President Director to monitor the Company's Operation and Finance, assess control, management, and its implementation in the Company, and provide improvement suggestions
2. Provide a report regarding the audit finding or report of the performance of duties of the Internal Audit Unit to the President Director;
3. Monitor the follow-up actions of the findings that have been reported.

To carry out those main tasks, the Internal Audit Unit is responsible to:

1. Undertake supervisory work program for the implementation of all policies and decisions of the Board of Directors and the Company's work program;
2. Coordinate and control the implementation of activities in the Internal Audit area that relates to audit activities of Operations and Administration & Finance;

3. Melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran laporan atau informasi mengenai segala hal yang dapat menyebabkan kerugian Perusahaan.
 4. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama mengenai hasil pemeriksaan, berikut saran perbaikannya.
 5. Menilai ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, dengan melakukan penilaian dan pemantauan atas semua sistem, prosedur, ketentuan dan operasional Perusahaan untuk mendorong efektifitas dan ketaatan dalam pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai pengendalian/pengelolaan risiko usaha.
 6. Menilai Sistem Pengendalian Intern Perusahaan.
 7. Menilai kewajaran Laporan Keuangan dan Menilai efisiensi dan efektifitas kegiatan Operasional/non operasional perusahaan.
 8. Memberikan pendapat, usulan dan saran perbaikan atas kegiatan operasional/non operasional.
 9. Memotivasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh setiap unit kerja dan wajib melakukan penilaian dan pemantauan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut oleh semua Organ Perusahaan.
 10. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas hasil pemeriksaan SPI maupun Auditor Eksternal dan melaporkan hasil pantauan tersebut kepada Direktur Utama.
3. Conduct research and testament of the correctness of the report or information concerning al matters that is potential to cause the loss of the Company;
 4. Prepare and submit a report to the President Director regarding the results of the findings and the suggestion for improvement.
 5. Assess compliance to the existing provisions, by assessing and monitoring all systems, procedures, rules and operations of the Company to promote the effectiveness and compliance in the implementation, as well as making recommendations to the Board of Directors of the control / management of business risks.
 6. Assess the Company's Internal Control System.
 7. Assess the fairness of financial statements and the efficiency and effectiveness of the Company's operations/ non-operation
 8. Provide opinions, recommendation and suggestions regarding the improvement of operational/non operational activities.
 9. Motivate the implementation of the principles of good corporate governance by each working unit and is compulsory to conduct assessments and monitoring of the implementation of these principles by all instruments of the Company.
 10. Monitor the follow-up of the findings of Internal and External Auditor and report the results to the President Director.



11. Menjadi Mitra Kerja Auditor Eksternal dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan ataupun pemeriksaan lainnya.

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Selama tahun 2013, SPI Perum Jamkrindo telah melaksanakan aktivitas pemeriksaan atas seluruh cakupan-cakupan pemeriksaan yang diperkirakan signifikan dan berpotensi mengganggu pencapaian tujuan Perusahaan. Peran SPI Perum Jamkrindo sebagai katalisator tumbuhnya kesadaran manajemen akan pentingnya Manajemen Risiko telah mampu diimplementasikan secara baik terkait dengan peran SPI sebagai *Strategic Business Partner* bagi manajemen ini Perum Jamkrindo. SPI telah melaksanakan tugas analisa dan evaluasi terhadap sistem yang berjalan maupun yang baru akan di implementasikan mengenai pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektivitas serta efisiensi sistem dan prosedur (*system operating procedure*) serta operasi Perusahaan pada semua bagian dan bidang kegiatan perusahaan serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses Manajemen Risiko serta praktek GCG atas seluruh aspek dan unsur kegiatan Perusahaan, dan melaporkan seluruh temuan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara periodik Audit Intern telah melaksanakan proses monitoring dan pelaporan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *auditee*. Dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaannya, SPI terus berupaya melakukan proses peningkatan kompetensi auditor melalui pendidikan Profesionalisme Audit Internal, training, seminar dan lainnya, yang diharapkan dapat memberikan pembekalan secara proporsional kepada auditor dalam menjalankan tugas pemeriksaannya.

Piagam Internal Audit

Audit internal memiliki Internal Audit Charter yang disusun guna memenuhi kewajiban Perusahaan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN dan Undang-

11. Become Partners of External Auditor in the implementation of the audit of financial statements or other audit.

Duty Implementation of Internal Audit

Throughout 2012, Internal Audit Unit of Perum Jamkrindo has conducted audit for all ranges of audit that significantly and potentially hampers the Company to achieve its objective. Role of Internal Audit Unit of Perum Jamkrindo as a catalyst to raise the awareness of the management concerning the importance of Risk Management has been implemented properly, with regard to the role of Strategic Business Partner for Perum Jamkrindo's management. Internal Audit Unit has analyzed and evaluated the existing and new system that will be implemented for controlling activity, amangement, monitoring of effectiveness and efficiency of system operating procedure and operations of the Company in all divisions and units, as well as assessment of working units' performance quality, evaluates the adequacy and effectiveness of Risk Management process and GCG practices of all aspects and elements of the Company's activities and reports all audit findings in accordance with the applicable regulation.

Internal Audit has conducted monitoring process and reporting of follow-up of improvement strategies carried out by the auditee. To improve the audit quality, Internal Audit continues to improve the auditor skills through education of Internal Audit Professionalism, training, seminars, and others, that is expected to give proper pembekalan to the auditor for discharging duties.

Internal Audit Charter

Internal Audit has Internat Audit Charter that created to comply with Regulation of Ministry of State Owned Enterprise No. PER-01/MBU/2011 regarding the implementation of Good Corporate Governance for SOE and Regulation of RI No. 19 Year 2003 concerning State Owned Enterprise. Furthermore, it is to

undang RI No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Di samping itu untuk mendorong terwujudnya iklim kerja yang kondusif bagi berkembangnya motivasi dan produktivitas kerja yang profesional.

Piagam Satuan Pengawasan Intern merupakan pedoman kerja audit internal yang memuat maksud, visi, misi, struktur dan hubungan kerja, fungsi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kualifikasi auditor internal, ruang lingkup, kebijakan, standar kode etik kerahasiaan, evaluasi dan penyempurnaan.

Dalam piagam tersebut juga dijelaskan tentang ruang lingkup pemeriksaan intern yang meliputi manajemen risiko, pengendalian intern serta tata kelola perusahaan yang baik.

a. lingkup manajemen risiko

- memastikan bahwa risiko-risiko yang dikelola oleh manajemen risiko sudah diidentifikasi, dianalisa, dievaluasi, dimonitor dan dikomunikasikan.
- melaksanakan konsultasi, pemantauan dan evaluasi atas penerapan pengelolaan risiko Perusahaan.
- menyusun dan menerapkan pemeriksaan berdasarkan risiko (risk based audit) yaitu audit berbasis risiko.

b. lingkup pengendalian intern

- lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur yang terdiri dari :
 - Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan
 - Filosofi dan gaya manajemen
 - Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya,
 - Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, dan
 - Perhatian dan arahan yang diberikan oleh Direksi.
- pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, menilai dan mengelola risiko usaha relevan.
- aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian

create a conducive working atmosphere to boost motivation, professionalism, and productivity of the Company.

Internal Audit Charter constitutes guidelines that encompass the Internal Audit's intention, vision, mission, structure and work relations, functions, duties and responsibilities, authorities, qualification of internal auditor, scope of works, policies, standards of confidentiality of ethical code, evaluation, and amendment.

The charter also elaborates with areas of the internal audit, comprising risk management, internal controls, and good corporate governance.

a. Risk management

- Ensuring that risks have been identified, analyzed, evaluated, monitored, and reported.
- Consulting, monitoring, and evaluation the implementation of risk management.
- Preparing and implementing risk-based audit.

b. Internal control's area

- Discipline and structured areas of internal control includes:
 - Integrity, ethical values, and employees' skills.
 - Philosophy and management formula
 - Management's strategy to exercise their authority and responsibility
 - Management and development of human resources, and
 - Attention and direction given by Board of Directors
- Review and manage of business risks to identify, analyze, evaluate, and manage relevant business risks.
- Control activities. This refers to control action for the Company's activity in each level and units such as those related to authority, verification, reconciliation, assessment of work achievement, segregation of duties, and asset protection.

atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan.

- sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Perusahaan.
- monitoring yang merupakan proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal pada setiap tingkat dan unit struktur Perusahaan sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

- Information and communication system. This refers to a process of reporting the operational and financial activity, including compliance with applicable laws.
- Monitoring. This refers to an assessment of internal control quality within each level and units of the Company's structure. The assessment is expected to generate an optimum result for all the Company's activities.

c. lingkup tata kelola perusahaan yang baik

- memastikan bahwa manajemen telah menetapkan nilai dan sasaran Perusahaan dan mengkomunikasikannya dengan para pemangku kepentingan.
- memastikan bahwa semua proses bisnis dalam Perusahaan memenuhi aspek akuntabilitas.
- mengawasi dan mengevaluasi penerapan GCG pada kegiatan operasional Perusahaan.

c. Areas of good corporate governance

- Ensuring that the management has determined values and target of the Company and communicating them to the stakeholders.
- Ensuring that all business process upholds accountability.
- Supervising and evaluating the implementation of GCG in the Company's operational activity.

Evaluasi atas Efektivitas Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern (SPI) membantu Manajemen untuk mendorong ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kinerja perusahaan agar mencapai sasaran yang ditetapkan.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Jumlah personil SPI per 31 Desember 2013 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala SPI, 2 (dua) orang Kepala Bagian, 4 (empat) orang staf SPI.

Pedoman pelaksanaan yang digunakan SPI dalam melaksanakan tugasnya adalah:

- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2008 tentang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum).

Evaluation of the Effectiveness of Internal Control Systems

Internal Audit Unit (SPI) helps management to promote compliance with the applicable regulations and improve the performance of the company in order to achieve the objectives set.

Internal Audit Unit (SPI) is directly responsible to the Director. The number of personnel SPI per December 31, 2013 amounted to 7 (seven) consisting of 1 (one) the head of SPI, 2 (two) Head of Section, 4 (four) SPI staff.

Guidelines for the implementation of the SPI used in carrying out their duties are:

- Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises.
- Government Regulation No. 95 of 2000 on the Establishment of the Public Enterprise Means Business Development in conjunction with the Government Regulation Number 41 of 2008 on Public Enterprise Jaminan Kredit Indonesia.
- Government Regulation No. 13 of 1998 on Public Company (Perum).

- Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 797/K/1985 tentang Norma Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern.
- Keputusan Direksi Nomor 04/Kep-Dir/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Jaminan Kredit.
- Keputusan Direksi Nomor 58/Dir/IX/1998 tanggal 18 September 1998 tentang Pedoman Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern.
- Piagam Satuan Pengawasan Intern (SPI Charter).

Pelaksanaan Assesment GCG

Satuan Pengawasan Intern (SPI) selama tahun 2013 melakukan *assesment* GCG dengan hasil sebagai berikut:

1. *Assesment* GCG yang dilakukan oleh BPKP untuk tahun 2012 memperoleh skor 75,882 dengan klasifikasi peringkat kualitas penerapan GCG baik.
2. *Self Assesment* GCG yang dilakukan pada tahun 2013 dimana skor *assesment* dapat ditingkatkan menjadi 90,084 dengan klasifikasi peringkat kualitas penerapan GCG sangat baik.

Pihak Yang Mengangkat/Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern

Pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan/pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- Circular Financial and Development Supervisory Agency (BPK) 797/K/1985 Number of Norms of Internal Control Unit Inspection.
- Decision No. 04/Kep-Dir/I/2013 Directors dated January 15, 2013 on Public Company Organizational Structure Credit Guarantee.
- Decision No. 58/Dir/IX/1998 Directors dated 18 September 1998 regarding Guidelines for Examination of Internal Audit.
- Internal Audit Charter (Charter SPI).

GCG Assessment Implementation

Internal Audit has performed GCG assessment in 2013 with the following results:

1. GCG Assessment conducted by BPKP for 2012 was marked 75.882 under GOOD category for its GCG implementation quality.
2. GCG Assessment conducted in 2013 was higher than last year and marked 90.084, which is under very good category for the company's GCG implementation quality.

Parties Appointing/Dismissing Internal Audit Head

Parties involved in the appointment/dismissal process of Internal Audit Head is Board of Directors upon the approval of the Supervisory Board.

AUDIT EKSTERNAL

Kantor AkuntanPublik

Husni, Mucharam & Rasidi

The Royal palace Blok C-18
 Jl. Prof. DR. Soepomo. SH, No. 178 A Jakarta 12870
 Telp. : +6221 8351868/8313413
 Fax : +6221 8351978

Kantor AkuntanPublik

Tanudiredja, Wibisana & Rekan

Plaza 89, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-7 No. 6
 Karet kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940
 Telp.: +6221 5212901
 Fax : +6221 52905555 / 52905050

Kantor Akuntan Publik

Zainal, Juhana & Rekan

Prima Bintara E.4 No. 8
 Jl. Bintara 8, Bekasi Barat 17134
 Telp. : +6221 888651622/70836936
 Fax : +6221 88851622

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Jl. Pramuka No. 33
 Jakarta Timur 13120
 Telp. : +6221 85910031 Ext 0102 atau 0103
 Fax : +6221 85910030

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Jalan Gatot Subroto Kav. 31
 Jakarta Pusat 10210
 Telp. : +6221 25549000

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menara Radius Prawiro Lt. 2
 Komplek Perkantoran Bank Indonesia
 Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta Pusat
 Telp. : +6221 500655
 Fax : +6221 3866032

EXTERNAL AUDIT

Public Accounting Firm

Husni, Mucharam & Rasidi

The Royal palace Blok C-18
 Jl. Prof. DR. Soepomo. SH, No. 178 A Jakarta 12870
 Telp. : +6221 8351868/8313413
 Fax : +6221 8351978

Public Accounting Firm

Tanudiredja, Wibisana & Rekan

Plaza 89, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-7 No. 6
 Karet kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940
 Telp.: +6221 5212901
 Fax : +6221 52905555 / 52905050

Public Accounting Firm

Zainal, Juhana & Rekan

Prima Bintara E.4 No. 8
 Jl. Bintara 8, Bekasi Barat 17134
 Telp. : +6221 888651622/70836936
 Fax : +6221 88851622

Development and Financial Supervisory Agency (BPKP)

Jl. Pramuka No. 33
 Jakarta Timur 13120
 Telp. : +6221 85910031 Ext 0102 atau 0103
 Fax : +6221 85910030

State Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI)

Jalan Gatot Subroto Kav. 31
 Jakarta Pusat 10210
 Telp. : +6221 25549000

Financial Services Authority (OJK)

Menara Radius Prawiro Lt. 2
 Komplek Perkantoran Bank Indonesia
 Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta Pusat
 Telp. : +6221 500655
 Fax : +6221 3866032

Peran Dan Fungsi Audit Eksternal

Pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan atas Perundang-undangan, Kebijakan Perusahaan, dan ketentuan terkait atas bisnis yang dilakukan Perum Jamkrindo tidak hanya dilakukan oleh Auditor Internal dalam hal ini adalah Satuan Pengawasan Intern melainkan dilakukan juga oleh Auditor Eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pelaksanaan Fungsi Audit Eksternal

Pada tahun 2013 Perum Jamkrindo telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah mendapatkan izin dan terdaftar di Departemen Keuangan yakni KAP Husni, Mucharam dan Rasidi. Penunjukan KAP berpedoman pada regulasi yang berlaku dan dipilih melalui tahapan untuk mengaudit sesuai ketentuan atau kriteria sebagai berikut:

- 1) KAP yang ditunjuk harus memiliki legalitas yang jelas.
- 2) Berpengalaman dalam memeriksa Perusahaan Bidang Jasa Keuangan.
- 3) Memahami dan menguasai regulasi terkait bisnis Perusahaan dan peraturan lainnya yang relevan.
- 4) Memahami produk-produk Perusahaan.
- 5) Berpengalaman dan paham mengenai Manajemen Risiko.

Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik yang telah melakukan Audit laporan keuangan tahunan Perusahaan pada Tahun 2013 adalah Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi.

Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Perum Jamkrindo. Kantor Akuntan Publik Husni Mucharam & Rasidi juga telah bekerja secara independen dan memenuhi kriteria yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi telah melakukan Audit laporan keuangan Tahunan Perusahaan Perum Jamkrindo sebanyak 5 (lima) periode yaitu Periode Tahun Buku 2009, 2010, 2011, 2012 serta 2013.

Role and Function of Internal Audit

The supervisory to the implementation of compliance with Legislations, Company Policies, and Provisions does not conducted only by Internal Auditor in this regard is the Internal Audit is also performed by External Auditor namely State Audit Board (BPK), the National Agency of Finance and Development (BPKP), Financial Services Authority (OJK) and Public Accounting Firm (KAP).

Implementation of External Audit Function

In 2013, Perum Jamkrindo has appointed Public Accountant Firm who has obtained a license and registered in the Ministry of Finance, namely KAP Husni, Mucharam and Rasidi. The appointment of KAP was based on the applicable regulations and selected through a procedure of audit in accordance with the following criterias:

- 1) The appointed KPA must have clear legality.
- 2) Experienced in auditing Company in Financial Service.
- 3) Understanding and controlling regulation related to the Company's business, and other relevant laws.
- 4) Understanding the Company's products.
- 5) Experienced and understanding of Risk Management.

Public Accounting Firm

The Public Accounting Firm that has conducted audit of the annual financial statement of the Company in 2013 was Public Accounting Firm of Husni, Mucharam & Rasidi.

Public Accounting Firm of Husni, Mucharam & Rasidi has submitted the result of the audit and letter management to Perum Jamkrindo. Public Accounting Firm of Husni, Mucharam & Rasidi also has worked independently and met the criteria agreed at the beginning.

Public Accounting Firm of Husni, Mucharam & Rasidi has audited Perum jamkrindo's annual Financial Statement for 5 (five) periods namely Period of Fiscal Year 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013.

Jasa lain yang diberikan akuntan adalah jasa *review* perhitungan amortisasi Pendapatan IJP/IJK, Beban *Co Guarantee*, *Fee Base* dibayar dimuka posisi Desember 2012 yang diakui di tahun 2013 dan tahun berikutnya oleh KAP Zainal, Juhana & Rekan dan jasa konsultan untuk memberikan pendapat akuntan atas perlakuan akuntansi Perum Jamkrindo sehubungan dengan transaksi yang telah dilakukan dengan PT Asuransi Syariah Mubarakah oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.

Other services given by the accountant are calculation review of Income amortization of IJP/IJK, CoGuarantee Expenses, advanced Fee Base in December 2012 validated in 2013 and the next future by KAP Zainal, Juhana & Partners and consultant service to give accountant opinion on the accounting behaviour of Perum jamkrindo as to the transactions made with PT Asuransi Syariah Mubarakah by KAP Tanudiredja, Wibisana & Partners.

225

Hasil Temuan Audit Eksternal

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Audit Eksternal

Posisi / Position	Jumlah Temuan / Total Finding					
	BPK		OJK		KAP	
	2013	2012	2012	2011	2013	2012
Total temuan / Total Finding	-	1	6	7	7	8
Telah diselesaikan / Finished	-	-	6	7	-	7
Dalam proses penyelesaian / Finishing	-	1	-	-	7	1
Belum diupayakan penyelesaian / Unfinished	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti dengan proses hukum / Followed Up by Legal Process	-	-	-	-	-	-

Findings from External Audit

The total findings of the External Audit Assessment

MANAJEMEN RISIKO

Blue-Print Manajemen Risiko

Untuk melakukan implementasi manajemen risiko terintegrasi, Perum Jamkrindo, telah menyusun Blue-Print Manajemen Risiko Terintegrasi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Blue-Print yang telah diselesaikan pada tahun 2010 tersebut merupakan cetak biru arsitektur pengembangan Enterprise Risk Management (ERM).

Secara umum, Blue-Print ERM perum Jamkrindo terdiri dari 6 komponen utama yaitu komitmen, struktur dan fungsi, mekanisme, proses manajemen risiko, sistem pendukung, dan pencapaian. Keenam komponen tersebut memiliki berbagai elemen sebagai bagian utamanya, secara lebih lengkap model Blue-Print ERM perum Jamkrindo digambarkan dalam model di bawah ini.

RISK MANAGEMENT

Blue-Print of Risk Management

To implement the integrated risk management, Perum Jamkrindo has compiled a Blue-Print of Integrated Risk Management of the Perusahaan Umum (Perum). The blue-print that was completed in 2011 is an architectural blueprint of the development of Enterprise Risk Management (ERM).

Broadly speaking, the Blue-Print of ERM of Perum Jamkrindo consists of six main components, namely commitment, structure and function, mechanism, risk management processes, supporting systems, and achievement. The six components have a variety of elements as its core. In detail, the model of the ERM Blue-Print of Perum Jamkrindo is demonstrated as follows:

Model Blue-Print Manajemen Risiko Terintegrasi Perum
Jamkrindo

Model of Integrated Risk Management of Perum Jamkrindo



Road Map Manajemen Risiko

Untuk mencapai kondisi penerapan manajemen risiko seperti yang telah dituangkan dalam blueprint Manajemen Risiko, Perum Jamkrindo telah menyusun road map implementasi pengembangan manajemen risiko.

Untuk mencapai kondisi tersebut, milestone pencapaian Blue-Print manajemen risiko terintegrasi Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

Risk Management Road Map

To meet the implementation of risk manageemnt as stated in the blueprint of Risk Management, Perum Jamkrindo has prepared a road map for the risk management development.

To reach the target, milestone of Blue-Print integrated risk management of Perum Jamkrindo is as follows:



227

Implementasi Manajemen Risiko

Kegiatan Manajemen Risiko dilakukan secara periodik dan insidental. Kegiatan Manajemen Risiko yang dilakukan secara periodik adalah proses manajemen risiko yang terdiri dari 4 tahapan proses, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan monitoring dan evaluasi risiko.

Pada tahap awal tersebut, proses yang dilakukan adalah Identifikasi dan Penilaian Risiko Inherent. Atas hasil identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan evaluasi untuk perbaikan proses manajemen risiko.

Kegiatan Manajemen Risiko yang bersifat insidental adalah pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap-tahap tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP proses bisnis berbasis risiko dan pemberian opini terkait dengan hal-hal yang harus dimintakan pendapat kepada Divisi Manajemen Risiko.

Kegiatan insidental berupa pemberian opini untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak signifikan bagi keberlangsungan perusahaan, pembuatan produk dan/atau aktivitas baru, transaksi dengan nilai tertentu, kebijakan penghapusbukuan piutang perusahaan, pembuatan SOP, RJP, RKAP, implementasi penggunaan aplikasi/software baru, penentuan bank baru untuk penempatan deposito dan investasi, dan kebijakan lainnya yang bersifat strategis.

Implementation of Risk Management

The Risk Management activities are carried out periodically and incidentally. The periodical activity refers to a risk management process consisting of four stages, i.e. risk identification, risk assessment, risk management and monitoring, and risk evaluation.

In the early stage, the process carried out is Identification and Assessment of Inherent Risk. Based on the identification and risk assessment, evaluation for improvement of risk management will be carried out.

Incidental Risk Management activities refer to implementation of risk management carried out at certain stages in accordance with the risk-based SOP of business processes. The activity also includes provision of opinion related to the matters of concerns to Division of Risk Management.

Incidental activities such as giving opinions on things which is essential for strategic matters significantly impact on the sustainability of the company, product manufacturing, and/or new activities, transaction within certain values, the company's receivables write-off, the creation of SOP, RJP, RKAP, implementation of new application/software, determination of new banks to place deposit and investment, and other strategic policies.

Sesuai Per-Dir No. 03 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Pendapat (Opini) Manajemen Risiko Perum Jamkrindo, pelaksanaan pemberian opini tersebut mulai diterapkan secara resmi pada tanggal 1 Juli 2013, namun demikian mulai bulan Oktober 2011 telah dilakukan pemberian opini dalam rangka pembelajaran.

Pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013, telah dilakukan pemberian opini sebanyak 50 (lima puluh), baik opini terkait dengan kegiatan penjaminan, keuangan, maupun kegiatan pendukung lainnya.

Di samping pemberian pendapat kepada unit kerja terkait, Divisi MR juga memberikan masukan kepada Direksi mengenai hal-hal berikut :

- Proporsi re-asuransi penjaminan kredit terkait dengan rencana pelaksanaan mitigasi risiko melalui perusahaan reasuransi.
- Pembukaan Unit Pelayanan Perum Jamkrindo yang disusun oleh Divisi Penjaminan Syariah kepada Direktur MRTI.
- Menyampaikan evaluasi kerjasama Bank Jabar Banten kepada Direktur MRTI.
- Pemetaan Pasar Penjaminan dengan Mempertimbangkan Risiko.

Kelengkapan Manajemen Risiko

Untuk implementasi manajemen risiko yang terintegrasi, diperlukan beberapa kelengkapan yang menunjang pelaksanaan manajemen risiko. Terkait dengan hal tersebut, Perum Jamkrindo telah menyusun beberapa kelengkapan sebagai berikut :

- Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko

Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko merupakan peraturan yang menyatakan tentang penerapan manajemen risiko dan perangkat pendukung yang diperlukan. Dalam peraturan tersebut dilampirkan pernyataan tentang pengelolaan risiko yang merupakan pernyataan Direksi dan seluruh Pejabat Perum Jamkrindo mengenai kebijakan penanganan risiko perusahaan. Pernyataan tersebut merupakan bentuk tertulis dari komitmen Direksi dan Pejabat Perum Jamkrindo dalam menerapkan manajemen risiko dalam setiap tahapan kegiatan.

In accordance with Regulation of Board of Directors number 03/Per-Dir/X/2011 dated October 10, 2011 regarding Opinion of Risk Management of Perum Jamkrindo, the input provision has been fully carried out in 2013, however since October 2011 the activity has been implemented in a trial.

In the period of January 1 to December 31, 2013, 50 (fifty) times input provision had been carried out, opinions related to guarantee activities, financial or other supporting activity.

In addition to input provision related to working unit, MR Division also suggested Board of Directors regarding:

- Re-assurance propotion credit in accordance with credit insurance by planning the implementation of risk mitigation.
- Open Service Unit of Perum Jamkrindo that porposed by Syaria Guarantee Division to the Director of MRTI.
- Deliver the evaluation of Jabar Banten Bank to the Director of MRTI.
- Guarantee Market Mapping to consider Risk Management.

Completeness of Risk Management

In order to implement integrated risk manajement, several requirements are needed to support the implementation of risk management. In this regard, Perum Jamkrindo has prepared some of the requirements as follows:

- Regulation of Board of Directors regarding the Implementation of Risk Management
Regulation of Board of Directors regarding the Implementation of Risk Management states its implementation and the required supporting instruments. The regulation attaches the statements of the risk management, which are statements of the Board of Directors and all Officers of Perum Jamkrindo regarding the company's policies of risk management. The statements reflect commitment of the Board of Directors and Officers of Perum Jamkrindo in implementing the risk management in every phase of activity.

- Organisasi Manajemen Risiko Perum Jamkrindo
Secara struktural, Direksi telah menetapkan struktur organisasi yang di dalamnya terdapat divisi yang menangani manajemen risiko. Di samping organisasi yang bersifat struktural, terdapat pula struktur yang bersifat *ad hoc*, yaitu Komite Manajemen Risiko Perum Jamkrindo.

Komite Manajemen Risiko (KMR) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia adalah komite yang bertugas membantu Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dalam melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko perusahaan, tata cara meminimalisasi risiko, dalam hubungannya dengan risiko usaha.

Tujuan dan manfaat dari Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Strategi dan Pengambilan Keputusan Risiko Strategis Perusahaan Komite Manajemen Risiko membangun strategi pengelolaan risiko strategis sekaligus mengambil keputusan terkait risiko strategis perusahaan. Komite Manajemen Risiko melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaporan risiko yang dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko (UMR) dan *Risk Taking Unit* (RTU)/*Risk Owner*/Pemilik Risiko.
- b. Komite Manajemen Risiko memberikan pengawasan independen atas proses manajemen risiko dan pelaksanaan tindak lanjut penanganan risiko.
- c. Komite Manajemen Risiko juga memberikan rekomendasi tentang risiko usaha, tata cara meminimalisasi risiko, dalam hubungannya dengan risiko usaha.

Struktur dan tugas keanggotaan Komite Manajemen Risiko (KMR) berbeda baik di tingkat Korporat yaitu Kantor Pusat dengan di tingkat Unit Proses Bisnis (UPB) yaitu Kantor Cabang, disesuaikan dengan pihak yang mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut, dengan pihak yang melaksanakan keputusan.

- Risk Management Organization of Perum Jamkrindo
Structurally, the Board of Directors has established an organizational structure in which there is a division in charge of risk management. In addition to the structural organization, the Company also has *ad hoc* structure, namely the Risk Management Committee of Perum Jamkrindo.

Risk Management Committee (RMC) of Perusahaan Umum (Perum) Jamkrindo is a committee assigned to assist the Board of Directors of Perum Jamkrindo in conducting regular assessments and providing recommendations concerning the Company's risks, procedures of mitigating the risks with regard to the business risk.

The purpose and benefits of the Risk Management Committee are as follows:

- a. Determining Strategy and Strategic Decision-Making of Risk Management Committee, establishing strategic risk management strategies, and making decisions related to corporate strategic risks. Risk Management Committee conducts an independent supervision of the risk reporting process implemented by the Risk Management Unit (UMR) and Risk Taking Unit (RTU)/Risk Owner.
- b. Risk Management Committee provides independent supervisory both to the risk management process and the implementation of follow-up of the risk.
- c. Risk Management Committee also provides advice on business risks, procedures for minimizing risks, regarding business risks.

The structure and tasks of the Risk Management Committee membership (KMR) are different at the Corporate level and at the Process Business Unit (UPB) in the Branch and Sub-Branch Office, adapted to whom the decisions are made and the responsibility for the decision and the person who should.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Tingkat Korporat

Ketua KMR Korporat	: Direktur Utama
Sekretaris KMR Korporat	
merangkap anggota	: Kepala Bagian Manajemen Risiko
Anggota KMR Korporat	: Seluruh Direksi Seluruh Kepala Divisi

Membership of the Corporate Risk Management Committee

Head of Corporate KMR	: President Director
Secretary of Corporate KMR	: Head of Risk Management who is also a member
Corporate KMR Members	: All Directors All Head of Divisions

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Tingkat Unit Proses Bisnis (UPB)

Ketua KMR Unit Proses Bisnis	: Kepala Unit Kerja
Sekretaris KMR UPB	: PIC ERM
merangkap anggota	
Anggota KMR Unit Proses Bisnis	: Seluruh Kepala Bagian/ Kepala Seksi di dalam Unit Kerja

Membership of the Risk Management Committee in the Business Processes Unit (UPB)

Chairman of KMR Business	: Head of Unit Process Unit
Secretary of KMR UPB and member	: PIC ERM PIC ERM
Member of the Business Process	: All Head of Departments Unit KMR / Head of Sections at the Unit of Works

Di samping itu, untuk kelancaran pelaksanaan proses manajemen risiko, di setiap unit kerja ditunjuk seorang *Person in Charge* (PIC) yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan proses manajemen risiko di masing-masing unit kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, PIC Manajemen Risiko berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Divisi Manajemen Risiko.

- Panduan Manajemen Risiko Perum Jamkrindo
Panduan Manajemen Risiko merupakan buku yang menjadi payung bagi pelaksanaan proses manajemen risiko yang memuat kebijakan manajemen risiko Perum Jamkrindo dan pedoman pelaksanaan proses manajemen risiko Perum Jamkrindo. Panduan manajemen risiko tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam SOP Manajemen Risiko, dan SOP Proses Bisnis Berbasis Risiko.
- SOP Proses Manajemen Risiko
SOP Proses Manajemen Risiko merupakan SOP yang ditujukan untuk memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan proses manajemen risiko pada Perum Jamkrindo.

In addition, to enhance the smooth process of risk management, Person in Charge at each working unit is appointed to coordinate the implementation of risk management process at each working unit. PIC of Risk Management coordinates and consults with Division of Information Technology and Risk Management Division in performing duties.

- Risk Management Guidelines of Perum Jamkrindo
Risk Management Guidelines of Perum Jamkrindo is a guideline for the implementation of the risk management process that includes risk management policies and guidelines for the implementation of risk management process of Perum Jamkrindo. Risk management guidelines are then derived (*cascading*) into SOP of Risk Management, Risk-Based Business Process SOP, and SOP Manual of Risk-Based Decision Making
- SOP of Risk Management Process
SOP of Risk Management Process is a standard operating procedure that is intended to provide technical guidance in the implementation of risk management processes at Perum Jamkrindo.

▪ Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko

Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko diterbitkan dengan Surat Edaran Nomor 15/SE/4/VII/2012. Petunjuk Teknis tersebut memuat penjelasan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap Unit Kerja terkait penerapan Manajemen Risiko di Perum Jamkrindo.

Hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan pelaksanaan penerapan manajemen risiko tersebut secara garis besar adalah :

1. Identifikasi Risiko
2. Penilaian Risiko
3. Penanganan Risiko
4. Monitoring dan Evaluasi Risiko
5. Komite Manajemen Risiko
6. Pelaporan *Loss Event* (Risiko yang telah terjadi)
7. Pelaksanaan proses bisnis dengan mempertimbangkan risiko
8. Pemberian Opini/Pendapat Manajemen Risiko atas risiko yang berdampak secara signifikan bagi Perusahaan.

▪ SOP Proses Bisnis Berbasis Risiko

SOP Proses Bisnis Berbasis Risiko merupakan SOP dari suatu proses bisnis yang disusun dengan mempertimbangkan risiko yang terkait proses tersebut. SOP tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa risiko yang tercantum dalam risk register dan pengendalian risiko yang diperlukan telah dipertimbangkan dalam pelaksanaan proses bisnis, serta untuk jenis-jenis risiko baru dipastikan telah mendapatkan opini dari bagian ERM sebagai *second* opinion dalam pengambilan keputusan. Mengingat jenis kegiatan yang ada di Perum Jamkrindo cukup beragam, maka penyusunan SOP proses bisnis berbasis risiko dilakukan secara bertahap.

Pada tahun 2013 telah dilakukan penyusunan 6 SOP proses bisnis berbasis risiko, yaitu:

- Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perum Jamkrindo yang ditetapkan dengan Per-Dir No. 13/Per-Dir/III/2013 tanggal 26 Maret 2013.
- SOP Kerjasama Mitra Keagenan Penjaminan yang ditetapkan dengan Per-Dir No. 23/Per-Dir/IV/2013 tanggal 10 April 2013.

- Technical Guidelinses of Risk Management Implementation
Technical Guidelinses of Risk Management Implementation is issued with Letter Number 15/SE/4/VII/2012. The technical guidelines consist of job description for each Working Unit regarding the implementation of Risk Management at Perum Jamkrindo.

General steps that have to be performed related to the implementation of risk management is as follows:

1. Risk Identification
2. Risk Assessment
3. Risk Management
4. Risk Monitoring and Evaluation
5. Committee of Risk Management
6. Reporting of Loss Event (Risk faced)
7. The implementation of business process with risk consideration
8. Provision of Opinion/Risk Management regarding risks significantly affect the Company

• SOP of Risk-Based Business Process

SOP of Risk-Based Business Process is a SOP of a structured business processes that considers the risk associated with these processes. The SOP is intended to ensure that the risks listed in the risk register and the required risk control has been considered in the execution of business processes. The types of new risks have been ascertained to have got the opinions of the ERM as a second opinion in the decision-making process. Given the kinds of activities that exists in Perum Jamkrindo is quite diverse, the preparation of the SOP process of risk- based business process is carried out in stages.

In 2013, 6 SOP of risk-based business processes have been issued, such as:

- Procurement of Goods and Services of Perum Jamkrindo stipulated in Regulation of Board of Directors No. 13/Per-Dir/III/2013, dated March 26, 2013.
- SOP of Cooperation Partner Assurance Agency as stipulated in Regulation of Board of Directors No. 23/Per-Dir/IV/2013, dated April 10, 2013.

- SOP Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang ditetapkan dengan Per-Dir No. 27/Per-Dir/V/2013 tanggal 1 Mei 2013.
- SOP Kerjasama Pialang Reasuransi yang ditetapkan dengan Per-Dir No. 30/Per-Dir/V/2013 tanggal 3 Mei 2013.
- SOP Kerjasama Reasuransi/Asuransi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesiayang ditetapkan dengan Per-Dir No. 32/Per-Dir/V/2013 tanggal 3 Mei 2013.
- SOP penyusunan SOP yang ditetapkan dengan Per-Dir No. 37/Per-Dir/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013.

Dengan adanya penambahan SOP tersebut, maka pada tahun 2013 telah terdapat 17 SOP proses bisnis berbasis risiko.

- Sistem Pendukung Manajemen Risiko Terintegrasi
Terkait dengan sistem pendukung manajemen risiko terintegrasi, pada tahun 2011, perusahaan telah mulai membangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mempermudah proses identifikasi, penilaian risiko, dan tindak lanjut penanganan risiko. Dengan adanya aplikasi, data risiko dapat tersimpan dalam bentuk *data base* yang terstruktur.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko telah selesai disusun dan telah ditetapkan dalam Per-Dir No. 6/Per-Dir/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Manual Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (Manual SI-MR) yang telah disosialisasikan kepada seluruh *Risk Owner* pada tahun 2012.

Atas aplikasi tersebut pada tahun 2013 telah dilakukan Pengembangan Fitur Aplikasi SIMR untuk mengakomodasi proses manajemen risiko yang saat ini masih dilakukan secara manual. Proses pengembangan tersebut dilakukan bekerjasama dengan Divisi Teknologi Informasi, yang ditetapkan dalam suatu Tim dengan Kep-Dir Nomor 58/Kep-Dir/III/2013 tanggal 27 Maret 2013. Proses pengembangan tersebut telah diselesaikan dan sedang dilakukan proses penetapan peraturan direksi terkait dengan hal tersebut.

- SOP of People's Business Credit (KUR) Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Guarantee Credit as stipulated in Regulation of Board of Directors No. 27/Per-Dir/V/2013, dated May 1, 2013.
- SOP of Reinsurance Broker Cooperation as as stipulated in Regulation of Board of Directors No. 30/Per-Dir/V/2013, dated May 3, 2013.
- SOP of Reinsurance Cooperation/ Perusahaan Umum Assurance as stipulated in Regulation of Board of Directors No. 30/Per-Dir/V/2013, dated May 3, 2013.
- SOP of SOP Arrangment as stipulated in Regulation of Board of Directors No. 37/Per-Dir/X/2013, dated October 22, 2013.

With the addition of the SOP, then in 2013 there have been 17 SOP-based business process risk.

- Supporting System of Integrated Risk Management
Pertaining to supporting system of integrated risk management, in 2011, the Company has started to build Application of Risk Management Information System. The application functions to simplify the identification process, risk assessment and follow-up of risk management. With the application, risk data can be stored in a structured data base.

The Application of Risk Management Information System has been prepared and stipulated in Regulation of Board of Directors No. 6/Per-Dir/IV/2012 dated April 30,2012 regarding the Manual of Application of Risk Management Information System (Manual SI-MR) that has been socialized to all Risk Owners in 2012.

In accordance with the application, in 2013 SIMR Application of Development Feature has been conducted to accomodate management risk that is running manually. The development process cooperated with the Division of Information Technology, as stipulated by a Team in Regulation of Board of Directors No. 58/Kep-Dir/III/2013 dated March 27, 2013. The process of development has been finished and being conducted the directors' regulation regarding to the development process.

Jenis dan Pengelolaan Risiko Selama Tahun 2013

Beberapa risiko yang relatif signifikan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Risiko Penjaminan Kredit

Risiko Penjaminan Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya default rate dan tingkat NPL kredit yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi.

Pada tahun 2013, beberapa indikator risiko penjaminan kredit mengalami penurunan. Default Rate mengalami peningkatan 62,07% dari tahun 2012, Tingkat NPL meningkat 44,31% dari tahun 2012, tingkat pencapaian pengembalian piutang subrogasi mengalami penurunan 41,87% dari tahun 2012. Namun demikian, terdapat satu indikator yang mengalami kenaikan, yaitu Recovery Rate Piutang Subrogasi, dengan kenaikan sebesar 27,07% dari tahun 2012.

Risk Variety and Management of 2013

Beberapa risiko yang relatif signifikan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Risiko Penjaminan Kredit

Risiko Penjaminan Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya default rate dan tingkat NPL kredit yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi.

Pada tahun 2013, beberapa indikator risiko penjaminan kredit mengalami penurunan. Default Rate mengalami peningkatan 62,07% dari tahun 2012, Tingkat NPL meningkat 44,31% dari tahun 2012, tingkat pencapaian pengembalian piutang subrogasi mengalami penurunan 41,87% dari tahun 2012. Namun demikian, terdapat satu indikator yang mengalami kenaikan, yaitu Recovery Rate Piutang Subrogasi, dengan kenaikan sebesar 27,07% dari tahun 2012.

Uraian/ Description	2012 (Rp)	2013 (Rp)	Pertumbuhan/ Growth (%)
$\text{Default rate} = \frac{\text{Biaya Klaim}}{\text{Volume Penjaminan}} \qquad \text{Default rate} = \frac{\text{Claim Cost}}{\text{Guarantee Volume}}$			
Biaya klaim / Claim Cost	618.015.662.668	898.582.003.777	
Volume penjaminan/ Guarantee Volume	52.385.231.625.151	46.996.238.461.142	
DR	1,18%	1,91%	62,07%
$\text{NPL} = \frac{\text{Outstanding Kredit Kol 3 + 4 + 5}}{\text{Total Outstanding Kredit}} \qquad \text{NPL} = \frac{\text{Outstanding Kredit Kol 3 + 4 + 5}}{\text{Total of Outstanding Credit}}$			
Outstanding kredit kol 3+4+5	104.589.511.913	61.907.452.709	
Total Outstanding Kredit/ Total of Outstanding Credit	91.064.419.180.820	97.685.466.719.275	
NPL	0,11%	0,17%	44,31%
$\text{Tingkat Pencapaian Pengembalian Subrogasi} = \frac{\text{Realisasi Angsuran Subrogasi}}{\text{Target Angsuran Subrogasi}} \qquad \text{Subrogation Return Rate} = \frac{\text{Subrogation Instalment Realization}}{\text{Subrogation Instalment Target}}$			
Realisasi angsuran subrogasi / Subrogation Instalment Realization	72.479.554.269	126.949.809.855	
Target angsuran subrogasi / Subrogation Instalment Target	50.000.000.000	150.645.785.217	
Tingkat Pencapaian Pengembalian Subrogasi / Subrogation Return Rate	144,96%	84,27%	-41,87%

Uraian/ Description	2012 (Rp)	2013 (Rp)	Pertumbuhan/ Growth (%)
$\text{Recovery Rate Piutang Subrogasi} = \frac{\text{Angsuran Piutang Subrogasi}}{\text{Saldo Piutang Subrogasi}} \quad \text{Subrogation Receivables Recovery Rate} = \frac{\text{Subrogation Receivable Instalment}}{\text{Subrogation Receivable Balance}}$			
Angsuran piutang subrogasi / Subrogation Receivable Instalment	72.479.554.269	126.949.809.855	
Saldo piutang subrogasi /Subrogation Receivable Balance	1.620.616.542.438	2.233.821.481.737	
Recovery Rate Piutang Subrogasi / Subrogation Receivables Recovery Rate	4,47%	3,37%	27,07%

Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka pada proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect*, *Productivity*, *Payment*, dan *Personality*. Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait.

Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan / atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem *scoring*. Berdasarkan *score* ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing Terjamin atau sekelompok Terjamin, atau suatu produk baru.

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah rapat komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan penjaminan (*risk taker unit*) dan pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih obyektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi.

In order to minimize guarantee risk, the credit guarantee process was conducted by using the method 4P, namely Prospect, Productivity, Payment, and Personality in identifying the risks. The items taken into consideration for each aspect were different, regarding corresponded with the characteristics of the guaranteed products, and explained in the system and procedure of the relevant guarantee.

In the implementation of risk prediction could be carried out qualitative and/or quantitatively for each aspect of 4P. The quantitative prediction created by scoring system. Based on the stipulated score, the guarantee risk prediction was able to be stipulated for a Guaranteed or a group of Guaranteed, or a new product.

Subsequently, for decision making of whether a guarantee proposal might be approved or not, a committee meeting was held. In line with the careful principle, the members of the committee consist of the Official who was involved directly with risk taker unit and the official who was involved directly with the risk financing unit. By this mechanism which decision making involved two or more parties from the different sides, the decision is expected to be more objective and risk potential of wrong decision-making may be minimized.

Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

Pada tahun 2013, di samping upaya mitigasi tersebut, perusahaan juga melakukan beberapa mitigasi risiko lainnya yaitu:

- Melakukan pembaharuan perjanjian kerjasama dengan menambahkan klausula yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko.
- Melakukan penyebaran risiko dengan menambah mitra kerja baru dan menambah produk yang dikerjakakan dengan mitra kerja.
- Menambah produk yang dipasarkan oleh Perusahaan.
- Melakukan penjajakan penyebaran risiko dengan bekerjasama dengan perusahaan reasuransi.
- Memanfaatkan jasa agen yang dapat membantu menyeleksi calon Terjamin untuk Penjaminan Kredit non KUR.
- Melakukan co-guarantee KUR untuk penyebaran risiko Penjaminan KUR.
- Melakukan koordinasi dengan Komite Kebijakan terkait dengan pelaksanaan Program KUR untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul.
- Melakukan pembatasan volume penjaminan untuk produk yang berisiko tinggi.
- Melakukan updating data piutang subrogasi termasuk agunan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan upaya penagihan piutang subrogasi agar upaya tersebut dapat dilakukan secara efektif.
- Mengoptimalkan penagihan piutang subrogasi.

2. Risiko Co-Guarantee

Co-guarantee adalah kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan perusahaan penjaminan lain atau asuransi dalam bentuk penutupan risiko tertentu. Terkait dengan kerjasama tersebut, maka Perum Jamkrindo ter-ekspos oleh risiko *co-guarantee*. Risiko *Co-Guarantee* merupakan risiko tidak tertagihnya piutang *co-guarantee*. Sesuai dengan Per-Dir

Inspite of being used to assist the guarantee decision-making, the result of risk analysis was also turned in to one of the considerations in conducting the observation of the running credit. For the high risk credit, the observation was conducted more intensively.

In 2013, in addition to mitigation, the company also conducted some other risk mitigation measures such as:

- To renew the contract by adding a clause that able to be used to minimize the risk
- To spread the risk by adding new partners and products in cooperation with partners
- To increase products that marketed by the Company
- To conduct risk assessment in cooperation with reinsurers
- To utilize the services of an agent/ broker that can help to select candidates for the Guaranteed for the Credit Guarantee Multi-purpose
- To co-guarantee of KUR to minimize the risk of KUR Guarantee
- To coordinate with the Policy Committee related to the implementation of the KUR program to anticipate problems that may arise.
- To limit the guarantee volume for high-risk product
- To update data of subrogation receivables, including factoring as one consideration to effectively collect subrogation receivables.
- To optimize the collection of subrogation receivables.

2. Risk of Co-Guarantee

Co-guarantee is a partnership between Perum Jamkrindo with other insurance companies or insurance in the form of the closure of certain risks. Associated with such cooperation, Perum Jamkrindo is exposed to a co-guarantee risk. Co-Guarantee risk is the risk of uncollectible co-guarantee receivables. In accordance with the Regulation

nomor 15 tanggal 29 Desember 2010 tentang Panduan Manajemen Risiko, risiko *co-guarantee* digolongkan ke dalam kategori risiko operasional dengan sub kategori risiko *counterpart*.

Salah satu indikasi besaran risiko *co-guarantee* adalah besarnya piutang *co-guarantee* dibandingkan dengan rata-rata pengajuan klaim *co-guarantee* dengan mitra *co-guarantee* yang terkait. Sesuai dengan Per-Dir no. 14 tanggal 22 Desember 2011, piutang *co-guarantee* dinyatakan wajar apabila saldo piutang *co-guarantee* yang belum diselesaikan oleh mitra *co-guarantee* maksimal 3 (tiga) bulan rata-rata pengajuan penggantian pembayaran klaim periode terakhir.

Pada tahun 2013, *co-guarantee* dilakukan dengan bekerjasama dengan 2 (dua) perusahaan asuransi, yaitu PT. Heksa Eka Life Insurance (PT. Heksa) dan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin (PT. AL Amin). Performance mitra *co-guarantee* Perum Jamkrindo tersebut adalah sebagai berikut :

of Board of Directors number 15 dated December 29, 2010 on Risk Management Guidelines, co-guarantee risk is classified into the category of operational risk with the sub category of counterpart risk.

The larger amount of co-guarantee receivable compared to the average co-guarantee claim with partner-related co-guarantee is one of indicators to determine the level of co-guarantee risk. Pursuant to the Regulation of Board of Directors no. 14 dated December 22, 2011, co-guarantee receivables is deemed normal provided that the co-guarantee receivables that have not been resolved by the partners of co-guarantee is at the average of maximum of 3 (three) months of filing the reimbursement claims in the last period.

In 2013, co-guarantee was conducted in cooperation with 2 (two) assurance company, namely PT Heksa Eka Life Insurance (PT. Heksa) and PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin (PT. Al Amin). The partnership performance of Perum Jamkrindo is as follows:



Mitra Co-Guarantee Co-Guarantee Partner	Saldo Piutang Co-Guarantee Co-Guarantee Receivable Balance	Rata-rata Pengajuan Klaim Co-Guarantee per Bulan Average of Co-Guarantee Proposed Claim per Month	Perbandingan Saldo Piutang terhadap 3 Bulan Rata-rata Pengajuan Comparison of Receivable Balance towards 3 Months Average Proposed
PT Heksa	12.044	5.471	0,73
PT AJS Al-Amin	50.595	9.658	1,75

Untuk meminimalkan risiko *co-guarantee*, perusahaan melakukan mitigasi dengan:

- Melakukan evaluasi kinerja mitra *co-guarantee* untuk meminimalisir risiko.
- Melakukan penyempurnaan perjanjian.
- Melakukan rekonsiliasi dan penagihan piutang *co-guarantee* secara berkala.

In order to minimize the risk of *co-guarantee*, the company mitigated the risk by:

- Evaluating the performance of *co-guarantee* partners to minimize risk.
- Amending the contract by adding a clause to minimize the risk;
- Performing reconciliation and collection of *co-guarantee* receivables in a regular basis.

3. Risiko Keuangan

Risiko Keuangan dapat tercermin dari risiko likuiditas suatu perusahaan. Sesuai dengan Per-Dir nomor 15 tanggal 29 Desember 2010 tentang Panduan Manajemen Risiko, Risiko Likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

Sesuai dengan PMK No. 99/PMK. 010/2011 rasio likuiditas penjamin ditetapkan paling sedikit 150% (seratus lima puluh per seratus). Rasio Likuiditas dihitung dengan menggunakan *current ratio* yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.

3. Financial Risk

Pursuant to Regulation of Board of Directors number 15 dated December 29, 2010 regarding Guidelines of Risk Management, Liquidity Ratio partly arises from the Company's incapability of meeting liabilities that have met its maturity.

In accordance with the PMK. 99/PMK. 010/2011, the liquidity ratio of guarantor is determined at the least 150% (one hundred fifty percent). Liquidity ratio is calculated by using the current ratio, which is a comparison between current assets and current liabilities.

Uraian Description	2012 (Rp)	2013 (Rp)	Pertumbuhan (%)
Risiko Likuiditas = set lancar / utang lancar Risk of Liquidity = current assets/current liabilities			
Aset lancar / Current assets	6.491.627	7.090.379	
Utang lancar / Current liabilities	1.222.990	701.979	
Risiko Likuiditas / Liquidity Ratio	530,80%	1010,06%	90,29%

Berdasarkan indikator tersebut, maka risiko likuiditas Perum Jamkrindo relatif kecil.

Regarding to those indicators, the liquidity risk of Perum Jamkrindo is relatively small.

4. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) penjaminan Perum Jamkrindo, yang dapat mengurangi pasar penjaminan (merugikan) Perusahaan serta pergerakan pasar keuangan yang dapat berpotensi menurunnya return dan nilai investasi. Variabel pasar dalam hal ini yang terkait penjaminan adalah tingkat kompetisi, *trend* kredit perbankan, regulasi pasar. Risiko pasar yang terkait dengan investasi adalah suku bunga, inflasi, dan portofolio investasi.

4. Market Risk

Market risk is due to the movements of market variables (*adverse movement*) of credit guarantee market of Perum Jamkrindo, which can reduce the insurance market (*adverse*) of the Company. In addition to that, market risk can be also triggered by movement of financial markets that could potentially decrease investment return and value. Market variables related to the guarantee is the level of competition, the trend of credit bank, market regulation. Market risks associated with investments are interest rates, inflation, and investment portfolio.

Uraian / Description	2012 (Rp)	2013 (Rp)	Pertumbuhan Growth (%)
$\text{Pertumbuhan Penjaminan} = \frac{(\text{Vol Penjaminan } t - \text{Vol Penjaminan } t-1)}{\text{Vol Penjaminan } t-1}$ $\text{Guarantee Growth} = \frac{(\text{Guarantee Vol } t - \text{Guarantee Vol } t-1)}{\text{Guarantee Vol } t}$			
Vol Penjaminan t - Vol Penjaminan t-1 Guarantee Vol t - Guarantee Vol t-1	(673.258.262.505)	(6.546.503.276.353)	
Vol Penjaminan t Guarantee Vol t	53.542.741.737.495	46.996.238.461.142	
Pertumbuhan Penjaminan Guarantee Growth	-1,26%	-13,93%	
$\text{Pencapaian Target Penjaminan} = \frac{\text{Realisasi Vol Penjaminan}}{\text{Target Vol Penjaminan}}$ $\text{Guarantee Target Achievement} = \frac{\text{Realization of Guarantee Volume}}{\text{Guarantee Volume Target}}$			
Realisasi volume penjaminan Realization of Guarantee Volume	53.542.741.737.495	46.996.238.461.142	
Target volume penjaminan Guarantee Volume Target	40.222.236.243.000	53.899.548.546.000	
Pencapaian Target Penjaminan Guarantee Target Achievement	133,12%	87,19%	-34,50%
$\text{Pencapaian Pendapatan Investasi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Investasi}}{\text{Target Pendapatan Investasi}}$ $\text{Investment Income Achievement} = \frac{\text{Realization of Investment Income}}{\text{Investment Income target}}$			
Realisasi pendapatan investasi Realization of Investment Income	205.802.142.173	286.814.758.443	
Target pendapatan investasi Investment Income target	204.721.512.500	281.368.750.000	
Pencapaian Pendapatan Investasi Investment Income Achievement	100,53%	101,94%	-2,49%
$\text{Risiko dari Return Investasi} = \text{standard deviasi return investasi deposito}$ $\text{Risks from Investment Return} = \text{Deviation Standard of Deposit Investment Return}$			
Rata-rata yield Deposito per bulan Average of Yield Deposit per month		0,43% atau setara 5,15% per tahun 0.43% or equal to 5.15% per year	
Standard deviasi per bulan Deviation Standard per month		0,06%	

Dari beberapa indikator tersebut di atas, dapat dilihat pertumbuhan penjaminan, pencapaian target penjaminan, dan pencapaian pendapatan investasi mengalami penurunan.

Secara nominal, nilai penjaminan Perusahaan mengalami peningkatan namun belum mencapai target yang ditetapkan dalam RKAP 2013. Oleh karena itu, dalam jangka panjang Perusahaan perlu waspada terhadap risiko tidak tercapainya target volume penjaminan kredit.

Secara nominal, pendapatan investasi Perusahaan mengalami peningkatan, dan pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan dalam RKAP 2013. Namun demikian, pertumbuhan pencapaian pendapatan investasi mengalami penurunan sebesar 1,41%, sehingga dalam jangka panjang Perusahaan perlu mewaspadai risiko tidak tercapainya target pendapatan investasi. Di samping itu, standard deviasi dari return investasi deposito adalah sebesar 0,70%. Hal ini berarti, apabila pola ini berlaku pada investasi di masa yang akan datang, maka yield tersebut dapat berpotensi untuk meningkat atau menurun sebesar 0,70% dari nilai rata-rata tersebut.

Untuk meminimalkan risiko investasi berupa deposito, hal-hal yang dilakukan perusahaan adalah:

- Melakukan pemilihan bank untuk penempatan deposito, dimana deposito ditempatkan di bank-bank yang berkinerja baik
- Nominal penempatan disesuaikan dengan ekuitas bank yang bersangkutan
- Penempatan dilakukan dengan jangka waktu tertentu yang memungkinkan dilakukan review apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga.

Selain risiko atas Deposito, risiko pasar terkait instrumen lainnya adalah sebagaimana terlampir.

Evaluasi atas Efektivitas Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan perusahaan. Penerapan Manajemen Risiko Perum Jamkrindo mulai dilakukan pada tahun 2010 yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan

From some indicators above, it can be seen that the insurance growth, the achievement of insurance target and the achievement of investment revenue decreased.

Nominally, the Company's insurance value increased yet has not achieved the target set forth in RKAP 2013. Therefore, in the long term, the Company needs to be careful to the risks of failure in achieving the target volume in credit insurance.

Nominally, the Company's investment income experienced an increase, and achievement exceeded the target set in the RKAP 2013. Nevertheless, the achievement of growth in investment income decreased by 1.41%, so that in the long term the Company needs to be aware of the risk of not achieving the target of investment income. In addition, the standard deviation of the return of investment deposits amounted to 0.70%. This means that, if this pattern applies to investments in the future, then yield can potentially increase or decrease by 0.70% from the average value.

To minimize the risk of investment in the form of deposits, the Company performs strategies as follows:

- Selecting high-performing banks for deposit placement, where deposit placed in the high quality performance banks
- The amount of equity is adjusted with the related equity bank
- The placement is carried out within the specified period to enable a review in case of changes in interest rates.

In addition to the risk for deposits, other market risks related to instruments are as attached.

Evaluation on the Effectiveness of Risk Management System

The implementation of Risk Management System purposes to ensure the company in the achievement of corporate objectives. The application of Perum Jamkrindo Risk Management started in 2012 that set by the Regulation of Board of Directors No.

Direksi No. 13/Per-Dir/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010. Penerapan tersebut masih bersifat pembelajaran dan baru diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Juli 2013. Mengingat pemberlakuan secara efektif baru dimulai pada semester kedua tahun 2013, maka penilaian efektivitas penerapan sistem Manajemen Risiko oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) atau oleh konsultan independen belum dilakukan.

13/Per-Dir/XII/2010 dated December 29, 2010. The application was still be enforced as a trial and effectively implemented from July 1, 2013. Regarding the effective enforcement begun effectively in the second semester of 2013, then assesment on the effectiveness implementation of Risk Management System by Internal Audit Unit (SPI) or independent consultant has not been conducted.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara garis besar kondisi beberapa parameter penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

As the details explained above, generally the condition in several parameters implemented of Risk Management are:

1. Pemahaman Manajemen Risiko

Sebagian proses manajemen risiko sudah tercantum dalam SOP-SOP proses bisnis berbasis risiko, sehingga apabila audit internal ataupun eksternal tidak menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap SOP dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman Manajemen Risiko sudah cukup baik.

1. Risk Management Comprehension

A half of a management risk process has been stated in SOP of risk-based business process, if the internal or external audit do not meet any non-compliance with referred SOP, then it can be concluded that the level of comprehension of Risk Management has been relatively good.

2. Pelaksanaan Rancangan Proses Manajemen Risiko

Pelaksanaan rancangan proses manajemen risiko perlu didukung dengan adanya sistem manajemen risiko. Terkait sistem manajemen risiko, Perum Jamkrindo telah memiliki Blueprint Manajemen Risiko dan Panduan Manajemen Risiko yang didukung dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko yang berfungsi untuk mempermudah proses identifikasi, penilaian risiko, dan tindak lanjut penanganan risiko. Proses identifikasi dan penilaian risiko serta penyusunan rencana pengendalian risiko tersebut sudah dilakukan secara triwulanan oleh *Risk Owner* di Perum Jamkrindo. Dengan demikian, dapat dikatakan rancangan proses manajemen risiko telah sesuai untuk diterapkan.

2. The Implementation of Risk Management Process Plan

The implementation of risk management process plan must be supported with risk management system. In relation to that, Perum Jamkrindo has had a Blueprint of the Risk Management and Guidelines of Risk Management, supported with the Application of Risk Management information System that functions to expedite the identification process, risk assessment and follow-up of the risk management. The identification process and risk assessment, including the preparation of the risk control plan has been done in a quarterly basis by the Risk Owner in Perum Jamkrindo. Therefore, it can be concluded that the blue print of risk management process has met the expectation to be further implemented.

3. Metode Evaluasi Proses Manajemen Risiko

Saat ini Perum Jamkrindo belum memiliki metode untuk melakukan evaluasi atas proses manajemen risiko di Perum Jamkrindo. Direncanakan pada tahun 2014 akan dilakukan evaluasi proses manajemen risiko Perum Jamkrindo oleh konsultan eksternal.

3. Evaluation Method of Risk Management Process

Currently, Perum Jamkrindo does not have a method for the evaluation of the risk management process in Perum Jamkrindo. Planned in 2014, evaluation on the risk management process of Perum Jamkrindo will be conducted by external consultant.

4. Pendokumentasian Kekurangan dan Usulan Perbaikan

Kekurangan dan usulan perbaikan atas penerapan Manajemen Risiko di Perum Jamkrindo telah tertuang dalam Berita Acara Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara triwulanan. Adapun ringkasan kekurangan dan usulan perbaikan atas penerapan Manajemen Risiko dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Kekurangan / Weakness	Usulan Perbaikan / Recommendation of Improvement
1	Penilaian risiko saat ini dilakukan dengan pendekatan <i>judgment</i> oleh masing-masing <i>Risk Owner</i>, sehingga terdapat kemungkinan penilaian tersebut belum 100% mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Risk assessment is currently conducted by judgment approach by each Risk Owner, leaving a possibility that the assessment does not 100% reflect its actual condition.	Perlu dikembangkan parameter penilaian risiko untuk mengurangi subjektivitas. Parameter of risk assessment to reduce subjectivity should be developed
2	Adanya promosi staf menjadi pejabat sehingga mengakibatkan <i>Risk Owner</i> belum memahami proses manajemen risiko. Promotion of staff to officials that makes the Risk Owner does not truly understand risk management process	Perlu dilakukan sosialisasi dan workshop tentang penerapan Manajemen Risiko di Perum Jamkrindo dan dilakukan test/ujian untuk mengetahui tingkat pemahaman <i>Risk Owner</i>. Dissemination and workshop on the implementation of the Risk Management in Perum Jamkrindo is necessary, including some tests to identify how far the Risk Owner understand it,
3	Belum dilakukan pemisahan antara risiko yang diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Division between risks has not yet been done due to internal and external factors.	Dalam profil risiko, perlu dibagi menjadi risiko internal dan eksternal. In risk profile, internal and external risk must be categorized.
4	Data profil risiko yang diidentifikasi oleh <i>Risk Owner</i> belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Risk profile data identified by the Risk Owner does not fully reflect the actual condition.	Divisi Manajemen Risiko perlu melakukan perbaikan/ penyempurnaan atas hasil identifikasi risiko oleh <i>Risk Owner</i>, kemudian dilakukan pembahasan di tingkat Divisi sebelum dilaksanakan Komite Direksi. Risk Management Division needs to perform improvement on the risk identification findings by the Risk Owner to be further discussed in the Division level prior to being conducted by the Committee of the Board of Directors.

Apabila dilihat dari tujuan penerapan Manajemen Risiko, maka meskipun beberapa parameter risiko mengalami penurunan kualitas dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun dengan mitigasi-mitigasi yang dilakukan, target pencapaian laba perusahaan dapat tercapai.

4. Documenting Weakness and Recommendation of Improvement

Weakness and recommendation of improvement on the implementation of Risk Management at Perum Jamkrindo has been stipulated at the Meeting Agenda of Risk Management Committee conducted in a quarterly basis. The summary of the weakness and recommendation of improvement on the implementation of the said Risk Management is as follows:

241

Seen from the objective of the implementation of the Risk Management, the Company succeeded in achieving its profit target by means of mitigation efforts of risk, even though some risk parameters decreased by quality compared to the previous year.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI

Perkara/Gugatan Yang Dihadapi

Selama tahun 2013 Perum Jamkrindo tidak memiliki Perkara/gugatan yang signifikan yang dihadapi oleh perusahaan.

Permasalahan Hukum

Selama tahun 2013 Perum Jamkrindo tidak memiliki Permasalahan Hukum yang signifikan yang dihadapi oleh perusahaan.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Akses Terhadap Informasi Perusahaan

Dalam menyampaikan dan penyebaran informasi serta berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan Perum Jamkrindo menggunakan berbagai media yang ada, yaitu media Internet, cetak dan kegiatan atau event.

Dalam prosesnya, akses terhadap informasi perusahaan dibedakan:

1. Komunikasi Internal

Komunikasi Internal dilakukan untuk mengonsolidasikan seluruh organ dan pekerja di dalam lingkungan Perum Jamkrindo agar memiliki visi yang sama dan fokus pada tujuan Perusahaan, dengan mempergunakan media antara lain sebagai berikut :

a. Surat Edaran

Perum Jamkrindo menggunakan Surat Edaran untuk mengkomunikasikan kebijakan dan peraturan terbaru di dalam internal perusahaan. Informasi yang disebarkan umumnya berisi tentang sosialisasi kebijakan Direksi

b. ICPR (Integrated Corporate Performance Reporting)

Perum Jamkrindo juga menggunakan sarana teknologi informasi yang berbasis web yaitu ICPR yang telah diterapkan di lingkungan Perum Jamkrindo.

c. E-mail

Perum Jamkrindo juga telah memiliki e-mail system sendiri untuk mengelola komunikasi internal perusahaan antar unit kerja.

LEGAL CASE

Case/Lawsuit Faced

During 2013, Perum Jamkrindo did not have case/lawsuit significantly affected the Company.

Legal Case

In 2013, Perum Jamkrindo did not have legal case significantly affected the Company.

ACCESS TO INFORMATION AND DATA OF THE COMPANY

Access to the Company's Information

In disclosing and disseminating information and communicating with parties related to Perum Jamkrindo, various means can be used such as Internet, printed media or event.

In its process, the access to company information is differentiated into:

1. Internal Communication

Internal communication is carried out to consolidate the entire instruments and workers within Perum Jamkrindo to have the same vision and focus on company goals, using the media as follows:

a. Circular Letter

Perum Jamkrindo uses Circular Letter to communicate policies and the newest regulations within the internal company. Information disseminated is generally about the dissemination of Board of Directors' policies.

b. ICPR (Integrated Corporate Performance Reporting)

Perum Jamkrindo also uses web-based information technology, namely ICPR, that has been applied in Perum Jamkrindo's environment.

c. E-mail

Perum Jamkrindo also has its own e-mail system to manage the company's internal communication between working units.

d. Evaluasi dan Action Plan Triwulan

Untuk sarana komunikasi antara Direksi dengan Kepala Divisi dan Pimpinan Kantor Cabang/Kantor Anak Cabang dalam menyampaikan target dan rencana bisnis Perusahaan, Perum Jamkrindo secara rutin tiga bulan/triwulanan menyelenggarakan rapat evaluasi dan action plan.

Dalam rapat evaluasi dan action plan ini, Direksi Perum Jamkrindo melakukan evaluasi terhadap kinerja triwulanan berjalan dan membahas serta mengkomunikasikan rencana bisnis Perum Jamkrindo untuk triwulan-an kedepan kepada para Kepala Divisi, Kepala Kantor Cabang dan Kepala Kantor Anak Cabang untuk meneruskan target dan rencana bisnis tahunan yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun berjalan.

2. Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal dilakukan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan citra perusahaan dimata mitra kerja, masyarakat, stakeholder serta lainnya. Adapun jenis informasi dan media yang digunakan Perum Jamkrindo dalam melakukan komunikasi eksternal Perusahaan antara lain sebagai berikut :

a. Alamat Perusahaan

Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dapat menghubungi :

Gedung Jamkrindo

Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6

Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat

Telepon : +62 21 6540335

Faksimili : +62 21 6540344/48

b. Website

Untuk memudahkan mitra kerja, masyarakat yang berkepentingan lainnya atau *stakeholders* dalam mendapatkan informasi Perum Jamkrindo menyediakan akses dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi yang handal melalui website www.jamkrindo.com

d. Quarterly Evaluation and Action Plan

As a means of communication between the Board of Directors and the Head of Division and Head of Branch Office/ Sub-branch offices, in delivering the Company's target and business plan, Perum Jamkrindo has regularly conducted a quarterly evaluation meeting and action plan.

In the evaluation meeting and action plan, Perum Jamkrindo evaluates and discusses the quarterly performance and communicates the business plan of Perum Jamkrindo for the next quarter to Head of Divisions, Head of Branch Office and Head of Sub Branch office to continue running the targets and annual business plan set out in the RKAP of current year.

2. External Communications

External communication performed to maintain and enhance the corporate image in the view of business partners, communities, and other stakeholders. The type of information and media used in Perum Jamkrindo to carry out the Company's external communications is as follows:

a. Address of Company

For more detailed information, any enquiries can be directed to:

Perum Jamkrindo's Building

Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6

Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat

Telephone : +62 21 6540335

Facsimile : +62 21 6540344/48

b. Website

To facilitate the business partners, other parties concerned, or stakeholders in obtaining information, Perum Jamkrindo provides access by leveraging reliable information technology through the website www.jamkrindo.com

c. Press Release

Perum Jamkrindo juga pada saat diperlukan melakukan publikasi dari setiap kegiatan perusahaan yang dilakukan melalui press release.

d. Public Expose

Sekali dalam setahun perusahaan wajib menyelenggarakan public expose atau paparan public mengenai kinerja perusahaan.

e. Iklan

Iklan digunakan sebagai alat untuk mengelola citra dan meningkatkan awareness terhadap Perum Jamkrindo beserta produk-produknya, dengan menggunakan media untuk menyebarluaskan iklan di masyarakat antara lain adalah surat kabar, majalah, dan media lainnya, dengan terlebih dahulu menganalisis media dan target audiences agar iklan dapat berfungsi dengan efektif.

f. Pameran

Perum Jamkrindo juga selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pameran untuk mengelola citra dan meningkatkan awareness terhadap Perum Jamkrindo beserta produk-produknya, dengan terlebih dahulu menganalisis media dan target audiences agar iklan dapat berfungsi dengan efektif.

c. Press Release

Perum Jamkrindo also publicizes every activity of the Company through press release.

d. Public Expose

Once in a year, the Company is required to hold public expose regarding the Company's performance.

e. Advertising

Advertising is used as a tool to manage the Company's image and raise the awareness of Perum Jamkrindo and its products, using the media to disseminate advertising in the community, such as through newspapers, magazines and other media, by first analysing the media and target audiences in order to serve ads effectively.

f. Exhibition

Perum Jamkrindo also continues to participate in every exhibition to manage its image and raise the awareness of Perum Jamkrindo and its products, by first analysing the media and target audiences so that advertising can work effectively.

TEKNOLOGI INFORMASI

Pengembangan Aplikasi TI 2013

Dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perum Jamkrindo, khususnya dukungan dalam penyediaan aplikasi perangkat lunak kegiatan operasional penjaminan kredit, maka perusahaan telah melakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan aplikasi inti (*core*)

Untuk menjaga konsistensi dan keakuratan data antara Keuangan (Akuntansi) dengan Operasional, maka perusahaan telah menyediakan aplikasi *middleware* yang berfungsi untuk mengintegrasikan input data Aplikasi Operasional dengan Aplikasi Akuntansi melalui mekanisme *single entry*. Perusahaan juga menerapkan mekanisme Klaim Register pada aplikasi operasional

INFORMATION TECHNOLOGY

2013 IT Application Improvement

In terms of supporting business activities of the Company, particularly in supporting the procurement of software application of Credit Guarantee, the Company has taken several actions of activities as below:

1. The Accomplishment of Core Application

To maintain the consistency as well as the the accuracy of data between Accounting and the Operational, the Company has provided *middleware* application which functions to integrate Data Application with Accounting Application through single entry mechanism. The company has also applied Register Claim mechanism on guarantee operational application so that any infeasible to be

penjaminan, sehingga pengajuan klaim yang tidak layak proses ke tahap selanjutnya dapat dikembalikan ke Bank dan tidak menjadi pending matters Perum Jamkrindo. Hal ini dapat meningkatkan validitas perhitungan rasio tingkat penyelesaian klaim Perum Jamkrindo karena dapat dihitung dari perbandingan antara persetujuan klaim dengan pengajuan klaim yang layak proses.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tingkat pelayanan (SLA) Perum Jamkrindo kepada mitra (Penerima Jaminan) maka perusahaan telah mengupayakan pengembangan mekanisme penerbitan sertifikat penjaminan yang telah dilengkapi dengan sistem penomoran sertifikat secara otomatis dan digitalisasi tandatangan pejabat di sertifikat. Untuk mempermudah proses pemilihan lembaga co-guarantee dan reasuransi maka perusahaan telah menyediakan mekanisme *grading by system* sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya manusia.

2. Penyusunan Aplikasi Surety Bond

Seiring dengan dirilisnya produk Surety Bond maka Perum Jamkrindo telah menyediakan sarana berupa program aplikasi untuk mengakomodasi kebutuhan akan pengelolaan penjaminan Surety Bond, yang terdiri dari:

- a. Jaminan Penawaran
- b. Jaminan Uang Muka
- c. Jaminan Pelaksanaan
- d. Jaminan Pembayaran
- e. Jaminan Pemeliharaan

3. Aplikasi Penjaminan KUR Online

Untuk meningkatkan daya saing dalam melakukan pemasaran produk-produk penjaminan maka perusahaan telah memperluas kerjasama penjaminan KUR Online. Dengan kerjasama penjaminan online diharapkan dapat meningkatkan *Service Level Agreement* perusahaan terhadap mitra-mitra kerja yang berdampak terhadap peningkatan daya saing perusahaan.

4. Penyusunan Aplikasi Penjaminan KKPE

Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKPE) adalah Kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam

processed claims can be denied and it will help avoiding suspended claims. This eventually leads to increase the validity of calculation ratio claim completion due to the ease in calculating by comparing claim approval to feasible to be processed claim proposed.

As part of the efforts to improve level of service (SLA) to the guarantee recipients, the company has improved the mechanism by issuing guarantee certificate in which has been equipped not only with numbering system but also with automatic and digitalized system for officer's signature. To ease the process of selecting co-guarantee institution as well as the reassurance, the Company has provided grading by system mechanism to help minimize time wasted and human resources' involvement.

2. Setting up The Surety Bond Application

In accordance with the release of Surety Bond product, the Company has provided means of the application program needed to help manage the Surety Bond guarantee in which is consisted of:

- a. Bid Bond
- b. Advanced Payment Bond
- c. Performance Bond
- d. Payment Bond
- e. Maintenance Bond

3. KUR Online Guarantee Application

To help increase the competitiveness of the guarantee products marketing activity, the Company has widen the the cooperation of Gurantee KUR online in order to level up its Service Level Agreement to the prospective and potential partners.

4. Setting up KKPE Guarantee Application

The Food and Energy Security (KKPE) is an investment credit and/or working capital provided in terms of supporting the

rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati. Sejalan dengan program pemerintah tersebut maka Perum Jamkrindo telah menyusun Aplikasi Penjaminan KKPE.

5. Penyusunan Aplikasi Keagenan

Untuk meluaskan jaringan pemasaran yang telah dibangun selama ini maka Perum Jamkrindo menggunakan salah satu strategi pemasaran, yaitu penggunaan agen. Untuk kebutuhan tersebut perusahaan menggunakan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang, yaitu :

- Jangka Pendek**
Dengan mengembangkan fasilitas pengisian sistem keagenan di dalam aplikasi operasional yang sudah ada.
- Jangka Panjang**
Dengan mengembangkan sistem informasi keagenan terpusat, dimana agen melakukan proses input secara langsung kedalamnya dan Kantor Cabang Perum Jamkrindo dapat melakukan check & verifikasi sebelum data masuk ke dalam sistem aplikasi operasional yang ada.

6. Penyusunan Aplikasi Internal Audit

Perum Jamkrindo telah menyusun Sistem Informasi manajemen pelaporan Audit Internal yang digunakan oleh Satuan Pengawas Internal dalam menjalankan aktivitasnya untuk melakukan proses pemeriksaan.

7. Penyesuaian Aplikasi Akuntansi PKBL

Sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Kementerian BUMN tentang Pelaporan Keuangan Berbasis PSAK ETAP untuk PKBL maka perusahaan telah melakukan penyesuaian terhadap Aplikasi Akuntansi PKBL yang ada.

Assessment Tata Kelola TI

Sebagai salah satu perusahaan BUMN, Perum Jamkrindo wajib memenuhi peraturan pemerintah yang berlaku terkait dengan penerapan *good corporate governance*, GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri BUMN No:PER-01/MBU/2011 pasal 2 ayat

Food and Energy Security program as well as supporting the Crops Development Program on Biofuel Raw Materials. To be in line with the Government's program mentioned, the Company has set up the Guarantee Application of KPPE.

5. Setting up Agency Application

In terms of the marketing network expansion built, the Company uses one of the marketing strategies, namely using agency. To accomodate that need, the Company prefers using short-term and long-term approaches as below:

- Short-Term**
By developing the fulfillment facility of the agency system in the existing operational application.
- Long Term**
By developing the agency of information system, in which is the agent inputs the process directly where the branch office of Perum Jamkrindo enables to check and verify prior to be exist in the operational application system.

6. Setting up the Internal Audit Application

Perum Jamkrindo has set up an information management report system of the Internal Audit that is accessed by Internal Supervision Unit whose authority to check and supervise.

7. PKBL Accounting Application Compliance

Referring to the instruction and guidance from the Ministry of State Owned Companies on Financial Report Based PSAK ETAP for PKBL, Perum Jamkrindo has customized with the existing PKBL Accounting Application.

IT Governance Assessment

As one of the State Owned Companies, Perum Jamkrindo is obliged to comply to the Regulation of the Government appliedlinked with Good Corporate Governance implementation to which the process and the mechanism of company management refers due to it contains the principles based the applicable regulations and business ethics as stipulated in Minister Regulation of State Owned Companies

(1) yang menyebutkan bahwa “BUMN wajib menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN”.

Dengan adanya peraturan tersebut, kewajiban BUMN untuk menerapkan *good corporate governance* berimbas terhadap perlunya BUMN untuk menerapkan *IT Governance* (tata kelola TI) ke dalam Perusahaannya.

Penerapan Tata Kelola TI di Perum Jamkrindo juga dilakukan untuk memastikan bahwa investasi dan perencanaan Teknologi Informasi dapat sejalan dengan visi dan misi perusahaan serta sesuai dengan kebutuhan bisnis dan *best practice* yang berlaku dalam penerapan TI di dunia penjaminan kredit atau industri sejenis.

Dalam upaya mendapatkan pemahaman tentang kondisi TI Perum Jamkrindo terkini, sekaligus dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan inisiatif pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tingkat maturitas level 3 (tiga), maka dengan menggunakan standar acuan COBIT 4.1 Perum Jamkrindo telah melakukan *assessment* Tata Kelola TI tahun 2013 dengan hasil sebagai berikut :

Cobit Process	Jamkrindo		GAP
	Current	Target	
PO (Plan And Organise)	1.62	3.00	1.39
AI (Acquire and Implement)	1.81	3.00	1.19
DS (Deliver and Support)	1.21	3.00	1.79
ME (Monitor and Evaluate)	1.25	3.00	1.75
Nilai Total GAP			1.53

Berdasarkan hasil penilaian maturity level tata kelola TI Perum Jamkrindo tahun 2013, maka untuk meningkatkan maturity level tata kelola TI Perum Jamkrindo sesuai dengan target yang diinginkan (level 3) telah ditetapkan rekomendasi kegiatan yang harus dilaksanakan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

No: PER-01/MBU/2011 Article 2 Verse (1) which states that “State Owned Companies is obliged to implement Good Corporate Governance consistently and continuously which is based on this Minister Regulation as well as noticing all the provisions, norms and the Articles of Association of State Owned Companies.”

With the regulation, SOE's obligation to implement good corporate governance entails another obligation, i.e. the requirement to implement IT governance in the Company.

The implementation of IT Governance in Perum Jamkrindo is done to ensure that the investment and planning of Information Technology can run in line with the vision and mission of the company and in accordance with the business needs and best practice applicable in the implementation of IT in the credit guarantee world or the similar industry.

In an effort to obtain understanding on the condition of Perum Jamkrindo's latest IT, in addition to giving recommendation on policy and initiative of works that must be done to achieve the maturity level 3 (three) using COBIT 4.1 reference, Perum Jamkrindo has conducted assessment on IT Governance in 2013 as follows:

Based on the assessmen on maturity level of IT governance of Perum Jamkrindo 2013 and in order to increase the maturity level of IT governance of Perum Jamkrindo according to the target (level 3), recommendation of activities that must conducted within 3 (three) categories consists of:

1. Menyusun Kebijakan dan Prosedur;

- Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Rencana Strategis TI
- Pedoman Tata Kelola TI
- Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Investasi TI
- Kebijakan dan Prosedur Manajemen Mutu
- Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko TI
- Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Proyek
- Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Sistem dan Infrastruktur TI
- Kebijakan dan Prosedur Manajemen Perubahan
- Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Tingkat Layanan TI
- Menetapkan pengukuran atas pencapaian SLA dengan vendor TI dalam Kebijakan dan Prosedur
- Kebijakan dan Prosedur Manajemen Kapasitas
- Kebijakan dan Prosedur Business Continuity Management (BCM)
- Kebijakan dan Prosedur Pengamanan Informasi
- Kebijakan dan Prosedur Manajemen Insiden
- Kebijakan dan Prosedur Manajemen Konfigurasi
- Kebijakan dan Prosedur Manajemen Problem
- Kebijakan dan Prosedur Manajemen Data
- Kebijakan dan Prosedur Monitoring dan Evaluasi TI

2. Standarisasi Tools;

- Standarisasi penggunaan tools penyimpanan dokumen
- Standarisasi penggunaan tools pengelolaan proyek
- Standarisasi penggunaan tools pengelolaan tingkat layanan TI
- Standarisasi penggunaan tools monitoring kapasitas infrastruktur TI
- Standarisasi penggunaan tools sistem keamanan
- Standarisasi penggunaan tools pengelolaan insiden dan pengelolaan problem
- Standarisasi penggunaan tools pengelolaan konfigurasi
- Standarisasi penggunaan tools backup
- Standarisasi penggunaan tools pengelolaan lingkungan fisik TI
- Standarisasi penggunaan tools monitoring kegiatan operasional TI
- Standarisasi penggunaan tools monitoring internal

1. Formulating Policies and Procedures;

- Policies and Procedures of IT Strategic Plan Management
- IT Governance Guidelines
- Policies and Procedures of IT Investment Management
- Policies and Procedures of Quality Management
- Policies and Procedures of IT Risk Management
- Policies and Procedures of Project Management
- Policies and Procedures of IT Infrastructre and System Development
- Policies and Procedures of Change Management
- Policies and Procedures of Management in IT Service Level
- Determining measurement on the achievement of SLA with IT vendor in policies and procedures
- Policies and Procedures of Capacity Management
- Policies and Procedures of Business Continuity Management (BCM)
- Policies and Procedures of Information Security
- Policies and Procedures of Incidental Management
- Policies and Procedures of Configuration Management
- Policies and Procedures of Problem Management
- Policies and Procedures of Data Management
- Policies and Procedures of Monitoring and Evaluation of IT

2. Tools Standardization

- Standardization of tools for document storage
- Standardization of tools for project management
- Standardization of tools for IT service management
- Standardization of tools for monitoring of IT infrastructure capacity
- Standardization of tools for security system
- Standardization of tools for accident and problem management
- Standardization of tools for configuration management tools
- Standardization of tools for backup
- Standardization of tools for IT physical environmental management
- Standardization of tools for IT operational activity monitoring
- Standardization of tools for internal monitoring tools

3. Peningkatan dan Pengelolaan SDM.

- Penyusunan Training Formal Masing-Masing Individu Sesuai Job Description
- Pengesahan dan Penetapan Peran dan Tanggung Jawab Dalam Job Description
- Penetapan IT Steering Committee

Program Kerja 2014

Dalam rangka untuk menunjang kegiatan usaha dan kebutuhan bisnis Perum Jamkrindo, maka perusahaan akan melakukan evaluasi Information Technology Master Plan (ITMP) yang ada agar pengembangan Teknologi Informasi dapat selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2014 - 2018.

Selain itu, agar tercipta kondisi sarana dan prasarana (*infrastruktur*) Teknologi Informasi yang ideal dan selaras dengan kebutuhan bisnis perusahaan serta mengikuti trend TI terkini, maka Perum Jamkrindo akan melakukan beberapa pengembangan dan penyesuaian infrastruktur tersebut dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan kemampuan perusahaan, seperti :

- Melakukan sentralisasi sistem penyimpanan dengan memanfaatkan implementasi *cloud storage*.
- Penggunaan *redundant line* untuk koneksi konsolidasi Kantor Cabang ke Kantor Pusat dengan teknologi VPN MPLS.
- Penggunaan *system clustering* dan teknologi *virtual machine* untuk menyediakan "*high availability server*" dalam rangka menjaga ketersediaan layanan operasional TI.
- Pemberian dukungan kepada manajemen dalam menampilkan dan memonitoring pencapaian kinerja perusahaan melalui penyediaan "*cockpit room*".
- Membangun sistem keamanan ruang server dari akses pihak yang tidak berkepentingan, baik secara langsung (fisik) maupun tidak langsung (remote).

Perum Jamkrindo juga akan melakukan pengadaan, perbaikan dan penyempurnaan sistem aplikasi perusahaan agar sesuai dengan kebutuhan bisnis terkini, seperti :

- Penambahan fasilitas yang spesifik berhubungan dengan produk hukum di dalam Sistem Digital Library.
- Penambahan modul monitoring rencana tindak lanjut dan tingkat risiko, serta penambahan modul pelaporan

3. Improvement and Management of Human Resources

- Preparation of Formal Training for Each Individual according to their Job Description
- Ratification and Determination of Role and Responsibilities in Job Description
- IT Determination of Steering Committee

Work Program 2014

For the purpose of supporting business activities and needs of Perum Jamkrindo, the Company will evaluate the existing Information Technology Master Plan (ITMP) to develop Information Technology that is in line with the Long Term Corporate Plan 2014-2018.

In addition, to create ideal Information Technology infrastructure that is in line with the needs of company business and follow the latest IT trend, Perum Jamkrindo will make some development and adjustment of infrastructure by keep taking into account priority scale and the Company's capacity such as:

- Centralizing the system of storage by utilizing cloud storage implementation.
- Using redundant line to connect consolidation of Branch Office to Head Office with VPN MPLS technology.
- System clustering use and virtual machine technology to provide "*high availability server*" to maintain the availability of IT operational service.
- Support for the management in displaying and monitoring the performance achievement of the company through cockpit room provision.
- Building safety system of server from access from the irrelevant parties, both physical and remote.

Perum Jamkrindo will also provide and improve the application system of the Company according to the latest business needs, such as:

- The increase of specific facilities in relation to legal products within the Library Digital System.
- The increase in monitoring module plan of follow-up and risk elvel, and increase of reporting module of Default Rate

perhitungan Default Rate, Rasio Klaim, Loss Events yang terintegrasi dengan aplikasi operasional di dalam SIMR.

- Penyempurnaan integrasi Sistem Akuntansi dengan sistem lainnya, pengembangan fitur konsolidasi dengan anak perusahaan, dan pengembangan Sistem Akuntansi Perusahaan Penjaminan Syariah & Dana Pensiun.
- Sistem Aplikasi Operasional, menambahkan fitur kerjasama online untuk penjaminan non program (eksisting), penyempurnaan fitur keagenan, surety bond, dan kontra bank garansi, re-ass, broker, edc system.
- Pengembangan sistem audit untuk pihak eksternal.
- Pengembangan sistem anggaran.
- Pengembangan Sistem Monitoring PKBL.
- Pengembangan manajemen stok barang, e-procurement dan inventaris/pengelolaan gedung.

calculation, Claim Ratio, integrated Loss Events with the operational appliacation within the SIMR.

- Improvement of integrated Accounting System with other system, development of consolidated feature with subsidiaries and development of Accounting System of Sharia Guarantee Company & Pension Fund.
- Operational Application System, increasing online cooperation feature for existing non program guarantee, improvement of agency feature, surety bond and contra bank guarantee, re-ass, broker, edc system.
- Development of audit system for external parties.
- Development of budget system.
- Development of PKBL monitoring system
- Development of goods stock management, e-procurement and inventories/building management.

KODE ETIK DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Kode Etik Perusahaan

Perusahaan memiliki komitmen untuk berusaha meningkatkan kinerja Perusahaan dengan berbasiskan budaya Perusahaan melalui Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas dan independen, sehingga dapat mendukung kebijakan Pemerintah di bidang pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Hal ini tertuang dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP-JAMKRINDO/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

Standard perilaku Perusahaan adalah transparansi dan pengungkapan informasi kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajiban. Penerapan standar etika usaha tersebut merupakan cara Perusahaan berbisnis dalam rangka mewujudkan komitmen untuk:

1. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama.
2. Menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
3. Senantiasa secara proporsional dalam rangka pemberian jasa yang bermutu tinggi kepada bisnis Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

CODE OF ETHICS AND CORPORATE CULTURE

Code of Ethics of the Company

The Company has commitment to improve the Company's performance by implementing corporate culture through good corporate governance that upholds the principles of transparency, fairness, accountability, and independency. This is expected to support the Government's policy in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperative (UMKMK). This is stated in the Joint Decree of Board of Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP-JAMKRINDO/ XII/2012 dated December 13, 2012 regarding the Code of Conduct.

Standards of the Company's conduct are transparency and disclosure of information concerning independency, esponsibility, and fairness. The implementation of the ethical standards is the Company's business strategy and its commitment to:

1. Placing customer satisfaction as the main priority
2. Implementing ethical standards in all operations based on Good Corporate Governance.
3. Continuously proportional to give high quality service to SME.

4. Memperlakukan semua stakeholder sebagai mitra.
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan stakeholder dengan baik.

Kode etik Perusahaan atau etika perusahaan dalam Code of Conduct berlaku bagi seluruh level organisasi, dan diatur dalam beretika dengan stakeholder, karyawan, mitra kerja (pelanggan), penyedia barang/jasa (supplier), pesaing, Pemerintah, masyarakat dan media massa.

Etika Perusahaan dengan Stakeholder

1. Perusahaan harus memperlakukan stakeholder secara baik dan adil dengan memenuhi hak-hak stakeholder.
2. Perusahaan wajib meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka meningkatkan nilai bagi stakeholder.
3. Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data.
4. Perusahaan harus mematikan pemberian informasi yang tidak menyesatkan kepada stakeholder.
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan stakeholder dengan baik.

Etika Perusahaan dengan Karyawan

1. Perusahaan harus mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, peningkatan kualitas dan kesejahteraan Karyawan dengan pemenuhan hak-hak Karyawan secara proporsional sehingga diharapkan Karyawan dapat menunjukkan kinerja secara maksimal.
2. Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada semua Karyawan tanpa memperhatikan latar belakang, etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
3. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri Karyawan.
4. Perusahaan memberikan penghargaan berdasarkan kompetensi dan kinerja Karyawan.
5. Perusahaan menciptakan lingkungan kerja, komunikasi dan hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja yang kondusif dan produktif.
6. Perusahaan harus menghargai martabat manusia tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang etnis, agama,

4. Treating all the stakeholders as partners.
5. The Company has to service and anticipate the needs for the stakeholders.

The Company's code of conduct is applied for all levels of organization and for building relationship to the stakeholders, employees, customers, suppliers, competitors, Government, public, and mass media.

The Company's ethics to the Stakeholders

1. The Company should treat the stakeholders well and with fairness by fulfilling their rights.
2. The Company is obliged to improve and maintain the positive image of the Company to improve value for the stakeholders.
3. The Company needs to protect the confidentiality of information and data
4. The Company should ensure to give information that is not misleading to the stakeholders.
5. The Company should service and anticipate the needs of all stakeholders.

The Company's Ethics to Employees

1. The Company has to prioritize the health, occupational safety, and welfare of the employees by fulfilling employee rights proportionally so that the employee can be motivated to perform their best.
2. The Company gives equal opportunity to all employees without differentiating their background, ethnic, religion, sex, ages, physical defect, or other certain condition protected by laws.
3. The Company provide equal opportunities to develop the employees.
4. The Company gives awards based on competency and their achievements.
5. The Company creates a conducive and productive work environment, communication, and relation between the supervisor and the sub-ordinates, as well partners.
6. The Company has to appreciate human rights without differentiating their ethnic, religion, sex, age, physical

jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

7. Perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip umum kemanusiaan, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perusahaan mengizinkan Karyawan melakukan kegiatan rangkap di luar Perusahaan untuk kegiatan social kemasyarakatan, keanggotaan profesi, asosiasi atau kelompok sejenisnya.

Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja (Pelanggan)

1. Perusahaan berupaya menjalankan praktik usaha yang saling menguntungkan dengan mitra kerja berdasarkan perjanjian kerjasama yang berimbang.
2. Perusahaan membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan hasil kerjasama.
3. Perusahaan harus menjaga hubungan yang kondusif dengan mitra kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Perusahaan harus menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan.

Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa (Supplier)

1. Perusahaan memperlakukan penyedia barang/jasa (supplier) termasuk proses pengadaan sesuai prinsip bisnis yang sehat, terbuka, tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Perusahaan harus melakukan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mengacu prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis.
3. Perusahaan menggunakan penyedia barang dan jasa dilakukan berdasarkan dokumen secara tertulis.
4. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. Perusahaan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

defect or any other certain condition protected by laws.

7. The Company has to uphold human rights and responsibilities based on the prevailing regulation.
8. The Company allows the employees to have affiliation outside the Company, such as for social interest, professional membership, association, or other groups.

The Company's Ethics to Customers

1. The Company endeavors to implement business practice that has mutual benefit with partners based on balanced contract agreement.
2. The Company build intensive communication with business partners to seek the best solution for the improvement of partnership.
3. The Company has to maintain a conducive relation with business partners in accordance with the applicable laws.
4. The Company has to avoid the any misuse within the partnership.

The Company's Ethics with Suppliers

1. The Company develops business with the suppliers, including in the process of procurement, in accordance with healthy, transparent, and non-block principle and the applicable laws.
2. The Company has to carry out the procurement process with transparency and accountability based on the applicable regulation by referring to the effective, efficient, and economical practices.
3. The Company cooperates with the suppliers based on a written consent.
4. The Company has to protect the confidentiality of information and documents of goods and service procurement based on the applicable regulation.
5. The Company does not commit to corruption, collusion, and nepotism in the activity of goods and service procurement.

Etika Perusahaan dengan Pesaing

1. Perusahaan harus melaksanakan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan kualitas layanan.
2. Perusahaan harus menghindari perilaku yang menyesatkan dan atau tindakan yang tidak jujur.
3. Perusahaan menentang kesepakatan atau kesepakatan yang bersifat anti kompetisi.
4. Perusahaan tidak melakukan kerjasama tanpa alasan yang dapat diterima dan wajar.

Etika Perusahaan dengan Pemerintah

1. Perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan harus membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah.
3. Perusahaan harus mendukung program-program Pemerintah sesuai dengan Peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Etika Perusahaan dengan Masyarakat

1. Perusahaan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.
2. Perusahaan mendukung kegiatan social, budaya, tradisi, agama dan hak azasi manusia.
3. Perusahaan berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
4. Perusahaan mengoptimalkan penyaluran program-program tanggung jawab social Perusahaan kepada masyarakat (Program Kemitaan dan Bina Lingkungan).
5. Perusahaan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Etika Perusahaan dengan Media Massa

1. Perusahaan harus memberikan informasi yang relevan.
2. Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dalam menciptakan kerjasama yang kondusif berdasarkan hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan.
3. Perusahaan menerima dan menindaklanjuti secara proporsional terhadap kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa.

The Company's Ethics to the Competitors

1. The Company has to engage in a healthy business competition by upholding the product and service quality.
2. The Company will avoid any misleading conducts or cheating.
3. The Company contends agreements or understanding related to anti-competition.
4. The Company does not build cooperation without any reasonable reasons.

The Company's Ethics to the Government

1. The Company must comply with the applicable regulation
2. The Company must build cooperation and good communication with the Government
3. The Company must support the Government's program in accordance with the applicable regulation.

The Company's ethics to Society

1. The Company shall preserve a clean and healthy environment.
2. The Company shall support social and cultural activity, tradition, and those related to religion and human rights.
3. The Company participates in empowering the economy of the nearby society.
4. The Company optimizes the disbursement of corporate social responsibility programs to public (Partnership and Environmental Development Program)
5. The Company does not carry out any actions that leads to discrimination to race, religions, and groups.

The Company's Ethics to Mass Media

1. The Company should give relevant information
2. The Company considers mass media as partners to create a conducive cooperation by respecting each other and giving mutual benefit.
3. The Company accepts and follows-up constructive criticism directed to the Company through mass media

STANDAR PERILAKU INSAN PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Pribadi dan Profesi

1. Seluruh Insan Perusahaan wajib mematuhi seluruh ketentuan Perusahaan tentang kepegawaian.
2. Seluruh Insan Perusahaan wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Perusahaan maupun regulator sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
3. Seluruh Insan Perusahaan harus berdedikasi, loyal, giat dan teliti dalam bekerja serta selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Seluruh Insan Perusahaan harus menerapkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif

1. Seluruh Insan Perusahaan harus bersikap santun dalam berkomunikasi.
2. Seluruh Insan Perusahaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja.
3. Seluruh Insan Perusahaan harus menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan.
4. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan perselingkuhan dan tindakan pelecehan seksual secara verbal, visual maupun fisik termasuk pelecehan atas privasi dan status.
5. Seluruh Insan Perusahaan dilarang (baik di kantor maupun di luar kantor) :
 - a. Menggunakan, memiliki, mendistribusikan atau menjual narkoba atau obat-obatan terlarang.
 - b. Mengonsumsi minuman beralkohol.
 - c. Melakukan semua bentuk perjudian,
 - d. Melakukan semua bentuk tindakan kriminal.
6. Seluruh Insan Perusahaan wajib memelihara lingkungan yang sehat.
7. Seluruh Insan Perusahaan agar mengupayakan penggunaan telepon secara efisien dan efektif serta menghindari penggunaan telepon untuk kepentingan pribadi secara berlebihan serta merespon bunyi telepon/ tanda panggilan pada kesempatan pertama.

CONDUCT STANDARD OF COMPANY PERSONNEL

Personnal and Professional Responsibility

1. All personnel of the Company must comply with all regulation of the Company on the employees.
2. All personnel of the Company is required to understand and comply with all provisions, both issued by the Company and regulators according to the duties and responsibilities.
3. All personnel of the Company must be dedicated, loyal, diligent and careful while working and always strive to improve knowledge and capacity to ensure that their works run smoothly.
4. All personnel of the Company must implement the Company's interest over personal or group interest.

Creating Conducive Work Environment

1. All personnel of the Company must be polite in communication.
2. All personnel of the Company must uphold ethical value in making working relation with supervisors, subordinaters or colleagues.
3. All personnel of the Company must avoid any action and remarks that contains harassment, humiliation, mock, blasphemy and despise.
4. All personnel of the Company is not allowed to have love affair and sexual harrasmment either verbally or physically, including harassment on privacy and status.
5. All personnel of the Company is not allowed (both inside and outside the office) to:
 - a. Use, have, distribute or sell narcotics or drugs.
 - b. Consume alcohols.
 - c. Playing gambling,
 - d. Committing to criminal act.
6. All personnel of the Company must maintain a healthy environment.
7. All personnel of the Company are encouraged to use telephone efficiently and effectively and avoid the use of telephone for personal interest improperly and pick up the telephone at the first ring.

Menghindari Segala Benturan Kepentingan dan Potensinya yang Memicu Perilaku Tidak Sehat dan Tidak jujur

1. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan tenaga, pemikiran dan kemampuan kerjanya untuk kepentingan Perusahaan. Pekerjaan atau kegiatan di luar jam kantor dapat dilakukan sepanjang tidak memanfaatkan nama dan kepentingan Perusahaan.
2. Seluruh Insan Perusahaan yang sudah tidak aktif atau telah mengundurkan diri dilarang menggunakan setiap bentuk hak cipta, hak milik intelektual, data dan informasi Perusahaan serta melakukan kegiatan atas nama Perusahaan.
3. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan atas nama pribadi atau golongan.
4. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan dengan memperjanjikan keuntungan pribadi dengan pihak lain.
5. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima suap atau pembayaran dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan jabatan atau tugasnya.
6. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima dan memberikan hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang sehat.
7. Seluruh Insan Perusahaan dilarang menjadi penyedia barang dan jasa yang secara langsung maupun tidak langsung menjual barang, hak atau jasa kepada Perusahaan.
8. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan mark up harga penjualan atau pembelian baik untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
9. Seluruh Insan Perusahaan dilarang memanfaatkan jabatannya untuk memberikan perlakuan istimewa kepada pihak lain.

Menjaga Asset, Harta dan Informasi demi Kepentingan Perusahaan

1. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan asset Perusahaan hanya untuk kepentingan Perusahaan dan tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi/golongan.
2. Seluruh Insan Perusahaan harus bertanggung jawab melindungi harta Perusahaan dari pencurian, penggelapan dan penyalahgunaan asset sesuai wewenang masing-masing.

Avoiding Any Conflict of Interest and Its Potential that Triggers Unhealthy and Dishonest Conduct

1. All personnel of the Company devote their energy, thought and work capacity for the interest of the Company. Any work or activity outside office hours can be done as long as it does not take advantage the name and interest of the Company.
2. All personnel of the Company that are not active or resign are not allowed to use any form of copy rights, intellectual property, data and information of the Company and conduct activities on behalf of the Company.
3. All personnel of the Company are not allowed to invest fund for the Company on behalf of personal or group name.
4. All personnel of the Company shall not invest the Company's fund by pledging personal benefits to other parties.
5. All personnel of the Company shall not accept bribes or payments of any form from parties who have a direct or indirect relationship with the office or duties.
6. All personnel of the Company shall not receive and give presents of any form which may allegedly affect a sound business decision.
7. All personnel of the Company are prohibited from being a provider of goods and services or directly and indirectly selling goods, rights or services to the Company.
8. All personnel of the Company are prohibited to mark up the sale or purchase price for both personal and party interests.
9. All personnel of the Company are prohibited from utilizing his position to give preferential treatment to other parties.

Maintaining Assets and Information for the Company's Interest

1. All personnel of the Company shall utilize the Company's assets for the benefit of the Company and not for personal/group interest.
2. All personnel of the Company are responsible for protecting the Company's assets from thievery, embezzlement and misappropriation in accordance of their respective authority.

3. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga data/informasi beserta perangkatnya sesuai dengan kewenangannya agar tidak disalahgunakan, dirusak, dicuri, atau tidak diakses oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab.
4. Seluruh Insan Perusahaan tidak diperkenankan menggunakan nama, logo, hak cipta dan berbagai aksesoris milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
5. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga informasi internal Perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman, golongan, atau kelompok apapun dan manapun.
6. Seluruh Insan Perusahaan wajib membuat dan memberikan laporan dan data-data dengan benar dan jujur kepada pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mematuhi Hukum daan Perundang-Undangan

1. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan kegiatan insider trading guna memperoleh keuntungan pribadi dan tidak bertindak sebagai pialang, pencari atau perantara lain untuk kepentingan pribadi atau golongan dalam transaksi yang dilakukan Perusahaan.
2. Seluruh Insan Perusahaan dilarang terlibat atau melibatkan diri pada investasi dan atau praktik yang bersifat pencucian uang (*money laundering*).
3. Seluruh Insan Perusahaan dilarang membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun, namun Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh insan Perusahaan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan syarat :
 - a. Tidak mengatasnamakan Perusahaan,
 - b. Tidak menggunakan asset Perusahaan dalam aktifitas politiknya,
 - c. Tidak memberikan kontribusi apapun atas nama Perusahaan,
 - d. Apabila menduduki jabatan di Partai Politik (parpol) dan menjadi calon/anggota legislatif dianggap mengundurkan diri dari Perusahaan.
4. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

3. All personnel of the Company shall maintain the data / information along with the device in accordance with the authority in order not to be abused, damaged, stolen, or accessed by other parties.
4. All personnel of the Company shall not utilize the name, logo, copyright and various accessories of the Company for personal gain.
5. All personnel of the Company shall maintain the Company's internal and confidential informations and shall not utilize them for personal, family, associates, or other parties' interests.
6. All personnel of the Company are required to prepare and provide reports and data properly and honestly to interested parties according to the rules and regulations in force.

Compliance on the Rules and Regulations

1. All personnel of the Company are prohibited from conducting insider trading for personal gain and shall not act as brokers, finders or other intermediary for personal or group interests in the transactions made by the Company.
2. All personnel of the Company are prohibited from engaging in investment and or money laundering.
3. All personnel of the Company are prohibited from establishing an understanding, engagement, statement, either directly or indirectly, which indicates the Company's ties to any political party. However, the Company grants freedom for all personnel to channel their political aspirations under these conditions:
 - a. All personnel shall not act on behalf of the Company,
 - b. All personnel must not utilize the Company's assets for political activities.
 - c. All personnel shall not provide any political contribution on behalf of the Company,
 - d. A personnel is considered to resign if he/she holds a position in any political party or becoming a legislature candidate / member.
4. All personnel of the Company are prohibited from conducting Corruption, Collusion and Nepotism (KKN).

Internalisasi dan Penegakanan Code of Conduct

Internalisasi dan Penegakan Code of Conduct dilakukan melalui Komitmen Bersama seluruh insan perusahaan yang bertekad untuk mentaati Pedoman Perilaku (Code of Conduct), dan perusahaan wajib melakukan sosialisasi atau internalisasi Pedoman Perilaku tersebut kepada seluruh insan Perusahaan.

Mekanisme penegakan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dilakukan dengan cara seluruh insan perusahaan wajib menandatangani surat Pernyataan Komitmen untuk Mematuhi Pedoman Perilaku (Code of Conduct), dan seluruh insan Perusahaan wajib mengerti, memahami dan menerapkan Pedoman Perilaku (Code of Conduct).

Saluran Pengaduan

1. Apabila ditemui adanya pelanggaran Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di lingkungan Perusahaan, setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk segera melaporkan secara tertulis dengan menyebutkan identitas pelapor kepada Divisi yang menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Permasalahan perilaku Dewan Pengawas dan Direksi, penanganannya dilakukan oleh Menteri.
3. Permasalahan perilaku pegawai, penanganannya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku.
4. Pelanggaran Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dalam hubungannya dengan masyarakat, penanganannya tetap mengacu kepada ketentuan kepegawaian yang berlaku dalam Perusahaan.
5. Divisi yang menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM) berkewajiban untuk merespon dengan segera setiap pertanyaan, pemberitahuan, dan laporan yang diterimanya secara Proporsional.

Mekanisme Penanganan Atas Laporan Pelanggaran Pedoman Perilaku (Code of Conduct)

1. Atasan langsung atau unit kerja yang ditunjuk untuk mengelola penanganan atas laporan pelanggaran berdasarkan laporan yang diterima melakukan identifikasi permasalahan analisis, mengumpulkan informasi tambahan yang relevan serta merahasiakan identitas pelapor.

Internalization and Enforcement of Code of Conduct

The Internalization and Enforcement of Code of Conduct is conducted through Joint Commitment for all employees who are determined to comply with the Code of Conduct. The Company is responsible to conduct dissemination or internalization of the Code of Conduct to all employees.

The enforcement mechanism of Code of Conduct is conducted by all employees by signing a Statement of Commitment to Comply with the Code of Conduct. All employees are obliged to understand, comprehend, and implement the Code of Conduct.

Complaints Hotline

1. If any violation of the Code of Conduct found in the Company, each personnel is obliged to promptly report in written form and state the rapporteur's identity to Human Resources Division.
2. Behavioral problems of Board of Supervisors and the Board of Directors are handled by the Minister.
3. Behavioral issues of the employees are handled immediately by the supervisor in tier in line with the mechanism.
4. Violations of the Code of Conduct in relation to the public shall be handled by referring to personnel's provision applicable in the Company.
5. The division in charge of Human Resources is obliged to respond immediately to any questions, notices, and reports received Proportionally

Handling Mechanism of Code of Conduct Mechanism

1. The immediate supervisor or unit designated to manage the handling of violations based on the received reports identifies analysis' issues, collects relevant additional information and conceals the rapporteur's identity.

2. Hasil analisis tersebut apabila di pandang perlu dapat dilaporkan kepada Direksi untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Penyebarluasan Etika Perusahaan

Upaya sosialisasi dan penyebarluasan Etika Perusahaan secara merata kepada seluruh elemen Perusahaan dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain:

1. Pemberian sosialisasi, training dan seminar bagi karyawan
2. Pemasangan banner maupun spanduk
3. Rapat evaluasi kinerja
4. Sosialisasi saat proses perekrutan

Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Etika Perusahaan

Agar penegakan standar etika dapat ditegakkan secara ketat, Perusahaan menerapkan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Etika Perusahaan yang diberlakukan oleh seluruh perangkat Perusahaan tanpa terkecuali. Adapun sanksi yang diberikan berupa surat peringatan.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Dalam rangka melakukan pengawasan internal perusahaan membuat sebuah Whistleblowing System. Sistem ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan di internal perusahaan. Sistem ini disediakan agar para karyawannya atau orang di luar perusahaan dapat melaporkan kejahatan yang dilakukan di internal perusahaan.

Pembuatan *Whistleblowing System* ini untuk mencegah kerugian yang diderita Perum Jamkrindo untuk menyelamatkan usaha. Dalam konsep yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), ada dua kata kunci yang berkaitan dengan Whistleblowing System, yaitu pelapor dan pelanggaran. Dalam prakteknya kedua kata ini dipadankan menjadi pelapor pelanggaran dan kemudian disebut sebagai Whistleblower. Pelapor pelanggaran ini bisa karyawan dari Perum jamkrindo (pihak internal). Akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggaran, pemasok, masyarakat).

2. The results of this analysis in perspective, if need be reported to the Board of Directors for further processing in accordance mechanism applicable.

Socialization of Corporate Ethics

Socialization and dissemination of Corporate Ethics are conducted evenly to all elements of the Company by way of several strategies, among others:

1. Providing socialization, training, and seminar for employees
2. Banner installation
3. Performance evaluation meeting
4. Socialization of recruitment process

Enforcement and Sanction for Violation to Corporate Ethics

To strictly enforce the ethical standard, the Company imposes sanction for the violation to Corporate Ethics enforced by all elements of the Company without exception. The sanctions can be in the form of letter of warning.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System is an internal controlling mechanism made by the Company. This system is composed in order to prevent internal violations and crimes in the company. This system allows the employees or individuals outside the company to report crimes committed inside the Company.

Whistleblowing System is made to prevent the loss suffered by Perum Jamkrindo to secure its business. Under the draft prepared by the National Committee on Governance Policy (KNKG), there are two key words related to the Whistleblowing System, namely the reporting and violation. In practice, the two words are paired into violation reporting and then referred to as whistleblower. The whistleblowers can consist of the employees of Perum Jamkrindo (internal party). However, it is also possible to have rapporteurs from external parties (violations, suppliers, communities).

Syarat dari seorang Whistleblower dalam konsep ini adalah memiliki informasi, bukti, atau indikasi yang akurat mengenai terjadinya pelanggaran yang dilaporkan oleh itikad baik atas suatu kebijakan perusahaan tertentu. Tujuan dari sistem pelaporan pelanggaran ini adalah untuk mengungkap tindakan pelanggaran, perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan perusahaan. Sementara yang disebut sebagai pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/standar industri terkait dengan peraturan internal perusahaan, serta dapat dilaporkan.

Yang termasuk di dalam aktivitas pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Melanggar kode etik perusahaan.
3. Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum.
4. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional perusahaan, ataupun kebijakan, prosedur, peraturan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan.
5. Tindakan kecurangan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan.
6. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non finansial.
7. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.

Praktik Whistleblowing System

A. Komitmen Perum Jamkrindo dan Karyawan

Seluruh karyawan Perum Jamkrindo berkomitmen untuk mempraktekkan Whistleblowing System dalam rangka melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran. Karyawan juga dituntut untuk berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran. Sementara itu, Perum Jamkrindo juga memiliki komitmen untuk membuat kebijakan untuk melindungi pelapor.

Yang lebih penting lagi bahwa menurut ketentuan di dalam KNKG, kebijakan perlindungan harus menyatakan secara jelas bahwa seorang pelapor pelanggaran akan

The requirement for a Whistleblower in this concept is: providing information, evidence, or an accurate indication of the occurring violation and reporting them in good faith and under specific company's policy. The purpose of the reporting system is to uncover violations, unlawful, unethical or immoral acts or other actions conducted by the employees or heads of the company that may harm the organization and the stakeholders. In addition, a violation is an act that contradicts the laws, industrial regulations/standards related to the company's internal regulations which can be reported.

Activities considered as violations are as follow:

1. Violating regulations
2. Violating code of ethics
3. Violating the generally accepted accounting principles.
4. Violating policies and operational procedures considered necessary for the Company
5. Any fraud
6. Any fraud potentially leading to financial and non financial loss.
7. Any harmful actions for occupational safety

Whistleblowing System Practice

A. Commitment of Perum Jamkrindo and Employees

All employees of Perum Jamkrindo are committed to the implemetation of Whistleblowing System. The employees are also required to actively report any violation. In addition, Perum Jamkrindo is also committed to prepare policies to protect the rapporteurs.

Furthermore, according to the provisions in KNKG, the policies should clearly state that the whistleblower will have protection from the Company to anticipate any

mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan. Sistem pelaporan pelanggaran berada dibawah direksi, khususnya direktur utama. Dewan pengawas akan melakukan pengawasan atas kecukupan dan efektivitas pelaksanaan sistem tersebut.

B. Komitmen Perum Jamkrindo untuk melindungi dan menindaklanjuti laporan Whistleblower

Laporan-laporan dari para Whistleblower tersebut tidak hanya dibiarkan, tetapi ditindaklanjuti dengan penelitian dan investigasi. Bahkan dalam kondisi tertentu perusahaan berkomitmen untuk melindungi Whistleblower jika mengancam jiwa, harta benda dan pekerjaannya.

Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan internal sistem pelaporan pelanggaran dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat memastikan bahwa:

- Semua pelanggaran yang telah dilaporkan dan diverifikasi telah tertangani dengan baik.
- Pelanggaran yang berulang dan sistemik telah dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan, misalnya pelanggaran di bidang pengadaan barang dan jasa dilaporkan kepada direktur umum yang membawahi bagian pengadaan.

Proses Penanganan dan data pengelolaan pelaporan pelanggaran selama tahun 2013.

Selama tahun 2013, Perusahaan tidak menerima laporan pengaduan pelanggaran.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Undang-undang Republik Indonesia menetapkan bahwa membayar atau menawarkan pembayaran atau bahkan menerima suap, kickback atau pun bentuk pembayaran lain yang korup adalah suatu tindak pidana yang dapat menjadikan Perusahaan maupun para pegawai secara individu dapat dikenai denda dan/atau hukuman penjara. Undang-undang anti korupsi ini, termasuk Peraturan Praktik Korupsi menjadikan pembayaran, penawaran atau pemberian segala sesuatu yang bernilai kepada pejabat Perusahaan dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan para pejabat sebagai suatu tindak pidana.

harmful deeds. The whistleblowing system is overseen by the Board of Directors, particularly the President Director. Board of Supervisors will oversee the adequacy and effectiveness of the system.

B. Perum Jamkrindo commits to protect and follow up reports from Whistleblowers

These reports from the Whistleblowers will be followed-up by research and investigation. Even in certain cases, the Company will protect the Whistleblowers of any potential actions that harm their lives, properties, and career.

Whistleblowing Mechanism

The internal whistleblowing reporting mechanism is designed to ensure that:

- All violations reported and verified have been well handled
- Repeat and systemic violation has been reported to the related official having authority to make improvement, such as violation in goods and service procurement which is reported to the director overseeing procurement division.

Handling Process and Whistleblowing Management Data in 2013

During 2013, the Company did not receive whistleblowing reports.

ANTI- CORRUPTION POLICY

The Law of the Republic of Indonesia stipulates that paying, offering to pay or accepting bribes, kickbacks, or any other form of corrupt payment is a crime which results in making the Company and the individual employee as subject to fines and / or imprisonment. Anti-corruption laws, including the Corrupt Practices Regulations categorizes payments, offering or giving valueable items to the Company's officials with the purpose of influencing actions or decisions of the officials as criminal offense.

Tujuan Kebijakan ini adalah untuk memastikan agar semua pegawai, pejabat dan direktur, serta semua anak perusahaan dan afiliasi Perusahaan patuh terhadap Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan dan undang-undang anti korupsi terkait.

Kebijakan ini mencakup hal-hal berikut ini:

- Suap, *Kickback* atau Pembayaran Korup Lain
- Pembayaran Fasilitas
- Hubungan dengan Pihak Ketiga

Kementerian Badan Usaha Milik Negara meluncurkan roadmap BUMN Bersih sebagai aksi anti korupsi dilingkungan kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan negara, dan itu juga berlaku di Perum Jamkrindo sebagai salah satu perusahaan negara.

PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE

Perusahaan menyadari bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan tidak terlepas dari interaksi secara langsung atau pun tidak langsung dengan masyarakat sekitar area proyek serta lingkungan. Oleh karena itu, praktik *bad corporate governance* senantiasa mengancam dalam kegiatan operasional Perusahaan. Meski demikian, selama tahun 2013, Perusahaan tidak memperoleh adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Perusahaan terhadap pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan tidak hanya semata-mata berorientasi pada keuntungan semata, namun lebih dari itu yakni memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Praktik *bad corporate governance* lainnya juga terlihat pada ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan audited dengan Standar Akuntansi Indonesia. Pada tahun 2013, Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan serta penyesuaian penyajian laporan keuangan audited dengan Standar Akuntansi Indonesia.

The purpose of this policy is to ensure that all employees, officers and directors, as well as all of its subsidiaries and affiliated companies adhere to the Company's Anti-Corruption Policies and related anti-corruption law.

The policies include:

- Bribery , Kickback or Other Corrupt Payments
- Facilitation Payments
- Relationships with Third Parties

The Ministry of State Owned Enterprises launches Clean BUMN roadmap as an act of anti-corruption within the environment of the Ministry of SOE and state corporations, including Perum Jamkrindo as one of the state corporations.

BAD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICE

The Company realizes that the implemented business activities are inseparable from direct or indirect interaction with nearby community and surrounding. Therefore, bad corporate governance practices can always entail the Company. However, there were no reports on the Company's activities being the causes of environmental pollution in 2013. This reflects the Company's commitment to community development and environmental preservation through corporate social responsibility. The Company is not only oriented to seek for profit, but more importantly, give enormous benefit to society and environment.

Other bad corporate governance practices are evidenced in the non-compliance with taxation regulation and the non-conformity of audited financial report presentation with Indonesia Accounting Standard. In 2013, the Company has met taxation obligation and conformed with the Indonesia Accounting Standard for presenting its audited financial report.

KEPATUHAN TERHADAP PAJAK

Perusahaan senantiasa mematuhi ketentuan pajak yang berlaku sebagai bentuk kontribusi nyata serta menjadi kewajiban terhadap negara. Hal ini sejalan dengan semangat Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan melalui optimalisasi penerimaan pajak.

Total kewajiban pajak Perum Jamkrindo pada tahun 2013 adalah sebesar Rp92.183.483.377, yang terdiri dari Pajak Penghasilan tahun 2013 sebesar Rp91.516.855.060, Pajak Pertambahan Nilai Rp289.018.655, dan Pajak Bumi dan Bangunan Rp377.609.662. Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan dan menyetor ke kas Negara sebesar Rp99.949.725.820, sehingga kewajiban pajak per 31 Desember 2013 sebesar Rp24.242.476.126.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatan usaha Perum Jamkrindo adalah memberikan penjaminan kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK), hal tersebut sejalan dengan komitmen pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Tanggungjawab sosial Perum Jamkrindo tersebut diwujudkan dalam kebijakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dan Program Bina Lingkungan yang ditetapkan tanggal 27 April 2007 yang konsisten dijalankan setiap tahunnya.

Program Bina Lingkungan

Perum Jamkrindo menjalankan Program Bina Lingkungan yang merupakan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat disekitar wilayah kerja Perum Jamkrindo menjadi lebih baik melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan.

Sampai dengan akhir tahun 2013 Perum Jamkrindo telah menyalurkan dana untuk Program Bina Lingkungan sebesar Rp6.651.854.273 antara lain terdiri dari bantuan

TAX COMPLIANCE

The Company continues to comply with the provisions of applicable taxes as well as being a form of real contribution obligations to the state. This is in line with the spirit of the Government to promote development through tax revenue optimization.

Perum Jamkrindo's total tax liability in 2013 amounted Rp92.183.483.377, which consist of income tax in 2013 amounted Rp91.516.855.060, Rp289.018.655 Value Added Tax, and the Land and Building Tax Rp377.609.662. The Company has fulfilled tax obligations and deposit into the state treasury for Rp99.949.725.820, so that the tax liability per December 31, 2013 amounted to Rp24.242.476.126.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Corporate Social Responsibility for the Environment

Perum Jamkrindo engages in credit guarantee business to Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK) in line with the Company's accountability commitment to the public in order to improve the welfare of the nation.

Perum Jamkrindo's corporate social responsibility is reflected in the policy of Partnership and Environmental Development Program (PKBL) based on Regulation of State Minister of SOE No. Per-05/MBU/2007 regarding the Partnership Program of State Owned Enterprise and Environmental Development Program stipulated in April 27, 2007, and consistently implemented each year.

Environmental Development Program

Perum Jamkrindo conducts Environmental Development Program to empower the communities' social condition and to improve the social conditions of the people who live near the work area. Perum Jamkrindo improves itself through the use of funds from the Company's profits.

By the end of 2013, Perum Jamkrindo has channeled funds for the Development Program which amounted to Rp6.651.854.273 include disaster relief for Rp306.533.181, education and training

bencana alam sebesar Rp306.533.181, pendidikan dan pelatihan sebesar Rp2.066.375.665, Peningkatan Kesehatan sebesar Rp476.298.325, Prasarana & Sarana Umum sebesar Rp1.859.442.052, Sarana ibadah sebesar Rp1.058.870.000, Pelestarian alam sebesar Rp298.650.000, serta Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp585.685.050.

Selama tahun 2013 Perum Jamkrindo telah menyalurkan bantuan Program Bina Lingkungan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

for Rp2.066.375.665, Rp476.298.325 for Health Improvement, Infrastructure & Public Facilities for Rp1.859.442.052, Means worship of Rp1.058.870.000, Wildlife nature of Rp298.650.000, and Social Community for Rp585.685.050.

During 2013, Perum Jamkrindo had distributed aids for Environmental Development Program as described in the following table:

Jenis Bantuan / Types of Aid	Rp.
Bantuan Bencana Alam / Aids for Victims of Natural Disaster	306.533.181
Bantuan Pendidikan & Pelatihan / Aids for Training & Education	2.066.375.665
Bantuan Peningkatan Kesehatan / Aids for Health Improvement	476.298.325
Bantuan Pengembangan Prasarana & Sarana Umum / Aids for Infrastructure & Facilities Development	1.859.442.052
Bantuan Sarana Ibadah / Aids for Religious Service	1.058.870.000
Bantuan Pelestarian Alam / Aids for Environmental Conservation	298.650.000
Sosial Kemasyarakatan / Social Community	585.685.050
Jumlah / Total	6.651.854.273

Tanggung Jawab Perusahaan dalam Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Komitmen pelaksanaan kegiatan yang aman, Perusahaan telah menetapkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, oleh sebab itu Perusahaan bersama pihak terkait bertekad menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan melakukan kegiatan operasional sesuai kaidah yang berlaku.

Untuk memastikan Perusahaan telah menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang maksimum dan menunjukkan komitmen pelaksanaan kegiatan operasional yang aman, Perusahaan telah mengintegrasikan semua sistem operasional berkaitan dengan pengelolaan K3.

Untuk efektivitas penerapan SMK3 dilakukan pengelolaan contractory safety management system (CSMS) yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja Perum Jamkrindo dalam menerapkan SMK3 termasuk aspek-aspek terkait Hak Asasi Manusia.

Corporate Responsibility in Manpower, Health, and Occupational Safety

In view of commitment to safety, the Company has established policies on Occupational Health and Safety, thus, the Company with related parties are committed to creating a healthy work environment and perform operations according to the rules applied.

To ensure whether the Company has optimally adopted the Occupational Health and Safety standards and demonstrate commitment to the safety of operations, the Company has integrated all operating systems related to the management of K3.

For the effective implementation of the SMK3 management, contractory safety management system (CSMS) intended to improve performance in implementing SMK3, including in the Company's aspects related to human rights, is conducted.

Program Kemitraan melalui Pengembangan Masyarakat dan Konsumen

Program Kemitraan

Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dan koperasi produktif disemua sektor ekonomi agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan.

Partnership Program through Community and Customer Development

Partnership Program

Partnership Program conducted by Perum Jamkrindo is a program that aims to improve the ability of productive SMEs and cooperatives in all economic sectors so as to be resilient and self-reliant through the use of funds from the Company's profits.

Selama tahun 2013 Perum Jamkrindo telah menyalurkan dana Program Kemitraan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

During the year 2013, Perum Jamkrindo has distributed funds as shown in the following table:

Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan Berdasarkan Sektor Tahun 2013

Disbursement of Loan for Partnership Program Based on Sectors in 2013

Sektor / Sector	Rp.
Industri / Industry	330.000.000
Perdagangan / Trading	2.186.000.000
Pertanian / Agriculture	75.000.000
Perkebunan / Plantation	35.000.000
Peternakan / Husbandry	150.000.000
Perikanan / Fishery	-
Jasa / Service	739.000.000
Jumlah / Total	3.515.000.000

Penyaluran Dana Pembinaan Program Kemitraan Berdasarkan Sektor Tahun 2013

Disbursement of Fund for Partnership Program Based on Sectors in 2013

Sektor	Rp.
Industri / Industry	-
Perdagangan / Trading	7.100.000
Pertanian / Agriculture	-
Jumlah / Total	7.100.000

**Referensi Isi Laporan Tahunan
dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Annual Report Contents Reference
To The Financial Services Authority Regulation

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

266

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference				
KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE
I. Umum / General				
Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris.	Annual Report is presented in good and correct Indonesian and it is recommended to present the report also in English.			√
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.	Annual report is printed in good quality and use type and font so that the text is easy to read.			√
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas.	Annual report should state clearly the identity of the company.	Nama Perusahaan dan Tahun Annual Report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; 4. Setiap halaman	Name of company and year of the annual report is placed on: 1. The front cover; 2. Side; 3. Back Cover; 4. Each page	√
Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan	Annual Report is presented in the company's website			√
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting / Financial data Highlights				
Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	Financial information in comparative form over a period of 3 financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 years.	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha 2. Laba (rugi) 3. Total laba (rugi) komprehensif 4. Laba (rugi) per saham	The information includes: 1. Sales/income from business 2. Gross profit (loss) 3. Comprehensive profit (loss) 4. Profit (loss) per share	20
Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	Financial position information in comparative form over a period of 3 financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 years.	Informasi memuat antara lain: 1. Modal kerja bersih 2. Jumlah investasi pada entitas asosiasi dan/atau joint venture 3. Jumlah aset 4. Jumlah liabilitas 5. Jumlah ekuitas	The information includes: 1. Net operating capital 2. Total investment in associate entities and/or joint venture 3. Total Assets 4. Total Liabilities 5. Total equities	19
Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	Financial ratio in comparative form over a period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	Information includes 5 (five) financial ratios that are common and relevant to the industry the company.	21

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / <i>Financial Services Authority Reference</i>				
KRITERIA / <i>CRITERIA</i>		PENJELASAN / <i>DESCRIPTION</i>		HALAMAN / <i>PAGE</i>
Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik.	Share price information in the form of chart and table.	Informasi dalam bentuk tabel dan grafik yang memuat: 1. Jumlah saham yang beredar; 2. Kapitalisasi pasar; 3. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan 4. Volume perdagangan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada).	Information in the form of chart and table includes: 1. Total outstanding shares 2. Market capitalization 3. The highest, lowest, and closing price of share 4. Trading volume on a quarterly basis during the last 2 (two) fiscal years.	N.A.
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.	Information on outstanding bond, sukuk or convertible bond within the last 2 (two) fiscal years.	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/ obligasi konversi yang beredar (outstanding) 2. Tingkat bunga/imbilan 3. Tanggal jatuh tempo 4. Peringkat obligasi/sukuk	The information contains: 1. The number of bonds/sukuk/ outstanding bonds 2. The interest rate / exchange 3. Date of maturity 4. The rating of bonds / sukuk	N.A.
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi / <i>Board of Commissioners and Board of Directors Report</i>				
Laporan Dewan Komisaris	Board of Commissioners' Report	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi. 3. Perubahan komposisi Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada)	Contains the following items: 1. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company. 2. View on the prospects of the company's business as established by the Board of Directors. 3. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any).	24-27
Laporan Direksi	Board of Directors' Report	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan 2. Gambaran tentang prospek usaha 3. Penerapan tata kelola perusahaan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada)	Contains the following items: 1. Analysis of company's performance, encompassing strategic policies, comparison between achievement of results and targets and challenges faced by the company 2. Description of business outlooks 3. The implementation of good corporate governance 4. Changes in the composition of the Board of Directors (if any)	28-30

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

268

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference				
KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE
Tanda tangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Signature of members of the Board of Directors and Board of Commissioners	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembar tersendiri 2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau: penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan	Contains the following items: 1. Signatures are set on a separate page. 2. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the accuracy of the annual report. 3. Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors, stating their names and titles/ positions. 4. A written explanation in a separate letter from each member of the Board of Commissioners or Board of Directors who refuses to sign the annual report, or: written explanation in a separate letter from the other members in the event that there is no written explanation provided by the said member.	32
IV. Profil Perusahaan / Company Profile				
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Name and address of the Company	Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website	Information on name and address, zip code, telephone and or facsimile, email, website.	46
Riwayat singkat perusahaan	Brief history of the company	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada).	Includes date/year of establishment, name, and change in the company name (if any)	47-50
Bidang usaha	Line of Business	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; dan 2. Penjelasan mengenai produk dan/atau jasa yang dihasilkan	Description about:	
			1. Line of business based on the latest articles of association; and 2. Description of products/ services	51-52 52-55
Struktur organisasi	Organizational Structure	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi	In the form of a chart, giving the names and titles at the least until one level below the Board of Directors.	56-59

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference				
KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE
Visi dan misi perusahaan	Company Vision and Mission	Mencakup: 1. visi perusahaan; 2. misi perusahaan; dan 3. keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/ Dewan Komisaris	Including: 1. Corporate vision 2. Mission; and 3. Statement that the vision and mission has been approved by the Board of Directors/Board of Commissioners	60
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	Identity and brief curriculum vitae of the members of the Board of Commissioners;	Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan 5. Pengalaman kerja 6. Tanggal penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris	The information should contain: 1. Name 2. Position (including position in other companies/ institutions) 3. Age 4. Education 5. Working experience 6. The first appointment date as member of Board of Commissioners	62-65
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi	Identity and brief curriculum vitae of the members of the Board of Directors;	Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan 5. Pengalaman kerja 6. Tanggal penunjukan pertama kali sebagai anggota Direksi	The information should contain: 1. Name 2. Position (including position in other companies/ institutions) 3. Age 4. Education 5. Working experience 6. The first appointment date as member of Board of Directors	68-71
Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)	Number of employees (comparative in 2 years) and description of competence building (for example: education and training of employees)	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan 3. Pelatihan karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan 4. Biaya yang telah dikeluarkan	The information should contain: 1. The number of employees for each level of the organization. 2. The number of employees for each level of education 3. Training of employee that has been and will be conducted 4. Availability of equal opportunity to all employees	81-98

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE
Komposisi pemegang saham	Composition of shareholders	Mencakup antara lain: 1. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham 2. Nama direktur dan komisaris yang memiliki saham 3. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%, dan persentase kepemilikannya	Should include: 1. Names of shareholders having 5% or more shares. 2. Names of Directors and Commissioners owning shares 3. Public shareholders having respective share ownership of less than 5% and its percentage	74
Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	List of subsidiaries and/or affiliated companies	Informasi memuat antara lain : 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi 2. Persentase kepemilikan saham 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi)	The information should include: 1. Name of subsidiaries/affiliated companies 2. Percentage of share ownership 3. Information on the line of business of subsidiaries and/or associate entities 4. Explanation regarding the operational status of the subsidiary or affiliated company (already operating or not yet operating)	74
Struktur grup perusahaan	Structure of company's group	Struktur grup perusahaan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV), atau pernyataan tidak memiliki grup	Structure of company's group describing subsidiaries, associate entities, joint venture, and special purpose vehicle (SPV), or statement of having no group.	N.A
Kronologis pencatatan saham	Share-listing chronology	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan saham 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah saham 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan	Includes: 1. Share-listing chronology 2. Types of corporate action causing changes in the number of shares 3. Changes in the number of shares from the beginning of listing up to the end of the financial year 4. Name of Stock Exchange where the company's shares are listed	74

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / <i>Financial Services Authority Reference</i>				
KRITERIA / <i>CRITERIA</i>		PENJELASAN / <i>DESCRIPTION</i>		HALAMAN / <i>PAGE</i>
Kronologis pencatatan efek lainnya;	Other securities listing chronology	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan efek lainnya 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku 4. Nama Bursa dimana efek lainnya dicatatkan 5. Peringkat efek	Includes: 1. Other securities listing chronology 2. Types of corporate action causing changes in the number of securities 3. Changes in the number of securities from the initial listing up to the end of the financial year 4. Name of Stock Exchange where the company's securities are listed 5. Rating of the securities	N.A
Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal	Name and address of institution and or profession supporting the capital market	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik 3. Nama dan alamat Perusahaan Pemeringkat Efek	The information contains: 1. Name and address of BAE 2. Name and address of Public Accounting Firm 3. Name and address of share registrar	75
Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional	Awards and/or certificates received by the company, both at national and international level	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi 2. Tahun perolehan 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi)	Information should include: 1. Name of the awards and/or certification 2. Year when awards are received 3. Institution presenting the awards/certification 4. Period of validity (for certification)	75
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Name and address of subsidiaries and/or branch office or representative office (if any)			99
V. Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan / <i>Managament Discussion and Analysis</i>				
Tinjauan operasi per segmen usaha	Operational review per business segment	Memuat uraian mengenai: 1. Produksi/kegiatan usaha; 2. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; 3. Penjualan/pendapatan usaha; 4. Profitabilitas; untuk masing-masing segmen usaha yang diungkapkan dalam laporan keuangan (jika ada)	Includes description of: 1. Products/line of business; 2. Increase/decrease in production capacity 3. Sales/operating income 4. Profitability For each business segment disclosed in the financial statement (if any)	106

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Description of company's financial performance	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas 3. Ekuitas 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif 5. Arus kas	An analysis of financial performance which includes a comparison between the financial performance of the current year and that of the previous year (in the form of narration and tables) concerning: 1. Current assets, non-current assets, and amount of assets 2. Short term and long term liabilities and total liabilities 3. Equity 4. Sales/operating income, expenses and profit (loss), other comprehensive revenue, and total comprehensive profit (loss) 5. Cash flow	126-134
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan	Discussion and analysis on the capacity to pay debts and the company's level of receivables collectability by presenting relevant ratio calculation	Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang 2. Tingkat kolektibilitas piutang	Explanation on: 1. Capacity to pay short term and long term debts 2. Receivables collectability level	N.A
Bahasan tentang struktur modal (capital structure), dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)	Discussion on capital structure, management policies on capital structure	Penjelasan atas: 1. Struktur modal (capital structure), dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies)	Explanation on: 1. Capital structure, and 2. Capital structure policies	139
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal	Discussion on material ties for the investment of capital goods	Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut 3. Mata uang yang menjadi denominasi 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal, agar diungkapkan	Explanation on: 1. The purpose of the ties 2. Fund resources expected to fulfill the said ties 3. Currency of denomination 4. Steps taken by the company to protect the position of related currency against risks. Notes: if the company does not have tie related to investment of capital goods, the information should be disclosed.	143

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference				
KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE
Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan/pendapatan bersih, maka berikan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan/atau adanya produk atau jasa baru.	If the financial statement discloses a material increase or decrease in the sales or net income, an explanation should be disclosed concerning the extent to which such changes can be linked to the amount of goods or service offered and/or new products/services.	Penjelasan mengenai: 1. Besaran peningkatan/penurunan penjualan atau pendapatan bersih 2. Faktor penyebab peningkatan/penurunan material dari penjualan atau pendapatan bersih yang dikaitkan dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan/atau adanya produk atau jasa baru.	Description of: 1. Amount of an increase/decrease of sales/net income 2. Factors causing the material increase/decrease from sales or net income related to total goods or services and or new products/services.	140
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan	Information on the comparison between target set at the beginning of the fiscal year and the realization and target or projection for the next year concerning revenue, profit, capital stricter, and others considered important for the company.	Informasi memuat antara lain: 1. perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) 2. target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam satu tahun mendatang	Information should include: 1. Comparison between target of the beginning of the year and the realization 2. Target or projection for the next year	135
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Information and material fact subsequent to the date of accountant	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan	Description of important events after the date of the accountant's report, including the effects on the performance and business risk in the future Note: if there is no important event after the date of the accountant report, such information should be disclosed	140
Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Description of the company's business prospects	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya	Description of the company's prospects related to overall industry and economy, complete with quantitative data and reliable sources	149
Uraian tentang aspek pemasaran	Description of marketing aspects	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar	Description of marketing aspect of products and/or services, such as marketing strategy and market share	145

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

274

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference				
KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE
Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	Description on dividend policy and amount of cash dividend per share and amount of dividend per year published/paid for the last 2 (two) financial years.	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah dividen kas 2. Jumlah dividen kas per saham 3. Payout ratio untuk masing-masing tahun Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya	Information includes: 1. Total cash dividend 2. Total cash dividend per year 3. Payout ratio for each year Notes: if there is no dividend distribution, the reason should be disclosed	141
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Realization of fund utilization from public offering (should the company be required to submit the report of fund utilization)	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana, 2. Rencana penggunaan dana, 3. Rincian penggunaan dana, 4. Saldo dana, dan 5. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada)	The information should include: 1. total funds obtained, 2. budget plan, 3. details of budget plan, 4. balance, and 5. Date of approval from General Meeting of Shareholders regarding the changes in fund utilization (if any)	142
Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal.	Material information concerning investment, expansion, divestment, consolidation/merger, acquisition or debt/capital restructuring.	Memuat uraian mengenai: 1. Tujuan dilakukannya transaksi; 2. Nilai transaksi atau jumlah yg direstrukturisasi; 3. Sumber dana. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan	The information should include: 1. The purpose of transaction 2. Transaction value or number of transaction 3. Fund resource Note: If there is no such transaction, the information should be disclosed	142
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.	Transaction information material conflict of interest and / or transactions with affiliated parties.	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode berjalan; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan	The information should include: 1. Name of the parties involved in the transactions and related affiliation 2. Explanation on fairness of transaction 3. Reason for transaction 4. Realization of transaction within the period 5. Corporate policy related to review mechanism of the transaction; and 6. Compliance to provisions and concerned regulation Note: if there is no such transaction, such information should be disclosed	143

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / <i>Financial Services Authority Reference</i>				
KRITERIA / <i>CRITERIA</i>		PENJELASAN / <i>DESCRIPTION</i>		HALAMAN / <i>PAGE</i>
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan	Description on changes in regulation having significant effect on the company	Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan	Description should include: changes in the regulation and its effect on the company Note: if there is no change in the regulation having significant effect on the company, such information should be disclosed	143
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi	Description on changes in the accounting policy	Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan	Description includes changes in accounting policy, its reasons and impacts on financial report Notes: if there is no change in accounting policy, such information should be disclosed	143
VI. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / <i>Good Corporate Governance</i>				
Uraian Dewan Komisaris	Description of Board of Commissioners	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris 4. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan 5. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris 6. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris)	Description includes: 1. Description of responsibilities of Board of Commissioners 2. Disclosure of procedures of determining remuneration 3. Remuneration structure that represents remuneration component and amount per component for each member of Board of Commissioners 4. Meeting frequency and attendance level of Board of Commissioners 5. Training programs to increase the competency of Board of Commissioners 6. Disclosure of Board Charter (regulation of Board of Commissioners)	164

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE
Uraian Direksi	Description of Board of Directors	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi 2. Frekuensi pertemuan 3. Tingkat kehadiran anggota direksi dalam pertemuan 4. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi 5. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi)	Description includes: 1. Scope of works and responsibility of each member of the Board of Directors 2. Meeting frequency 3. Attendance level of each member of the Board 4. Training programs for improving the competence of the Board 5. Disclosure on Board Charter (regulation of Board of Directors)	174
Assessment terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi	Assessment on Board of Commissioners and Board of Directors	Mencakup antara lain: 1. Proses pelaksanaan assessment atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 3. Pihak yang melakukan assessment	Includes: 1. Assessment on performance of Board of Commissioners and/or Board of Directors' performance 2. Criteria used in the assessment process 3. Parties conducting assessment	185
Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi	Description on remuneration policies for Board of Directors	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 2. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi 3. Pengungkapan indikator kinerja untuk mengukur performance Direksi	Includes: 1. Disclosure of procedure of determining remuneration 2. Remuneration structure which shows type and total short term and long term returns, post employment, and other long term kinds of remuneration for each member of the Board of Directors 3. Disclosure of performance indicator to assess the performance of the Board of Directors.	187
Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu	Information on the Majority and Controlling Shareholders, direct and indirectly, and the individual shareholder	Dalam bentuk skema atau diagram	In the form of scheme or diagram	195

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / <i>Financial Services Authority Reference</i>				
KRITERIA / <i>CRITERIA</i>		PENJELASAN / <i>DESCRIPTION</i>		HALAMAN / <i>PAGE</i>
Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali	Disclosure of affiliation among Board of Directors, Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan	Include: 1. Affiliation among internal members of the Board of Directors 2. Affiliation between the Board of Directors and the Board of Commissioners 3. Affiliation between the member of the Board of Directors and Majority and/or Controlling Shareholders 4. Affiliation among internal members of the Board of Commissioners 5. Affiliation between the member of the Board of Commissioners and Majority and/or Controlling Shareholders Note: if there is no such transaction, such information should be disclosed	195
Komite Audit	Audit Committee	Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan anggota komite audit 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit 3. Independensi anggota komite audit 4. Uraian tugas dan tanggung jawab 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit	Includes: 1. Name and position of each member of audit committee 2. Educational background and working experience of audit committee member 3. Independency of audit committee member 4. Description of roles and responsibilities 5. Brief report of the implementation of audit committee activity 6. Meeting frequency and attendance level of audit committee	195
Komite Nominasi dan Remunerasi	Nomination and Remuneration Committee	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi 2. Independensi anggota komite nominasi dan/atau remunerasi 3. Uraian tugas dan tanggung jawab 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi	Includes: 1. Name, position, and brief curriculum vitae of member of remuneration and nomination committee 2. Independency of remuneration and nomination committee member 3. Description of roles and responsibilities 4. Description of the implementation of remuneration and/or nomination committee's activity 5. Meeting frequency and attendance level of remuneration and/or nomination committee	N.A.

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

278

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference				
KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE
Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	Other committees under the Board of Commissioners	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain 2. Independensi anggota komite lain 3. Uraian tugas dan tanggung jawab 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain	Includes: 1. Name, position, and brief curriculum vitae of other committees 2. Independency of other committee member 3. Description of roles and responsibilities 4. Description of the implementation of other committee's activity 5. Meeting frequency and attendance level of other committees	201
Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan	Description on roles and functions of corporate secretary	Mencakup antara lain: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan	Includes: 1. Name and professional record of corporate secretary 2. Description on the implementation of corporate secretary's duties	209
Uraian mengenai unit audit internal	Description on internal audit unit	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal 3. Kualifikasi/sertifikasi sebagai profesi audit internal 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan 5. Uraian pelaksanaan tugas 6. Pihak yang mengangkat/ memberhentikan ketua unit audit internal	Includes: 1. Name of head of internal audit unit 2. Number of employees (internal auditor) within internal audit unit 3. Qualification/certification as professional internal audit 4. Position of internal audit unit in the company structure 5. Description of duty implementation 6. Parties appointing/dismissing head of internal audit unit	213
Akuntan Perseroan	Company accountant	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah periode akuntan telah melakukan audit laporan keuangan tahunan 2. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan	Information includes: 1. Total period when the accountant has audited the yearly financial statements 2. Total period when the Public Accounting Firm has audited yearly financial statements 3. The amount of fee for each service given by the public accountant 4. Other service given by the accountant other than audit for financial reports Note: if there is no such transaction, such information should be disclosed	223

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / <i>Financial Services Authority Reference</i>				
KRITERIA / <i>CRITERIA</i>		PENJELASAN / <i>DESCRIPTION</i>		HALAMAN / <i>PAGE</i>
Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	Description on risk management	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut	Includes: 1. Explanation on risk management system 2. Explanation on evaluation of risk management system effectiveness 3. Explanation on risks posed to the company 4. Efforts to manage such risks	225
Uraian mengenai sistem pengendalian intern	Description on internal control system	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional/COSO (control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities) 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern	Includes: 1. Brief explanation on internal control system, including financial and operational control 2. Explanation of the conformity of internal control system to the internationally-recognized framework/COSO (control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities) 3. Explanation of the evaluation on the effectiveness of internal control system.	221
Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup	Description on corporate social responsibility program that relates to environment	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, dan lain-lain 4. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	Includes: 1. Policies, 2. Activities, and 3. Financial impacts from the environmental programs that relates the company's operational activity, such as the use of eco-friendly and recyclable material, energy saving, waste management, and others 4. Certification for environmental programs	262

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference

KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE
Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja	Explanation on corporate social responsibility related to employment, occupational health and safety	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain	Includes: 1. Policies, 2. Activities, and 3. Financial impacts from the activities related to employment and occupational health and safety such as gender equality, facilities for safety, employee turnover level, accident at work rate, etc	263
Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan masyarakat	Explanation on corporate social responsibility related to social and community development	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait pengembangan sosial dan masyarakat, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain.	Includes: 1. Policies, 2. Activities, and 3. Financial impacts from the activities related to social and community development programs, such as the empowerment of local manpower and society in the vicinity of the company, the improvement of social facilities and infrastructure, donation, others.	264
Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen	Explanation on corporate social responsibility related to responsibility to customers	Mencakup antara lain: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanganan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain	Includes: 1. Policies, 2. Activities, and 3. Financial impacts from the activities related to product reliability, such as aspects of customer health and safety, product information, facilities, number of customer complaint management, etc	N.A.

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference				
KRITERIA / CRITERIA		PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan	Litigation faced by the company, subsidiaries, members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners for the period	Mencakup antara lain: 1. pokok perkara/gugatan 2. status penyelesaian perkara/gugatan 3. pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan 4. sanksi administrasi yang dikenakan kepada entitas, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi) Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan	Includes: 1. Material of the case/claim 2. Status of settlement of the case/claim 3. Potential impacts on the company 4. Administrative sactions imposed to the entity, members of the Board of Directors and Board of Commissioners, which is imposed by the authorities concerned (capital market, banking, etc) for the last financial year (including statements of having no administrative sanction, if any) Note: if there is no litigation, such information should be disclosed	240
Akses informasi dan data perusahaan	Information access and corporate data	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya	Description on the availability of access to corporate information and data for public, such as through website (in Bahasa and English), mass media, mailing list, bulletin, meeting with analysts, etc.	240
Bahasan mengenai kode etik	Description on code of conduct	Memuat uraian antara lain: 1. Isi kode etik 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi 3. Upaya dalam penerapan dan penegakannya 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan	Includes: 1. Content of code of conduct 2. Disclosure that code of conduct prevails to all organizational levels 3. Efforts in its implementation and enforcement 4. Statement of corporate culture owned by the company	248
Pengungkapan mengenai whistleblowing system	Disclosure on whistleblowing system	Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran 2. Perlindungan bagi whistleblower 3. Penanganan pengaduan 4. Pihak yang mengelola pengaduan 5. Hasil dari penanganan pengaduan	Includes description on whistleblowing system such as 1. Submission of violation reports 2. Protection for the whistleblowers 3. Complaint management 4. Parties managing the complaint 5. Results from the complain handling	256

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference

KRITERIA / CRITERIA	PENJELASAN / DESCRIPTION	HALAMAN / PAGE
VII. Informasi Keuangan / Financial Information		
Pernyataan direksi dan/atau dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan	Statement by the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the responsibility of financial reports	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang tanggung jawab atas laporan keuangan
Opini auditor independen atas laporan keuangan	Opinion of independent auditor on the financial reports	Conformity to the regulation applied concerning the responsibility on the financial statements
Deskripsi auditor independen di opini	Description of the independent auditor in the opinion	Description includes: 1. Name & signature 2. Date of Audit Report 3. PAF and Public Accountant license
Laporan keuangan yang lengkap	Complete financial statements	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan (neraca) 2. Laporan laba rugi komprehensif 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan)
Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya	Disclosure in the notes to the financial statements when the entity implements accounting policy retrospectively or to make the restatement of financial statements items, or when the entity reclassify items in financial statements.	Ada atau tidak ada pengungkapan sesuai dengan PSAK
Perbandingan tingkat profitabilitas	Comparison of the levels of profitability	Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / <i>Financial Services Authority Reference</i>				
KRITERIA / <i>CRITERIA</i>		PENJELASAN / <i>DESCRIPTION</i>		HALAMAN / <i>PAGE</i>
Laporan arus kas	Cash flow report	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan/atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan	Meet the following propositions: 1. Classification for three activities: operation, investment, and funding 2. The utilization of direct method to report cash flow from operational activity 3. Separated presentation of the cash receipt and or cash expended for the year related to the operational, investment, and funding activity. 4. Disclosure of non-cash transaction should be attached in the notes to financial statements	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements
Ikhtisar kebijakan akuntansi	Accounting policy highlights	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan 3. Pengakuan pendapatan dan beban 4. Aset Tetap 5. Instrumen Keuangan	Includes at least: 1. Statement of compliance to SAK 2. Benchmark of preparing financial report 3. Recognition of income and expense 4. Fixed asset 5. Financial instrument	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements
Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Disclosure of transaction from related parties	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.	Disclosure materials: 1. Name of the related parties and its affiliation 2. Transaction value and its percentage of the total revenue and expenses concerned; and 3. Total balance amount and its percentage of the total assets and liabilities	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / Financial Services Authority Reference				
KRITERIA / CRITERIA	PENJELASAN / DESCRIPTION		HALAMAN / PAGE	
Pengungkapan yang berhubungan dengan Perpajakan	Disclosure related to taxation	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	Disclosure materials: 1. Fiscal reconciliation and calculation of current tax 2. Explanation of the relationship between tax expense (income) and income tax accounting 3. Statement that the amount of Taxable Profit as calculated through reconciliation is in accordance with the Tax Return 4. Details of the asset and liabilities in deferred tax presented in the balance sheet in each period of presentations, and amount of charge (income) of deferred tax acknowledged in the profit loss statement if the said amount is not evident in the asset or liability of deferred tax acknowledged in the balance sheet 5. Disclosure of whether there is tax dispute or not	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements
Pengungkapan yang berhubungan dengan Aset Tetap	Disclosure related to fixed asset	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi	Disclosure material: 1. Depreciation method used 2. Description of the selected accounting policies between the fair value model and cost model 3. Methods and significant assumptions used in estimating the fair value of fixed assets (valuation model) or disclosure of the fair value of fixed assets (cost method); and 4. Reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and end of the period with disclosure of addition, deduction, and reclassification.	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements

REFERENSI ISI LAPORAN TAHUNAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Annual Report Contents Reference to the Bapepam-LK Regulation

REFERENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) / <i>Financial Services Authority Reference</i>				
KRITERIA / <i>CRITERIA</i>		PENJELASAN / <i>DESCRIPTION</i>		HALAMAN / <i>PAGE</i>
Kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan imbalan kerja	Accounting policies related to benefit	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Jenis imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan; 2. Deskripsi umum mengenai jenis program imbalan pascakerja yang diselenggarakan oleh perusahaan; 3. Kebijakan akuntansi perusahaan dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial; dan 4. Pengakuan keuntungan dan kerugian untuk kurtailmen dan penyelesaian.	Disclosure material: 1. Types of benefit given to the employees; 2. Overview of types of post-employment benefits program held by the company 3. Accounting policy for the recognition of actuarial profit and loss; and 4. Recognition of profit and loss for curtailment and completion	
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Disclosure related to financial instrument	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 2. Klasifikasi instrumen keuangan; 3. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan; 4. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko; 5. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 6. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	Material disclosure: 1. Requirements, accounting condition and policy for each financial instrument classification; 2. Classification of financial instruments; 3. Fair value of each financial instrument; 4. Objective and policy of risk management; 5. Explanation of risk related to financial instruments; market risk, credit and liquidation; and 6. Risk analysis with quantitative method related to financial instruments	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements
Penerbitan laporan keuangan	Publishing of financial statements	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan	Material disclosure: 1. Date of financial statements authorized for publication; and 2. Parties responsible to authorize the financial statements.	Laporan Keuangan Konsolidasi/ Consolidated Financial Statements